WALI KOTA SABANG

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA SABANG TAHUN 2022-2025

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Qanun Kota Sabang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sabang tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Sabang Tahun 2022-2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor ...

Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
7. Qanun Kota Sabang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA SABANG TAHUN 2022-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
3. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
4. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
5. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
6. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
7. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
8. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
9. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

10. Permukiman ...

10. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.
11. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan Kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
12. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
13. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang selanjutnya disebut RP2KPKPK merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan Perumahan dan Permukiman Kumuh yang disusun oleh Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan Permukiman yang bebas Kumuh.
14. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
15. Peningkatan Kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta Prasarana, Sarana dan utilitas umum.
16. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Pemerintah Provinsi adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur dan Perangkatnya;
18. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Organisasi Masyarakat adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan;
20. Pihak Swasta, Akademisi, Organisasi Masyarakat, dan Media adalah pihak non pemerintah yaitu para pelaku pembangunan yang berkelanjutan yang berasal dari luar sektor Pemerintah Kota.

21. *New* ...

21. *New Urban Agenda* selanjutnya disingkat NUA adalah kesepakatan yang disusun untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan;
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

(1) RP2KPKPK dimaksudkan sebagai dokumen rencana terpadu penanganan Permukiman Kumuh yang disusun oleh Pemerintah Kota dalam rangka memenuhi target pencapaian 0% (nol persen) Permukiman Kumuh.

(2) RP2KPKPK bertujuan:
   a. sebagai instrumen Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh yang jelas dan komprehensif yang mempertimbangkan semua aspek pembangunan baik fisik, sosial, ekonomi, investasi, pembiayaan, kelembagaan maupun partisipasi publik;
   b. sebagai dokumen rencana aksi penanganan dan Pencegahan Permukiman Kumuh perkotaan jangka menengah yang berisi rumusan konsep, strategi, kebutuhan, program dan rencana investasi untuk mewujudkan Permukiman yang bebas Kumuh;
   c. sebagai dokumen perencanaan yang bersinergi dengan rencana tata ruang (Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang) dan rencana pembangunan (Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan RPJMD) yang lingkup penanganannya bersifat menyeluruh (komprehensif) dan terpadu tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan-kegiatan yang bersifat non-fisik (peningkatan kapasitas/pemberdayaan, sosial dan ekonomi); dan
   d. sebagai acuan dalam pelaksanaan penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh dengan mengintegrasikan skala lingkungan sampai dengan skala kawasan dan Kota.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:
a. sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
b. permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota;
c. rencana Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota;
d. rencana Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota;
e. rencana penyediaan lahan;
f. rencana investasi dan pembiayaan; dan
g. rumusan peran pemangku kepentingan.

BAB II
SEBARAN PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 4

Sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III
PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA SABANG

Pasal 5

(1) Permasalahan berdasarkan kondisi aktual Kota terkait Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh terdapat pada tujuh aspek, yaitu:
   a. Permukiman;
   b. jalan dan jembatan;
   c. air minum;
   d. drainase;
   e. air limbah;
   f. persampahan; dan
   g. kebakaran.

(2) Aspek Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki permasalahan meliputi:
   a. besarnya kebutuhan rumah tempat tinggal yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
   b. Kawasan Permukiman yang belum tertata dengan baik; dan
   c. status lahan Permukiman belum sepenuhnya memiliki sertifikat.

(3) Aspek jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki permasalahan meliputi:
   a. persentase jalan Kota dalam kondisi baik belum optimal;
   b. masih adanya sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar; dan
   c. konektifitas jaringan jalan belum optimal.

(4) Aspek air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki permasalahan meliputi:
   a. belum optimalnya sistem penyediaan air minum dan pengembangan air minum terlindungi;
   b. kurangnya ketersediaan Prasarana Sarana sumber daya air terkait pengelolaan sumber air baku untuk air minum dan sistem jaringan distribusi yang belum baik;
   c. *water treatment plan* yang belum cukup dan lokasinya terlalu jauh dari wilayah layanan, sehingga mengakibatkan waktu distribusi air tidak dapat melayani setiap hari (dua puluh empat jam); dan
   d. kebocoran pipa distribusi, pemasangan sambungan pipa ilegal menyebabkan hilangnya volume air bersih yang terdistribusi.

(5) Aspek ...

(5) Aspek drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memiliki permasalahan meliputi:
a. sistem jaringan drainase belum terintegrasi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya;
b. persentase kondisi jaringan drainase lingkungan belum optimal;
c. jaringan drainase lingkungan yang tidak saling terhubung;
d. kawasan Permukiman yang tergenang; dan
e. belum optimalnya fungsi drainase akibat timbunan sampah dilingkungan Permukiman.

(6) Aspek air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, memiliki permasalahan meliputi:
a. perilaku masyarakat yang masih menggunakan badan-badan sebagai tempat pembuangan limbah;
b. tingginya penggunaan Sarana pengelolaan limbah yang belum sesuai teknis;
c. rendahnya pelayanan dan pengelolaan kegiatan penyehatan lingkungan sanitasi yang layak baik; dan
d. belum optimalnya dan ketersediaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Kota, komunal, serta kawasan.

(7) Aspek persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, memiliki permasalahan meliputi:
a. belum optimalnya sinergisitas kerjasama dalam pengelolaan sampah Kota secara regional;
b. rendahnya cakupan pelayanan persampahan;
c. kurangnya Sarana dan Prasarana persampahan;
d. rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan serta kurang berfungsinya sistem pengawasan dan pengendalian; dan
e. kurangnya pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan dan pemilahan sampah.

(8) Aspek kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, memiliki permasalahan yaitu belum tersedianya Sarana dan Prasarana proteksi kebakaran ditingkat kawasan maupun lingkup hunian.

BAB IV
RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA

Bagian Kesatu
Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota

Pasal 6

(1) Program Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota dilakukan dengan tindakan:
a. pengawasan dan pengendalian; dan
b. pemberdayaan masyarakat.

(2) Tindakan ...

(2) Tindakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis, dan tahap pemanfaatan;
   b. pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi, untuk menjadi kondisi sistem pelayanan;
   c. pengawasan dan pengendalian terhadap kuantitas kapasitas dan dimensi serta kualitas bahan atau material yang digunakan masih sesuai dengan fungsinya; dan
   d. pengawasan dan pengendalian terhadap kondisi keberfungsian bangunan beserta Prasarana, Sarana dan utilitas umum (PSU) bangunan tidak mengurangi keberfungsiannya.

(3) Tindakan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. pendampingan; dan
   b. pelayanan informasi.

(4) Kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
   a. penyuluhan;
   b. pembinaan; dan
   c. bantuan teknis.

(5) Kegiatan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
   a. rencana tata ruang;
   b. rencana penataan bangunan dan lingkungan;
   c. perizinan; dan
   d. standar teknis.

Bagian Kedua
Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota

Pasal 7

(1) Rencana aksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota terdiri dari:
   a. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru; dan
   b. Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

(2) Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui strategi:
   a. pengawasan dan pengendalian; dan
   b. pemberdayaan masyarakat.

(3) Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui strategi:

a. pemugaran;
b. peremajaan; dan
c. permukiman kembali.

BAB V
RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA

Bagian Kesatu
Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota

Pasal 8

(1) Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota dirumuskan berdasarkan kondisi dan permasalahan aktual yang terjadi.

(2) Program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Program Peningkatan Kualitas Kawasan Prioritas Krueng Raya

Pasal 9

(1) Kawasan Krueng Raya menjadi kawasan prioritas pertama berdasarkan hasil penilaian skala prioritas penanganan kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota dengan luas 27,011 Ha (dua puluh tujuh koma nol satu satu).

(2) Program Peningkatan Kualitas kawasan prioritas dirumuskan berdasarkan kondisi dan permasalahan aktual yang terjadi.

Bagian Ketiga
Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota

Pasal 10

Rencana aksi program Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
RENCANA PENYEDIAAN LAHAN

Pasal 11

Rencana penyediaan lahan memuat rumusan penyediaan lahan terhadap penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh dengan Permukiman kembali.

Pasal 12

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas ketersediaan

lahan untuk permukiman kembali Perumahan dan Kawasan Permukiman.

(2) Penyediaan lahan bagi pembangunan permukiman kembali dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Sumber Pembiayaan

Pasal 13

(1) Sumber pembiayaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kota direncanakan berasal dari:
   a. Pemerintah Pusat;
   b. Pemerintah Provinsi;
   c. Pemerintah Kota; dan
   d. non pemerintahan atau pembiayaan lainnya

Bagian Kedua
Rencana Investasi Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Sabang

Pasal 14

Rencana Investasi Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Sabang dijabarkan selama lima tahun kedepan.

BAB VIII
RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 15

(1) Pemangku kepentingan dalam upaya Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota terdiri dari:
   a. Pemerintah Pusat;
   b. Pemerintah Provinsi;
   c. Pemerintah Kota;
   d. pihak swasta;
   e. pihak akademisi;
   f. pihak Organisasi Masyarakat; dan
   g. pihak media.

(2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai peran antara lain:
   a. menyusun kebijakan perkotaan nasional yang mengakomodasi NUA dan *Sustainable Development Goals*;
   b. mengkoordinasikan pemerintah daerah;
   c. untuk menangani permasalahan Pembangunan lintas daerah; dan
   d. mendorong terwujudnya kerja sama multi pihak dan multilevel pemerintahan untuk mewujudkan NUA.

(3) Pemerintah ...

(3) Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai peran antara lain:
   a. memperkuat mekanisme kerja sama antar kabupaten/Kota; dan
   b. bersama dengan Pemerintah Pusat, mendorong terlaksananya kebijakan perkotaan nasional (jika sudah berlandaskan hukum) di tingkat daerah.

(4) Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai peran antara lain:
   a. menjalankan wewenang dan fungsi pemerintahan sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
   b. memetakan keterkaitan NUA dengan RPJMD; dan
   c. mendorong kerja sama dengan badan usaha.

(5) Pihak Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mempunyai peran antara lain:
   a. menggiatkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Corporate Shared Value* (CSV); dan
   b. mendorong KPBU untuk membantu pemenuhan kebutuhan pembangunan perkotaan.

(6) Pihak Akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mempunyai peran berupa penyediakan *evidence-based research* sebagai masukan dalam pembuatan kebijakan pembangunan perkotaan.

(7) Pihak Organisasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mempunyai peran antara lain:
   a. terlibat aktif dalam berbagai forum pembangunan Kota; dan
   b. mendorong aspirasi masyarakat terkait pembangunan perkotaan.

(8) Pihak Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mempunyai peran berupa publikasi isu-isu pembangunan Kota secara objektif.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 16 Januari 2023

Pj. WALI KOTA SABANG,

REZA FAHLEVI

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 16 Januari 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ANDRI NOURMAN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2023 NOMOR 3

PERATURAN WALI KOTA SABANG

TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA SABANG TAHUN 2022-2025



2022-2025

BAPPEDA KOTA SABANG

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) merupakan produk akhir dari rangkaian kegiatan penyusunan RP2KPKPK. Hal-hal yang diuraikan dalam dokumen ini antara lain latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran dari pekerjaan, kajian kebijakan pembangunan permukimman perkotaan, profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh, permasalahan permukiman perkotaan, profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh, konsep peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, rencana investasi dan pembiayaan serta rumusan peran pemangku kepentingan dalam kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Dokumen RP2KPKPK merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan Kota Sabang yang bersifat menyeluruh (komprehensif) dan terpadu, tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan-kegiatan yang bersifat non- fisik seperti peningkatan kapasitas/pemberdayaan sosial dan ekonomi.

Akhir kata diucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam penyusunan dokumen ini. Besar harapan semoga laporan ini dapat memberikan manfaat yang optimal dan dapat menjadi acuan dalam penanganan kawasan kumuh Kota Sabang. Atas kerjasama dan kepercayaannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran 4
1.3 Ruang Lingkup 5
1.4 Kedudukan Dokumen RP2KPKPK dalam Kerangka Pembangunan Kabupaten/Kota 12
1.5 Sistematika Penyajian 13
BAB II KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN 16
2.1 Gambaran Umum Kota Sabang 16
2.2 Isu Strategis Pembangunan Perumahan dan Permukiman 24
2.3 Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman 27
2.4 Kebijakan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 40
BAB III PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA SABANG 55
3.1 Sebaran Permukiman Kumuh, Peta Deliniasi Kawasan Kawasan Kumuh, Lokasi Permukiman Kumuh dan Luasan Verifikasi .. 56
3.2 Profil Kawasan Permukiman Kumuh dan Gambaran Kelembagaan Lokal 59
BAB IV PERMASALAHAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH 121
4.1 Isu Dan Permasalahan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh 121
4.2 Kriteria Dan Indikator Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan 125
4.3 Perumusan Kebutuhan Penanganan Berdasarkan Isu dan Permasalahan Permukiman Kumuh 147
BAB V KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH 152
5.1 Konsep Dan Strategi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Sampai Dengan Pencapaian Kota Bebas Kumuh Dalam Skala Kota 152
5.2 Konsep Dan Strategi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 163
BAB VI RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNY6.1A PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH 181
6.1 Program Dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembanganya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh 181
6.2 Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten/Kota, Skala Kawasan, Dan Skala Lingkungan (Rencana Aksi Masyarakat/Cap) 186
6.3 Memorandum Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembanganya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 187

BAB VII RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

7.1 Program Dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh 191
7.2 Program Peningkatan Kualitas Kawasan Prioritas Krueng Raya 197
7.3 Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Kota Sabang 201
7.4 Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kawasan Prioritas - Krueng Raya 215
7.5 Rencana Detail Konsep Desain Kawasan Prioritas 219

BAB VIII RENCANA PENYEDIAAN TANAH 226

8.1 Pola Penyediaan Tanah 226
8.2 Pengadaan Tanah Dan Permukiman Kembali 230

BAB IX RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN 234

9.1 Sumber Pembiayaan 234
9.2 Rencana Investasi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Sabang 236

BAB X RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN 255

10.1 Peran Pemangku Kepentingan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh 255

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ruang lingkup substansi penyusunan dokumen RP2KPKPK 6

Tabel 1.2 Sebaran Permukiman Kumuh Kota Sabang 10

Tabel 2.1 Kondisi Iklim Kota Sabang 2019 19

Tabel 2.2 Sebaran Zona Kerentanan Tanah Tinggi di Kota Sabang 20

Tabel 2.3 Jumlah Desa/Gampong yang Mengalami Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kota Sabang, 2011–2018 21

Tabel 2.4 Lokasi Objek Wisata di Kota Sabang, 2019 21

Tabel 2.5 Isu Strategis Pembangunan Perumahan dan Permukiman Kota Sabang 26

Tabel 2.6 Overview Kebijakan Dan Program Pembangunan Kota Sabang 28

Tabel 2.7 Muatan Pencegahan dan Peningkatan terhadap Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 40

Tabel 2.8 Peran, Tugas dan Fungsi Stakeholder dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 42

Tabel 2.9 Pembagian Urusan Pemerintah terkait Penanganan Permukiman Kumuh 43

Tabel 2.10 Indikator dan Kriteria Permukiman Kumuh 45

Tabel 2.11 Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 46

Tabel 2.12 Kriteria perumahan dan permukiman kumuh 47

Tabel 3.1 Sebaran Permukiman Kumuh Kota Sabang Berdasarkan SK No. 650/351/2020 56

Tabel 3.2 Hasil Verifikasi Luasan Permukiman dan Perumahan Kumuh Kota Sabang 59

Tabel 3.3 Profil Kumuh Gampong Krueng Raya 61

Tabel 3.4 Data Baseline Numerik Kumuh Gampong Krueng Raya 77

Tabel 3.5 Profil Kumuh Gampong Paya 73

Tabel 3.6 Data Baseline Numerik Kumuh Gampong Paya 84

Tabel 3.7 Profil Kumuh Gampong Keuneukai 85

Tabel 3.8 Data Baseline Numerik Kumuh Gampong Keuneukai .96

Tabel 3.9 Profil Kumuh Gampong Jaboi 97

Tabel 3.10 Data Baseline Numerik Kumuh Gampong Jabo 108

Tabel 3.11 Profil Kumuh Gampong Beurawang 109

Tabel 3.12 Data Baseline Numerik Kumuh Gampong Jaboi 120

Tabel 4.1 Sebaran Permukiman Kumuh Kota Sabang 123

Tabel 4.2 ...

Tabel 4.2 Isu dan Permasalahan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Sabang 124

Tabel 4.3 Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan Prioritas 126

Tabel 4.4 Penilaian Lokasi Berdasarkan Kriteria, Indikator Dan Parameter Kekumuhan 135

Tabel 4.5 Rekapitulasi Hasil Penilaian dan Skala Prioritas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh 146

Tabel 4.6 Rumusan Kebutuhan Penanganan Perumhan dan Permukiman Kumuh Kota Sabang 148

Tabel 5.1 Tabel Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kota 154

Tabel 5.2 Tabel Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kawasan 164

Tabel 6.1 Program Pencegahan Perumahan dan Permukiman Kumuh Baru 184

Tabel 6.2 Program dan Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Permukiman Kumuh Baru 184

Tabel 6.3 Rencana Aksi Program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Sabang 188

Tabel 7.1 Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Sabang 191

Tabel 7.2 Informasi Umum Kawasan Kumuh Krueng Raya 197

Tabel 7.3 Program Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Prioritas – Kawasan Krueng Raya 198

Tabel 7.4 Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Sabang 201

Tabel 7.5 Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Prioritas – Krueng Raya 215

Tabel 8.1 Tabel Kebutuhan Dokumen Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali 231

Tabel 9.1 Sumber Biaya, Bentuk dan Skema Pembiayaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kawasan Kota Sabang 234

Tabel 9.2 Karakteristik Pembiayaan 234

Tabel 9.3 Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur Dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Sabang Tahun 2022-2025 237

Tabel 10.1 Peran Para Pelaku Dalam Pembangunan yang Berkelanjutan Sesuai Prinsip NUA Dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh 256

Tabel 10.2 Pembagian Urusan Pemerintah Terkait Penanganan Permukiman Kumuh 258

Tabel 10.3 Peran dan Bentuk Keterlibatan Pemerintah Kota Sabang dalam Penyusunan Dokumen RP2KPKPK 259

DAFTAR ...

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan RP2KPKPK 9

Gambar 1.2 Deliniasi Kawasan Kumuh Kota Sabang. (dari kiri ke kanan) Kawasan Paya Keuneukai, Kawasan Krueng Raya, Kawasan Jaboi dan Kawasan Beurawang 11

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Sabang 18

Gambar 2.2 Pantai Pasir Putih - Paya 23

Gambar 2.3 Gunung Berapi Jaboi 23

Gambar 2.4 Tugu Kilometer 0 - Iboih 23

Gambar 2.5 Pulau Klah – Krueng Raya 23

Gambar 3.1 Deliniasi Permukiman dan Perumahan Kumuh Gampong Keuneukai 55

Gambar 3.2 Deliniasi Permukiman dan Perumahan Kumuh Gampong Paya 57

Gambar 3.3 Deliniasi Permukiman dan Perumahan Kumuh Gampong Beurawang 57

Gambar 3.4 Deliniasi Permukiman dan Perumahan Kumuh Gampong Jaboi 58

Gambar 3.5 Deliniasi Permukiman dan Perumahan Kumuh Gampong Krueng Raya 58

Gambar 3.1 Deliniasi Permukiman dan Perumahan Kumuh Gampong Keuneuka 55

Gambar 5.1 Peta Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kota - Kota Sabang 153

Gambar 5.2 Peta Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh – Kawasan Krueng Raya 179

Gambar 5.3 Peta Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh – Kawasan Paya Keunekai 179

Gambar 5.4 Peta Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh – Kawasan Jaboi 180

Gambar 5.5 Peta Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh – Kawasan Beurawang 180

Gambar 7.1 Ilustrasi Diagram Program Penanganan Permukiman Kumuh Kota Sabang 196

Gambar 7.2 Kegiatan pengembangan penanganan kumuh Kawasan Krueng Raya 220

Gambar 7.3 Masterplan Penanganan Kumuh Kawasan Krueng Raya 220

Gambar 7.4 Kegiatan Naturalisasi Krueng Raya 221

Gambar 7.5 Kegiatan *Manggrove Trail/ Park*. Krueng Raya 221

Gambar 7.5 Kegiatan *Manggrove Trail/ Park*. Krueng Raya 221

Gambar 7.6 Ilustrasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Jalan dan Drainase Lingkungan 222

Gambar 7.7 Ilustrasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Jalan dan Drainase Lingkungan 222

Gambar 7.8 Ilustrasi Kegiatan Rehab Jembatan 222

Gambar 7.9 Konsep Kegiatan IPAL Komunal Terintegrasi RTP ... 223

Gambar 7.10 ...

Gambar 7.10 Kegiatan TPS 3R dan SIstem Pengelolaan Persampahan 223

Gambar 7.11 Potensi sumber air bersih. Alur Waduk Paya Senara (kiri) dan Mata air (kanan) 224

Gambar 7.12 Skema Konsep Penyediaan Air Bersih 224

Gambar 7.13 Ilustrasi Penyediaan Galeri dan Food Stall Untuk Mendukung Pertumbuhan UMK dan Ekonomi Kreatif 224

Gambar 7.14 Rencana Penyediaan Ruang Terbuka Komunitas 225

Gambar 7.15 Ilustrasi 3D Ruang Terbuka Komunitas 225

Gambar 10.1 Struktur Pembagian Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat 255

Gambar 10.2 Skema Peran Antar Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 258

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA
SABANG TAHUN 2022-2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena semakin bertambahnya jumlah penduduk di suatu kawasan perkotaan atau yang lebih dikenal dengan istilah urbanisasi, telah turut berdampak terhadap perubahan karakteristik kawasan perkotaan. Salah satu dampak yang bisa terlihat adalah lahirnya kawasan-kawasan permukiman kumuh yang terjadi akibat dari ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan huniannya yang layak.

Dampak dari lahirnya kawasan permukiman kumuh ini juga akan menimbulkan paradigma buruk terhadap penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan dampak citra negatif akan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan hidup dan penghidupan warganya. Padahal jika merujuk pada UU No 1 Tahun 2011 dalam pasal 94 ayat (3) Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, tersebut bahwa pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau setiap orang. Sehingga dengan demikian, dalam kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman agar tercapai 0 ha luasan kumuh di Kota Sabang, maka juga diperlukan adanya perencanaan yang komprehensif meliputi seluruh aspek sosial, ekonomi dan lingkungan dari berbagai pihak penyelenggara pemerintahan, yang terintegrasi dengan pengembangan mulai dari skala lingkungan atau komunitas, skala kawasan, dan skala kabupaten/kota. Penanganan kawasan kumuh juga merupakan upaya bersama pelaku pembangunan untuk mencapai perkembangan kota yang berkesinambungan.

Dalam ...

Dalam mewujudkan fungsi permukiman yang memenuhi syarat Standar Pelayanan Minimal (SPM) maka, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh harus segera dilakukan guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni yang berdasarkan pada kepastian bermukim dan menjamin hak bermukim menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Selain tercantum dalam UU No 1 Tahun 2011, Perencanaan penanganan kawasan kumuh juga diatur dalam PP No 14 Tahun 2016, Permen PUPR No 14/PRT/M/2018 serta dalam SE DJCK 30/SE/DC/2020. Program ini dikenal dengan nama RP2KPKPK (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh). RP2KPKPK ini merupakan program perencanaan penanganan permukiman kumuh yang dicanangkan pada tahun 2020 dan merupakan pengembangan dari program RKPKP (Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan) pada tahun 2015 dan RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan) pada tahun 2016-2019.

Selanjutnya, penyusunan RP2KPKPK ini juga merujuk pada memorandum Program RP2KPKP yang merupakan review Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKPKP), yang juga merupakan rencana 5 (lima) tahun pengurangan kawasan kumuh yang terintegrasi dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Sabang dengan menguraikan sebuah perencanaan tingkat kota dan kawasan serta skenario untuk pengurangan kawasan kumuh kota, juga mengidentifikasi kebutuhan investasi maupun sumber-sumber pembiayaannya.

Dengan berpatokan pada undang-undang, penanganan kawasan kumuh diawali dengan identifikasi lokasi perumahan dan permukiman kumuh yang selanjutnya diikuti dengan penetapan lokasi kawasan kumuh tersebut. Melalui identifikasi tersebut, penanganan dilakukan sesuai undang-undang no 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman khususnya di Bab VII dan VIII yang menjelaskan berbagai hal tentang pemeliharaan dan perbaikan kawasan permukiman, serta pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh dengan tiga pola penanganan yaitu pemugaran, peremajaan dan permukiman kembali.

Selain dari amanat peraturan perundang-undangan di atas, penanganan permukiman kumuh di Kota Sabang juga dilaksanakan dengan mengikuti berkembangnya isu strategis saat ini, diantaranya;

1. Sustainable ...

1. *Sustainable Development Goal's*/SDGs pada tujuan 11 *sustainable cities and communities* beserta dengan target dan indikatornya. Dalam target dan indikator, terdapat keterkaitan dengan semangat inklusifitas kota. Keterkaitan inilah yang mendorong berkembangnya visi/common vision kota-kota dan permukiman yang berkelanjutan di masa mendatang.
2. *New Urban Agenda*/NUA yang merupakan komitmen global sesuai dengan kesepakatan untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (*sustainable urbanization*). NUA memiliki prinsip pelaksanaan antara lain tidak menelantarkan siapapun (*no one left behind*), pembangunan ekonomi perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan dan memastikan keberlanjutan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Prinsip-prinsip pelaksanaan ini sangat terkait dengan penanganan permukiman kumuh dan selanjutnya dapat diterjemahkan dalam rencana pembangunan masing-masing daerah.

Selanjutnya, penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) ini juga dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan kepada pemerintah daerah dalam menyusun rencana penanganan permukiman kumuh di kabupaten/kota dengan harapan:

1. Terciptanya percepatan penanganan permukiman kumuh secara menyeluruh dan tuntas serta berkelanjutan bagi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan melalui SK bupati/walikota;
2. Terciptanya keterpaduan program yang dapat menyelesaikan dan/atau menuntaskan permasalahan permukiman kumuh melalui peran semua sektor;
3. Meningkatnya kapasitas pemerintah kabupaten/kota melalui pelibatan aktif dalam proses penanganan permukiman kumuh bersama Kelompok Swadaya Masyarakat/ *Community Based Organizations* (KSM/CBO's) dan kelompok badan usaha/ *Corporate Social Responsibility* (CSR);
4. Terciptanya keberlanjutan progam penanganan permukiman kumuh sebagai bagian dari agendapembangunan perkotaan yang berkelanjutan (New

Urban Agenda) sesuai dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDG's).

1.2 Maksud, Tujuan Dan Sasaran

1.2.1 Maksud

Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen rencana penyelenggaraan pembangunan kawasan yang difokuskan pada pola pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh, sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan yang terpadu dan bersinergi yang pada gilirannya dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah Kota Sabang secara mandiri dan berkelanjutan.

1.2.2 Tujuan

Dokumen RP2KPKPK (Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Peruamahan Kumuh dan Permukiman Kumuh) Kota Sabang ini disusun dengan tujuan:

a. Memantapkan pemahaman Pemerintah Kota Sabang tentang kebijakan dan strategi penanganan kawasan perumahan dan permukiman kumuh dalam mencapai target zero kumuh (100-0-100) padatahun – tahun ke depan.
b. Agar Pemerintah Kota Sabang dapat sepenuhnya menjadi pemrakarsa utama dan berpartisipatif dalam Penyusunan Memorandum Program RP2KPKPK yang difokuskan pada penanganan dan pengurangan kawasan perumahan dan permukiman kumuh.
c. Agar Pemerintah Kota Sabang memiliki komitmen tinggi serta konsisten di dalam mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta menjaga keberlanjutannya.
d. Melakukan identifikasi potensi dan permasalahan kawasan permukiman dalam suatu profil kawasan kumuh berdasarkan SK Walikota Sabang.
e. Menyusun rencana kegiatan aksi komunitas sebagai bentuk penguatan kapasitas pemerintah kota dengan kelompok masyarakat.
f. Menyusun dokumen perancangan berupa rencana aksi penanganan kawasan kumuh dan DED kegiatan tahun pertama dan peta perencanaan
g. Menyusun strategi penanganan kumuh secara spasial dan tipologi kawasan, indikasi program dan kegiatan

penanganan ...

penanganan kawasan kumuh perkotaan oleh seluruh pelaku, dan nota kesepakatan bersama.

h. Melakukan pendampingan penyusunan dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan melalui keterpaduan program semua sektor keciptakaryaan.

1.2.3 Sasaran

Sasaran dari kegiatan penyusunan dokumen RP2KPKPK (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh) Kota Sabang adalah:

a. Tersedianya suatu konsep dan strategi yang dapat menjadi landasan pemikiran dalam pemahaman penanganan perumahan dan permukiman kumuh bagi seluruh pelaku (stakeholders) pemerintahan Kota Sabang.
b. Tersedianya suatu dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan penanganan kawasan kumuh perkotaan bagi seluruh pelaku (stakeholders) pelaksanaan penyelenggaran penanganan permukiman kumuh perkotaan yang menyeluruh, tuntas, dan berkelanjutan (konsep *delivery system*).
c. Tersedianya strategi penanganan kumuh secara spasial dan tipologi kawasan, indikasi program dan kegiatan penanganan kawasan kumuh perkotaan oleh seluruh pelaku, dan nota kesepakatan bersama bagi seluruh pelaku dalam pengendalian pembangunan bersama selama jangka waktu berjalan (2022-2025).
d. Tersedianya Rencana Kegiatan Aksi Komunitas (*Action Plan Community*) sebagai bentuk perkuatan kapasitas Pemerintah Kabupaten/ Kota dan kelompok masyarakat (komunitas masyarakat/ BKM/KSM/CBO's) untuk dapat lebih aktif terlibat dalam menangani permukiman kumuh di lingkungannya.
e. Tersedianya Dokumen Rencana Aksi (*Action Plan Document*), Peta Perencanaan skala 1:1000 dan 1:5000, Dokumentasi Visual dan Visualisasi 3 dimensi Dokumen Perencanaan, serta adopsi rencana penanganan kumuh kegiatan tahun pertama (2022) sebagai bagian dari RP2KPKPK secara keseluruhan.

1.3 Ruang Lingkup

1.3.1 Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup substansi penyusunan dokumen RP2KPKPK (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan

Kumuh dan Permukiman Kumuh) yang ditetapkan dalam pelaksanaan kegiatan di Kota Sabang ini dibagi menjadi 7 tahap, yaitu:

Tabel 1.1 Ruang lingkup substansi penyusunan dokumen RP2KPKPK

LINGKUP KEGIATAN	CAPAIAN
A. PERSIAPAN	
1. Mengikuti kegiatan sosialisasi dan konsolidasi penyusunan RP2KPKPK	a. Kesepahaman tahapan dan prosedur penyusunan RP2KPKPK b. Memperkaya dokumen RP2KPKPK dengan Konsep Pembangunan Permukiman yang Berkelanjutan
2. Melakukan persiapan dan pemantapan rencana kerja	a. RencanaKerja b. Pendekatan dan metodologi pelaksanaan kegiatan
3. Menyiapkan data profil permukiman kumuh yang terdiri dari baseline data kumuh atau data statistic terkait	Data awal profil permukiman kumuh
4. Melakukan penyiapan readiness kriteria penyusunan RP2KPKPK	a. SK Lokasi Permukiman Kumuh, SK Pokja PKP Kabupaten/ Kota dan Peta Dasar b. Peta dasar skala 1:25.000 untuk kota dan 1:50.000 untuk kabupaten c. Peta skala 1:5.000 untuk skala kawasan d. Peta skala 1:1.000 untuk skala kawasan prioritas
5. *Overview* kebijakan daerah dan identifikasi kesesuaian permukiman terhadap rencana tata ruang kabupaten/ kota dan status tanah permukiman	a. Hasil overview dokumen perencanaan dan kebijakan daerah b. Hasil overview dokumen status tanah dan perpetaan status tanah permukiman c. Peta kesesuaian permukiman terhadap rencana pola ruang kabupaten/ kota (guna lahan permukiman)
6. Melakukan konsolidasi dengan Pokja PKP Provinsi	Berita acara dan hasil koordinasi dengan Pokja PKP Provinsi
7. Melakukan kegiatan penyiapan kelembagaan masyarakat ditingkat kabupaten/ kota	Terbentuknya/ tersiapkannya kelembagaan masyarakat (BKM/ LKSM) yang terdaftar/ legal secara hukum
B. SURVEI	
1. Bersama dengan pemangku kepentingan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data kumuh baik data primer maupun data sekunder	Hasil sinkronisasi data kumuh (primer dan sekunder)
2. Menyusun desain survei	Desain survei
3. Melaksanakan survey dan mengolah data permukiman kumuh bersama antara Pokja PKP kabupaten/ kota	a. Hasil survey berupa gambaran permukiman kumuh kabupaten/ kota dan hasil pengolahan data permukiman kumuh b. Hasil kompilasi data dari hasil survey dan data baseline sesuai dengan kriteria dalam Permen PUPR Nomor14/PRT/M/2018

C. PENYUSUNAN ...

LINGKUP KEGIATAN	CAPAIAN
C. PENYUSUNAN DATA DAN FAKTA	
Verifikasi dan indikasi justifikasi lokasi dan penyusunan profil permukiman kumuh	a. Data hasil verifikasi lokasi (delineasi, luasan, layanan hunian dan infrastruktur) b. Indikasi justifikasi penanganan pada lokasi permukiman kumuh c. Profil permukiman kumuh yang telah terverifikasi
D. ANALISIS	
1. Melakukan proses pemutakhiran profil permukiman kumuh yang dilaksanakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) 1 untuk verifikasi dan justifikasi lokasi permukiman kumuh	Berita acara penyelenggaraan FGD 1 (verifikasi lokasi kumuh dan kawasan prioritas dan penyepakatan justifikasi indikasi penanganan pada permukiman kumuh)
2. Melakukan penilaian lokasi kawasan berdasarkan kriteria, indikator dan parameter kekumuhan dan justifikasi yang akan dilakukan terhadap permukiman kumuh	a. Daftar peringkat permukiman kumuh berdasarkan kriteria, indikator dan parameter kekumuhan b. Peta justifikasi penanganan permukiman kumuh

LINGKUP KEGIATAN	CAPAIAN
E. PENYUSUNAN KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH	
1. Merumuskan arahan distribusi pola kolaborasi penanganan permukiman kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas)	Menghasilkan arahan pola kolaborasi dalam penanganan permukiman kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas)
2. Bersama dengan pemangku kepentingan mengkoordinasikan peran masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas)	a. Pembagian peran dalam penanganan permukiman kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas) b. Harmonisasi dengan rencana aksi pokja PKP provinsi untuk pembangunan permukiman kabupaten/ kota
3. Merumuskan kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh (pencegahan dan Peningkatan kualitas)	a. Kebutuhan penanganan permukiman kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas) b. Agenda/ rencana pengembangan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan
4. Merumuskan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh	Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh
5. Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) 2 untuk penyepakatan konsep dan strategi sesuai dengan pembangunan kabupaten/	Berita acara penyelenggaraan FGD 2 (konsep dan strategi dan indikasi added value dalam penanganan permukiman kumuh)

LINGKUP KEGIATAN	CAPAIAN
kota yang berkelanjutan dengan adanya added value dalam penanganan kumuh	
F. PENYUSUNAN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH	
1. Merumuskan scenario pentahapan pencapaian kota bebas kumuh, desain kawasan dan tindak lanjut pengendalian	a. Skenario pencapaian kota bebas kumuh dan tindak lanjut pengendalian keberlanjutan pembangunan perkotaan b. Desain kawasan dan scenario penanganan permukiman kumuh
2. Merumuskan rencana aksi (pencegahan dan peningkatan) kualitas dan memorandum keterpaduan program untuk skala kabupaten/ kota, skala kawasan dan skala lingkungan	a. Rencana aksi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh untuk skala kabupaten/ kota, skala kawasan dan skala lingkungan. b. Rencana investasi dan pembiayaan permukiman kumuh c. Memorandum keterpaduan program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh
3. Menentukan skala prioritas penanganan permukiman kumuh berdasarkan readiness criteria, penanganan pembangunan yang berkelanjutan dan pertimbangan lain	Skala prioritas penanganan permukiman kumuh
4. Merumuskan konsep tematik & scenario pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan prioritas	Konsep tematik dan scenario pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan prioritas
5. Menyusun rencana penyediaan tanah	Rencana Penyediaan Tanah untuk pola penanganan Peremajaan dan Pemukiman Kembali
6. Menyusun rencana investasi & pembiayaan kawasan prioritas	Rencana investasi dan pembiayaan kawasan prioritas
7. Bersama pemangku kepentingan perencanaan partisipatif pada kawasan prioritas	a. Terselenggaranya perencanaan partisipatif (pelaksanaan RKM dan penyepakatan komponen DED) pada kawasan prioritas b. Disusunnya agenda tindak lanjut oleh pemangku kepentingan di kabupaten/ kota
8. Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) 3: Penyepakatan rencana aksi, program dan kegiatan	Berita acara FGD 3 (rencana aksi, program dan kegiatan)
9. Penyusunan Desain Teknis Kawasan Prioritas	a. Peta rinci/ siteplan b. Visualisasi pendukung perancangan (dokumentasi drone, animasi 3D) c. Daftar rencana komponen infrastruktur pembangunan d. Data hasil pengukuran detail komponen infrastruktur e. DED (gambar kerja, RAB, RKS) komponen infrastruktur permukiman

G. LEGALISASI ...

LINGKUP KEGIATAN	CAPAIAN
G. LEGALISASI RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH	
1. Penyusunan *legal drafting* rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RP2KPKPK	Draft Peraturan Kepala Daerah tentang RP2KPKPK dan lampiran (dokumen RP2KPKPK)
2. Legalisasi rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RP2KPKPK	Peraturan Wali Kota/ Peratuan Bupati RP2KPKPK

Secara lebih ringkas, lingkup substansi penyusunan dokumen RP2KPKPK Kota Sabang tahun 2020 dapat dilihat dalam bagan berikut ini. Lihat Gambar 1.1



Gambar 1.1 Proses Penyusunan RP2KPKPK

1.3.2 Ruang Lingkup Wilayah

Lokasi kegiatan, kajian, penyusunan dokumen serta pembahasan laporan RP2KPKPK Kota Sabang ini dilaksanakan dalam lingkup wilayah administrasi Kota Sabang, yang meliputi seluruh kawasan permukiman kumuh yang disebutkan dalam SK Walikota Kota Sabang No. 650/351/2020 Tanggal 26 Maret Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Sabang. Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Sabang tersebar di 4 Kawasan dengan total luasan kumuh sebesar 123,713 Ha. Sebaran kawasan kumuh Kota Sabang dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.2 ...

Table 1.2. Sebaran Permukiman Kumuh Kota Sabang

NO	KECAMATAN	KAWASAN	GAMPONG	JURONG	LUAS DELINIASI KUMUH (HA)	TOTAL DELINIASI KAWASAN (HA)
1	Sukajaya	Kawasan Paya - Keuneukai	Keuneukai	Lhok	16,002	57,495
				Pasi	10,809	
				Kulam	2,520	
				Blang Mukim	5,492	
			Paya	Pante Jaya	4,457	
				Tgk. Chok Alue Kala	15,088	
				Cot Preh	1,894	
				Ditremon	1,233	
2	Sukajaya	Kawasan Beurawang	Beurawang	Teupin Bada	8,348	15,279
				Meurelo	6,931	
3	Sukajaya	Kawasan Jaboi	Jaboi	Meunasah Tuha	9,322	23,928
				Tgk. Di Jaboi	5,133	
				Lamkuta	3,89	
				Gampong Baroe	5,583	
4	Sukakarya	Kawasan Krueng Raya	Krueng Raya	Batu Singa Berfakta	9,24	27,011
				Lhok Drien	3,039	
				Mustika Kolam Bermata	7,161	
				Teupin Cirik	7,571	
					TOTAL	123,713 Ha

Gambar 1.2 ...

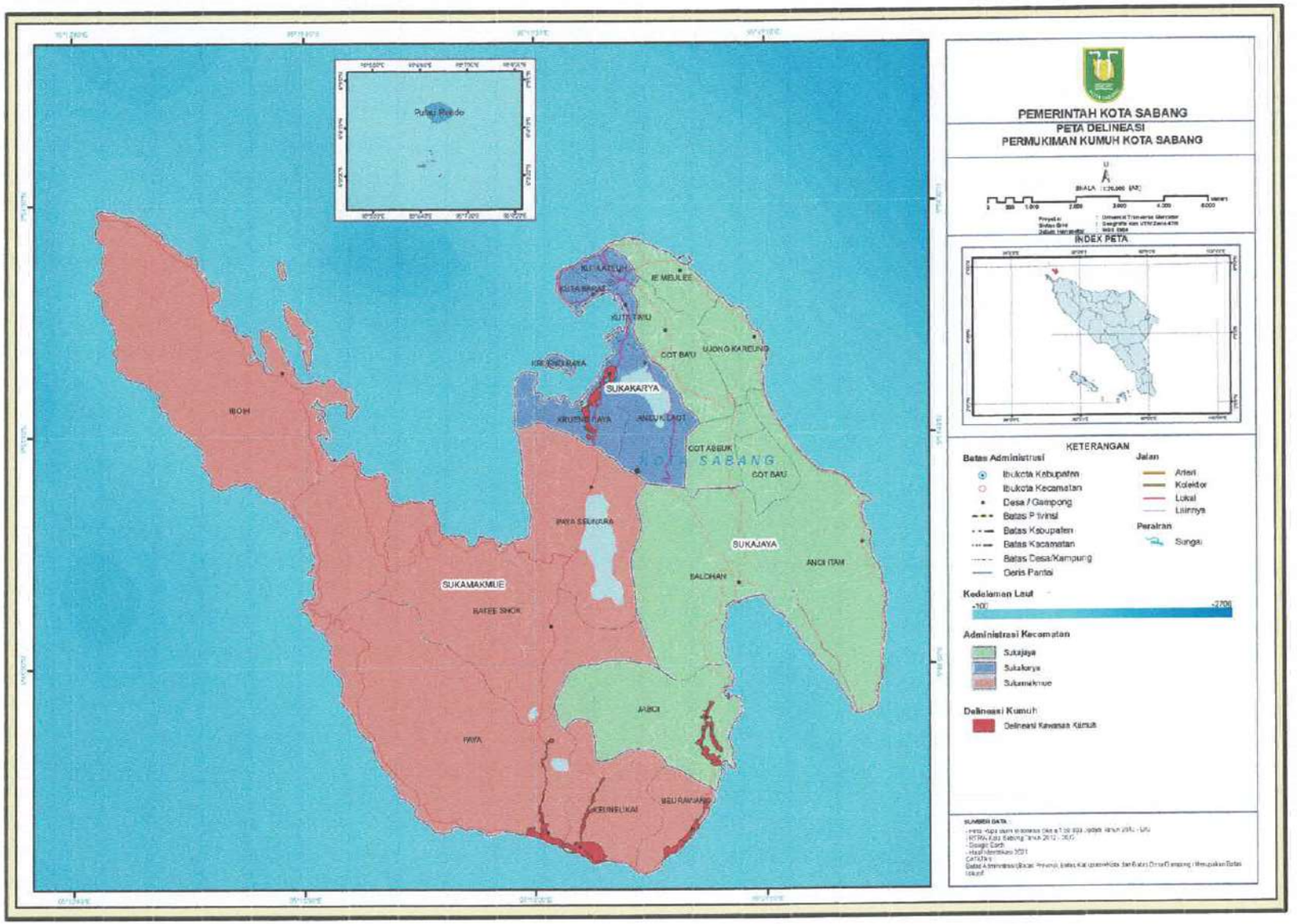

Gambar 1.2 Deliniasi Kawasan Kumuh Kota Sabang. (dari kiri ke kanan) Kawasan Paya Keuneukai, Kawasan Krueng Raya, Kawasan Jaboi dan Kawasan Beurawang.
Sumber : Lampiran SK Wali Kota Sabang No. 650/351/2020 Tahun 2020

1.4 Kedudukan ...

1.4 Kedudukan Dokumen RP2KPKPK Dalam Kerangka Pembangunan Kabupaten/Kota

Kebutuhan program penanganan RP2KPKPK dalam skala kabupaten/kota, skala kawasan, skala lingkungan, dan program pembangunan disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

a. Kebijakan dan strategi yang terkait dengan penanganan permukiman kumuh;
b. Strategi dan program yang telah ada di berbagai dokumen perencanaan pembangunan dan penataan ruang yang berlaku dan terkait dengan penanganan permukiman kumuh;
c. Kebutuhan penanganan permukiman kumuh, yang didasarkan pada isu strategis kawasan permukiman kumuh dan karakteristik permasalahan permukiman kumuh secara eksisting;
d. Target capaian dalam menuju 0% permukiman kumuh serta tindak lanjut dalam mencapai kota layak huni dan berkelanjutan;
e. Readiness criteria yang dapat menjadi pembatas ataupun pendorong bagi terwujudnya target capaian menuju 0% permukiman kumuh dan agenda tindak lanjut pembangunan permukiman berupa:
   1) Sumber pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupeten/kota);
   2) Kesiapan lahan yang tersedia untuk pembangunan;
   3) Kesiapan masyarakat dalam mendukung program penanganan kumuh;
   4) Kebijakaan pemerintah kabupaten/kota
   5) dan sebagainya

Fokus dari obyek yang diatur di dalam RP2KPKPK sesuai Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 adalah program dan kegiatan terkait dengan infrastruktur permukiman, yang terdiri atas:

a. Kondisi fisik bangunan hunian;
b. Aksesibilitas lingkungan;
c. Kondisi drainase lingkungan;
d. Kondisi pelayanan air minum/baku;
e. Kondisi pengelolaan air limbah;
f. Kondisi pengelolaan persampahan; dan
g. Kondisi proteksi kebakaran;

Selain ...

Selain fokus pada infrastruktur permukiman kumuh, program dan kegiatan yang disusun dapat juga mencakup infrastruktur bidang lainnya yang dibutuhkan di dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan yang tidak kalah pentingnya dalam proses penilaian terhadap permukiman kumuh terdapat beberapa pertimbangan lain yaitu kejelasan status lahan, kesesuaian dengan rencana tata ruang, nilai strategis lokasi, kepadatan penduduk, dan kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat. Beberapa fokus objek lainnya akan disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing kabupaten/kota.

1.5 Sistematika Penyajian

Untuk memudahkan dan memahami proses dan subtansi penyusunan RP2KPKPK Kota Sabang ini, maka RP2KPKPK ini dibagi kedalam 10 (sepuluh) bagian, dan setiap bagian dibagi lagi menjadi beberapa sub bagian yang lebih rinci, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan Latar Belakang penyusunan dokumen, Maksud, Tujuan dan Sasaran, Ruang Lingkup yang terdiri dari Ruang Lingkup Substansi dan Ruang Lingkup Wilayah, Kedudukan dokumen RP2KPKPK dalam kerangka pembangunan kabupaten/kota serta uraian Sistematika penyajian laporan.

BAB II KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

Bagian ini mencerminkan karakter dan kekhasan penanganan kawasan kumuh di Kota Sabang yang telah di-*overview*. Rumusan bagian ini lebih menggambarkan dan memaparkan secara jelas rumusan kebijakan penanganan kumuh perkotaan tersebut. Secara lebih rinci, bagian ini turut menjelaskan tentang Isu Strategis Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Kota Sabang, Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Kota Sabang, serta Kebijakan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Sabang.

BAB III PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian ini berisi gambaran mengenai profil permukiman kumuh Kota Sabang yang telah dilakukan sinkronisasi dan verifikasi bersama stakeholder terkait. Secara lebih rinci,

bagian ini turut menjelaskan tentang Sebaran permukiman kumuh, peta deliniasi kawasan kumuh, lokasi beserta luasannya hasil verifikasi, Profil kawasan permukiman kumuh kota hasil verifikasi (dilengkapi peta masing-masing kawasan) dan gambaran kelembagaan lokal (BKM/LKM/KSM), serta Pola kontribusi program penanganan permukiman kumuh perkotaan sesuai cakupan skala kabupaten/kota dan skala lingkungan.

BAB IV PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian ini berisi rumusan kebutuhan penanganan sebagai strategi mengatasi isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Sabang. Secara lebih rinci, bagian ini turut memaparkan tentang Isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Sabang, Kriteria dan Indikator penilaian penentuan klasifikasi dan skala prioritas penanganan, serta Perumusan kebutuhan penanganan berdasarkan isu dan permasalahan permukiman kumuh tersebut.

BAB V KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian ini akan menjelaskan alur dan arah penyusunan RP2KPKPK sebagai suatu strategi pencapaian pada akhirnya berupa perumahan dan permukiman bebas kumuh. Bagian ini akan mengulas tentang konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Sabang sampai dengan pencapaian kota bebas kumuh dalam skala kota serta Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala Kawasan.

BAB VI RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Ini merupakan bagian yang akan memuat Dokumen Rencana Aksi Program Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Memorandum Program) yang berupa Rencana Program pada lingkup penanganan skala lingkungan, kawasan dan kota secara bersama oleh seluruh stakeholders. Secara lebih rinci, bagian ini akan membahas tentang Program dan kegiatan

pencegahan terhadap tumbuh dan berkembanganya perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Sabang, Rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kabupaten/kota, skala kawasan, dan skala lingkungan (Rencana Aksi Masyarakat/CAP), serta Memorandum Program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembanganya perumahan kumuh dan perkotaan kumuh di Kota Sabang.

BAB VII RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Ini merupakan bagian yang akan memuat Dokumen Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Memorandum Program) berupa Rencana Program pada lingkup penanganan skala lingkungan, kawasan dan kota secara bersama oleh seluruh stakeholders. Secara lebih rinci, bagian ini akan memaparkan tentang Program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Sabang, Program peningkatan kualitas kawasan prioritas, Rencana aksi program peningkatan permukiman kumuh skala kabupaten/kota dan skala kawasan, Indikasi program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan prioritas, dan prioritas kebutuhan dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh

BAB VIII RENCANA PENYEDIAAN TANAH

Merupakan bagian yang akan memuat rumusan rencana penyediaan tanah khususnya untuk pola penanganan peremajaan dan pemukiman kembali.

BAB IX RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN

Merupakan bagian yang akan memuat rumusan rencana investasi dan pembiayaan penanganan kawasan permukiman kumuh.

BAB X RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Merupakan bagian yang akan memuat matriks peran pemangku kepentingan dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

BAB II

KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

2.1 Gambaran Umum Kota Sabang

Area	122,13 Km²
Permukiman	
Penduduk	41.197 Jiwa
Kepadatan Penduduk	355,285/Km²

PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF

KECAMATAN	KELURAHAN	JURONG
3	18	77

Kota sabang merupakan salah satu kota di Provinsi Aceh. Kota ini berupa kepulauan di seberang utara pulau Sumatra, dengan Pulau Weh sebagai pulau terbesar. Kota Sabang merupakan zona ekonomi bebas Indonesia, sering disebut sebagai titik paling utara Indonesia, tepatnya di Pulau Rondo.

Berdasarkan Qanun Kota Sabang No. 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang yang mulanya terdiri dari dua kecamatan, saat ini telah menjadi tiga kecamatan, dan delapan belas gampong. yang masing-masing kecamatan memiliki luas sebagai berikut: (1) Kecamatan Sukakarya 1.706,09 Ha; (2) Kecamatan Sukajaya 3.599,2 Ha dan (3) Kecamatan Sukamakmue 6902,82 Ha.

Kota Sabang terletak secara geografis berada antara 05°46'28"-05°54'28" Lintang Utara dan 95°13'13'02"-95°22'36" Bujur Timur. Sabang merupakan wilayah administratif paling utara, dan berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia, Thailand, dan India. Wilayah Kota Sabang dikelilingi oleh Selat Malaka di Utara, Samudera Hindia di Selatan, Selat Malaka di Timur dan Samudera Hindia di Barat. Batas-batas administrasi Kota Sabang sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Andaman,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Andaman, dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka

2.1.1 Kondisi Sosial dan Budaya

Jumlah penduduk Kota Sabang pada tahun 2019 adalah 42.191 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,82 persen, terdiri dari 21.267 jiwa penduduk laki-laki dan 20.924 jiwa penduduk perempuan. Penyebaran penduduk Kota Sabang yaitu Kecamatan

Sukajaya 22.002 jiwa dan Kecamatan Sukakarya 20.189 jiwa. Rata-rata tingkat kepadatan penduduk sebanyak 362 jiwa/km^2 Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya yaitu Kecamatan Sukajaya sebesar 329 jiwa/km^2, dan Kecamatan Sukakarya sebanyak 267 jiwa/km^2 (BPS, 2020).

Jumlah, dan Kepadatan Penduduk Kota Sabang, 2019

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk (2019)
1	Sukajaya	Balohan	3.599,2	15.663
2	Sukakarya	Aneuk Laot	1.706,95	12.349
3	Sukamakmue	Batee Shoek	6.902,82	6.559

Mata pencaharian penduduk Kota Sabang adalah sebagai pegawai pemerintahan, petani dan nelayan. Jenis mata pencaharian masyarakat lainnya adalah sebagai pedagang, buruh, pelaku wisata, sektor jasa dan industri rumah tangga, selain itu penghasilan masyarakat juga didapatkan dari memelihara hewan ternak. Angkatan kerja berjumlah 17.071 jiwa dan pengangguran berjumlah 824 jiwa (BPS, 2020)

Penduduk Kota Sabang sebanyak 39.004 jiwa atau 92,45% beragama islam, dan terdiri dari berbagai suku bangsa. Ada 63 tempat ibadah di Kota Sabang diantaranya 18 masjid, 29 Mushalla, 2 gereja dan 1 vihara. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan bahasa Aceh.

Tahun 2019 terdapat 18 Taman Kanak-Kanak (TK)/Sederajat yang menampung 1.205 murid dengan 123 guru. Kota Sabang juga memiliki 29 Sekolah Dasar (SD)/sederajat dengan 4.867 murid dan 482 guru. Sekolah Menengah Pertama terdapat 11 sekolah yang menampung 1.920 murid dengan 278 guru. Sedangkan untuk Sekolah Menengah Atas terdapat 4 sekolah yang menampung 1.591 murid dengan 175 guru. (BPS, 2020)

Fasilitas kesehatan yang ada di Kota Sabang pada tahun 2019 terdiri dari 2 Rumah Sakit, 2 Poliklinik, 6 Puskesmas, 9 Puskemas Pembantu, 6 Apotek, 37 Posyandu dan 15 Polindes. Fasilitas kesehatan ini didukung oleh tenaga kerja kesehatan yang terdiri dari 60 Dokter, 60 Perawat, 51 Bidan, 12 Farmasi dan 6 Ahli Gizi

Gambar 2.1 ...

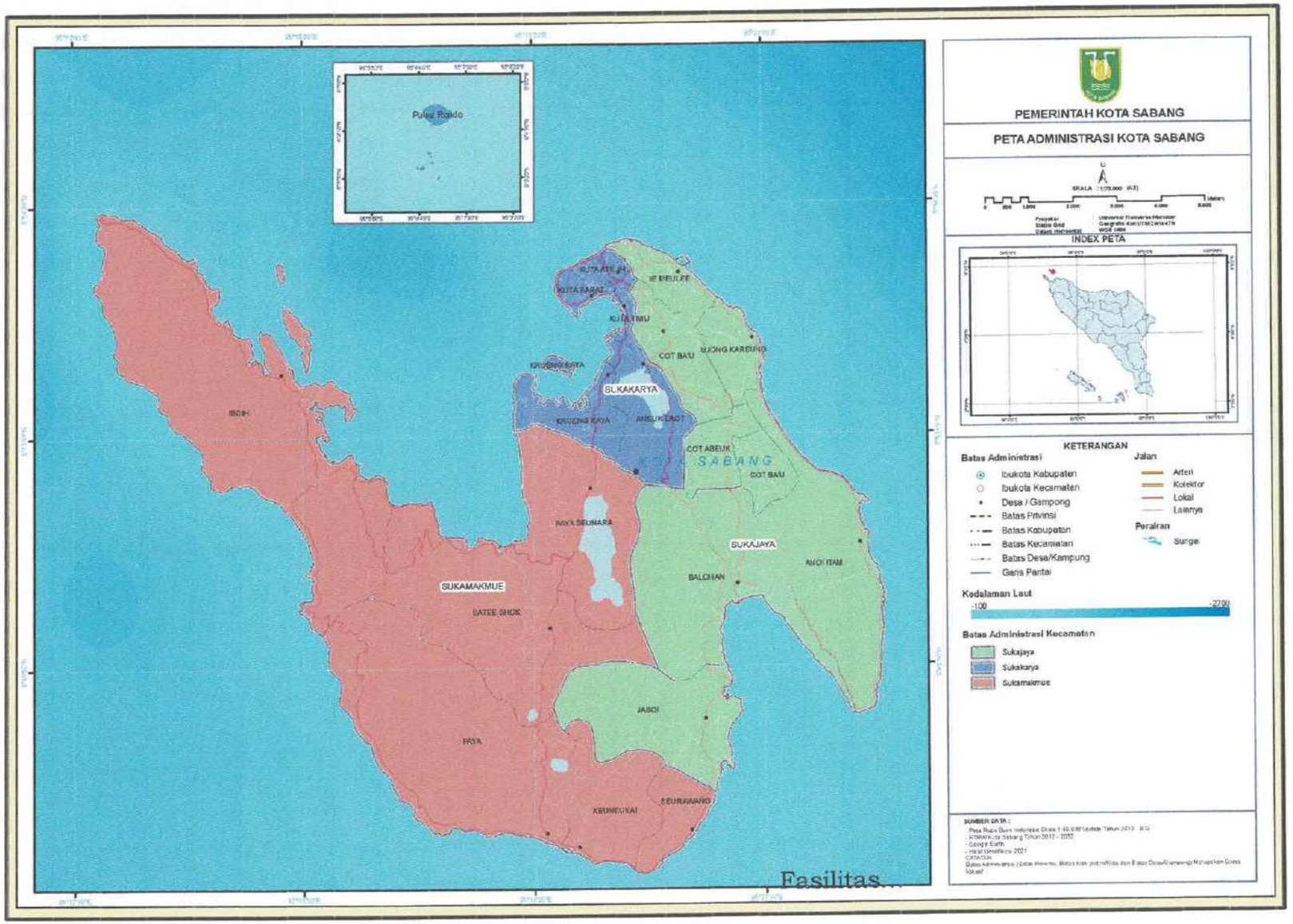

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Sabang, Sumber Hasil Pemetaan, 2020

Fasilitas...

2.1.2 Kondisi ...

2.1.2 Kondisi Iklim

Secara umum iklim di Kota Sabang termasuk ke dalam iklim tropis. Hal ini karena dipengaruhi oleh letaknya yang berada di sekitar garis khatulistiwa. Curah hujan tahunan Kota Sabang berjumlah di atas 2000 mm, dengan tingkat curah hujan sedikit terjadi perbedaan antara wilayah pantai dengan wilayah berbukit dan bergunung. Temperatur rata-rata di Kota Sabang adalah sekitar 26,9°C

Tabel 2.1 Kondisi Iklim Kota Sabang 2019. Sumber: Kota Sabang Dalam Angka 2020

Bulan	Suhu Rata-Rata (°C)	Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan	Penyinaran Matahari
Januari	22,2	123,6	15	131
Februari	23,2	13,3	4	189
Maret	23,8	102,9	10	208
April	22,7	19,0	5	177
Mei	25,5	123,7	11	195
Juni	27,0	90,8	10	119
July	25,0	119,9	11	146
Agustus	22,3	140,6	12	152
September	22,1	153,7	13	119
Oktober	21,7	235,3	17	112
November	23,5	290,0	18	147
Desember	23,7	382,0	19	103

2.1.3 Kondisi Bencana Alam

Bencana Alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan/penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor sehingga mengakibatkan kerugian materi maupun nonmateri.

a. Gempa Bumi

Berdasarkan Pusat Survei Geologi Pulau Weh merupakan daerah yang rawan terhadap goncangan gempabumi. Berdasarkan catatan yang ada Pulau Weh pernah mengalami gempa bumi dengan besaran magnitude 6-7 skala richter dan dalam peta wilayah rawan bencana bumi Indonesia, Kota Sabang dan sekitarnya masuk ke dalam skala V-VI MMI (Modifield Mercaly Intensity).

b. Tanah Longsor

Kondisi tanah pada beberapa tempat di Kota Sabang kurang stabil. Hal ini diakibatkan karena struktur geologinya merupakan hasil letusan gunung api yaitu tufa andesit. Jenis batuan ini sifat fisiknya kurang baik, yaitu tidak memberikan tahanan dalam menerima tekanan. Selain itu

struktur ...

struktur tanahnya cenderung terjadi perubahan sehingga mudah longsor.

Tabel 2.2 Sebaran Zona Kerentanan Tanah Tinggi di Kota Sabang

No	Kecamatan	Gampong	Luas Sebaran Kerentanan Tanah (Ha)
1	Sukajaya	Anoi Hitam	1,62
2		Balohan	95,69
3		Cot Abeuk	45,33
4		Cot Ba'U	20,90
5		Jaboi	38,40
6	Sukakarya	Aneuk Laot	49,62
7		Krueng Raya	247,20
8	Sukamakmue	Beurawang	83,29
9		Keuneukai	152,52
10		Paya	114,55
11		Iboih	628,65
12		Paya Seunara	83,56
13		Batee Shok	151,63
		Total	1.712,96

c. Abrasi

Dampak dari tsunami telah merusak ekosistem vegetasi yang ada di Pulau Weh. Pantai di Kota Sabang seperti Pantai Kasih, Pantai Iboih, Pantai Sabang Fair, dan Pantai Jaboi, kondisinya adalah tergolong pantai yang landai dengan kelerengan kurang dari 2°. Material pantai terdiri dari pasir, pasir lanauan sampai berukuran lempung (Clay). Pantai-pantai yang teramati yaitu Pantai Iboih, Pantai Sabang Fair dan Pantai Jaboi termasuk pantai-pantai yang berpotensi terjadinya abrasi.

d. Angin

Kota Sabang mengalami dua musim angin yaitu angin barat dan angina timur. Musim angin barat terjadi bulan November sampai Januari dimana merupakan bulan-bulan dengan suhu relatif rendah dan curah hujan yang paling tinggi. Musim Timur terjadi pada bulan Mei hingga Juli. Pada musim ini angin bergerak dari arah timur kearah barat dan barat daya. Pada bulan-bulan musim timur rata-rata suhu udara di Kota Sabang bersekitar antara 26,40 0C sampai dengan 28,70 0C. Kelembapan nisbi rata-rata di Kota Sabang bersekitar antara 84% sampai dengan 89%. Secara umum angin pada musim timur merupakan angin rata-rata dengan kecapatan tertinggi dan berpotensi terjadinya puting beliung.

Tabel 2.3 ...

Tabel 2.3 Jumlah Desa/Gampong yang Mengalami Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kota Sabang, 2011–2018. Sumber: Kota Sabang Dalam Angka 2020

No	Kecamatan	Gampong	Luas Sebaran Kerentanan Tanah (Ha)
1	Sukajaya	Anoi Hitam	1,62
2		Balohan	95,69
3		Cot Abeuk	45,33
4		Cot Ba'U	20,90
5		Jaboi	38,40
6	Sukakarya	Aneuk Laot	49,62
7		Krueng Raya	247,20
8	Sukamakmue	Beurawang	83,29
9		Keuneukai	152,52
10		Paya	114,55
11		Iboih	628,65
12		Paya Seunara	83,56
13		Batee Shok	151,63
		Total	1.712,96

2.1.4 Kondisi Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Kota Sabang. Selain memiliki potensi alam, historis atau karakter budaya yang menarik bagi wisatawan, Kota Sabang juga menawarkan banyak pilihan wisata lain yang mampu menjadikannya salah satu destinasi wisata paling populer di Indonesia. Berikut disajikan lokasi objek wisata di Kota Sabang pada tabel 2.4

Tabel 2.4 Lokasi Objek Wisata di Kota Sabang, 2019 Sumber: Kota Sabang Dalam Angka 2020

No	Nama Objek Wisata	Lokasi (Gampong)	Jarak Dari Pusat Kota
1	Pantai Pasir Putih	Paya	±17 Km
2	Pantai Pasir Teungoh	Paya	±17 Km
3	Pantai Pasir Cum	Paya	±17 Km
4	Air Terjun Bango	Paya	±17 Km
5	Makam Aulia Tengu dicemong	Paya	±17 Km
6	Benteng Ujong Peunayong	Paya	±17 Km
7	Kolam Air panas Keunekai	Keunekai	±21 Km
8	Gunung Berapi Keunekai	Keunekai	±21 Km
9	Pantai Keunekai	Keunekai	±21 Km
10	Pantai Beurawang	Beurawang	±19 Km
11	Kolam Pemandian Air Panas Jaboi	Jaboi	±15 Km
12	Gunung Berapi Jaboi	Jaboi	±15 Km
13	Panjati Jaboi	Jaboi	±15 Km
14	Kelok 13 Teupin meuneng dan Telok Balohan	Balohan	±11 Km
15	Kebun Salak	Balohan	±11 Km

16. Tugu ...

No	Nama Objek Wisata	Lokasi (Gampong)	Jarak Dari Pusat Kota
16	Tugu I Love Sabang	Cot Ba'u	±3 Km
17	Pantai Teupin reudep/Pantai Batee Gajah	Anoi Itam	±12 Km
18	Pantai Arun	Anoi Itam	±12 Km
19	Pantai Teupin Bube	Anoi Itam	±12 Km
20	Benteng Pertahanan jepang	Anoi Itam	±12 Km
21	Pantai Ujong Kareung	Ujong Kareung	±12 Km
22	Pantai Sumur Tiga	Ie Meulee	±4 Km
23	Pantai Tapak Gajah	Ie Meulee	±2 Km
24	Benteng Jepang Tapak Gajah	Ie Meulee	±2 Km
25	Rumah Teuku Abbas	Ie Meulee	±4 Km
26	Pantai Gapang	Iboih	±19 Km
27	Pantai Calok Meunasah	Iboih	±21 Km
28	Pantai Teupin Layeu	Iboih	±21 Km
29	Pantai Teupin Serkui	Iboih	±21 Km
30	Pantai Teupin Reudeup	Iboih	±21 Km
31	Pulau Rubiah	Iboih	±21 Km
32	Taman Laut Pulau Rubiah	Iboih	±21 Km
33	Batu gendangg	Iboih	±21 Km
34	Tugu Kilometer 0	Iboih	±21 Km
35	Hutan Wisata Iboih	Iboih	±21 Km
36	Gua Sarang	Iboih	±21 Km
37	Pantai Serui	Batee Shoek	±12 Km
38	Pantai Pria Laot	Batee Shoek	±12 Km
39	Tugu Pemancungan Jepang	Batee Shoek	±12 Km
40	Air Terjun Pria Laot	Batee Shoek	±12 Km
41	Makam Aulia Pria Laot	Batee Shoek	±12 Km
42	Pantai Teupin Cirik	Krueng Raya	± 1 Km
43	Pantai Lhong Krueng Raya	Krueng Raya	± 6 Km
44	Pantai Teupin Tongkang	Krueng Raya	± 6 Km
45	Kuburan keramat Ujung Sekundur	Krueng Raya	± 6 Km
46	Pulau Klah	Krueng Raya	± 6 Km
47	Danau Aneuk Laot	Aneuk Laot	± 2 Km
48	Kolam Permainan Anak-anak Jurong Putro Ijo	Aneuk Laot	± 2 Km
49	Benteng Tinjau Alam	Aneuk Laot	± 2 Km
50	Masjid Baiturrahim	Kuta Timu	± 1 Km
51	Gudang Pelor	Kuta Timu	± 1 Km
52	Benteng Jepang Jurong Keutapang	Kuta Timu	± 1 Km
53	Zwimbath	Kuta Timu	± 2 Km
54	Dermaga CT3	Kuta Timu	± 1 Km
55	Lokasi Sabang Fair	Kuta Barat	± 1 Km
56	Benteng Pertahanan Jepang Ujung Asam	Kuta Barat	± 1 Km

57. Benteng ...

No	Nama Objek Wisata	Lokasi (Gampong)	Jarak Dari Pusat Kota
57	Benteng Pertahanan Jepang di tengah jalan Sabang Fair	Kuta Barat	± 1 Km
58	Benteng Jepang di Samping gedung BPKS	Kuta Barat	± 1 Km
59	Dermaga CT1	Kuta Barat	± 1 Km
60	Puncang Sabang	Kuta Barat	± 1 Km
61	Sabang Hill	Kuta Ateuh	± 1 Km
62	Kuburan Kerkhop	Kuta Ateuh	± 1 Km



Gambar 2.2. Pantai Pasir Putih - Paya



Gambar 2.3. Gunung Berapi Jaboi



Gambar 2.5. Pulau Klah – Krueng Raya



Gambar 2.4. Tugu Kilometer 0 - Iboih

2.2 Isu ...

2.2 Isu Strategis Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 atau RPJMN 2020-2024 terdapat 7 Prioritas Nasional (PN) yaitu:

(1). Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.
(2). Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
(3). Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
(4). Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa.
(5). Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
(6). Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
(7). Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman masuk dalam 5 dari 10 prioritas nasional dalam 2020-2024 yaitu Prioritas Nasional 1,2,3,5, dan 6. Dalam penanganan permukiman kumuh terdapat 2 target besar yaitu peningkatan kualitaspermukiman kumuh seluas 10.000 ha dan peremajaan 10 kawasan permukiman kumuh.

Kota Sabang merupakan kawasan perkotaan yang tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan pembangunan perumahan

dan ...

dan permukiman. Kebutuhan perumahan yang layak huni (*livable),* aman (*safe*), nyaman (*comfortable*), dan damai (*peaceful*) dan sejahtera (*prosperous*) serta berkelanjutan (*sustainable*) dalam kawasan permukiman terus meningkat seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Kota Sabang.

Permasalahan-permasalahan yang bersifat mendasar, mendesak dan penting ini selanjutnya diidentifikasi menjadi isu-isu strategis pembangunan perumahan dan permukiman Kota Sabang. . Isu strategis merupakan kondisi bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagan yang jika tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkan permasalahan di masa datang dan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Sehingga perlu dilakukan identifikasi isu-isu strategis agar dapat dipetakan program program kegiatan yang tepat sasaran untuk mengatasi permasalahan-permaslahan tersebut.

Berdasar identifikasi dan analisa kondisi riil, tantangan lima tahun kedepan, serta dinamika lingkungan strategis serta telaahan dokumen yang ada, maka isu-isu strategis pembangunan Kota Sabang adalah:

1. Pelaksanaan syariat islam
2. Kualitas dan pelayanan pendidikan
3. Kualitas dan pelayanan kesehatan
4. Pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi
5. Ketersediaan infrastruktur dasar dan konektivitas
6. Peningkatan daya saing daerah berbasis potensi dan kearifan lokal untuk mendukung sektor pariwisata;
7. Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan;
8. Tata kelola pemerintahan.

Selanjutnya isu strategis pembangunan perumahan dan pembangunan Kota Sabang disajikan pada tabel 2.5 dibawah ini. Isu strategis ini yang dirumuskan berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan terkait, hasil kajian berbagai dokumen pembangunan dan perencanaan serta kondisi di lapangan,

Tabel 2.5 Isu Strategis Pembangunan Perumahan dan Permukiman Kota Sabang.
Sumber : Kajian dan Analisis Dokumen. RP2KPKP 2022-2025

No	Aspek	Isu Strategis
1	Permukiman	1. Masih besarnya kebutuhan rumah tempat tinggal yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 2. Masih banyak dijumpai permukiman pada kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, 3. Belum tergarapnya infrastruktur hijau (green infrastructure) dan upaya hemat energy 4. Masih ada kawasan permukiman yang belum tertata dengan baik 5. Masih ada lahan permukiman tidak bersertifikat
2	Jalan dan Jembatan	1. Persentase jalan kota dalam kondisi baik belum optimal 2. Masih adanya sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar 3. Konektifitas jaringan jalan belum optimal 4. Permasalahan mengenai pengembangan utilitas penerangan jalan umum (PJU)
3	Air Minum	1. Belum optimalnya sistem penyediaan air minum dan pengembangan air minum terlindungi 2. Kurangnya ketersediaan prasarana sarana sumber daya air terkait pengelolaan sumber air baku untuk air minum dan sistem jaringan distribusi yang belum baik. 3. Water Treatment Plant yang belum cukup dan lokasinya terlalu jauh dari wilayah layanan, sehingga mengakibatkan waktu distribusi air tidak dapat melayani setiap hari (24 jam). 4. Kebocoran pipa distribusi, pemasangan sambungan pipa illegal menyebabkan hilangnya volume air bersih yang terdistribusi.
4	Drainase	1. Sistem jaringan drainase belum terintegrasi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya, 2. Persentase kondisi jaringan drainase lingkungan belum optimal. 3. Jaringan drainase lingkungan yang tidak saling terhubung. 4. Kawasan permukiman yang tergenang. 5. Belum optimalnya fungsi drainase akibat timbunan sampah dilingkungan permukiman.
5	Sanitasi	1. Prilaku masyarakat yang masih menggunakan badan-badan air sebagai tempat pembuangan limbah. 2. Tingginya penggunaan sarana pengelolaan limbah yang belum sesuai teknis. 3. Rendahnya pelayanan dan pengelolaan kegiatan penyehatan lingkungan sanitasi yang layak baik. 4. Belum optimalnya dan ketersediaan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) kota, komunal, serta kawasan;

6. Persampahan ...

No	Aspek	Isu Strategis
6	Persampahan	1. Belum optimalnya sinergisitas kerjasama dalam pengelolaan sampah kota secara regional. 2. Rendahnya cakupan pelayanan persampahan. 3. Kurangnya sarana dan prasarana persampahan. 4. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan serta kurang berfungsinya sistem pengawasan dan pengendalian 5. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan dan pemilahan sampah.,
7	Kebakaran	1. Belum tersedianya sarana dan prasarana proteksi kebakaran ditingkat kawasan maupun lingkup hunian.

2.3 Kebijakan Pembangunan Perumahan Dan Permukiman

Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman bersifat multi sektoral dan melibatkan banyak pihak. Perlu dipahami bahwa pencapaian target pembangunan perumahan dan permukiman merupakan upaya terpadu dan sinkron dari berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta.

Memahami berbagai kebijakan terkait pembangunan perumahan dan permukiman yang berlaku di Kota Sabang dilakukan agar dalam melakukan menentukan program-program penanganan kekumuhan sejalan dengan visi dan misi pemerintah Kota Sabang. Hal ini juga dilakukan agar kegiatan penanganan kumuh yang direncanakan

tidak saling tumpang tindih antar berbagai pihak terkait. Kajian Kebijakan ini menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis) untuk mengidentifiasi dan menyimpulkan kebijakan, strategi, dan program pembangunan Kota Sabang yang terdapat dalam dokumen perencanaan pembangunan Kota (RPJMD, Renstra Dinas, Rencana Sektor, dan dokumen lain).

Tabel 2.6 ...

Tabel 2.6 Overview Kebijakan Dan Program Pembangunan Kota Sabang

No	Sumber Dokumen	Visi dan Misi	Tujuan & Sasaran	Strategi & Arahan Kebijakan
1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sabang 2007-2027	VISI: Kota Sabang Yang Maju, Sejahtera, Beriman, serta Pemerintahan Yang Baik dan Berwibawa		
		MISI terkait dengan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman. MISI KEDUA: Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang bertaraf internasional dan berwawasan lingkungan	Sasaran: 1. Terbangunnya kelengkapan sarana dan prasarana perkotaan (prasarana jalan, sarana transportasi, pelayanan air bersih, pengelolaan air limbah dan sampah) yang berkualitas baik, ruang terbuka hijau, kesediaan energi listrik, perlindungan masyarakat dari bencana (mitigasi bencana), meningkatnya ketentraman dan ketertiban kota, serta pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup. Penataan ruang yang sinergis, serasi dan berkelanjutan, dan pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, serta penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi	Arahan Kebijakan: 1. Peran pemerintah akan lebih difokuskan pada perumusan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana dasar, sementara peran swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana akan makin ditingkatkan terutama untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat komersial. 2. Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi (pengelolaan air limbah dan persampahan) diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya seperti industri, perdagangan, transportasi, pariwisata dan jasa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan melalui pendekatan tanggap kebutuhan (demand responsive approach) dan pendekatan terpadu dengan sektor sumber

daya ...

No	Sumber Dokumen	Visi dan Misi	Tujuan & Sasaran	Strategi & Arahan Kebijakan
				daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya air serta kesehatan. 3. Pemanfaatan terpadu sumber air baku, antara air permukaan dan air tanah akan dikembangkan terutama untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber air baku. 4. Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar wilayah. Penyediaan pelayanan angkutan umum masal perkotaan yang didukung pelayanan yang aman, nyaman, tertib, terjangkau dan ramah lingkungan serta bersinergi dengan kebijakan tata guna lahan serta meningkatkan budaya berlalu lintas yang tertib dan disiplin. 5. Pembangunan prasarana jalan, diarahkan pada peningkatan mutu jaringan jalan lingkar Pulau Weh, pengembangan jaringan jalan baru untuk pengembangan wilayah dan peningkatan mutu jalan-jalan dalam kota serta seluruh jalan lingkungan berstandar aspal beton/hot mix. 6. Pembangunan perumahan dan permukiman yang layak, sehat dan tertata dengan membangun kawasan permukiman baru (resetlement) dan pembangunan rumah tidak

layak ...

No	Sumber Dokumen	Visi dan Misi	Tujuan & Sasaran	Strategi & Arahan Kebijakan
				layak huni masyarakat tidak mampu (dhuafa). 7. Pembangunan perkotaan dilakukan dengan merevitalisasi kota lama dan bangunan bersejarah (heritage) untuk menciptakan kota yang indah dan mempunyai daya tarik, dan membangun kawasan kota baru (newtown) untuk pengembangan wilayah. 8. Pembangunan Lingkungan Hidup, diarahkan pada pelestarian sumber daya alam (danau, hutan, taman laut, wiayah pesisir) dan membangun Ruang Terbuka Hijau. 9. Peningkatan sumber daya energi listrik, diarahkan selain mengandalkan tenaga diesel perlu juga dikembangkan sumber energi alternatif lain seperti sumber energi Panas Bumi Jaboi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri. 10. Arah kebijakan pembangunan Komunikasi dan Informatika adalah meningkatkan pemerataan dan pemenuhan pelayanan jasa pos, informasi dan telekomunikasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Arah kebijakan ini dimaksudkan agar perkembangan teknologi informasi yang kian pesat dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Lebih lanjut, upaya ini dilakukan dalam rangka meningkatkan akses informasi, khususnya penggunaan jaringan telepon selular dan pelayanan internet, sehingga setiap lapisan

masyarakat ...

No	Sumber Dokumen	Visi dan Misi	Tujuan & Sasaran	Strategi & Arahan Kebijakan
				masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pelayanan telekomunikasi secara mudah dan terjangkau. Dalam kaitan ini, diharapkan juga arah kebijakan Komunikasi dan Informatika mampu mendukung percepatan dan pengembangan ekonomi wilayah dari sisi keterisolasian dan ketertinggalan. Penanggulangan bencana alam diarahkan pada upaya peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan diantara pemangku kepentingan, tidak hanya pada saat bencana tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan pasca bencana
2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sabang 2017-2022	VISI: Terwujudnya pembangunan kota sabang yang mandiri, sejuk, tentram yang berbasis wisata maritim dan berazaskan syari'ah dengan semangat kebersamaan (ulama dan umara)		
		MISI terkait dengan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman. MISI KEENAM: Meningkatkan Infrastruktur Dan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Dhu'afa)	Tujuan: 1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan rumah layak huni 2. Meningkatkan penataan ruang, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana Sasaran: 1.1 Meningkatnya pelayanan sanitasi yang berkelanjutan	Strategi: 1.1.1 Meningkatkan sarana dan prasrana layanan persampahan 1.1.2 Menyediakan akses pelayanan air limbah rumah tangga 1.1.3 Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan jaringan drainase 1.2.1 Menyiapkan lahan dan pembangunan rumah yang layak bagi kaum dhuafa di Kota Sabang

1.2 Tersedianya ...

No	Sumber Dokumen	Visi dan Misi	Tujuan & Sasaran	Strategi & Arahan Kebijakan
			1.2 Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan penataan kawasan permukiman kumuh 1.3 Meningkatnya akses transportasi 1.4 Tersedianya akses dan layanan komunikasi dan informasi bagi masyarakat 2.1 Terwujudnya tata ruang kota yang berkelanjutan 2.2 Terwujudnya ketahanan dan kapasitas adaptasi terhadap bencana alam yang terkait dengan perubahan iklim 2.3 Meningkatnya upaya konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam 2.4 Meningkatnya pelayanan kebencanaan 2.5 Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana Meningkatnya kapasitas penyelenggara penanggulangan bencana	1.2.2 Meningkatkan kualitas rumah MBR 1.3.1 Meningkatkan sarana, prasarana dan aksesibilitas transportasi darat, laut dan udara antar wilayah 1.4.1 Meningkatkan Layanan Informasi dan Komunikasi bagi masyarakat 2.1.1 Menyusun dokumen, penegakan hukum dan implementasi RTRW 2.2.1 Mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan 2.2.2 Meningkatkan pelayanan persampahan 2.3.1 Meningkatkan dan Mempertahankan Kualitas, Daya Dukung dan Kelestarian Fungsi Lingkungan 2.4.1 Menyusun dokumen rencana mitigasi bencana 2.5.1 Meningkatkan Ketahanan wilayah dan masyarakat terhadap bencana 2.6.1 Meningkatkan Kapasitas SDM Penanggulangan bencana Arah Kebijakan: 1.1.1.1 Penyediaan sarana dan prasrana pengelolaan persampahan 2. Peningkatan sarana dan prasarana air limbah 3. Peningkatan penyediaan dan pemeliharaan jaringan drainase 1.2.1.1 Validasi data calon penerima rumah layak hunin pemeliharaan jaringan drainase

1.2.1.2 Penyiapan ...

No	Sumber Dokumen	Visi dan Misi	Tujuan & Sasaran	Strategi & Arahan Kebijakan
				1.2.1.2 Penyiapan lahan untuk pembangunan rumah layak huni 1.2.1.3 Penyiapan dokumen perencanaan terhadap kawasan peruntukan rumah layak huni 1.2.2.1 Rehabilitasi/peningkatan kualitas rumah tidak layak huni 1.3.2.1 Peningkatan aksesibilitas transportasi darat, laut dan udara 1.4.2.1 Peningkataan kualitas dan kuantitas jaringan komunikasi dan Informasi 2.1.1.1 Penyusunan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi 2.2.1.1 Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 2.2.2.1 Peningkatan pengelolaan persampahan 2.3.1.1 Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam 2.3.1.2 Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 2.3.1.3 Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan 2.4.1.1 Penyusunan dokumen rencana mitigasi bencana 2.5.1.1 Peningkatan sarpras penanggulangan bencana dan ketahanan masyarakat 2.6.1.1 Peningkatan kapasitas SDM Pelaku penanggulangan bencana

3. Rencana ...

No	Sumber Dokumen	Visi dan Misi	Tujuan & Sasaran	Strategi & Arahan Kebijakan
3	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sabang Tahun 2012-2032		Tujuan: Mewujudkan Kota Sabang yang aman, nyaman, produktif, mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan serta menjamin keterpaduan pengembangan kota sebagai kawasan strategis nasional. Sasaran: 1. Meningkatnya interaksi dan integrasi wilayah Kota Sabang ke dalam konteks sistem tata ruang wilayah Provinsi (RTRWP) Aceh maupun RTRW Nasional melalui penataan sistem pusat-pusat permukiman perkotaan (urban system) secara terpadu dengan sistem transportasi wilayah (c.q. transportasi antar wilayah); 2. Mempercepat pengembangkan Kawasan Perdagangan Bebas sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional melalui kegiatan dibidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi dan maritim, post dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, pengolahan, pengepakan, dan gudang hasil pertanian, perikanan, dan industri dari kawasan sekitarnya;	Kebijakan Penataan Ruang Wiayah Kota Sabang untuk mencapai tujuan penataan ruang Kota SabangKota: 1. Pengembangan Sistem Pusat- Pusat Pelayanan yang diarahkan pada harmonisasi perkembangan kegiatan dan pelayanan kota yang berjenjang dalam mendukung investasi kawasan perdagangan dan pelabuhan Sabang 2. Pemantapan fungsi kawasan lindung 3. Pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal 4. Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung kegiatan ekonomi yang produktif 5. Pengembangan dan peningkatan kawasan pariwisata agar dapat mendukung perekonomian Kota Sabang 6. Peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara Strategi 1.1 Mengembangkan Kuta Barat, Kuta Ateuh, Cot Ba'u, Ie Meulee sebagai pusat pelayanan kota 1.2 Mengembangkan Kuta Timu, Balohan, Paya Seunara, Batee Shok sebagai sub pusat pelayanan kota 1.3 Mengembangkan Krueng Raya, Aneuk Laot, Jaboi, Cot Abeuk, Iboih, Paya, Keunekai, Beurawang sebagai pusat

3. Meningkatkan ...

No	Sumber Dokumen	Visi dan Misi	Tujuan & Sasaran	Strategi & Arahan Kebijakan
			3. Meningkatkan interaksi wilayah Kota Sabang ke dalam jaringan perkotaan poros-perekonomian dunia (aksesibilitas global) seperti Singapore dan Batam melalui pengembangan pusat-pusat permukiman perkotaan jenjang PKSN dan PKW khususnya, serta pengembangan simpul-simpul kegiatan transportasi internasional. 4. Meningkatkan interaksi wilayah hinterland dengan pusat-pusat permukiman perkotaan melalui pengembangan prasarana dan sarana transportasi intra wilayah untuk memperkuat keterkaitan ekonomi dan ruang antara perkotaan dengan pedesaan; 5. Meningkatkan aksessibilitas ke kawasan-kawasan tertinggal/perdesaan, terpencil dan pulau-pulau yang jauh untuk mendorong pertumbuhan dan memeratakan perkembangan kawasan; 6. Mengurangi tingkat konflik pemanfaatan ruang dalam wilayah melalui penegasan fungsi ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya di ruang daratan maupun lautan, serta penetapan kriteria	lingkunganMengembangkan dan mengoptimalkan sistem jaringan transportasi secara terpadu antara transportasi darat, laut, dan udara; 2.1 Menetapkan batas kawasan lindungMerehabilitasi kawasan lindung yang telah berubah fungsi; 2.2 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga fungsi dan ekosistem kawasan lindung sesuai dengan kearifan 3.1. Mengatur, menata dan mengendalikan pengembangan kawasan budidaya agar sesuai peruntukan; 3.2. Mengendalikan perkembangan kawasan terbangun pada wilayah yang berkepadatan tinggi; dan 3.3. Membangun kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam menciptakan ruang Kota Sabang yang nyaman 4.1. Mengembangkan dan meningkatkan jaringan jalan untuk menunjang pengembangan perekonomian wilayah 4.2. Mengembangkan sektor pertanian dengan mendorong komoditi tanaman pangan, tanaman holtikultura dan perkebunan 4.3. Memanfaatkan daya Tarik wisata bahari, budaya dan alam

No	Sumber Dokumen	Visi dan Misi	Tujuan & Sasaran	Strategi & Arahan Kebijakan
			lokasi dan standar teknis pengelolaan kawasan; 7. Mengupayakan terwujudnya perimbangan dalam luasan dan sebaran ruang antara kawasan hutan dan non hutan dengan memperhatikan fungsi-fungsi hidrologis hutan sebagai kawasan resapan air, pemeliharaan kesuburan tanah, dan mencegah terjadinya erosi maupun banjir; 8. Meningkatkan optimalitas pemanfaatan dan produktivitas lahan kawasankawasan budidaya, terutama pola kawasan-kawasan produksi yang belum diusahakan dan terlantar dengan tetap mempertahankan terpeliharanya kelestarian lingkungan dan daya dukung wilayah; 9. Menyediakan dan mencadangkan secara khusus lahan-lahan budidaya untuk mendukung pengembangan perekonomian rakyat (usaha kecil, menengah dan koperasi) di berbagai sektor; dan 10. Menetapkan stategi pemanfaatan ruang yang telah mengantisipasi kebencanaan yang mungkin timbul.	4.4. Memanfaatkan secara optimal potensi sektor perikanan di kawasan laut dan pesisir 4.5. Mengembangkan kawasan budidaya yang memiliki peluang ekonomi tinggi; 4.6. Menetapkan dan mengembangkan kawasan budidaya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; 4.7. Menyediakan ruang untuk sektor informal untuk mendukung usaha industri rumah tangga/kecil 5.1. Mengembangkan wisata bahari dan wisata sejarah 5.2. Membangun sarana dan prasarana wisata 5.3. Mengembangkan pengelolaan bersama dengan investor 6.1 Mendukung fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara 6.2 Mengembangkan kawasan budidaya secara selektif yang berada di kawasan maupun sekitar kawasan pertahanan dan keamanan 6.3 Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan

No	Sumber Dokumen	Visi dan Misi	Tujuan & Sasaran	Strategi & Arahan Kebijakan
4	Strategi Sanitasi Kota Sabang Tahun 2016	VISI SANITASI KOTA SABANG: Terwujudnya Kota Sabang sebagai Kota Wisata yang mandiri, bersih dan sehat melalui pembangunan dan peningkatan layanan sanitasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan pada tahun 2026.		
		MISI AIR LIMBAH DOMESTIK: 1. Menyediakan regulasi tingkat daerah dalam hal pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan kemitraan dengan swasta. 3. Meningkatkan dan mengembangkan alternatif sumber pendanaan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik. Menciptakan sistem kelembagaan yang kuat dalam pengelolaan air limbah domestik.	TUJUAN: 1. Tercapainya akses aman 3% di sektor air limbah domestik. 2. Tercapainya Akses Layak di sektor air limbah domestik. 3. Tercapainya Kota Sabang tanpa BABS di tempat terbuka. SASARAN: 1.1. Meningkatkan akses aman dari 2% menjadi 3% pada tahun 2024 dan 5% di tahun 2026 1.2. Menyusun regulasi tingkat Daerah dalam hal Pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan 1.3. Membentuk sistem kelembagaan dalam pengelolaan air limbah domestik Berkurangnya kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dari 32,9% menjadi 0% pada tahun 2019	STRATEGI: 1. Menyusun qanun dan regulasi turunan tentang pengelolaan air limbah domestik. 2. Melakukan penguatan terhadap regulasi prioritas penggunaan dana gampong yang menjadikan air limbah domestik sebagai salah satu kegiatan prioritas pembangunan di gampong. 3. Revitalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 4. Mendorong Kota Sabang sebagai Kota Open Defecation Free (ODF) melalui penyediaan akses layak, aman dan berkelanjutan. 5. Meningkatkan Kegiatan Kampanye Perubahan Perilaku 6. Menyediakan anggaran yang sesuai dan mencukupi bagi kebutuhan program kegiatan pengelolaan air limbah domestic 7. Membentuk pengelola teknis setingkat UPTD untuk pengelolaan limbah domestic Memperkuat pelaksanaan inovasi Gerakan Bersama Sanitasi Aman dan Tuntas (GEBER

2.1 Meningkatkan ...

No	Sumber Dokumen	Visi dan Misi	Tujuan & Sasaran	Strategi & Arahan Kebijakan
			2.1 Meningkatkan akses layak individu (tidak termasuk aman) dari 85% menjadi 95% pada tahun 2024 dan 100% pada tahun 2026 2.2 Menurunkan akses layak bersama dari 4,5% menjadi 2% pada tahun 2024 dan 0% pada tahun 2026 2.3 Menurunkan akses layak khusus perdesaan (leher angsa - cubluk) dari dari 1,6% menjadi 0% pada tahun 2024. 2.4 Menurunkan akses belum layak dari 5,7% menjadi 0% pada tahun 2024. 3.1 Menurunkan angka BABS dari 1,7% menjadi 0% di tahun 2023. 3.2 Meningkatkan persentase pendanaan pada sektor air limbah domestic	SANTUN) dan Kelompok Kerja Sanitasi Saweu Gampong (POSSAGA)
		MISI PERSAMPAHAN: 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 2. Meningkatkan dan mengembangkan alternatif sumber pendanaan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan.	TUJUAN: 1. Tercapainya penanganan sampah perkotaan yang menjangkau seluruh wilayah 2. Tercapainya target 15% pengurangan sampah perkotaan. SASARAN: 1.1 Meningkatkan capaian penanganan sampah perkotaan dari 85,8%	STRATEGI: 1. Peningkatan dan pengembangan TPA Lhoek Batee 2. Meningkatkan sarana dan prasarana penanganan persampahan 3. Melakukan penguatan terhadap regulasi prioritas penggunaan dana gampong yang menjadikan persampahan sebagai salah satu kegiatan prioritas pembangunan di gampong.

3. Mengurangi ...

No	Sumber Dokumen	Visi dan Misi	Tujuan & Sasaran	Strategi & Arahan Kebijakan
		3. Mengurangi timbulan sampah dari sumbernya dalam rangka pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan kemitraan dengan swasta. Menciptakan sistem manajemen dan kelembagaan yang kuat dalam pengelolaan persampahan sesuai dengan prinsip good and cooperative governance. Mendorong peran swasta dalam penanganan dan pengelolaan persampahan.	menjadi 90% pada tahun 2024 dan 100% pada tahun 2026 1.2 Memperkuat regulasi tingkat Daerah dalam hal Pengelolaan Persampahan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan 1.3 Membentuk sistem kelembagaan dalam pengelolaan persampahan 1.4 Meningkatkan persentase pendanaan pada sektor persampahan 2.1 Meningkatkan capaian pengurangan sampah perkotaan dari 0% menjadi 10% pada tahun 2024 dan 15% pada tahun 2026 Mengurangi Timbulan Sampah dari sumbernya dengan metode 3R	4. Menyediakan anggaran yang sesuai dan mencukupi bagi kebutuhan program kegiatan penanganan persampahan 5. Mengurangi sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R 6. Memperkuat regulasi dalam pengelolaan persampahan 7. Membentuk pengelola teknis setingkat UPTD untuk penanganan persampahan 8. Memperkuat pelaksanaan inovasi Aksi dan Implementasi Kelola Sampah yang Berkelanjutan Ramah Lingkungan di Kota Sabang (ASIK SAYANG SABANG) dan Kelompok Kerja Sanitasi Saweu Gampong (POSSAGA) 9. Memperkuat pelaksanaan inovasi Aksi dan Implementasi Kelola Sampah yang Berkelanjutan Ramah Lingkungan di Kota Sabang (ASIK SAYANG SABANG) dan Kelompok Kerja Sanitasi Saweu Gampong (POSSAGA) 10. Memberikan reward/penghargaan kepada pihak swasta yang terlibat dalam sistem pengelolaan persampahan

2.4 Kebijakan ...

2.4 Kebijakan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

2.4.1 Amanat Undang-Undang Nomor.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemah, dan/atau setiap orang.

Tabel 2.7 Muatan Pencegahan dan Peningkatan terhadap Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

PENCEGAHAN	
Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru mencakup:	a. Ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi; b. Ketidaklengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum; c. Penurunan kualitas rumah, perumahan, dan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum; dan d. Pembangunan rumah, perumahan, dan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
Pencegahan dilaksanakan melalui:	a. Pengawasan dan pengendalian; dan b. Pemberdayaan masyarakat
Pengawasan dan pengendalian	Dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemberdayaan masyarakat	Dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

PENINGKATAN ...

PENINGKATAN KUALITAS	
Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan pola-pola penanganan:	a. Pemugaran; b. Peremajaan; atau c. Pemukiman kembali
Penetapan Lokasi	Penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh wajib memenuhi persyaratan: a. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; b. Ksesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan; c. Kondisi dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni; d. Tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan; e. Kualitas bangunan; dan f. Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.
Pemugaran	Merupakan upaya perbaikan atau dapat pula dilakukan melalui pembangunan kembali kawasan permukiman agar menjadi layak huni.
Peremajaan	Merupakan upaya untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Untuk meremajakan suatu kawasan, terlebih dahulu perlu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat yang terkena dampak. Peremajaan harus menghasilkan rumah, perumahan, dan permukiman dengan kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.
Pemukiman Kembali	Dilakukan apabila lokasi kumuh eksisting adalah lokasi yang tidak diperuntukkan bagi kawasan permukiman menurut RTRW atau merupakan lokasi yang rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi orang yang mendiami kawasan / lokasi tersebut. Pemukiman kembali merupakan upaya memindahkan masyarakat dari lokasi eksisting yang dilakukan oleh dukungan Pemerintah dan pemerintah daerah yang juga menetapkan lokasi untuk pemukiman kembali dengan turut melibatkan peran masyarakat

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011, upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh pada dasarnya

meliputi ...

meliputi 4 (empat) tahapan utama yakni pendataan, penetapan lokasi, pelaksanaan dan pengelolaan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 juga mengamanatkan bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Terkait hal ini, masing-masing stakeholder memiliki peran, tugas, dan fungsi sesuai dengan kapasitasnya dalam penyelenggaraan kawasan permukiman, termasuk di dalamnya terkait upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

Tabel 2.8 Peran, Tugas dan Fungsi Stakeholder dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Stakeholder	Peran, Tugas dan Fungsi
Pemerintah Pusat • Pokja PKP Nasional • Kementerian terkait • Forum PKP Nasional	• Peraturan Perundangan dan Kebijakan Nasional Penyelenggaraan Permukiman. Peraturan dan Pedoman Umum bidang penyelenggaraan permukiman. • Penganggaran, Monitoring, Supervisi, Pengembangan Kapasitas, dll.
Pemerintah Provinsi • ODP Provinsi • Pokja Provinsi • Forum PKP Provinsi	• Kelembagaan Pokja PKP • Dukungan ke Pemerintah Kota/Kabupaten. Koordinasi, Sinkronisasi, dll
	• Pendanaan dan Pemprogramanan di APBD. Alokasi dana dan program penyelenggaraan permukiman.
Pemerintah Provinsi • ODP Kab/Kota • Pokja PKP/Kota • Forum PKP Kab/Kota	• Peraturan Daerah Penanganan Kumuh. Perda Kumuh, Perda BG, Perda Tata Ryang, dll • Kelembagaan Pokja PKP • Dokumen Strategi & Perencanaan (program investasi, masterplan, dokumen teknis). • Pelaksanaan Kegiatan Penataan Kawasan dalam Penanganan Permukiman Kumuh, • Dukungan Masyarakat. Informasi kebijakan, apresiasi partisipasi, koordinasi, dll.
Masyarakat & Swasta/Dunia Usaha	• Perencanaan Partisipatif. Pemetaan Swadaya Penyusunan Profil Kumuh dan Perencanaan Partisipasi Penanganan & Pencegahan kumuh dikomunitas • Integrasi Perencanaan ke Dokumen Strategi & Perencanaan (SIAP/RKP-KP) • Penguatan Kelembagaan. Penguatan Kapasitas BKM dan Pemerintah Kelurahan/Desa dalam Penanganan Kuuuh dan Pencegahan Kumuh. • Pelaksanaan Kegiatan Investasi Invesatsi Infrastruktur Peningkatan Kualitas dan Pencegahan Kumuh Tingkat Komunitas.

2.4.2 Amanat ...

2.4.2 Amanat Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman bersifat multi sektoral dan melibatkan banyak pihak. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan leading sector dalam pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman, namun bukan sebagai pelaku tunggal. Perlu dipahami bahwa pencapaian target pembangunan merupakan upaya terpadu dan sinkron dari berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta.

Dalam penyelenggaraannya, pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dilakukan secara terdesentralisasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Pemerintah pusat akan lebih berperan sebagai pembina, pengarah, dan pengatur, agar terus dapat tercipta suasana yang semakin kondusif. Antara Pemerintah dengan pemerintah daerah, juga terdapat pembagian peran dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Disamping itu agar terjadi efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan perumahan dan permukiman, baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan, pelaksanaannya harus dilakukan secara terpadu (baik sektornya, pembiayaannya, maupun pelakunya) dan dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan dan penataan ruang yang berlaku.

Secara rinci pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk sub urusan kawasan permukiman serta perumahan dan kawasan permukiman kumuh dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9 Pembagian Urusan Pemerintah terkait Penanganan Permukiman Kumuh

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KOTA
1	Kawasan Permukiman	a. Penetapan sistem kawasan permukiman. b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai	a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.

lima ...

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KOTA
		lima belas) ha atau lebih.	dengan di bawah 15 (lima belas) ha.	b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh			Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada kabupaten/kota .
3	Permukiman	a. Penetapan sistem pengembangan infrastruktur permukiman secara nasional. b. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis nasional.	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah provinsi	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kabupaten/kota

2.4.3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/Prt/M/2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Kriteria kekumuhan ditinjau dari:

a. Bangunan gedung
b. Jalan lingkungan;
c. Penyediaan air minum;
d. Drainase lingkungan;
e. Pengelolaan air limbah;
f. Pengelolaan persampahan; dan
g. Proteksi kebakaran.

Tabel 2.10 ...

Tabel 2.10 Indikator dan Kriteria Permukiman Kumuh

NO	INDIKATOR KUMUH	KRITERIA
1	Bangunan gedung	a. Ketidakteraturan bangunan; b. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau c. Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
2	Jalan Lingkungan	a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman; dan/atau b. Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
3	Penyediaan Air Minum	a. akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.
4	Drainase lingkungan	a. Drainase lingkungan tidak tersedia; b. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau c. Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
5	Pengelolaan air limbah	a. Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau b. Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
6	Pengelolaan persampahan	a. Prasarana dan Sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau b. Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
7	Proteksi kebakaran	a. Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan b. Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.

Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan pengelompokan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis. Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, terdiri atas:

1. Di atas air;
2. Di tepi air;
3. Di dataran rendah;
4. Di perbukitan; dan/atau
5. Di daerah rawan bencana.

Tabel 2.11 ...

Tabel 2.11 Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

NO	TIPOLOGI	LOKASI	KETERANGAN
1	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di atas air, baik daerah pasang surut, rawa, sungai ataupun laut.	 Pemukiman kumuh di atas air di Banjarmasin
2	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada tepi badan air (sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya), namun berada di luar Garis Sempadan Badan Air	 Permukiman kumuh di tepi air di Jakarta
3	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng < 10%.	 Permukiman kumuh di dataran rendah di Jakarta
4	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran Tinggi dengan kemiringan lereng > 10 % dan < 40%	 Permukiman kumuh di perbukitan di Jayapura
5	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terletak di daerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam tanah longsor, gempa bumi dan banjir.	 Permukiman kumuh di daerah rawan bencana di Yogjakarta

2.4.4 Qanun Kota Sabang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas

Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Qanun ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Qanun ini bertujuan untuk:

a. Mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dalam mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya;
b. Meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Kriteria perumahan dan permukiman kumuh berdasarkan berdasarkan Qanun Kota Sabang Nomor 11 Tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.12. Kriteria perumahan dan permukiman kumuh

NO	INDIKATOR	KRITERIA	PENJELASAN
1	Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan bangunan	• Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau • Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kaveling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep

orientasi ...

NO	INDIKATOR	KRITERIA	PENJELASAN
			orientasi lingkungan, dan wajah jalan.
		b. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau	• Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau • Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL.
		c. Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.	Persyaratan tata bangunan terdiri atas: • Peruntukan lokasi dan intensitas bangunan gedung; • Arsitektur bangunan gedung; • Pengendalian dampak lingkungan;

NO	INDIKATOR	KRITERIA	PENJELASAN
			• Rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL); dan • Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum. Persyaratan keandalan bangunan gedung, terdiri atas: • Persyaratan keselamatan bangunan gedung; • Persyaratan kesehatan bangunan gedung; • Persyaratan kenyamanan bangunan gedung; dan • Persyaratan kemudahan bangunan gedung.
	Jalan Lingkungan	a. Jaringan jalan lingkungan tidak	Merupakan kondisi dimana jaringan jalan tidak

melayani ...

NO	INDIKATOR	KRITERIA	PENJELASAN
		melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman;	terhubung antar dan/atau dalam suatu lingkungan perumahan atau permukiman.
		b. Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.	Merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan yang meliputi retak dan perubahan bentuk.
	Penyediaan Air Minum	a. Akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau	Merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memenuhi syarat kualitas sesuai peraturan yang berlaku.
		b. Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.	Merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 (enam puluh) liter/orang/hari.
	Drainase Lingkungan	a. Drainase lingkungan tidak tersedia;	Merupakan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
		b. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau	Merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali setahun.

c. Kualitas ...

NO	INDIKATOR	KRITERIA	PENJELASAN
		c. Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.	Merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.
	Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau	Merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.
		b. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.	Merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana:

NO	INDIKATOR	KRITERIA	PENJELASAN
			• Kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; atau • Tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat
	Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis;	Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut: • Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; • Tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (*reduce, reuse, recycle*) pada skala lingkungan;

Sarana ...

NO	INDIKATOR	KRITERIA	PENJELASAN
			• Sarana pengangkut sampah pada skala lingkungan; dan • Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.
		b. Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.	Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: • Pewadahan dan pemilahan domestik; • Pengumpulan sampah lingkungan; • Pengangkutan sampah lingkungan;

NO	INDIKATOR	KRITERIA	PENJELASAN
			• Pengolahansampah lingkungan.
	Proteksi Kebakaran	a. Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia merupakan kondisi dimana tidak tersedianya: • Pasokan air dari sumber alam maupun buatan; • Jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran; • Sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada Instansi pemadam kebakaran; dan/atau • Data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses.

b. Sarana ...

NO	INDIKATOR	KRITERIA	PENJELASAN
		b. Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.	Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia antara lain terdiri atas: • Alat Pemadam Api Ringan (APAR); • Kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau • Mobil tangga sesuai kebutuhan.

Perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan melalui tahap:

a. persiapan;
b. survey
c. penyusunan data dan fakta;
d. analisis;
e. penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Penyusunan Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh paling sedikit memuat:

a. profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
b. rumusan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
c. rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
d. rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
e. rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
f. rumusan perencanaan penyediaaan tanah dan penyediaan rumah;
g. rumusan rencana investasi dan pembiayaan; dan
h. rumusan peran pemangku kepentingan.

Rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh memuat prinsip desain universal. Prinsip desain universal meliputi:

a. Kesetaraan penggunaan ruang;
b. Keselamatan dan keamanan bagi semua;
c. Kemudahan akses tanpa hambatan;
d. Kemudahan akses informasi;
e. Kemandirian penggunaan ruang;

f. Efisiensi ...

f. Efisiensi upaya pengguna; dan
g. Kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis.

Prinsip desain universal mempertimbangkan prinsip kebutuhan seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil.

Pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas tanah. Pola penanganan direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pola penanganan meliputi:

a. Pemugaran; merupakan perbaikan rumah, prasarana, sarana dan/atau utilitas umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.
b. Peremajaan; dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum.
c. Pemukiman kembali; dilakukan melalui pembangunan dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana dan/atau utilitas umum pada lokasi baru yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pelaksanaan pemugaraan, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali dilakukan dengan memperhatikan antara lain:

a. Hak keperdataan masyarakat terdampak;
b. Kondisi ekologis lokasi; dan
c. Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.

Pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh harus mempertimbangkan tipologi kumuh dengan ketentuan:

a. Dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air;
b. Dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah;
c. Dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran, maka

penanganan ...

penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;

d. Dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kelerengan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;

e. Dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kawasan rawan bencana, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.

BAB III

PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA SABANG

3.1 Sebaran Permukiman Kumuh, Peta Deliniasi Kawasan Kumuh, Lokasi Permukiman Kumuh Dan Luasan Verifikasi

Sebaran permukiman kumuh Kota Sabang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kota Sabang No. 650/351/2020 Tanggal 26 Maret Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Sabang. Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Sabang tersebar di 4 Kawasan dengan total luasan kumuh sebesar 123,713 Ha. Sebaran kawasan kumuh Kota Sabang dapat dilihat pada table berikut

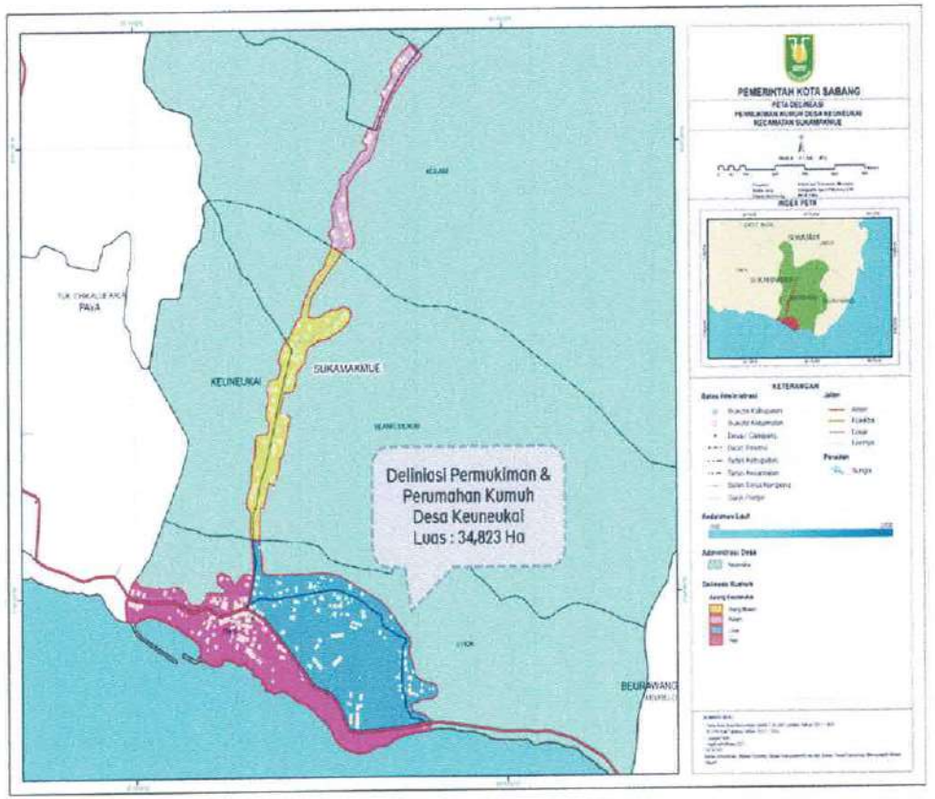

Gambar 3.1 Deliniasi Permukiman dan Perumahan Kumuh Gampong Keuneukai

Tabel 3.1 ...

Table 3.1 Sebaran Permukiman Kumuh Kota Sabang Berdasarkan SK No. 650/351/2020

NO	KECAMATAN	KAWASAN	GAMPONG	JURONG	LUAS DELINIASI KUMUH (HA)	TOTAL DELINIASI KAWASAN (HA)
1	Sukajaya	Kawasan Paya - Keuneukai	Keuneukai	Lhok	16,002	57,495
				Pasi	10,809	
				Kulam	2,52	
				Blang Mukim	5,492	
			Paya	Pante Jaya	4,457	
				Tgk. Chok Alue Kala	15,088	
				Cot Preh	1,894	
				Ditremon	1,233	
2	Sukajaya	Kawasan Beurawang	Beurawang	Teupin Bada	8,348	15,279
				Meurelo	6,931	
3	Sukajaya	Kawasan Jaboi	Jaboi	Meunasah Tuha	9,322	23,928
				Tgk. Di Jaboi	5,133	
				Lamkuta	3,89	
				Gampong Baroe	5,583	
4	Sukakarya	Kawasan Krueng Raya	Krueng Raya	Batu Singa Berfakta	9,24	27,011
				Lhok Drien	3,039	
				Mustika Kolam Bermata	7,161	
				Teupin Cirik	7,571	
						123,713 Ha

Gambar 3.2 ...

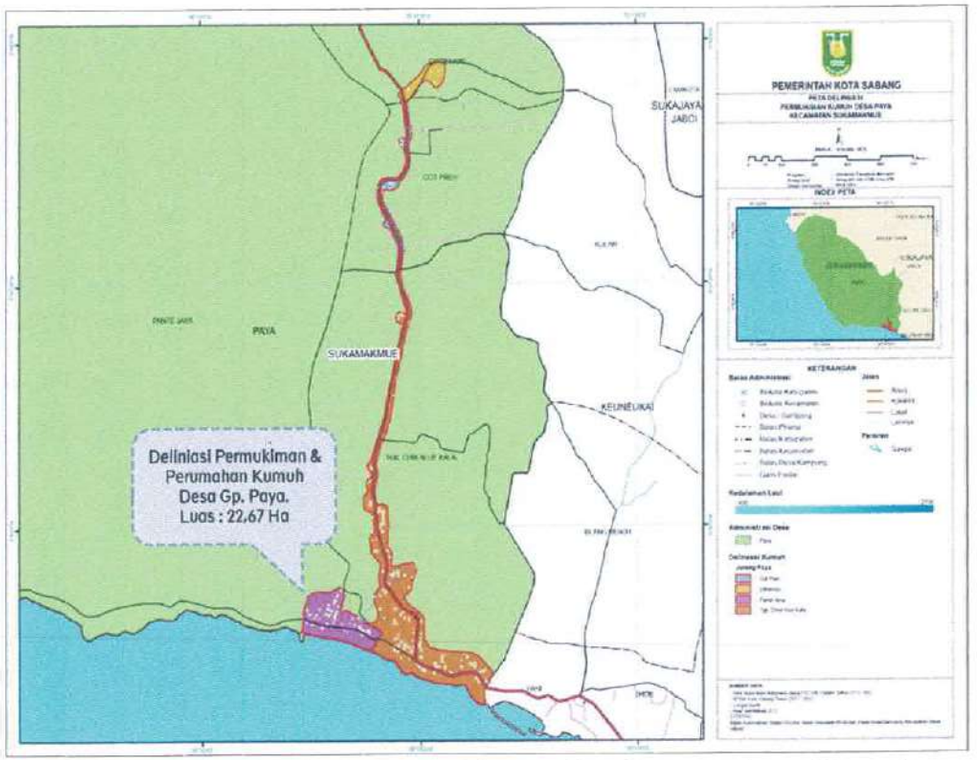

Gambar 3.2 Deliniasi Permukiman dan Perumahan Kumuh Gampong Paya

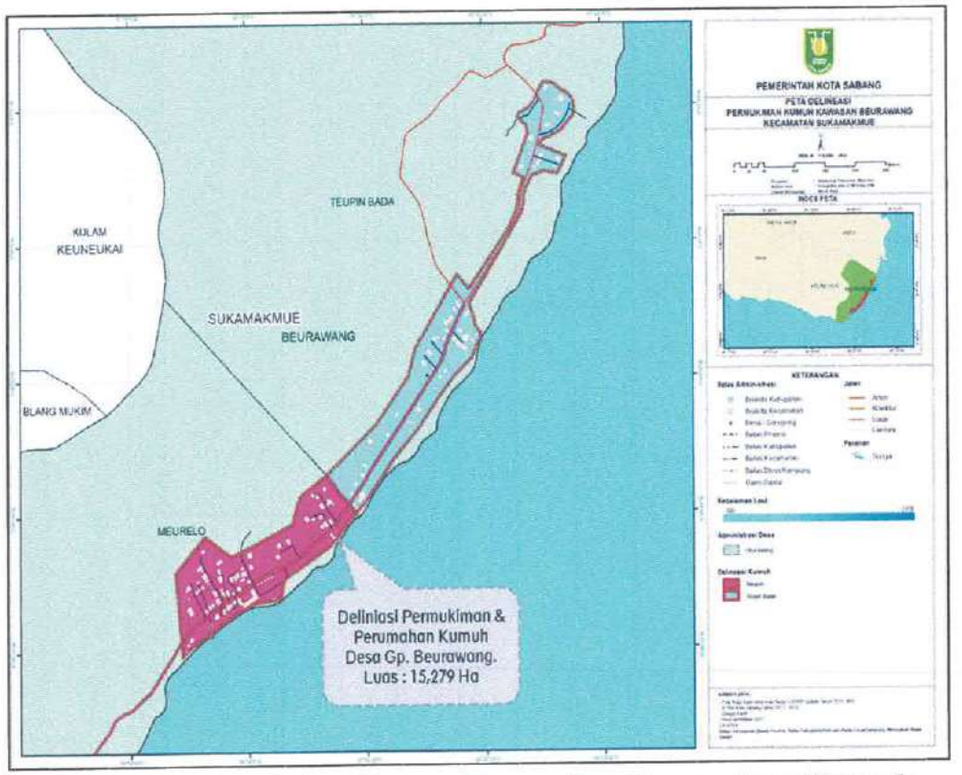

Gambar 3.3 Deliniasi Permukiman dan Perumahan Kumuh Gampong Beurawang

Gambar 3.4 ...

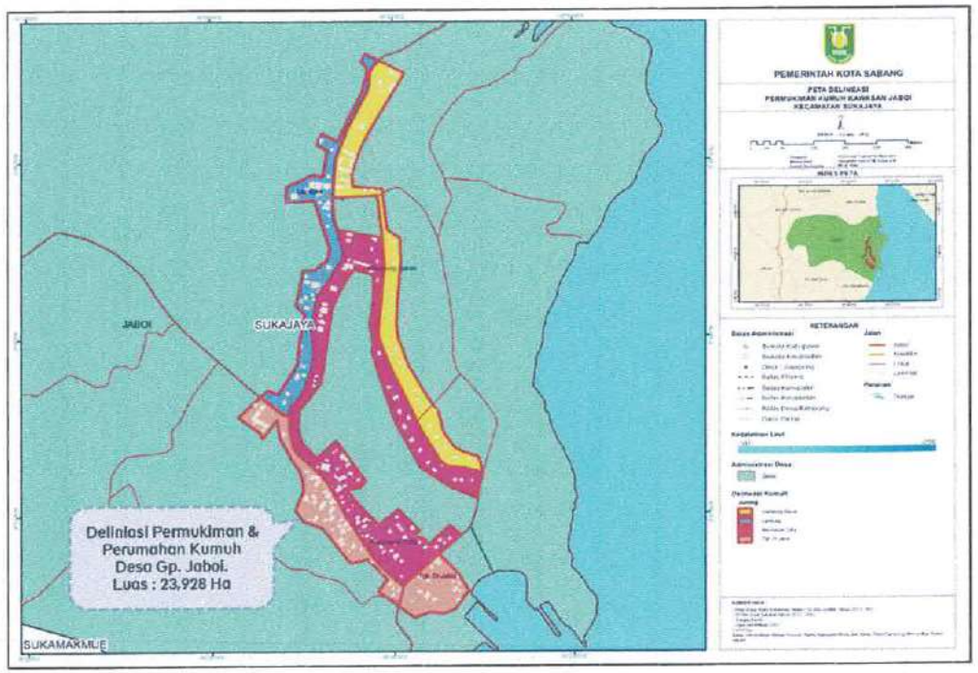

Gambar 3.4 Deliniasi Permukiman dan Perumahan Kumuh Gampong Jaboi

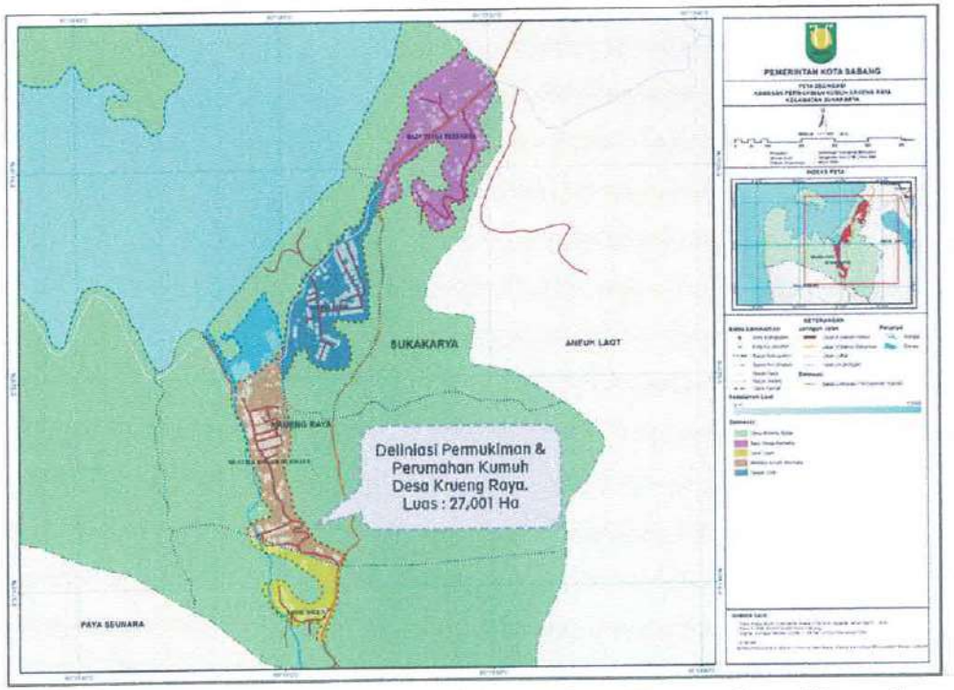

Gambar 3.5 Deliniasi Permukiman dan Perumahan Kumuh Gampong Krueng Raya

Selanjutnya dilakukan tinjauan lapangan secara menyeluruh dilokasi perumahan dan permukiman kumuh Kota Sabang berdasarkan baseline awal yang menjadi dasar pembentukan SK. Berdasarkan verifikasi dan sinkronasi yang dilakukan, sebaran lokasi perumahan dan permukiman kumuh Kota Sabang SK Walikota, berikut ditampilkan detail hasil verifikasi:

Tabel 3.2 ...

Table 3.2 Hasil Verifikasi Luasan Permukiman dan Perumahan Kumuh Kota Sabang

No	Kecamatan	Kawasan	Kelurahan/Gampong	Luas SK (Ha)	Luas Verifikasi (Ha)	Tingkat Kekumuhan
1	Sukamakmue	Paya-Keuneukai	Paya	22,672	22,672	Kumuh Ringan
2	Sukamakmue		Keuneukai	34,823	34,823	Kumuh Ringan
3	Sukamakmue	Beurawang	Beurawang	15,279	15,279	Kumuh Ringan
4	Sukajaya	Jaboi	Jaboi	23,928	23,928	Kumuh Ringan
5	Sukakarya	Krueng Raya	Krueng Raya	27,011	27,011	Kumuh Ringan
				123,713	123,713	

3.2 Profil Kawasan Permukiman Kumuh Dan Gambaran Kelembagaan Lokal

3.2.1 Profil Kawasan Permukiman Kumuh

Profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Sabang disusun berdasarkan pendataan Data baseline kumuh. Data baseline adalah data 100-0-100, merupakan data yang terkait akses air minum (100 kiri), pengurangan kawasan kumuh (0) dan yang terkait dengan akses sanitasi yang layak (100 kanan). Data tersebut terdiri dari data fisik dan non fisik terkait dengan 7 indikator kumuh.

Data fisik mencakup :

1) Kondisi bangunan hunian, meliputi keteraturan bangunan, kepadatan bangunan dan kondisi fisik bangunan.
2) Jalanan lingkungan.
3) Drainase lingkungan.
4) Pembuangan air limbah.
5) Penyediaan air minum/baku.
6) Pengelolaan persampahan.
7) Pengamanan Bahaya Kebakaran

Data non fisik bangunan meliputi :

1) Legalitas Pendirian Bangunan

2). Kepadatan ...

2) Kepadatan Penduduk
3) Mata Pencaharian Penduduk
4) Pembangunan Daya Listrik
5) Fasilitas Pelayanan Kesehatan
6) Fasilitas Pelayanan Pendidikan

Metode pendataan baseline melalui FGD digunakan pada saat penggalian data awal di tingkat desa/kelurahan yang melibatkan unsur masyarakat desa/kelurahan tersebut. FGD lebih detail juga akan dilakukan di tingkat basis (komunitas kecil) untuk menggali data utama. Metode pendataan baseline melalui wawancara, digabungkan dengan teknik FGD dimana prosesnya dilakukan dengan wawancara khususnya kepada warga dan informan kunci yang berada di tingkat basis dusun. Metode pendataan baseline melalui transek, akan dilakukan terutama untuk verifikasi dan klasifikasi data hasil FGD tingkat basis, terutama secara visual maupun verbal kepada masyarakat langsung atau lokasi sasaran.

Tabel 3.3 Profil Kumuh Gampong Krueng Raya.

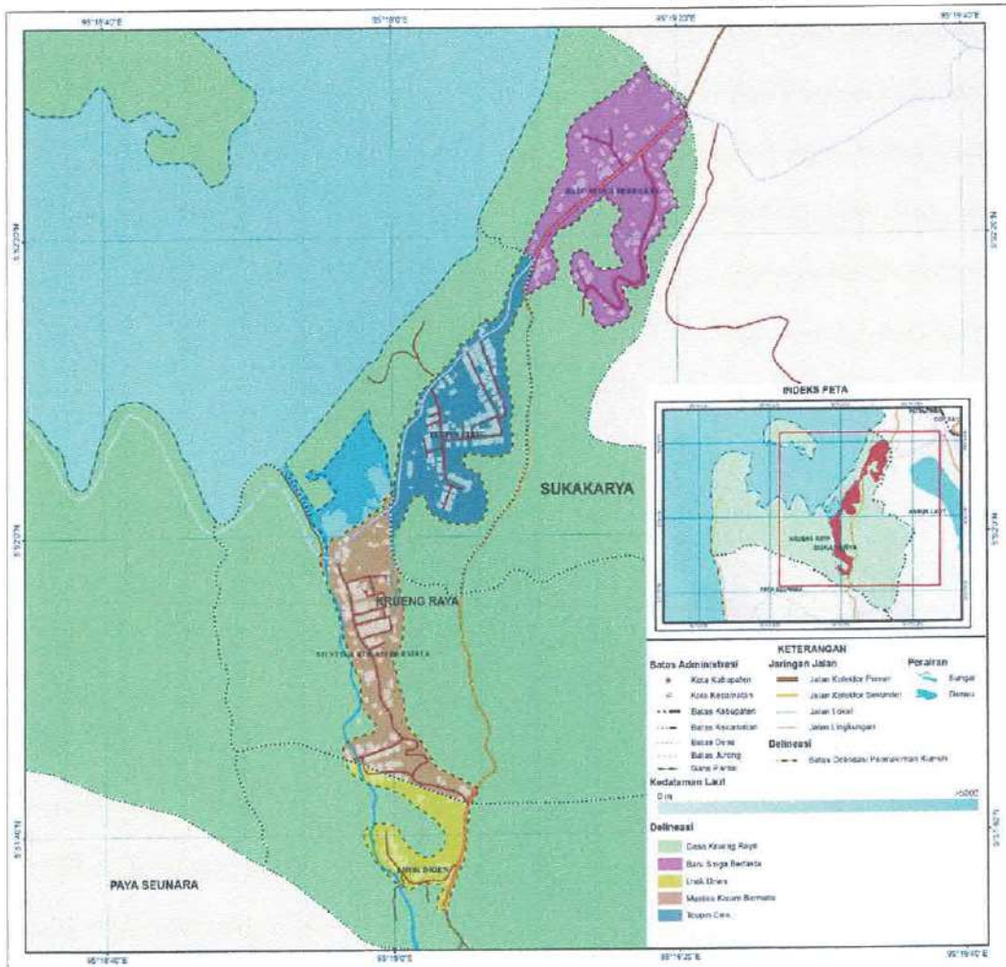

INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH		
Kawasan Kelurahan Kecamatan Kota Provinsi	Krueng Raya Krueng Raya Sukakarya Sabang Aceh	No	Nama Dusun	Luas Kumuh (Ha)
Luas Deliniasi Kumuh	27,011	1	Batu Singa Berfakta	9,24
Koordinat Latitude Longtitude		2	Lhok Drien	3,04
Jumlah Bangunan Jumlah Penduduk Jumah KK	332 Unit 1.220 Jiwa 294 KK	3	Mustika Kolam Bermata	7,16
Kategori, Tipologi dan Karakteristik Permukimah Kumuh		4	Teupin Cirik	7,57
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan		Total	27,011
Tipologi Kumuh	Permukiman Kumuh Pesisir Pantai			
Karakteristik	Kawasan Gampong Nelayan			

Tidak ...

				Permasalahan Utama				
				• Tidak tersedia sarana dan prasarana persampah yang memadai dan sesuai teknis • Kondisi jalan lingkungan belum memadai (<2 M) • Kondisi drainase lingkungan yang buruk Sistem pengolahan limbah yang tidak sesuai teknis.				
PERTIMBANGAN LAIN	**BANGUNAN**		**LEGALITAS & TATUS TANAH**	**SOSIAL EKONOMI**			**JALAN LINGKUNGAN**	
	Jumlah Bangunan	332 Unit	Bangunan Ber IMB	86 Rumah Tangga	Jumlah penduduk	1220 Jiwa	Total jaringan jalan	6.852 Meter
	Jumlah RTLH	82 Unit	Bangunan tidak memiliki IMB	246 Rumah Tangga	Jumlah KK	294 KK	Jalan rusak	2.542 Meter
	Ketidakteraturan Bangunan	99 Unit			Jumlah MBR	180 KRT	Jalan belum memadai (<2 m)	
	Kepadatan Bangunan	0	Bangunan tidak sesuai peruntukan				Kebutuhan jalan baru	2001 Meter

Air Minum ...





AIR MINUM		DRAINASE		PENGOLAHAN LIMBAH	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			KONDISI KEBAKARAN	
Jumlah KK	294 KK	Panjang drainase eksisting	3.600 Meter	Jumlah KK	294 KK	Jumlah KK	294 KRT	Jumlah KK	294 KK
Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum	14 KK	Panjang drainase ideal	4.945 Meter	Sistem pengolahan air limbah tidak sesuai teknis	16 KK	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	294 KK	Ketidakter-sediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	108 Unit
Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	80 KK	Luas genangan	2,00 Ha	Prasarana dan Sarana Penge-lolaan Air Lim-bah Tidak Sesuai dengan Persya-ratan Teknis	81 KK	Sistem Penge-lolaan Persam-pahan yang tidak sesuai Standar Teknis	285 KK	Ketidakters ediaan Sarana Proteksi Kebakaran	332 Unit

Drainase ...

		Drainase rusak	1.754 Meter						
									

Kondisi ...

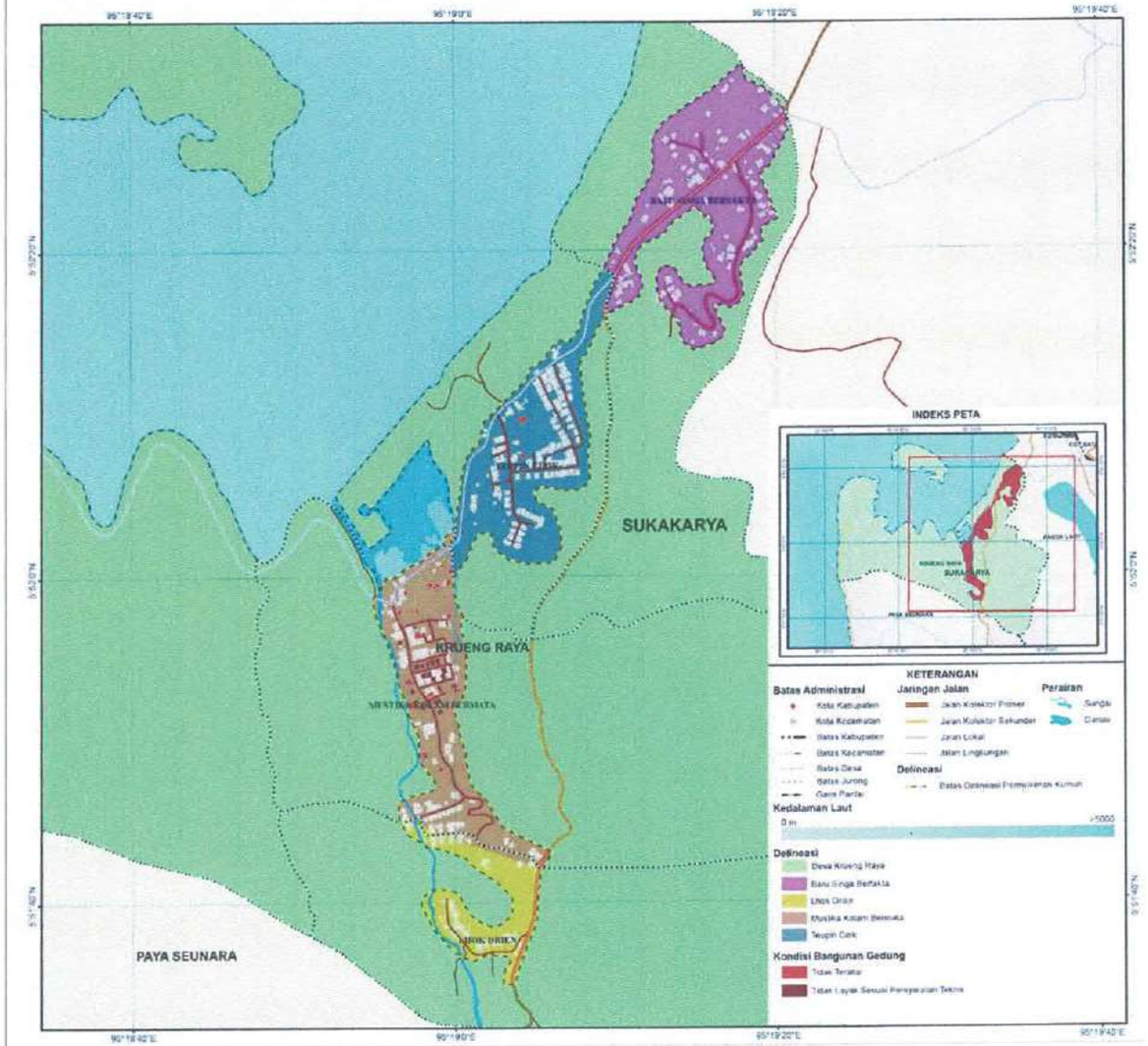

KONDISI BANGUNAN GEDUNG GP. KRUENG RAYA







Jumlah Bangunan	294 Unit
Jumlah RTLH	22 Unit
Ketidakteraturab Bangunan	39 Unit
Kepadatan Bangunan	-

Kondisi ...

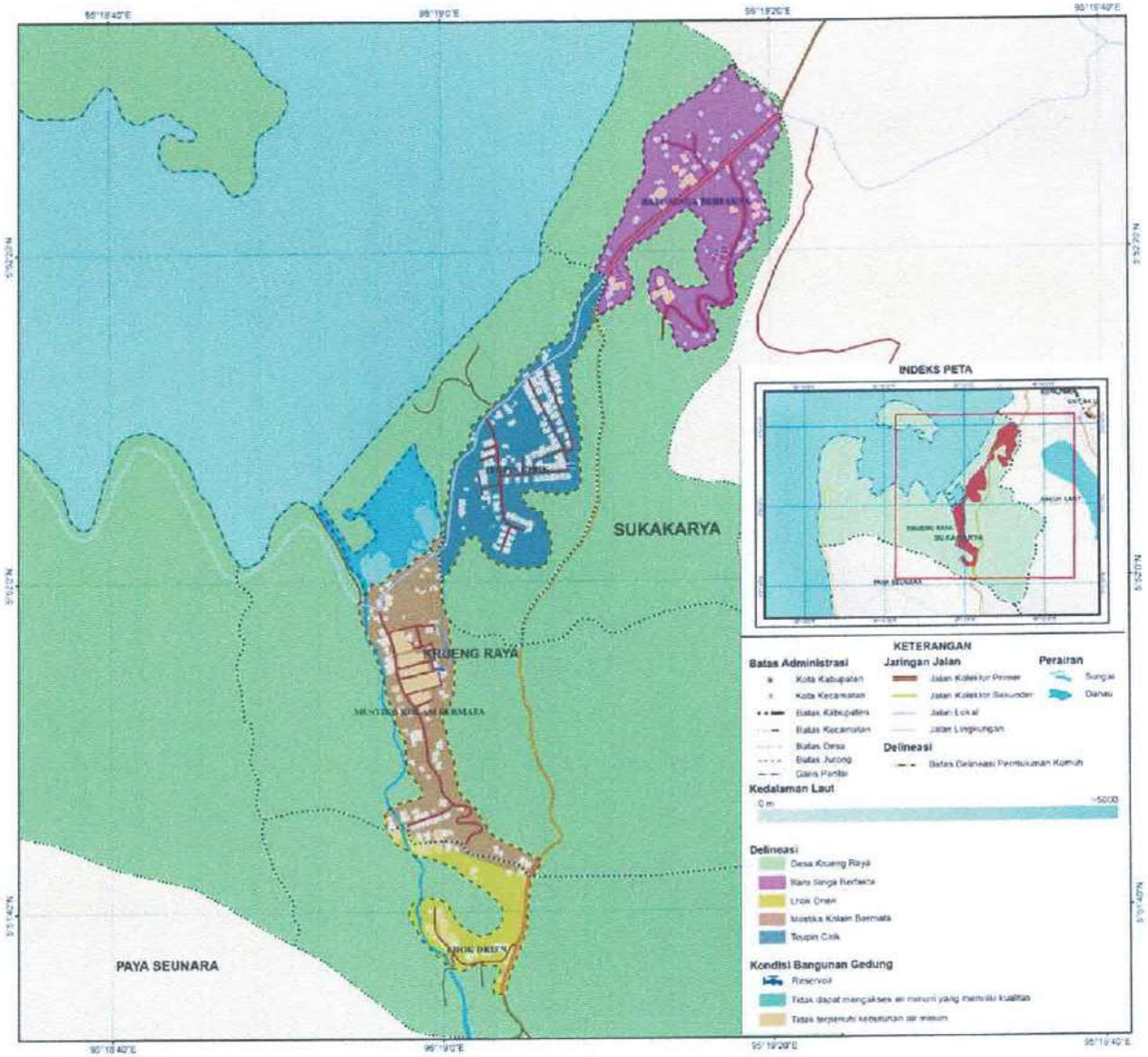

KONDISI JALAN LINGKUNGAN GP. KRUENG RAYA





Total jaringan jalan	6.852,00 Meter
Jalan rusak	2.542,00 Meter
Kebutuhan jalan baru	2001,00 Meter

Kondisi ...

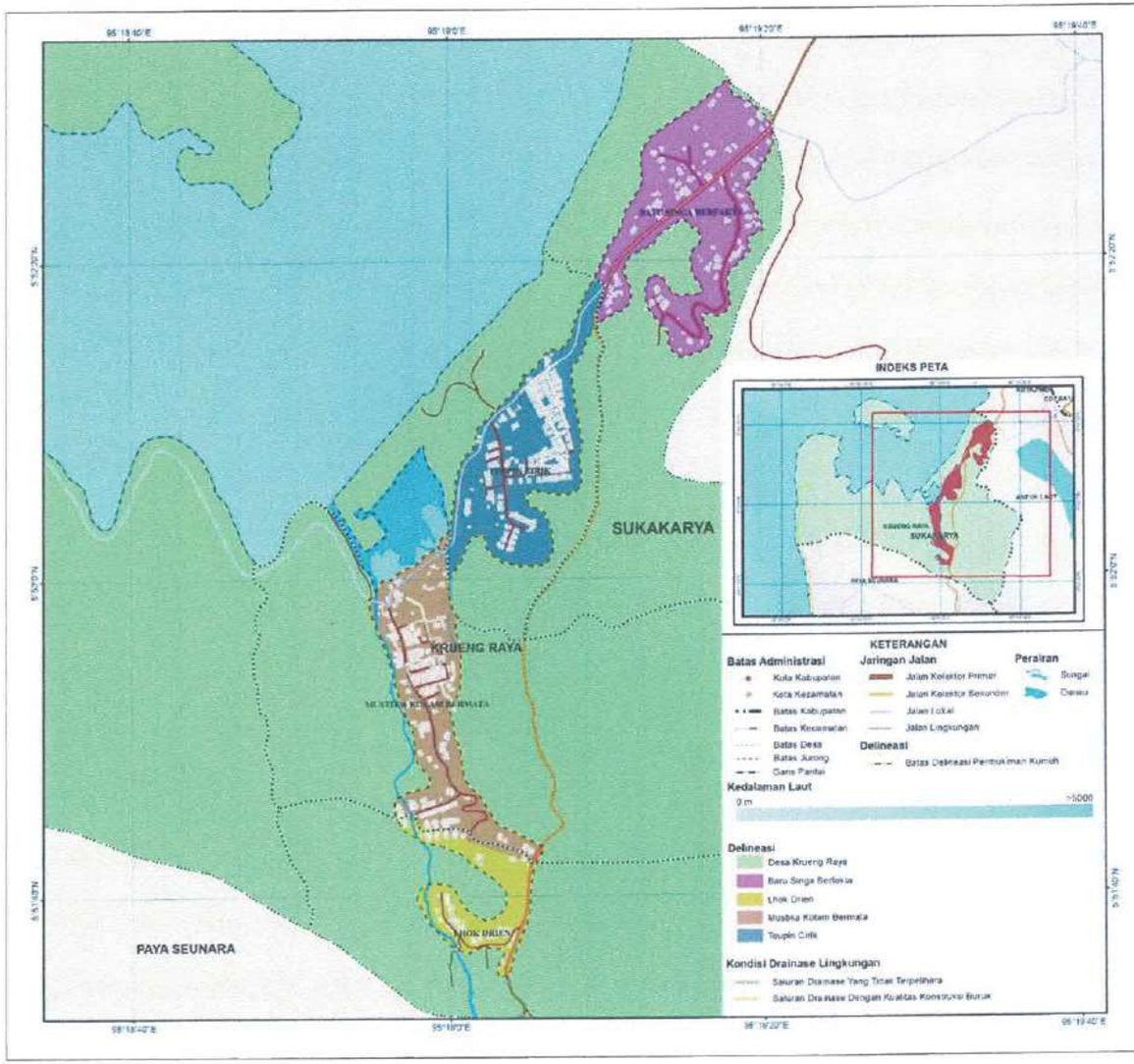

KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM GP. KRUENG RAYA

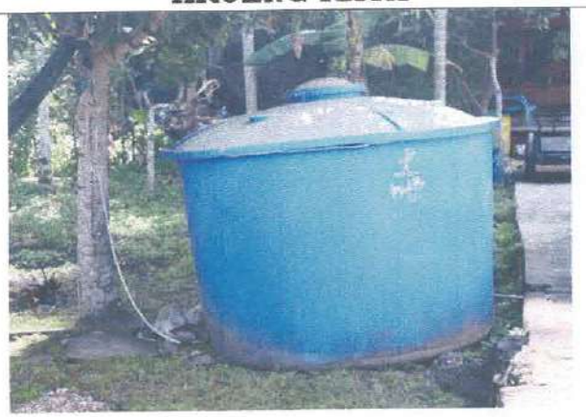



Jumlah KK	294 KK
Ketidak tersediaan Akses Aman Air Minum	14 KK
Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	80 KK

Kondisi ...

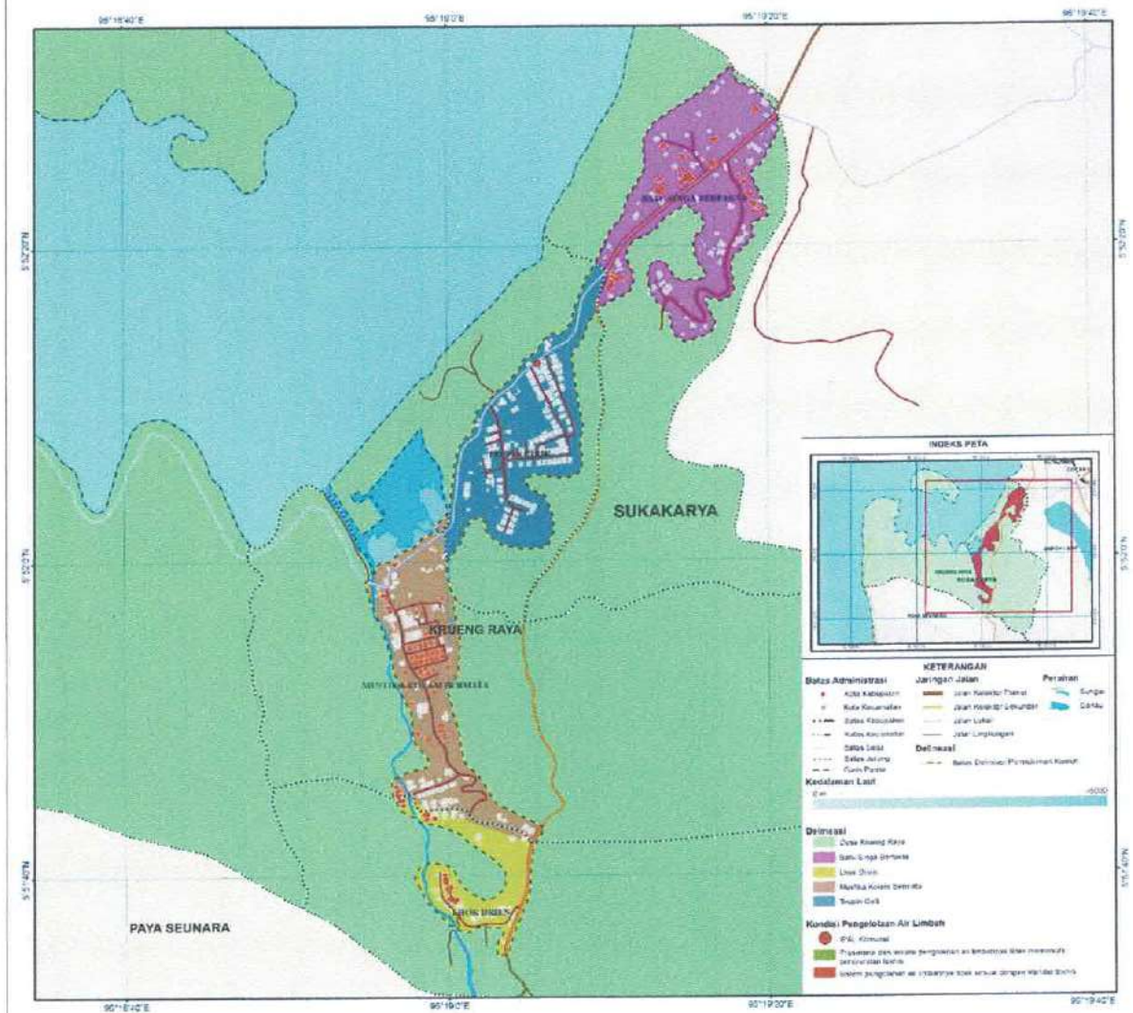

KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN GP KRUENG RAYA







Panjang drainase eksisting	3.600 Meter
Panjang drainase ideal	4.945 Meter
Luas genangan	2,00 Ha
Drainase rusak	1.756 Meter

Kondisi ...

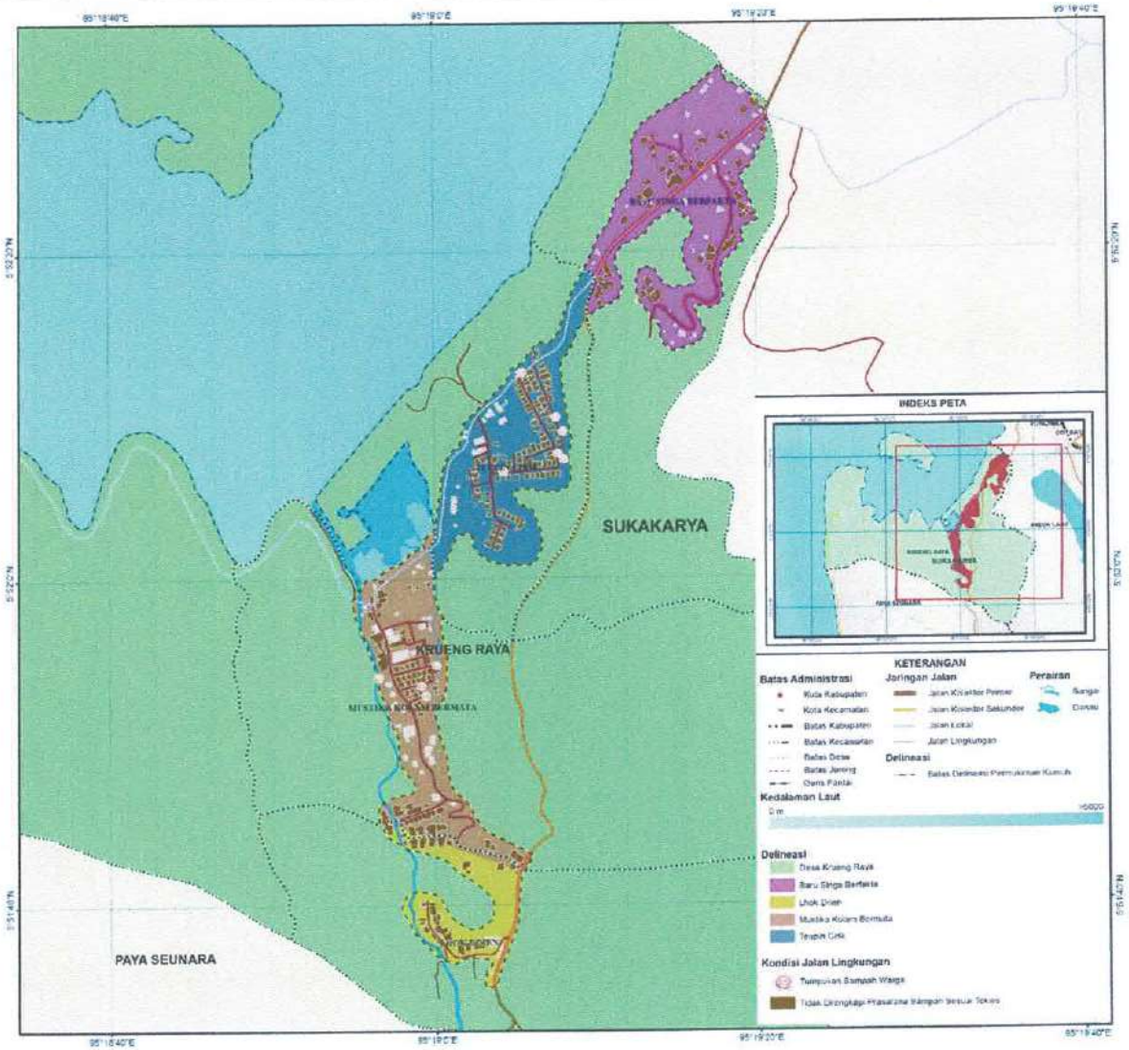

KONDISI PENGOLAHAN LIMBAH GP. KRUENG RAYA







Jumlah KK	294 KK
Sistem pengolahan air limbah tidak sesuai teknis	16 KK
Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	81 KK

Kondisi ...

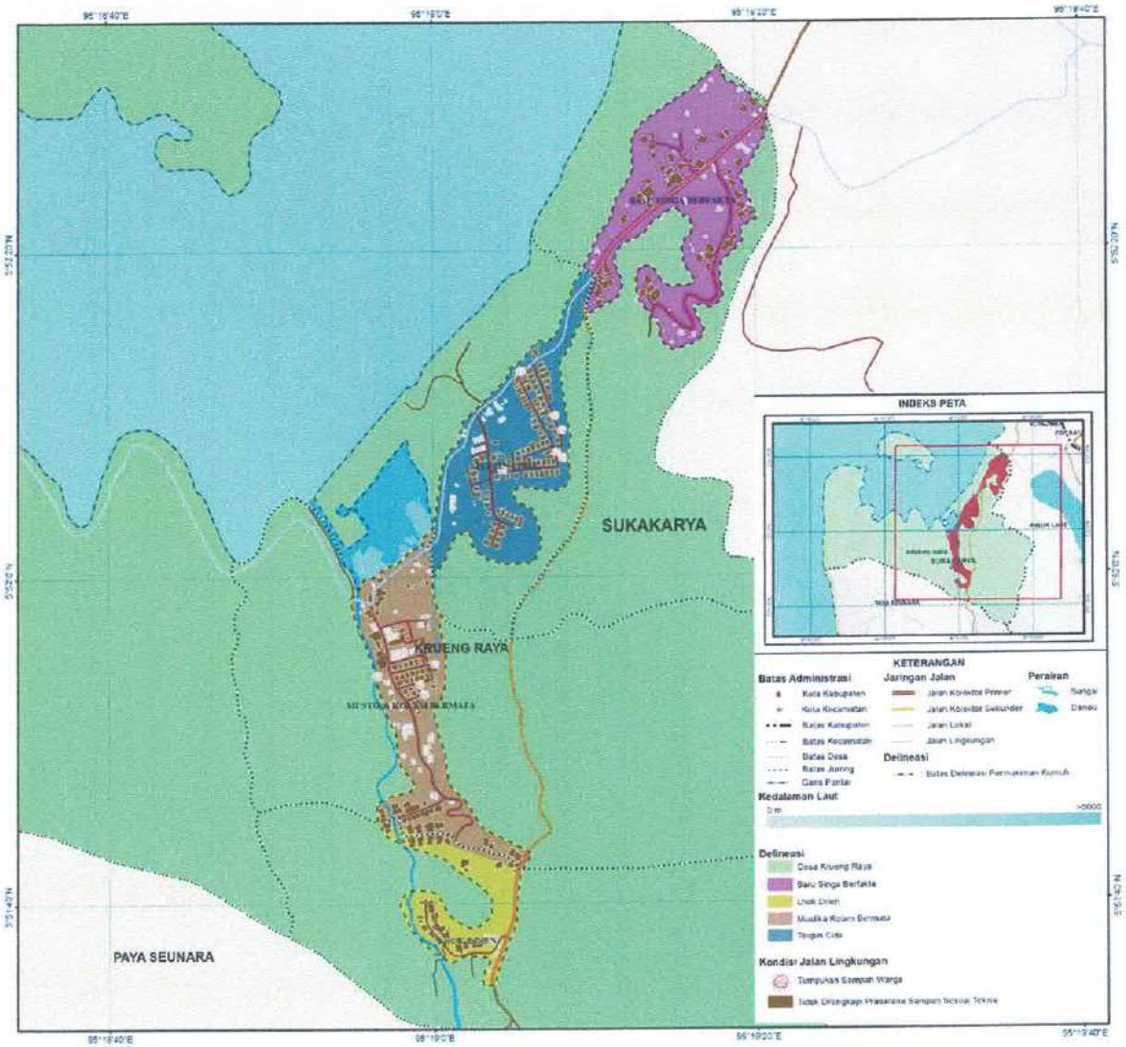

KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN GP. KRUENG RAYA





Jumlah KK	294 KK
Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	294 KK
Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	295 KK

Kondisi ...

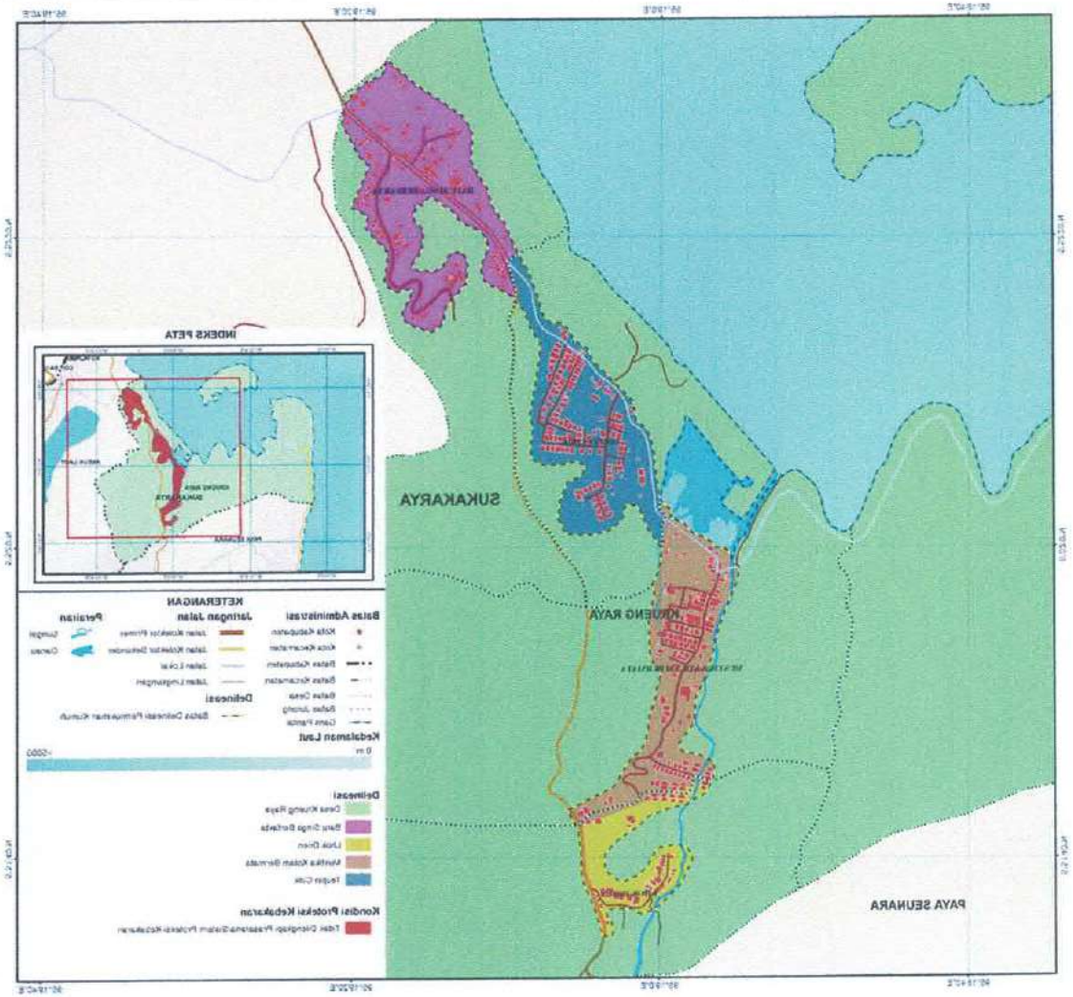

M

KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN GP. KRUENG RAYA

Jumlah KK	294 KK
Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	108 Unit
Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	332 Unit

DATA ...

DATA BASELINE NUMERIK KUMUH GAMPONG KRUENG RAYA

Hasil pendataan baseline numerik Kumuh Gampong Krueng Raya berdasarkan 7 indikator kumuh menurut permen PUPR No.14 Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.4. Dapat disimpulkan nilai skoring Kumuh Gampong Krueng Raya adalah 16, yang tergolong dalam kategori kumuh ringan.

Tabel 3.4 Data Baseline Numerik Kumuh Gampong Krueng Raya

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH	Luas SK	27,01	Ha
Kab/Kota	: SABANG	Luas Verifikasi	27,01	Ha
Kecamatan	: SUKAKARYA	Jumlah Bangunan	332	Unit
Kawasan	: KRUENG RAYA	Jumlah Penduduk	1.220	Jiwa
Kelurahan	: KRUENG RAYA	Jumlah KK	294	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	39,00	Unit	11,75%	0
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	22,00	Unit	6,63%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				0,00%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1.401,00	Meter	16,98%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	2.892,00	Meter	35,04%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				17,52%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	14,00	KK	4,76%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	80,00	KK	27,21%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				13,61%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	2,00	Ha	7,40%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	1.845,00	Meter	27,20%	1
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	1.756,00	Meter	35,51%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				20,90%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	16,00	KK	5,44%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	81,00	KK	27,55%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				13,78%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	294,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	285,00	KK	96,94%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				98,47%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	108,00	Unit	32,53%	1
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	332,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				66,27%	

TOTAL NILAI	21
TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN
RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	32,93%
KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN

DS001-00000

9,24	Ha
9,24	Ha
123	Unit
293	Jiwa
65	KK

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1,00	Unit	0,81%	0
-	Ha	0,00%	0
3,00	Unit	2,44%	0
		0,00%	
151,00	Meter	5,30%	0
1.420,00	Meter	49,81%	1
		24,90%	
1,00	KK	1,54%	0
15,00	KK	23,08%	0
		0,00%	
-	Ha	0,00%	0
-	Meter	0,00%	0
357,00	Meter	77,11%	5
		25,70%	
4,00	KK	6,15%	0
15,00	KK	23,08%	0
		0,00%	
65,00	KK	100,00%	5
65,00	KK	100,00%	5
		100,00%	
58,00	Unit	47,15%	1
123,00	Unit	100,00%	5
		73,58%	

TOTAL NILAI	22
TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN
RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	32,03%
KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%

DS003-00000

3,04	Ha
3,04	Ha
63	Unit
278	Jiwa
82	KK

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
11,00	Unit	17,46%	0
-	Ha	0,00%	0
17,00	Unit	26,98%	1
		8,99%	
350,00	Meter	27,62%	1
247,00	Meter	19,49%	0
		13,81%	
-	KK	0,00%	0
20,00	KK	24,39%	0
		0,00%	
-	Ha	0,00%	0
-	Meter	0,00%	0
302,00	Meter	54,41%	3
		18,14%	
-	KK	0,00%	0
19,00	KK	23,17%	0
		0,00%	
82,00	KK	100,00%	5
82,00	KK	100,00%	5
		100,00%	
-	Unit	0,00%	0
63,00	Unit	100,00%	5
		50,00%	

TOTAL NILAI	20
TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN
RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	27,28%
KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%

DS004-00000

7,16	Ha
7,16	Ha
50	Unit
221	Jiwa
51	KK

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
23,00	Unit	46,00%	1
-	Ha	0,00%	0
2,00	Unit	4,00%	0
		15,33%	
650,00	Meter	29,08%	1
598,00	Meter	26,76%	1
		27,92%	
13,00	KK	25,49%	1
24,00	KK	47,06%	1
		36,27%	
2,00	Ha	27,93%	1
775,00	Meter	87,77%	1
577,00	Meter	28,12%	1
		31,27%	
12,00	KK	23,53%	0
24,00	KK	47,06%	1
		23,53%	
51,00	KK	100,00%	5
42,00	KK	82,35%	5
		91,18%	
50,00	Unit	100,00%	5
50,00	Unit	100,00%	5
		100,00%	

TOTAL NILAI	29
TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN
RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	46,50%
KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%

DS005-00000

7,57	Ha
7,57	Ha
96	Unit
428	Jiwa
96	KK

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
4,00	Unit	4,17%	0
-	Ha	0,00%	0
-	Unit	0,00%	0
		0,00%	
250,00	Meter	18,16%	0
627,00	Meter	33,00%	1
		16,58%	
-	KK	0,00%	0
21,00	KK	21,88%	0
		0,00%	
-	Ha	0,00%	0
570,00	Meter	30,40%	1
520,00	Meter	27,73%	1
		19,38%	
-	KK	0,00%	0
23,00	KK	23,96%	0
		0,00%	
96,00	KK	100,00%	5
96,00	KK	100,00%	5
		100,00%	
-	Unit	0,00%	0
96,00	Unit	100,00%	5
		50,00%	

TOTAL NILAI	18
TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN
RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	26,55%
KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%

Tabel 3.5 ...

Tabel 3.5 Profil Kumuh Gampong Paya

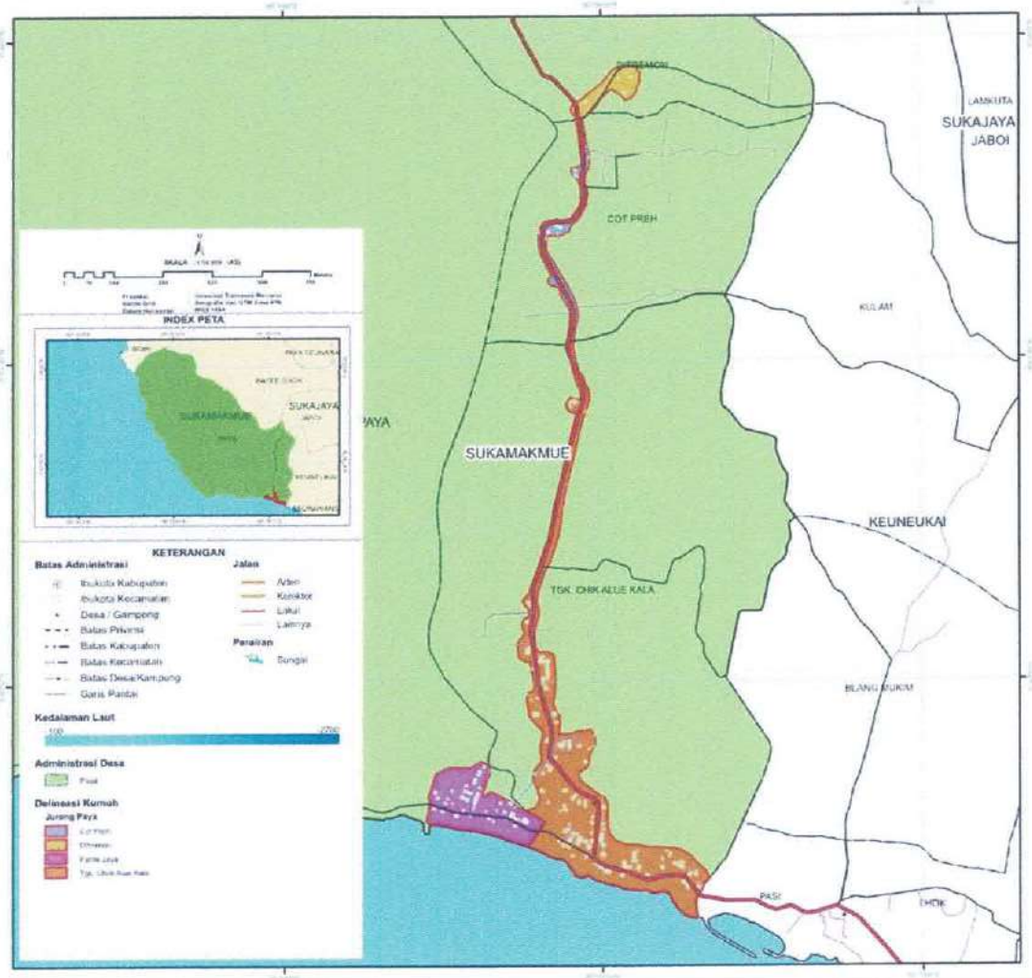

INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH		
Kawasan Kelurahan Kecamatan Kota Provinsi	Paya Keuneukai Paya Sukamakmue Sabang Aceh	No	Nama Dusun	Luas Kumuh (Ha)
Luas Deliniasi Kumuh	22,672	1	Pante Jaya	4,457
		2	Tgk. Chik Alue Kala	15,088
Koordinat Latitude Longtitude		3	Cot Preh	1,894
Jumlah Bangunan	172 Unit	4	Tgk Di Tereumon	1,233
Jumlah Penduduk	606 Jiwa			
Jumah KK	131 KK			
Kategori, Tipologi dan Karakteristik Permukimah Kumuh				
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan		**Total**	**22,672**
Tipologi Kumuh	Permukiman Kumuh Pesisir Pantai			
Karakteristik	Kawasan Gampong Nelayan			

Permasalahan ...

					Permasalahan Utama			
					• Belum adanya sarana dan prasarana persampahan yang memadai dan sesuai teknis • Sarana prasarana proteksi kebakaran belum tersedia • Kondisi drainase lingkungan yang buruk • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum • Ketidakteraturan bangunan			
PERTIMBANGAN LAIN	**BANGUNAN**		**LEGALITAS & STATUS TANAH**		**SOSIAL EKONOMI**		**JALAN LINGKUNGAN**	
	Jumlah Bangunan	172 Unit	Bangunan Ber IMB	0	Jumlah penduduk	606 Jiwa	Total jaringan jalan	18.913,93 Meter
	Jumlah RTLH	37 Unit	Bangunan tidak Ber IMB	172 Unit	Jumlah KK	131 KK	Jalan rusak	2.242,51 Meter
	Ketidakteraturan Bangunan	86 Unit	Rumah Tangga tidak memiliki SHM	28 Unit	Jumlah MBR	128 KK	Jalan belum memadai (<2 m)	0
	Kepadatan Bangunan	0	Bangunan tidak sesuai peruntukan	0			Kebutuhan jalan baru	0

									
AIR MINUM		DRAINASE		PENGOLAHAN LIMBAH		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		KONDISI KEBAKARAN	
Jumlah KK	131 KK	Panjang drainase eksisting	1.518,32 Meter	Jumlah KK	131 KK	Jumlah KK	131 KK	Jumlah Bangunan	172 Unit
Ketersediaan Akses Aman Air Minum	2 KK	Panjang drainase idela	1.518,32 Meter	Sistem pengolahan air limbah tidak sesuai teknis	25 KK	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	131 KK	Ketidakterse diaan Prasarana Proteksi Kebakaran	127 Unit
Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	35 KK	Luas genangan	0	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	25 KK	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	131 KK	Ketidakterse diaan Sarana Proteksi Kebakaran	172 Unit

Drainase ...

		Drainase rusak	424,6 Meter						
		 							

Kondisi ...

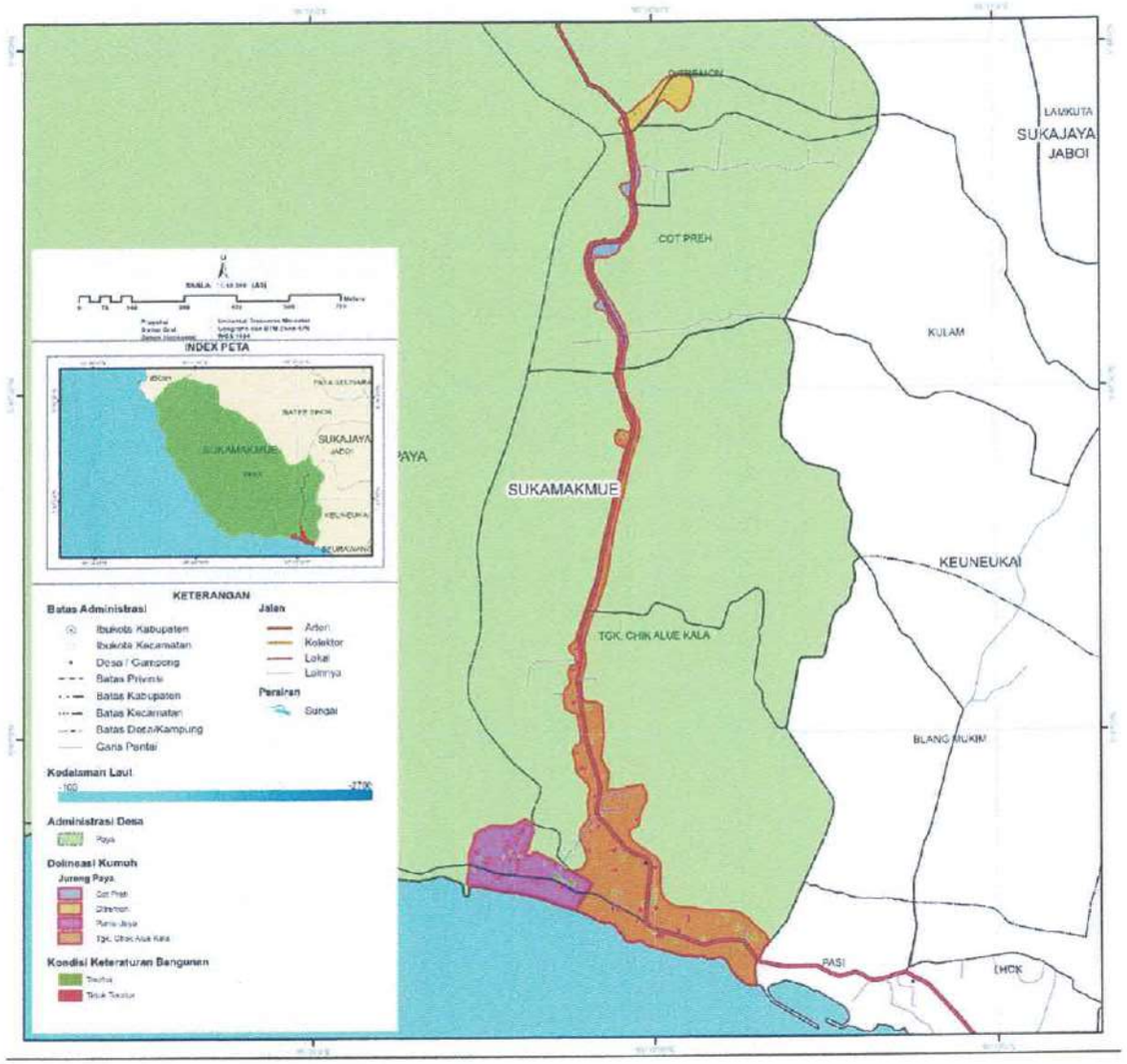

KONDISI BANGUNAN GEDUNG GAMPONG PAYA







Jumlah Bangunan	131 Unit
Jumlah RTLH	37 Unit
Ketidakteraturan Bangunan	86 Unit
Kepadatan Bangunan	-
Ketidaksesuaian dgn Persyaratan Teknis	37 Unit

Kondisi ...

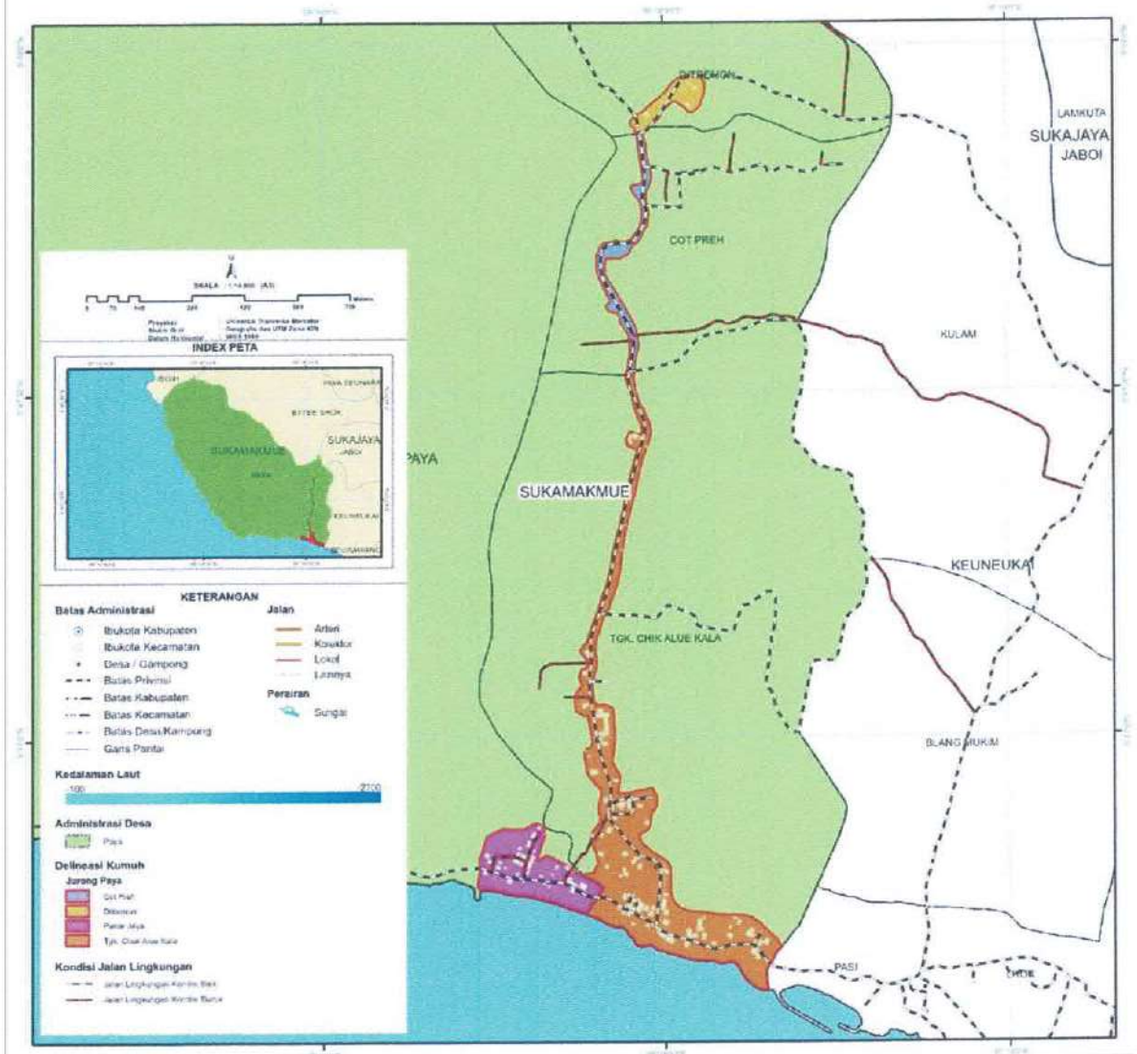

KONDISI JALAN LINGKUNGAN GAMPONG PAYA





Total jaringan jalan	18.913,93 Meter
Jalan rusak	2.242,93 Meter
Kebutuhan jalan baru	0 Meter

Kondisi ...

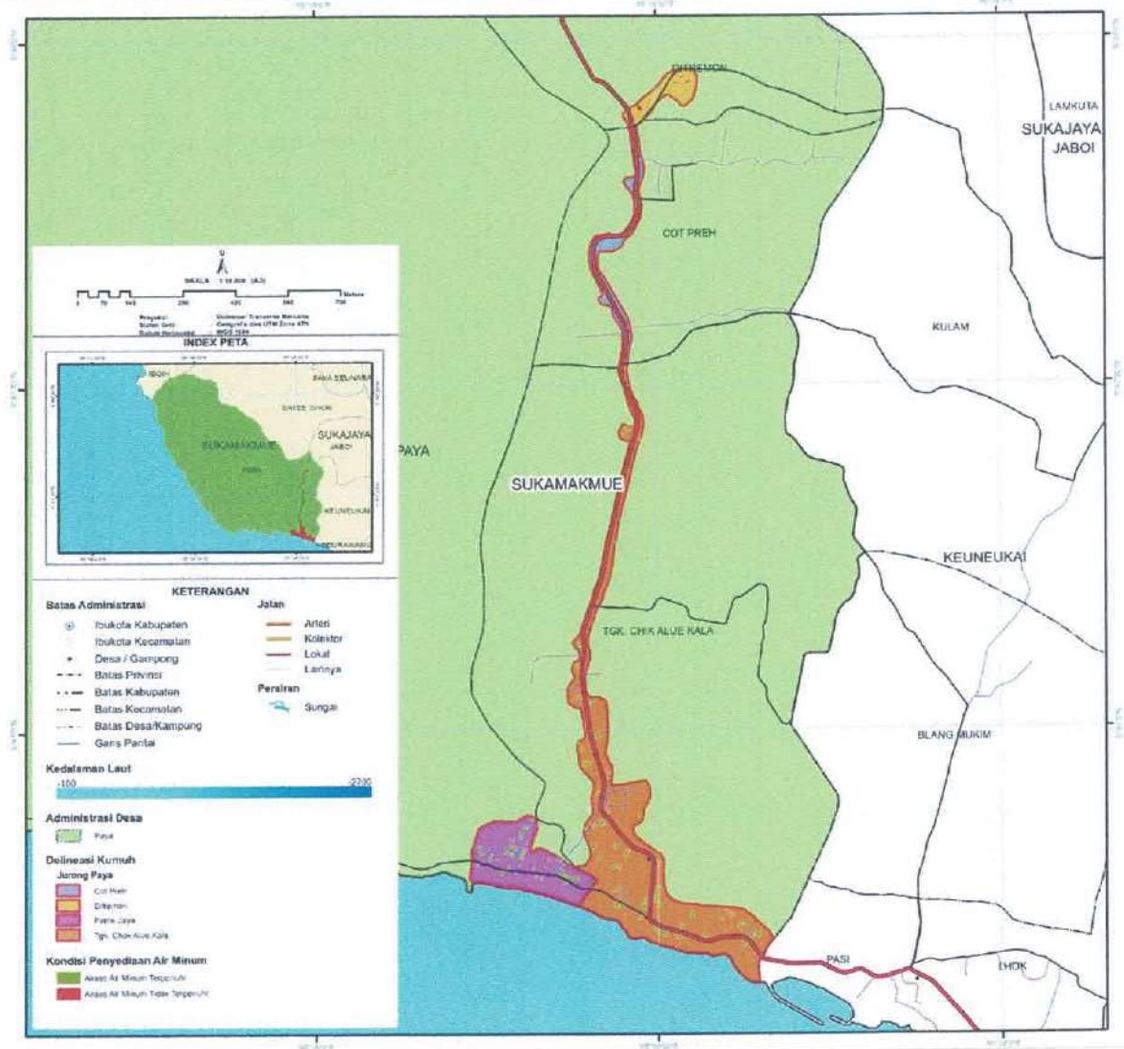

KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM GAMPONG PAYA





Jumlah KRT	131 KK
Ketersediaan Akses Aman Air Minum	2 KK
Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	35 KK

Kondisi ...

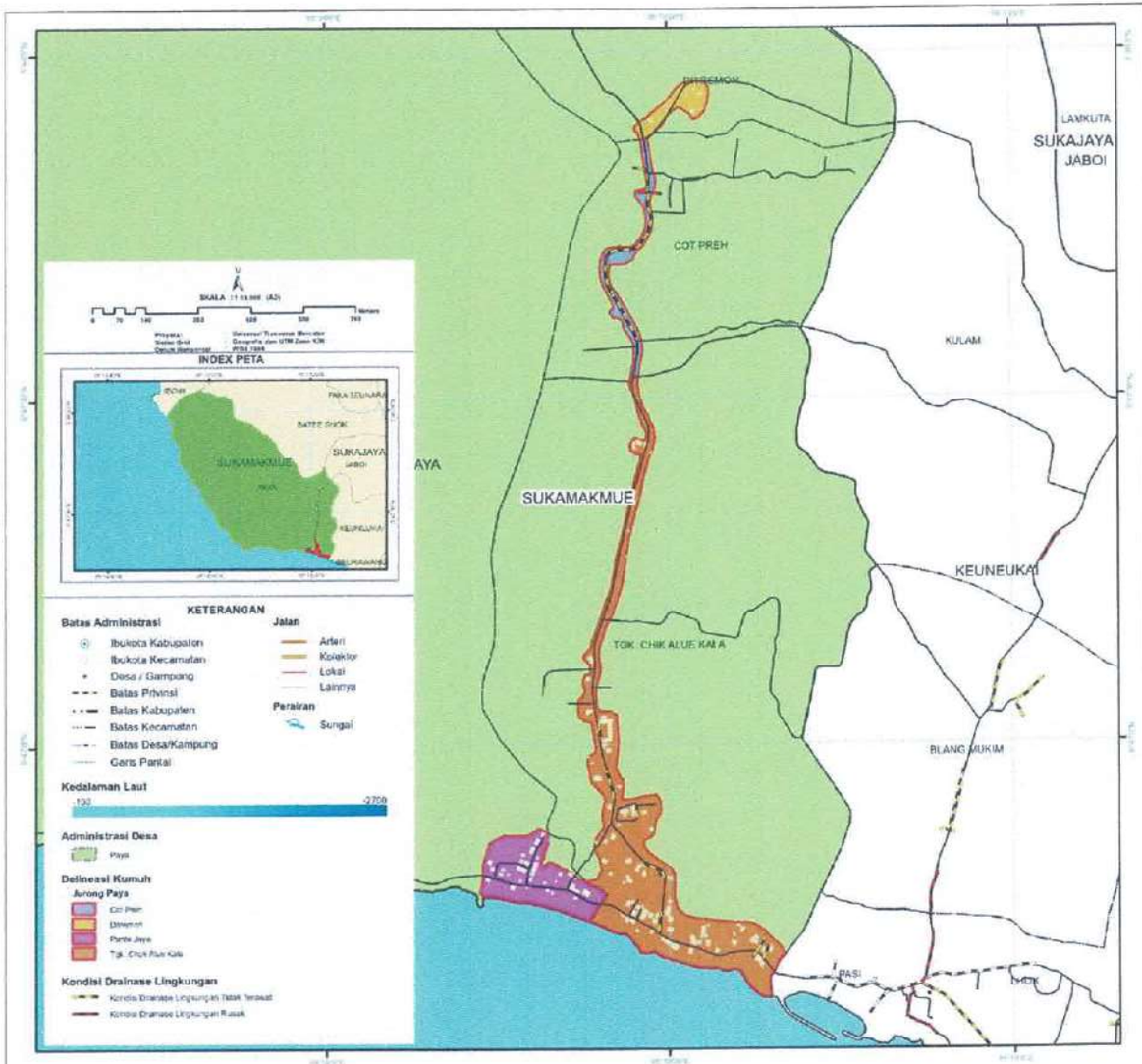

KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN GAMPONG PAYA







Panjang drainase eksisting	1.518,32 Meter
Panjang drainase idela	1.518,32 Meter
Luas genangan	0 Ha
Drainase rusak	424,6 Meter

Kondisi ...

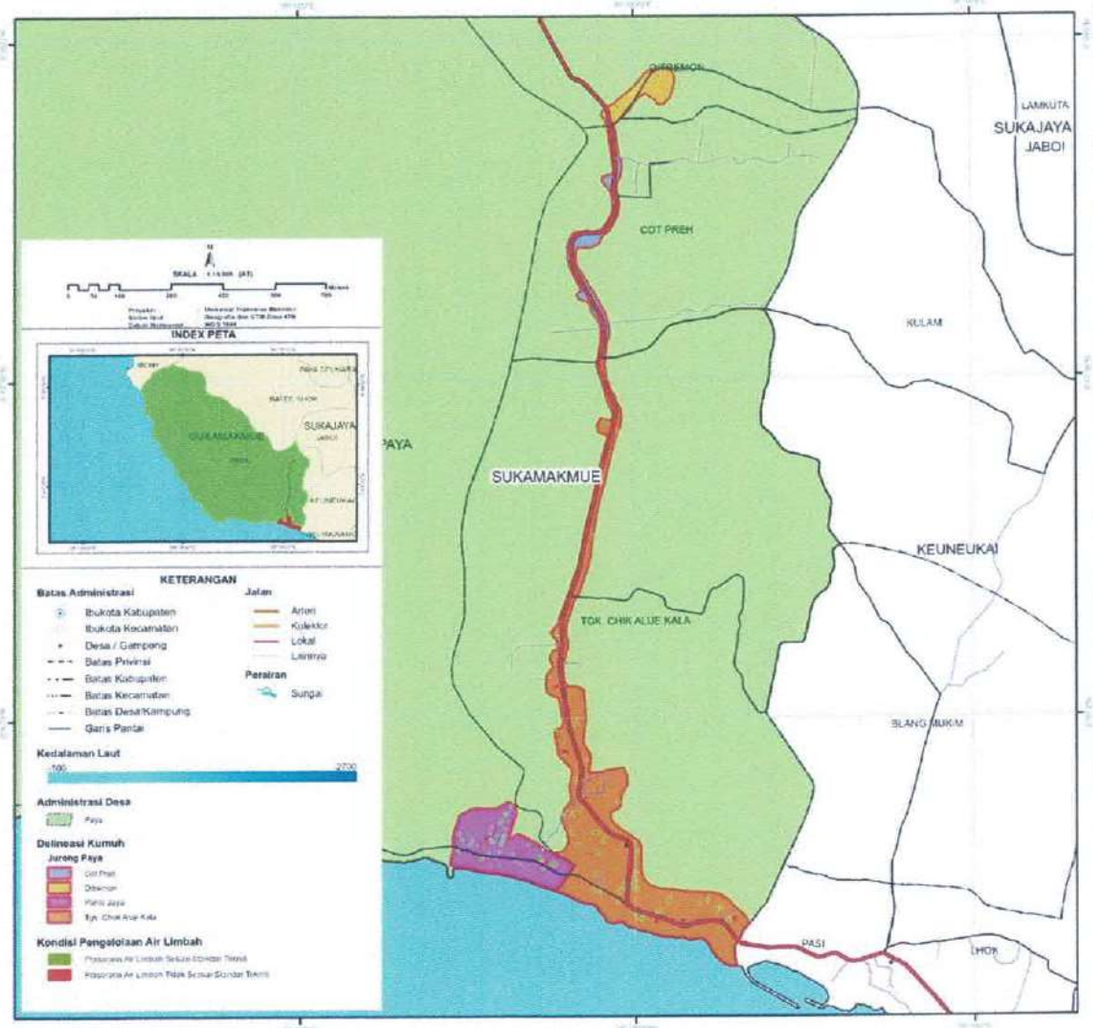

KONDISI PENGOLAHAN LIMBAH GAMPONG PAYA





Jumlah KRT	131 KK
Sistem pengolahan air limbah tidak sesuai teknis	25 KK
Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	25 KK

Kondisi ...

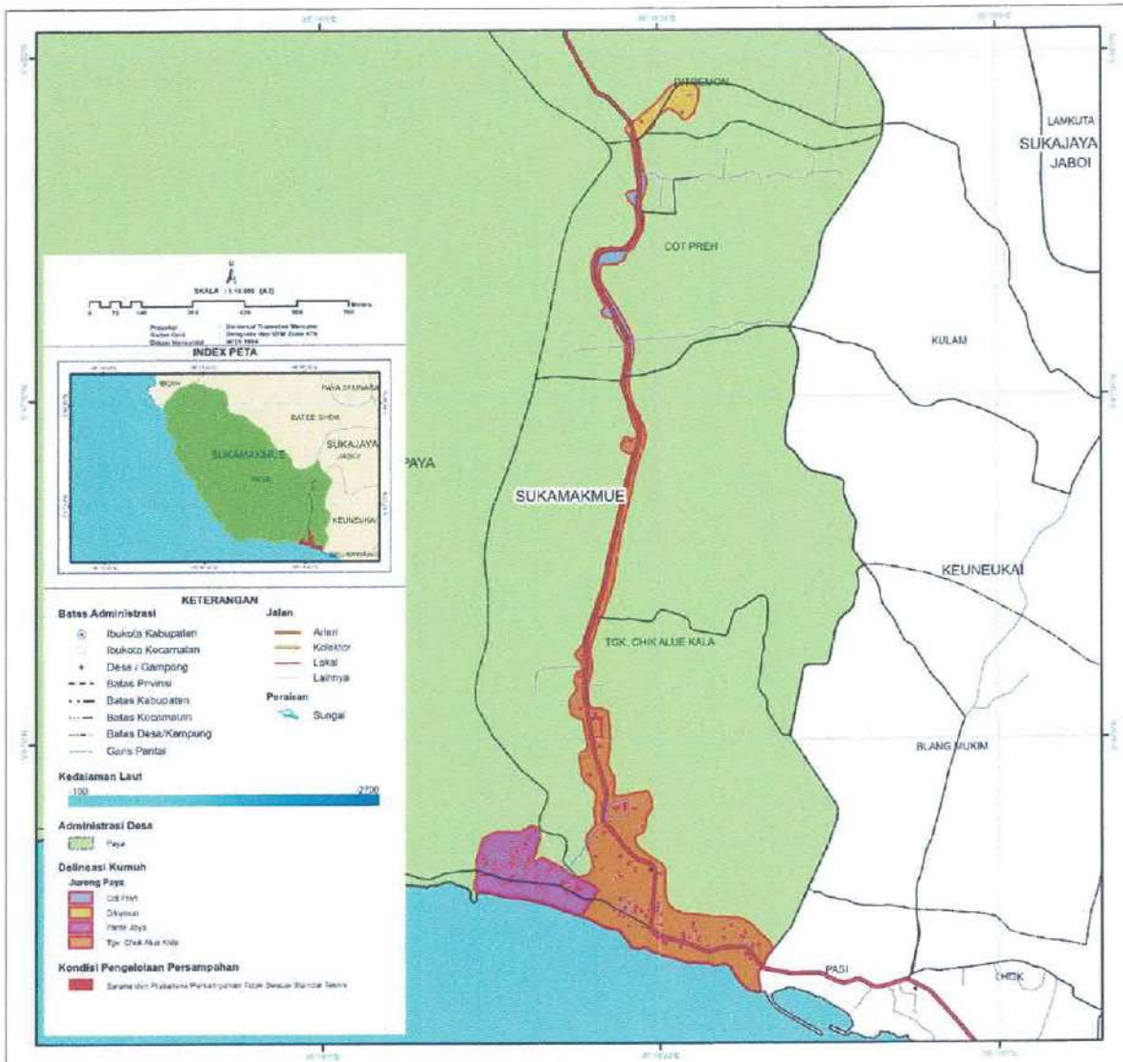

KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN GAMPONG PAYA





Jumlah KRT	131 KK
Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	131 KK
Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	131 KK

Kondisi ...

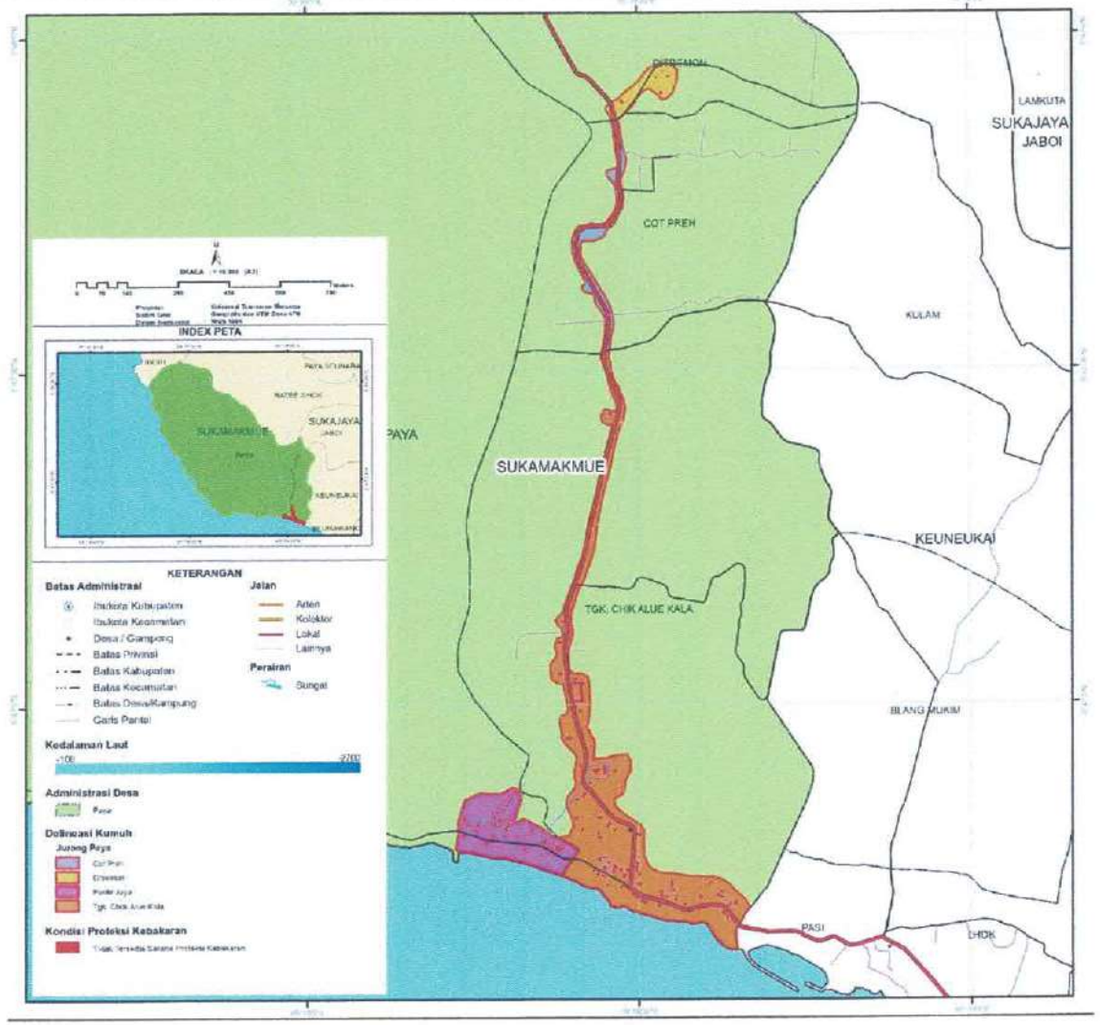

KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN GP. PAYA





Jumlah KRT	131 KK
Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	127 Unit
Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	172 Unit

DATA ...

DATA BASELINE NUMERIK KUMUH GAMPONG PAYA

Hasil pendataan baseline numerik Kumuh Gampong Paya berdasarkan 7 indikator kumuh menurut permen PUPR No.14 Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.6. Dapat disimpulkan nilai skoring Kumuh Gampong Paya adalah 21, yang tergolong dalam kategori kumuh ringan.

Tabel 3.6 Data Baseline Numerik Kumuh Gampong Paya

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH	Luas SK	22,67	Ha
Kab/Kota	: KOTA SABANG	Luas Verifikasi	22,67	Ha
Kecamatan	: SUKAMAKMUE	Jumlah Bangunan	172	Unit
Kawasan	: PAYA KEUNEUKAI	Jumlah Penduduk	606	Jiwa
Kelurahan	: PAYA	Jumlah KK	131	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	86,00	Unit	50,00%	1
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	37,00	Unit	21,51%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				16,67%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	2.242,51	Meter	11,86%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				0,00%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	2,00	KK	1,53%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	35,00	KK	26,72%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				13,36%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	424,64	Meter	27,07%	1
Rata-rata Kondisi Drsinase Lingkungan				9,32%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	25,00	KK	19,08%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	25,00	KK	19,08%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	131,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	131,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	127,00	Unit	73,84%	3
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	172,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				86,92%	

TOTAL NILAI	21
TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN
RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	32,32%
KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

DS001-00000 — Cot Preh

1,894	Ha	
1,894	Ha	
30	Unit	
116	Jiwa	
30	KK	

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
12,00	Unit	40,00%	1
-	Ha	0,00%	0
4,00	Unit	13,33%	0
		13,33%	
-	Meter	0,00%	0
821,97	Meter	31,26%	1
		15,63%	
2,00	KK	6,67%	0
-	KK	0,00%	0
		0,00%	
-	Ha	0,00%	0
-	Meter	0,00%	0
91,81	Meter	14,07%	0
		0,00%	
11,00	KK	36,67%	1
11,00	KK	36,67%	1
		36,67%	
30,00	KK	100,00%	5
30,00	KK	100,00%	5
		100,00%	
-	Unit	0,00%	0
30,00	Unit	100,00%	5
		50,00%	

TOTAL NILAI	19
TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN
RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	30,80%
KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%

DS002-00000 — Pante Jaya

4,46	Ha	
4,46	Ha	
61	Unit	
202	Jiwa	
17	KK	

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
45,00	Unit	73,77%	3
-	Ha	0,00%	0
15,00	Unit	24,59%	0
		24,59%	
-	Meter	0,00%	0
215,41	Meter	2,24%	0
		0,00%	
-	KK	0,00%	0
17,00	KK	100,00%	5
		50,00%	
-	Ha	0,00%	0
-	Meter	0,00%	0
214,05	Meter	76,34%	5
		25,45%	
3,00	KK	17,65%	0
3,00	KK	17,65%	0
		0,00%	
17,00	KK	100,00%	5
17,00	KK	100,00%	5
		100,00%	
61,00	Unit	100,00%	5
61,00	Unit	100,00%	5
		100,00%	

TOTAL NILAI	33
TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN
RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	42,86%
KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%

DS003-00000 — Tgk Chik Alue Kala

15,09	Ha	
15,09	Ha	
66	Unit	
230	Jiwa	
66	KK	

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
25,00	Unit	37,88%	1
-	Ha	0,00%	0
12,00	Unit	18,18%	0
		12,63%	
-	Meter	0,00%	0
-	Meter	0,00%	0
		0,00%	
-	KK	0,00%	0
-	KK	0,00%	0
		0,00%	
-	Ha	0,00%	0
-	Meter	0,00%	0
118,78	Meter	30,98%	1
		10,33%	
11,00	KK	16,67%	0
11,00	KK	16,67%	0
		0,00%	
66,00	KK	100,00%	5
66,00	KK	100,00%	5
		100,00%	
66,00	Unit	100,00%	5
66,00	Unit	100,00%	5
		100,00%	

TOTAL NILAI	22
TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN
RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	31,85%
KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%

DS004-00000 — Tgk Di Tereumon

1,23	Ha	
1,23	Ha	
15	Unit	
58	Jiwa	
18	KK	

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
4,00	Unit	26,67%	1
-	Ha	0,00%	0
6,00	Unit	40,00%	1
		22,22%	
-	Meter	0,00%	0
767,55	Meter	34,85%	1
		17,42%	
	KK	0,00%	0
18,00	KK	100,00%	5
		50,00%	
-	Ha	0,00%	0
-	Meter	0,00%	0
-	Meter	0,00%	0
		0,00%	
-	KK	0,00%	0
-	KK	0,00%	0
		0,00%	
18,00	KK	100,00%	5
18,00	KK	100,00%	5
		100,00%	
-	Unit	0,00%	0
15,00	Unit	100,00%	5
		50,00%	

TOTAL NILAI	23
TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN
RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	34,34%
KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%

Tabel 3.7 ...

Tabel 3.7 Profil Kumuh Gampong Keuneukai

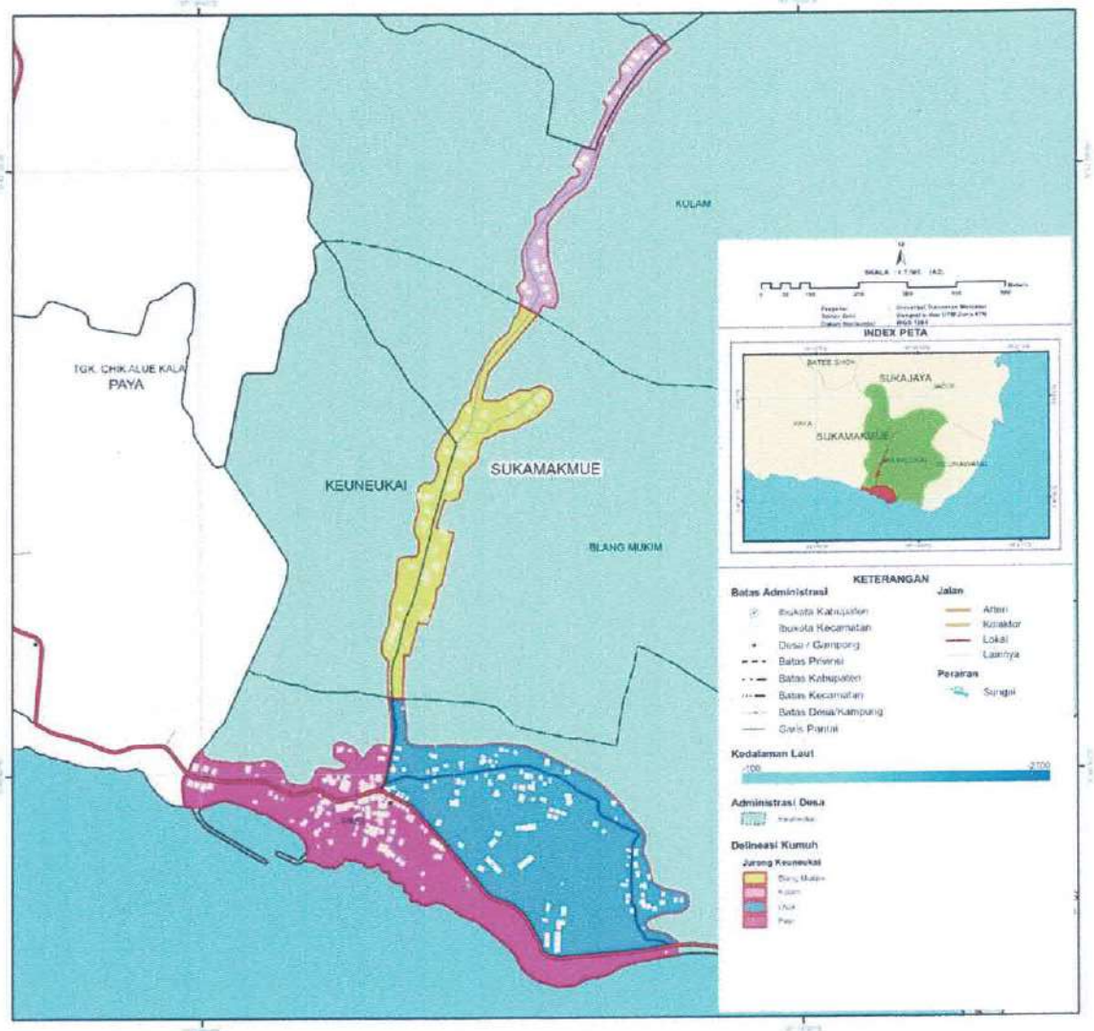

INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH		
Kawasan	Paya Keuneukai	No	Nama Dusun	Luas Kumuh (Ha)
Kelurahan	Keuneukai			
Kecamatan	Sukamakmue			
Kota	Sabang			
Provinsi	Aceh			
Luas Deliniasi Kumuh	34,823 Ha	1	Blang Mukim	5,492
Koordinat		2	Kulam	2,520
Latitude		3	Lhok	16,002
Longtitude		4	Pasi	10,809
Jumlah Bangunan	221 Unit			
Jumlah Penduduk	858 Jiwa			
Jumah KK	253 KK			
Kategori, Tipologi dan Karakteristik Permukimah Kumuh				
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan		**Total**	**34,823**
Tipologi Kumuh	Permukiman Kumuh Pesisir Pantai			
Karakteristik	Kawasan Gampong Nelayan			

Permasalahan ...

					Permasalahan Utama			
					• Tidak tersedianya sarana dan prasarana persampahan yang memadai dan sesuai teknis • Sarana prasarana proteksi kebakaran belum tersedia • Kondisi drainase lingkungan yang buruk • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum • Ketidakteraturan bangunan			
PERTIMBANGAN LAIN	**BANGUNAN**		**LEGALITAS & STATUS TANAH**		**SOSIAL EKONOMI**		**JALAN LINGKUNGAN**	
	Jumlah Bangunan	221 Unit	Bangunan Ber IMB	0	Jumlah Penduduk	858 Jiwa	Total jaringan jalan	10.786,89 Meter
	Jumlah RTLH	31 Unit	Bangunan tidak Ber IMB	221 Unit	Jumlah KK	253 KK	Jalan rusak	1.524,09 Meter
	Ketidakteraturan Bangunan	26 Unit	Rumah Tangga tidak memiliki SHM	210 Unit	Jumlah MBR	128 KK	Jalan belum memadai (<2 m)	0
	Kepadatan Bangunan	0	Bangunan tidak sesuai peruntukan	0			Kebutuhan jalan baru	0

AIR MINUM ...

									
AIR MINUM		DRAINASE		PENGOLAHAN LIMBAH		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		KONDISI KEBAKARAN	
Jumlah KK	253 KK	Panjang drainase eksisting	2.649,25 Meter	Jumlah KK	253 KK	Jumlah KK	253 KK	Jumlah Bangunan	221 Unit
Ketersediaan Akses Aman Air Minum	0	Panjang drainase ideal	2.649,25 Meter	Sistem pengolahan air limbah tidak sesuai teknis	0	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	253 KK	Ketidakter sediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	80 Unit
Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	98 KK	Luas genangan	0	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	0	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	203 KK	Ketidakter sediaan Sarana Proteksi Kebakaran	221 Unit

Drainase ...

		Drainase rusak	1.049,6 Meter						
		 							

Kondisi ... 1 b

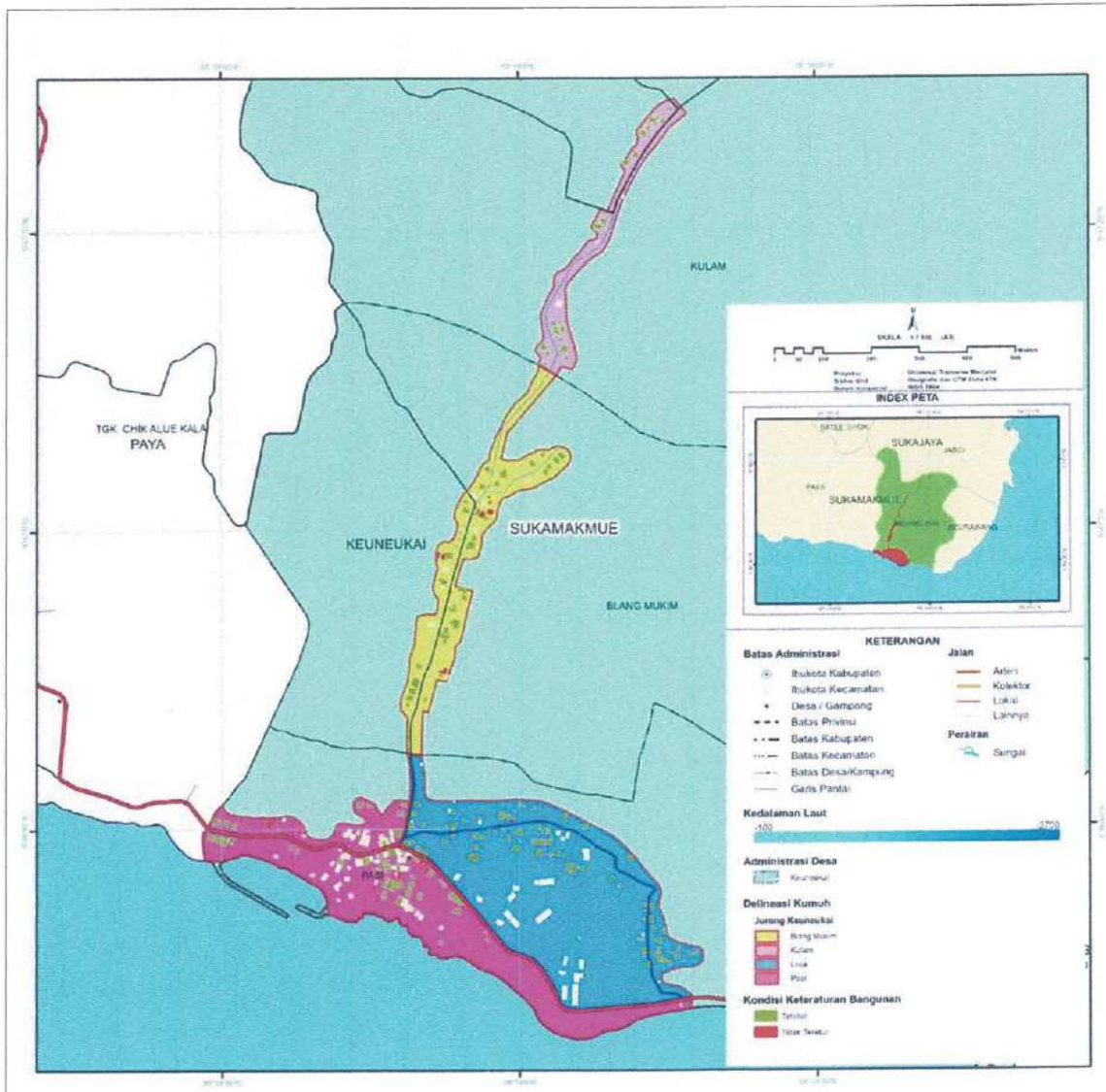

KONDISI BANGUNAN GEDUNG GAMPONG KEUNEUKAI







Jumlah Bangunan	221 Unit
Jumlah RTLH	31 Unit
Ketidakteraturab Bangunan	26 Unit
Kepadatan Bangunan	-
Ketidaksesuain dengan Persyaratan Teknis	31 Unit

Kondisi ...

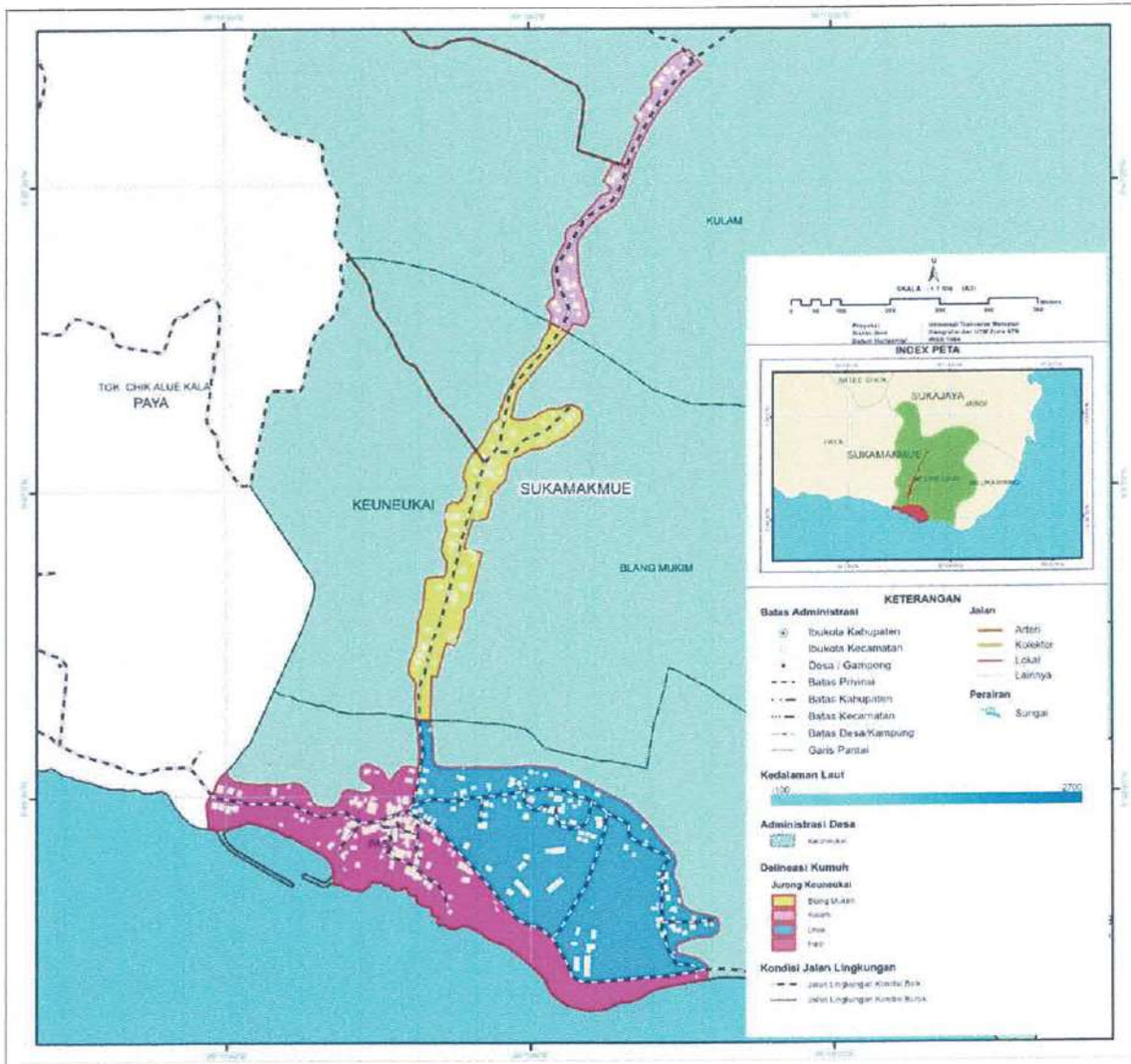

KONDISI JALAN LINGKUNGAN GAMPONG KEUNEUKAI





Total Jaringan Jalan	10.786,89 Meter
Jalan Rusak	1.524,09 Meter
Kebutuhan Jalan Baru	0 Meter

Kondisi ...

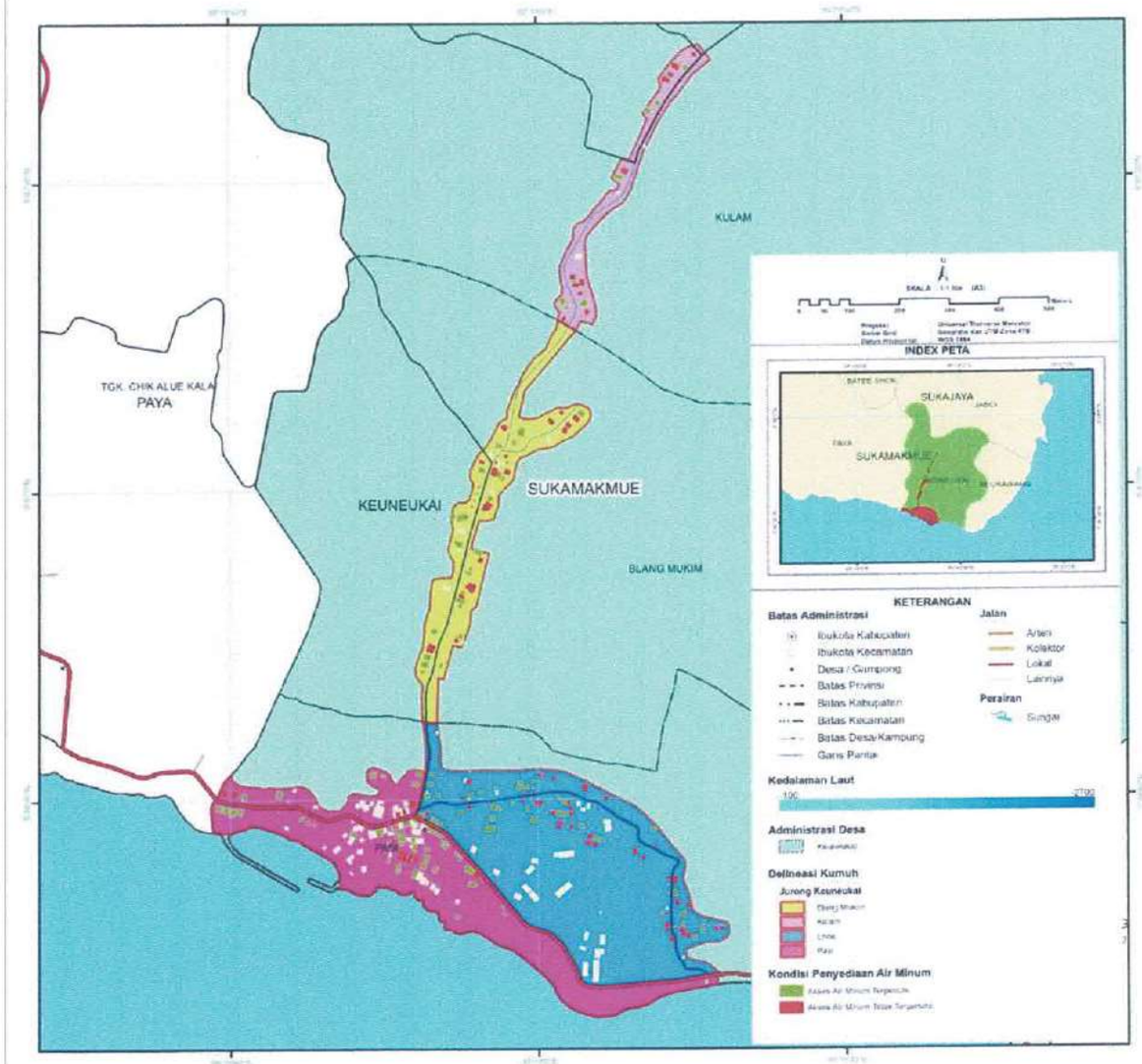

KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM GAMPONG KEUNEUKAI





Jumlah KK	253 KK
Ketersediaan Akses Aman Air Minum	0
Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	98 KK

Kondisi ...

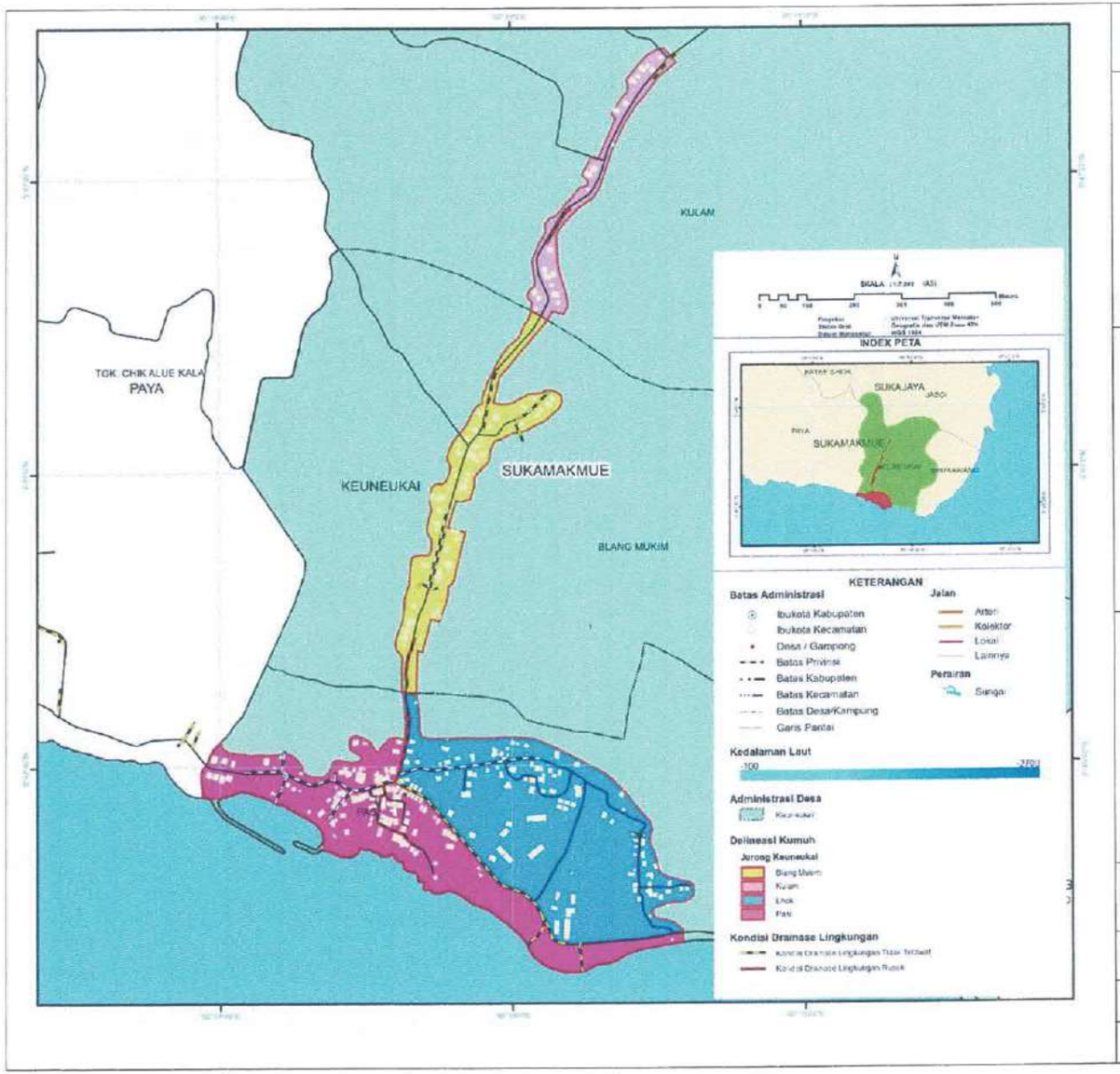

KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN GAMPONG KEUNEUKAI







Panjang Drainase Eksisting	2.649,25 Meter
Panjang Drainase Ideal	2.649,25 Meter
Luas Genangan	0 Ha
Drainase Rusak	1.049,6 Meter

Kondisi ...

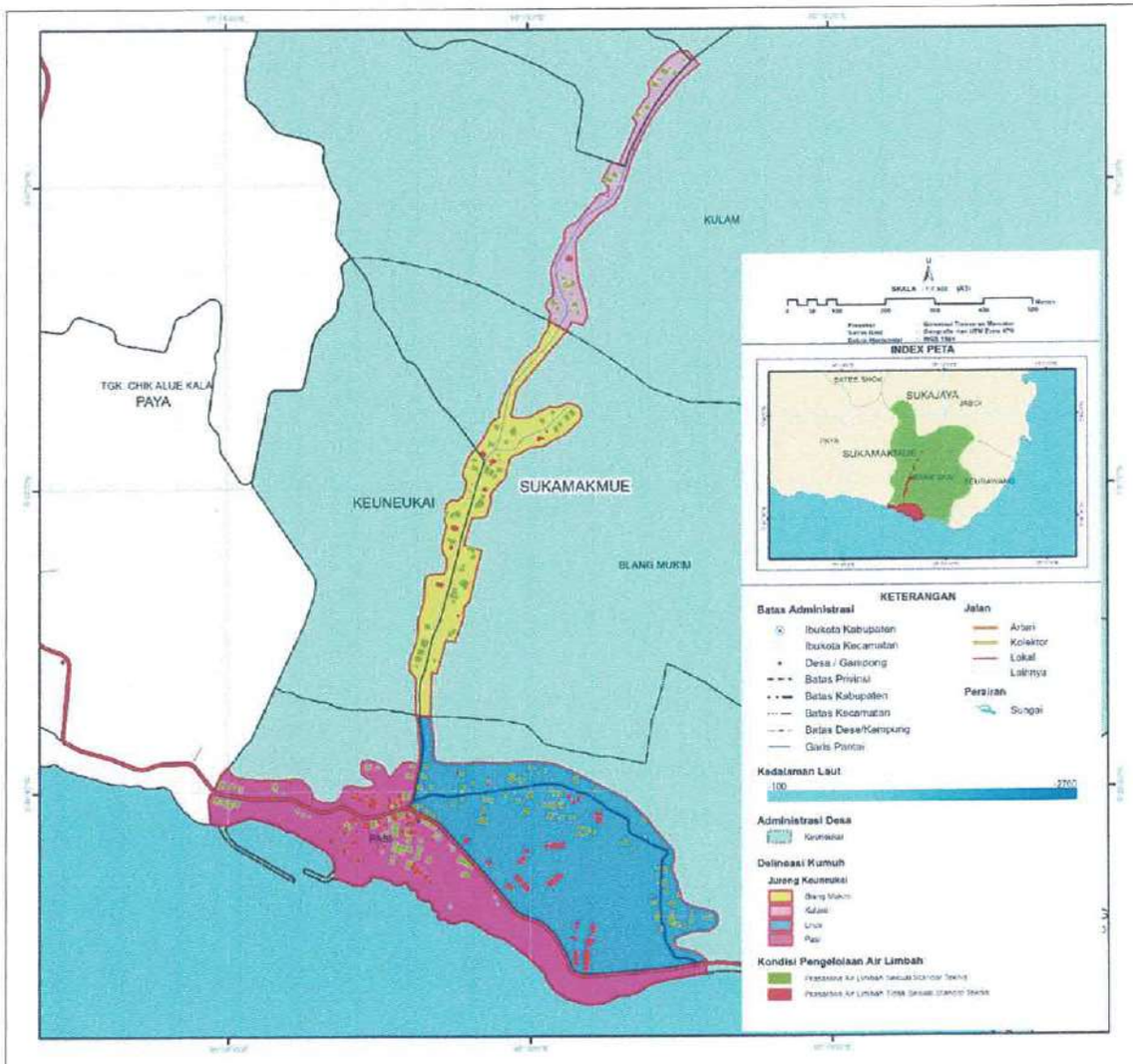

KONDISI PENGOLAHAN LIMBAH GAMPONG KEUNEUKAI





Jumlah KK	253 KK
Sistem Pengolahan Air Limbah Tidak Sesuai Teknis	0
Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	0

Kondisi ...

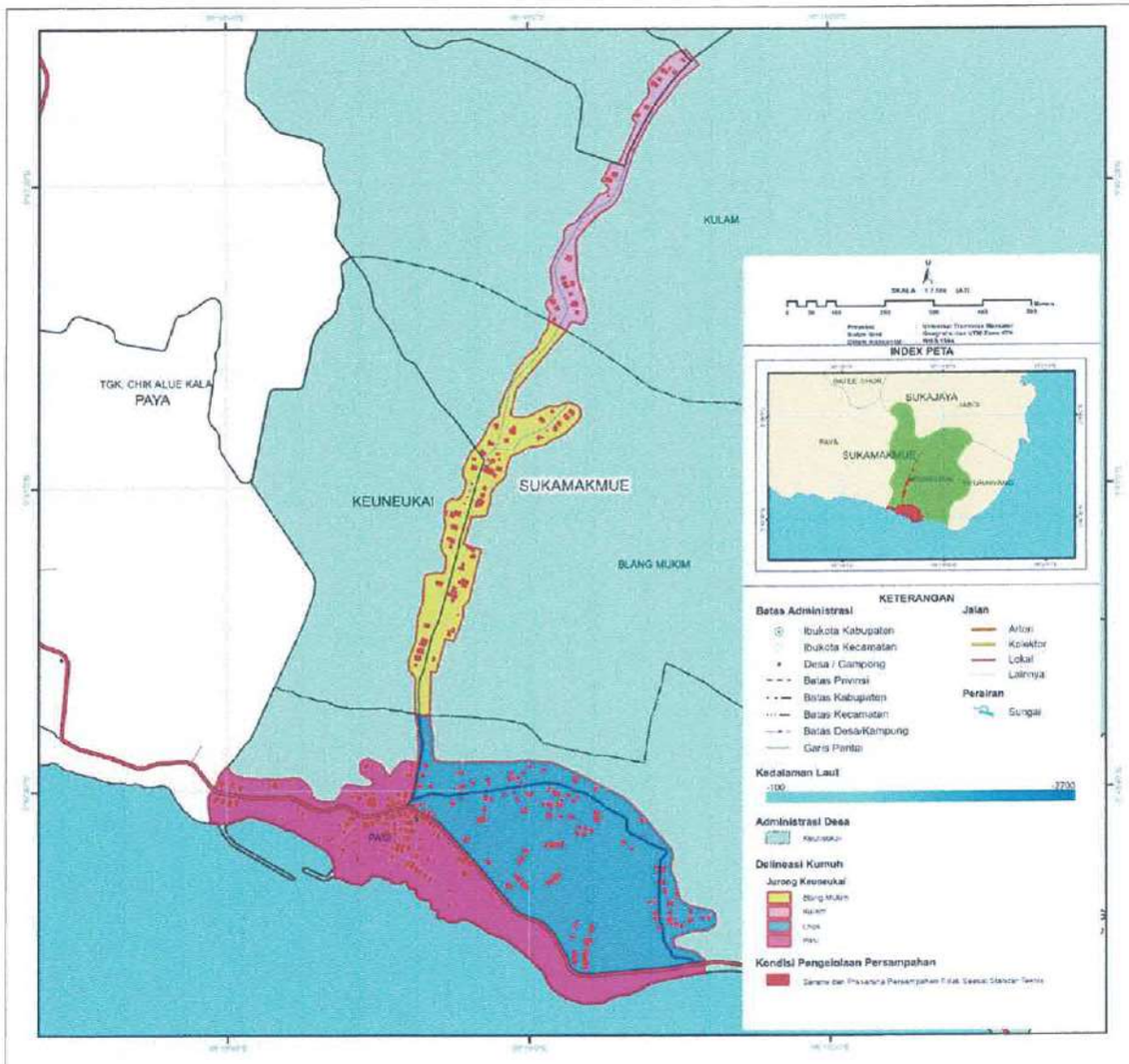

KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN GAMPONG KEUNEUKAI





Jumlah KK	253 KK
Prasarana Dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	253 KK
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis	203 KK

Kondisi ...

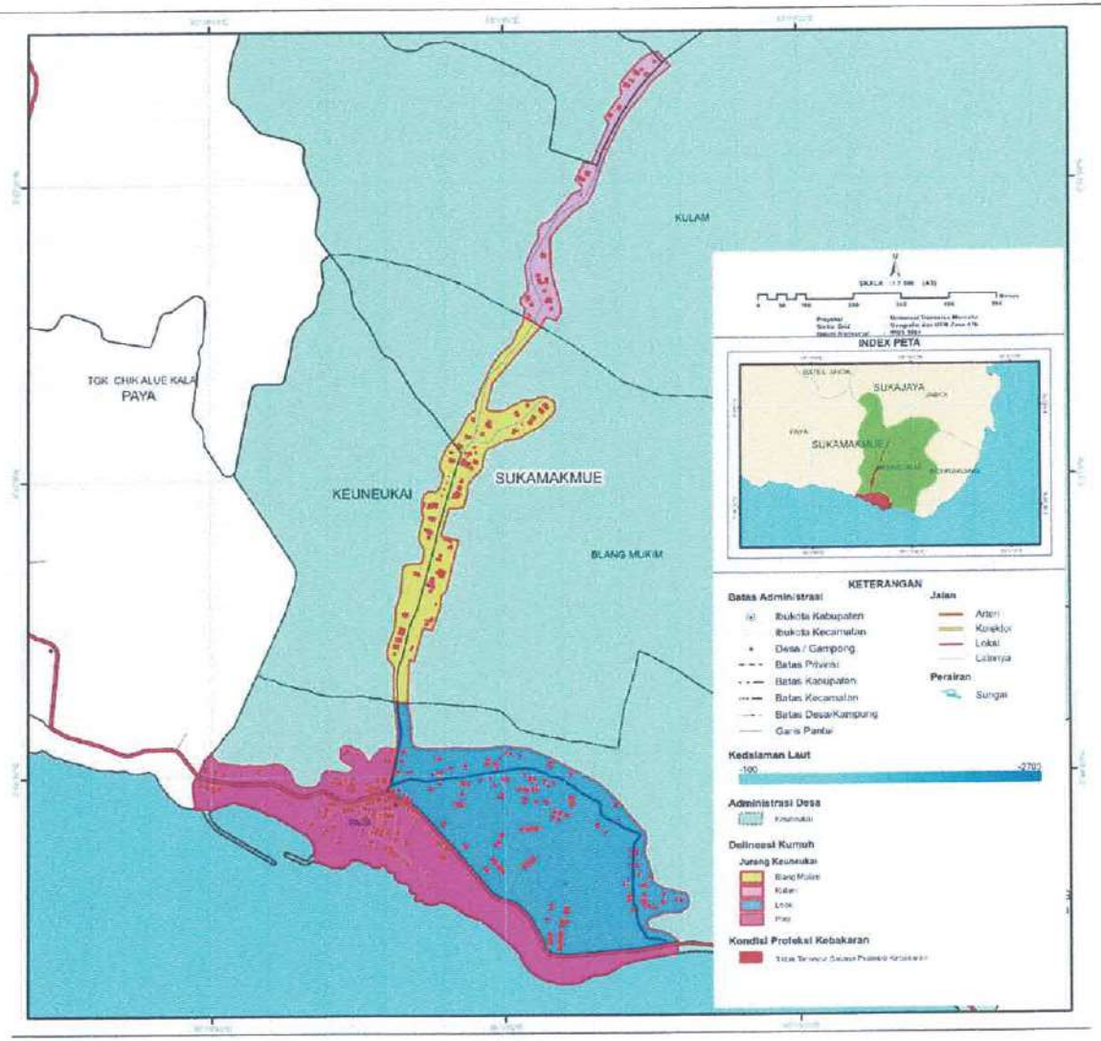

KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN GAMPONG KEUNEUKAI



Jumlah Bangunan	221 Unit
Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	80 Unit
Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	221 Unit

DATA ...

DATA BASELINE NUMERIK KUMUH GAMPONG KEUNEUKAI

Hasil pendataan baseline numeric Kumuh Gampong Keuneukai berdasarkan 7 indikator kumuh menurut permen PUPR No.14 Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.8. Dapat disimpulkan nilai skoring Kumuh Gampong Keuneukai adalah 18, yang tergolong dalam kategori kumuh ringan.

Tabel 3.8 Data Baseline Numerik Kumuh Gampong Keuneukai

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH	Luas SK	34,823	Ha
Kab/Kota	: KOTA SABANG	Luas Verifikasi	34,823	Ha
Kecamatan	: SUKAMAKMUE	Jumlah Bangunan	221	Unit
Kawasan	: PAYA KEUNEUKAI	Jumlah Penduduk	858	Jiwa
Kelurahan	: KEUNEUKAI	Jumlah KK	253	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	26,00	Unit	11,76%	0
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	31,00	Unit	14,03%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				0,00%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1.524,09	Meter	14,13%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				0,00%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	-	KK	0,00%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	98,00	KK	38,74%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				19,37%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1.049,64	Meter	39,62%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				13,21%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	-	KK	0,00%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	253,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	203,00	KK	80,24%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				90,12%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	80,00	Unit	36,20%	1
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	221,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				68,10%	
			TOTAL NILAI		18
			TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		27,26%
			KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN
60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

DS001-00000 — Blang Mukim

5,492	Ha	
5,492	Ha	
46	Unit	
192	Jiwa	
55	KK	

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
6,00	Unit	13,04%	0
-	Ha	0,00%	0
1,00	Unit	2,17%	0
		0,00%	
-	Meter	0,00%	0
504,59	Meter	24,14%	0
		0,00%	
-	KK	0,00%	0
23,00	KK	41,82%	1
		20,91%	
-	Ha	0,00%	0
-	Meter	0,00%	0
111,00	Meter	14,80%	0
		0,00%	
-	KK	0,00%	0
-	KK	0,00%	0
		0,00%	
55,00	KK	100,00%	5
55,00	KK	100,00%	5
		100,00%	
-	Unit	0,00%	0
46,00	Unit	100,00%	5
		50,00%	
TOTAL NILAI			16
TINGKAT KEKUMUHAN			KUMUH RINGAN
RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			24,42%
KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%

DS002-00000 — Kulam

2,520	Ha	
2,520	Ha	
28	Unit	
120	Jiwa	
23	KK	

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
2,00	Unit	7,14%	0
-	Ha	0,00%	0
5,00	Unit	17,86%	0
		0,00%	
-	Meter	0,00%	0
1.019,50	Meter	22,01%	0
		0,00%	
-	KK	0,00%	0
11,00	KK	47,83%	1
		23,91%	
-	Ha	0,00%	0
-	Meter	0,00%	0
88,58	Meter	50,07%	1
		16,69%	
-	KK	0,00%	0
-	KK	0,00%	0
		0,00%	
23,00	KK	100,00%	5
23,00	KK	100,00%	5
		100,00%	
-	Unit	0,00%	0
28,00	Unit	100,00%	5
		50,00%	
TOTAL NILAI			17
TINGKAT KEKUMUHAN			KUMUH RINGAN
RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			27,23%
KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%

DS003-00000 — Lhok

16,002	Ha	
16,002	Ha	
67	Unit	
254	Jiwa	
82	KK	

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1,00	Unit	1,49%	0
-	Ha	0,00%	0
6,00	Unit	8,96%	0
		0,00%	
-	Meter	0,00%	0
-	Meter	0,00%	0
		0,00%	
-	KK	0,00%	0
42,00	KK	51,22%	3
		25,61%	
-	Ha	0,00%	0
-	Meter	0,00%	0
849,06	Meter	84,86%	5
		28,29%	
-	KK	0,00%	0
-	KK	0,00%	0
		0,00%	
82,00	KK	100,00%	5
82,00	KK	100,00%	5
		100,00%	
-	Unit	0,00%	0
67,00	Unit	100,00%	5
		50,00%	
TOTAL NILAI			23
TINGKAT KEKUMUHAN			KUMUH RINGAN
RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			29,13%
KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%

DS004-00000 — Pasi

10,809	Ha	
10,809	Ha	
80	Unit	
292	Jiwa	
93	KK	

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
17,00	Unit	21,25%	0
-	Ha	0,00%	0
19,00	Unit	23,75%	0
		0,00%	
-	Meter	0,00%	0
-	Meter	0,00%	0
		0,00%	
-	KK	0,00%	0
22,00	KK	23,66%	0
		0,00%	
-	Ha	0,00%	0
-	Meter	0,00%	0
-	Meter	0,00%	0
		0,00%	
-	KK	0,00%	0
-	KK	0,00%	0
		0,00%	
93,00	KK	100,00%	5
43,00	KK	46,24%	1
		73,12%	
80,00	Unit	100,00%	5
80,00	Unit	100,00%	5
		100,00%	
TOTAL NILAI			16
TINGKAT KEKUMUHAN			KUMUH RINGAN
RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			24,73%
KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%

Tabel 3.9 ...

Tabel 3.9 Profil Kumuh Gampong Jaboi

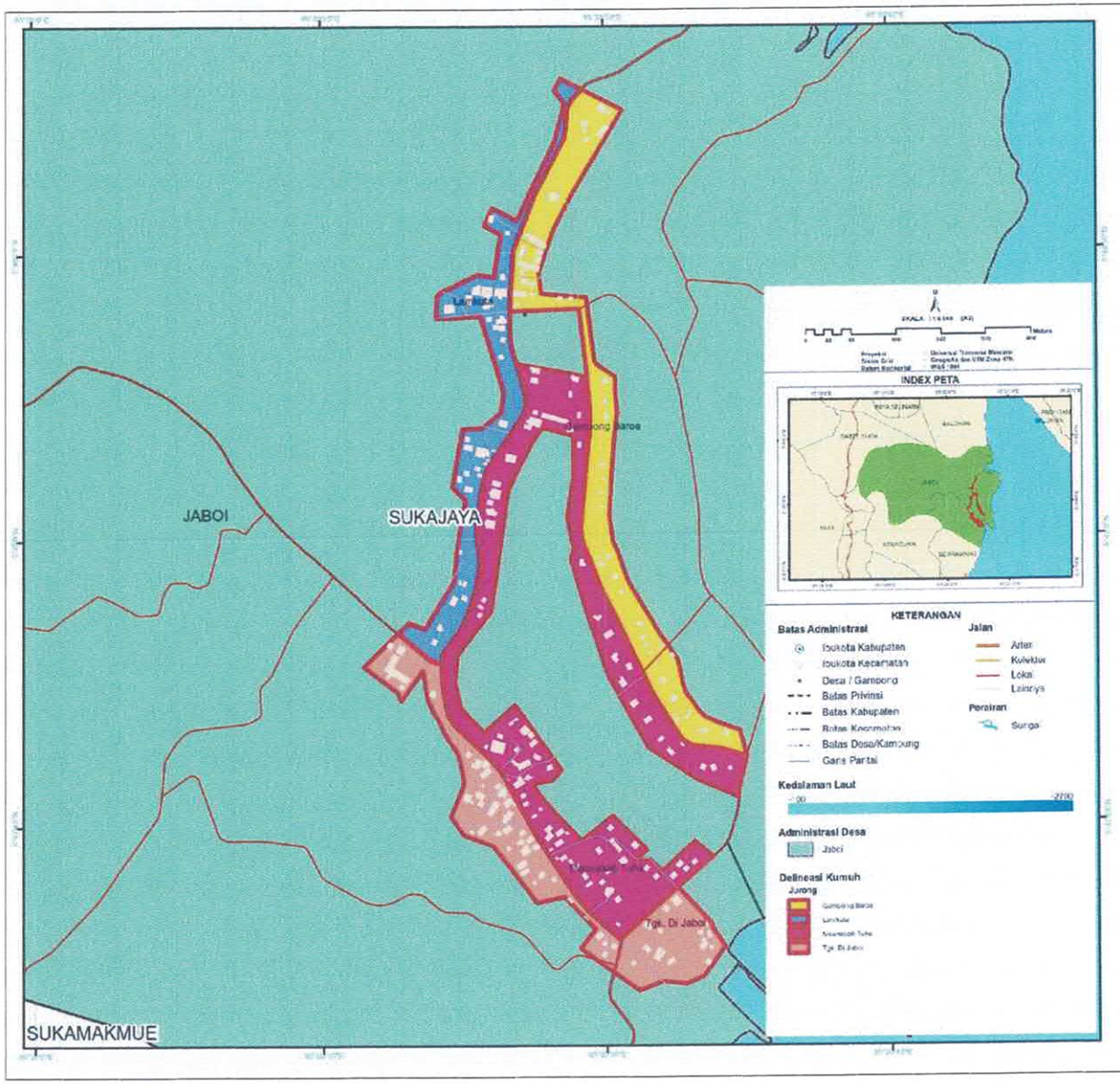

INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH		
Kawasan Kelurahan Kecamatan Kota Provinsi	Jaboi Jaboi Sukajaya Sabang Aceh	No	Nama Dusun	Luas Kumuh (Ha)
Luas Deliniasi Kumuh	23,928	1	Gampong Baroe	5,583
Koordinat Latitude Longtitude		2	Lamkuta	3,89
Jumlah Bangunan Jumlah Penduduk Jumah KK	165 Unit 717 Jiwa 178 KK	3	Meunasah Tuha	9,322
Kategori, Tipologi dan Karakteristik Permukimah Kumuh		4	Tgk Di Jaboi	5,133
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan		**Total**	**23,928**
Tipologi Kumuh	Permukiman Kumuh Pesisir Pantai			
Karakteristik	Kawasan Gampong Nelayan			

Permasalahan ...

					Permasalahan Utama			
					• Belum adanya sarana dan prasarana persampah yang memadai dan sesuai teknis • Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum • Ketersediaan akses aman air minum • Kualitas permukaan jalan lingkungan • Prasarana dan sarana pengolahan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis • Sistem pengolahan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis			
PERTIMBANGAN LAIN	**BANGUNAN**		**LEGALITAS & STATUS TANAH**		**SOSIAL EKONOMI**		**JALAN LINGKUNGAN**	
	Jumlah Bangunan	165 Unit	Bangunan Ber IMB	8 Unit	Jumlah penduduk	717 Jiwa	Total jaringan jalan	15.279,93 Meter
	Jumlah RTLH	16 Unit	Bangunan tidak Ber IMB	157 Unit	Jumlah KK	178 KK	Jalan rusak	5.103,65 Meter
	Ketidakteraturan Bangunan	24 Unit	Rumah Tangga tidak memiliki SHM	22 Unit	Jumlah MBR	144 KK	Jalan belum memadai (<2 m)	0 Meter
	Kepadatan Bangunan	0	Bangunan tidak sesuai peruntukan	0			Kebutuhan jalan baru	0 Meter

AIR MINUM ...

									
AIR MINUM		DRAINASE		PENGOLAHAN LIMBAH		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		KONDISI KEBAKARAN	
Jumlah KRT	178 KK	Panjang drainase eksisting	7.416,92 Meter	Jumlah KRT	178 KK	Jumlah KRT	178 KK	Jumlah KRT	178 KK
Ketersediaan Akses Aman Air Minum	97 KK	Panjang drainase idela	9.235,36 Meter	Sistem pengolahan air limbah tidak sesuai teknis	50 KK	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	178 KK	Ketidakterse diaan Prasarana Proteksi Kebakaran	31 Unit
Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	163 KK	Luas genangan	0 Ha	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah	50 KK	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak	178 KK	Ketidakterse diaan Sarana Proteksi Kebakaran	165 Unit

Tidak ...

				Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis		sesuai Standar Teknis			
		Drainase rusak	999,6 Meter						

Kondisi ...

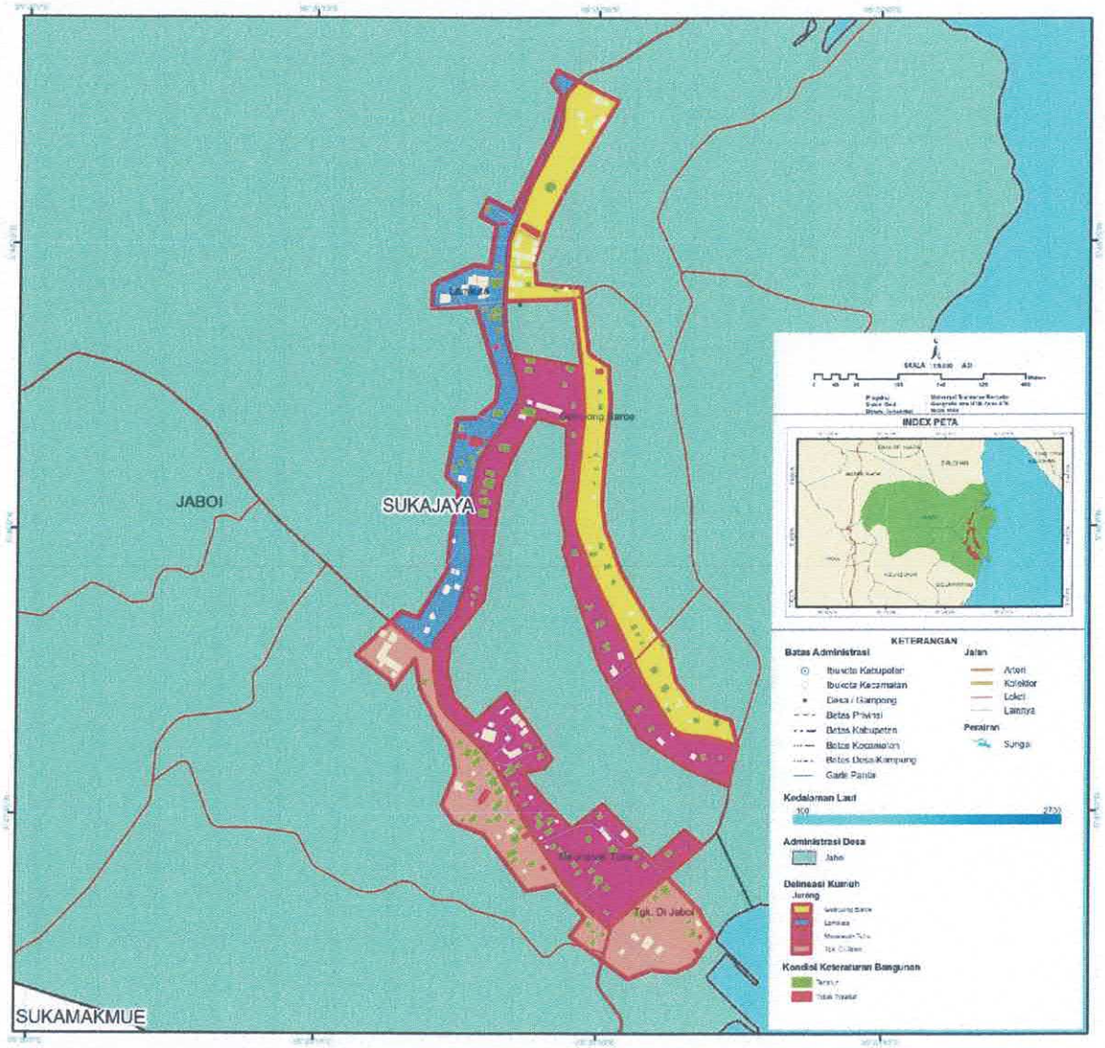

KONDISI BANGUNAN GEDUNG GAMPONG JABOI







Jumlah Bangunan	165 Unit
Jumlah RTLH	16 Unit
Ketidakteraturab Bangunan	24 Unit
Kepadatan Bangunan	-
Ketidaksesuain dgn Persyaratan Teknis	16 Unit

Kondisi ...

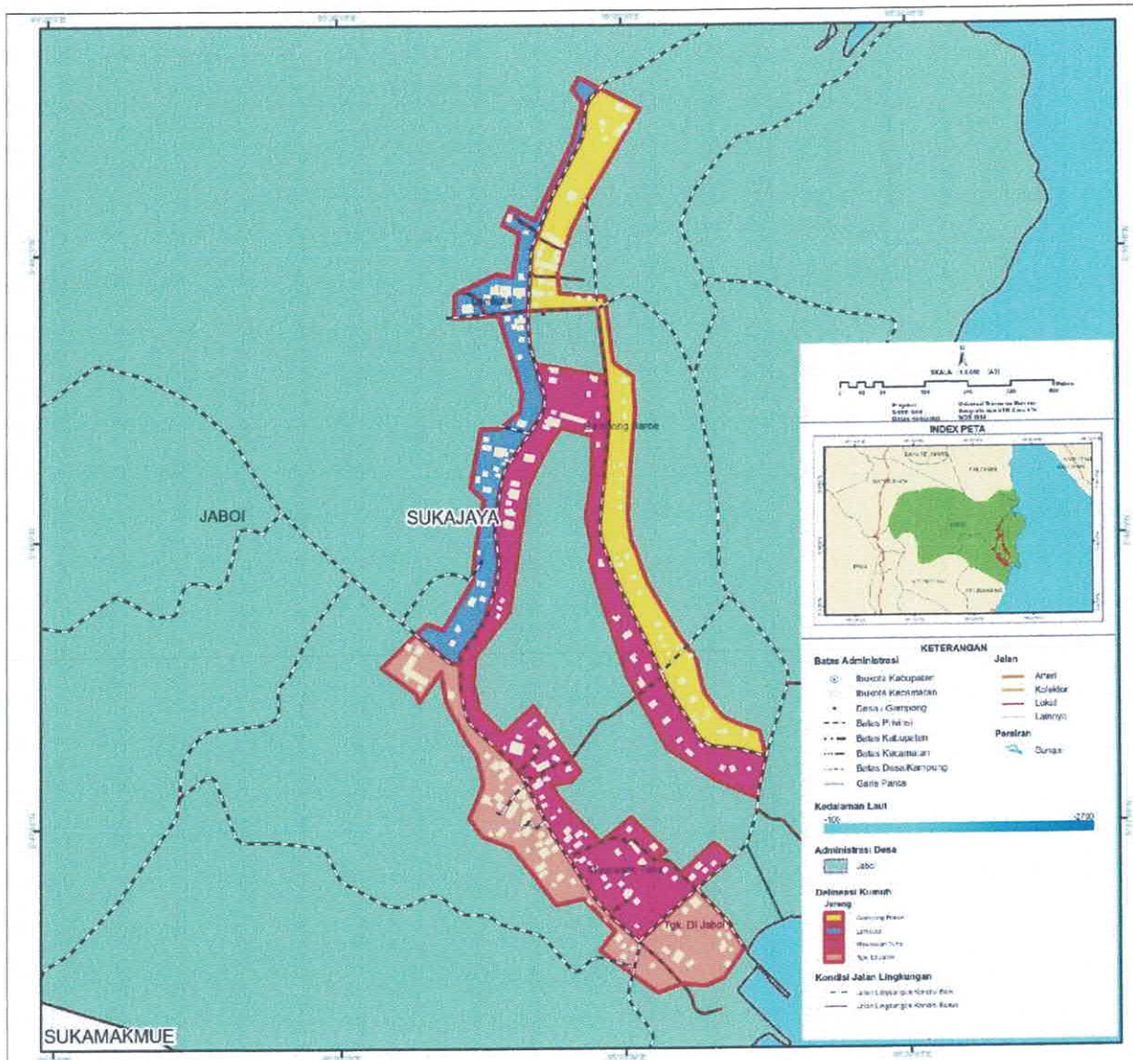

KONDISI JALAN LINGKUNGAN GAMPONG JABOI



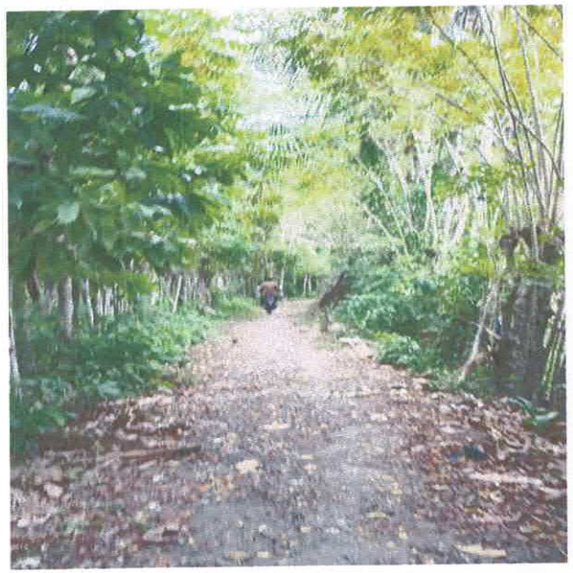

Total Jaringan Jalan	15.279,93 Meter
Jalan Rusak	5.103,65 Meter
Kebutuhan Jalan Baru	0 Meter

Kondisi ...

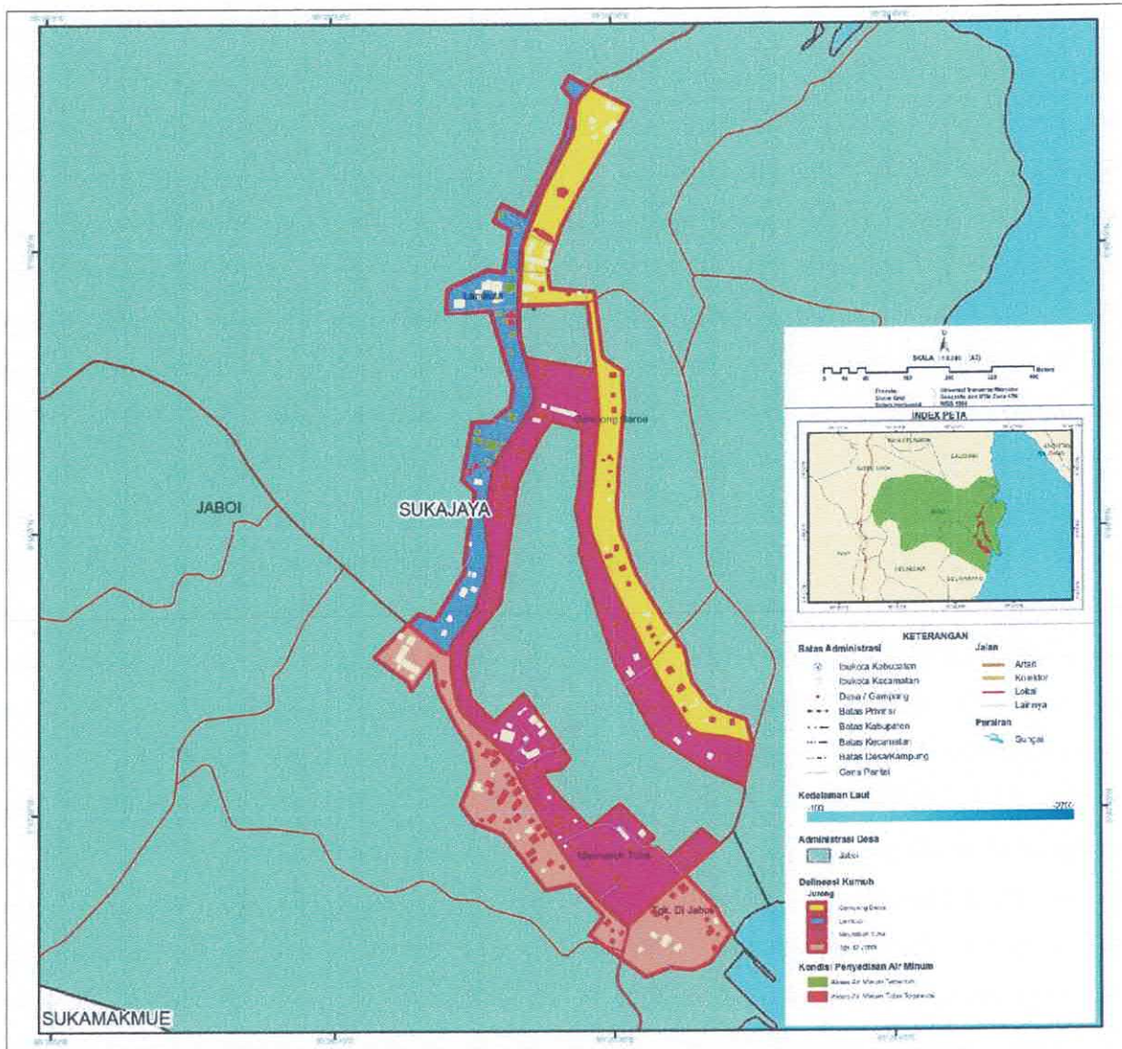

KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM GAMPONG JABOI





Jumlah KK	178 KK
Ketersediaan Akses Aman Air Minum	97 KK
Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	163 KK

Kondisi ...

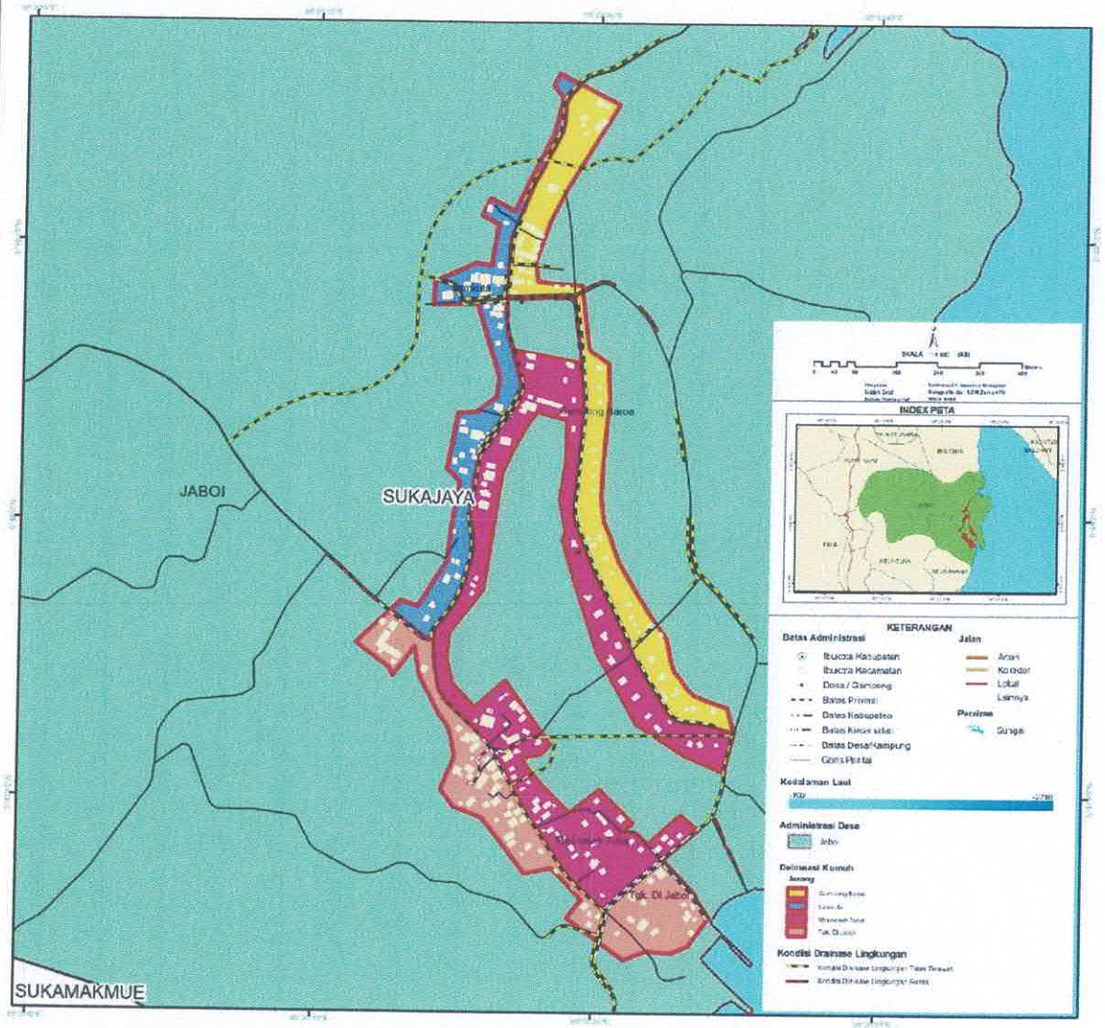

KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN GAMPONG JABOI





Panjang Drainase Eksisting	7.416,92 Meter
Panjang Drainase Ideal	9.325,36 Meter
Luas Genangan	0 Ha
Drainase Rusak	999,6 Ha

Kondisi ...

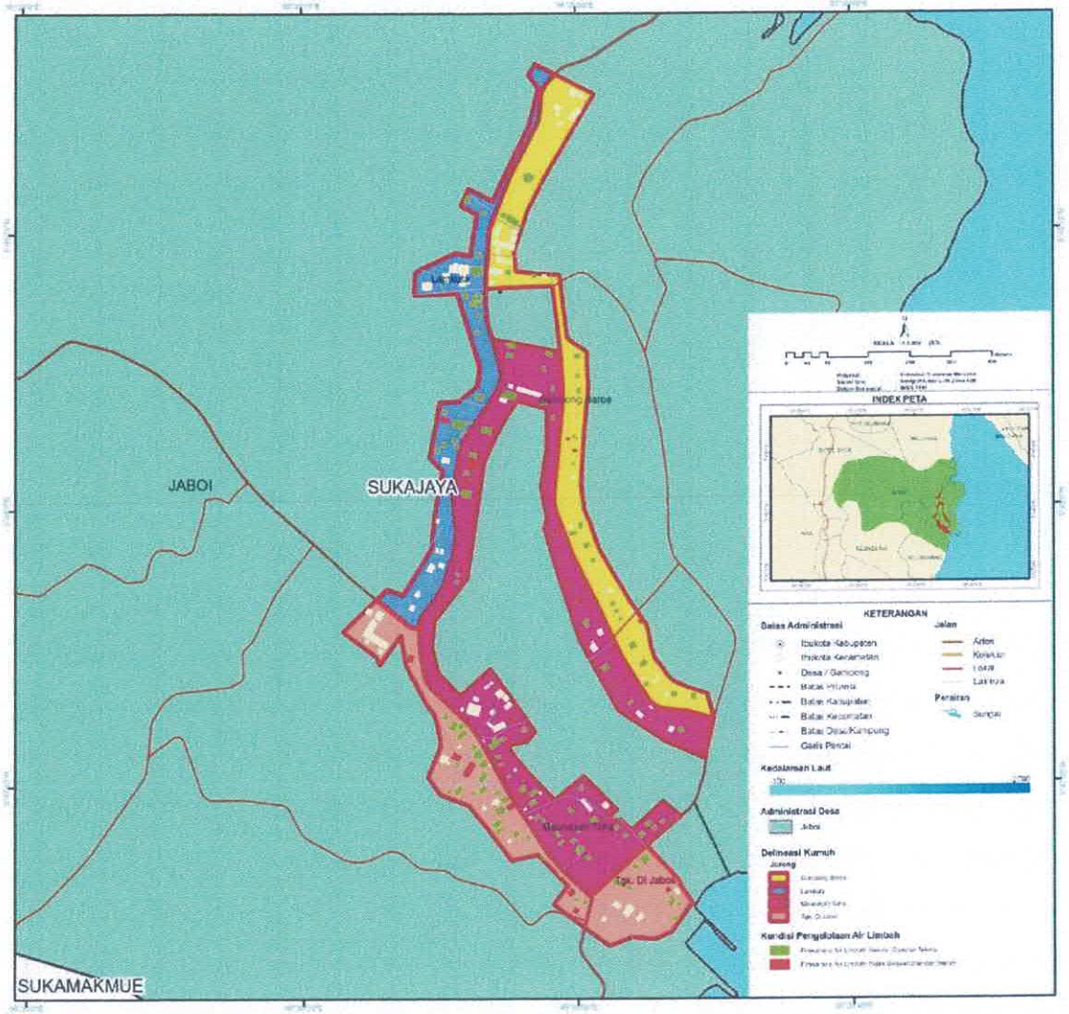

KONDISI PENGOLAHAN LIMBAH GAMPONG JABOI







Jumlah KK	178 KK
Sistem Pengolahan Air Limbah Tidak Sesuai Teknis	50 KK
Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	50 KK

Kondisi ...

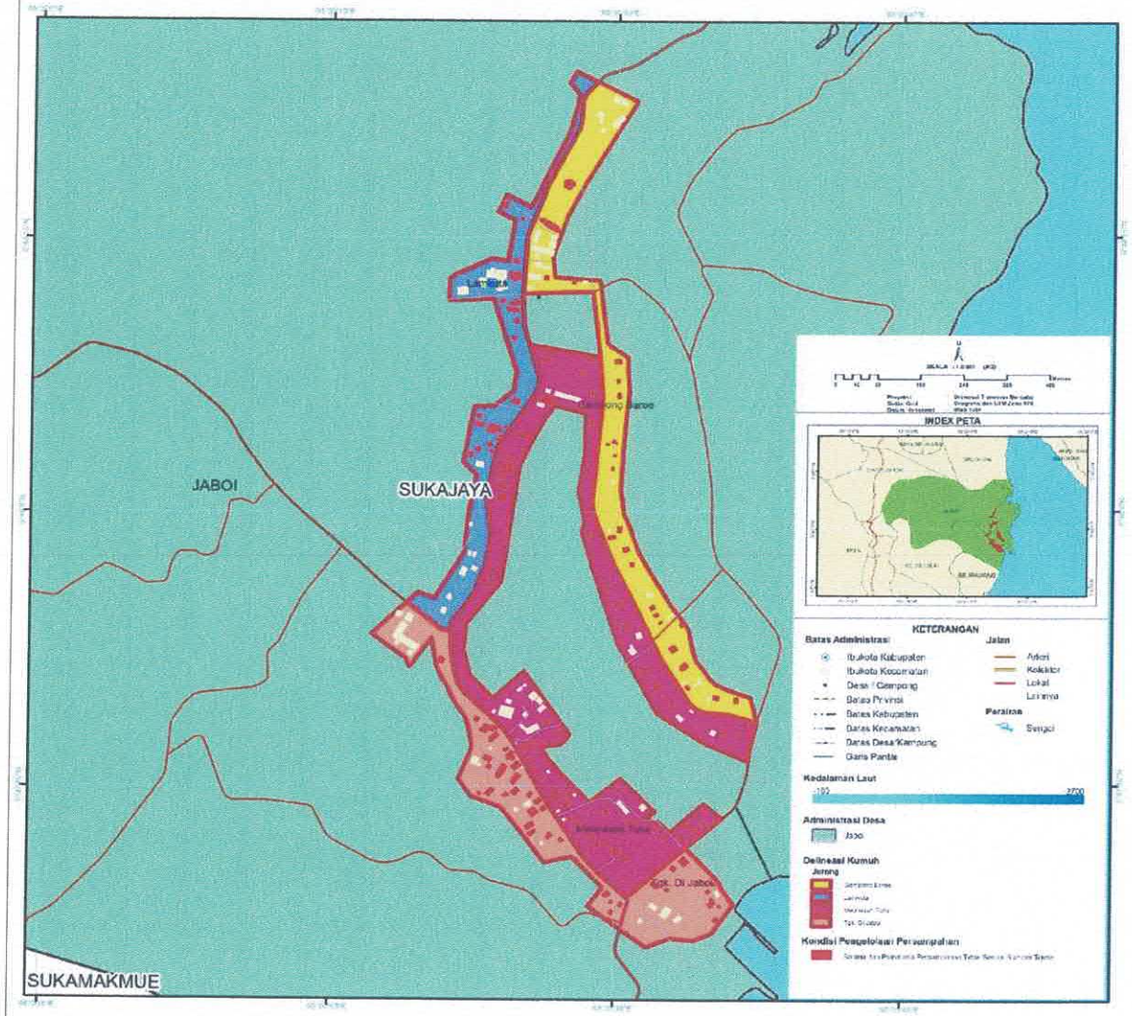

KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN GAMPONG JABOI





Jumlah KK	178 KK
Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	178 KK
Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	178 KK

Kondisi ...

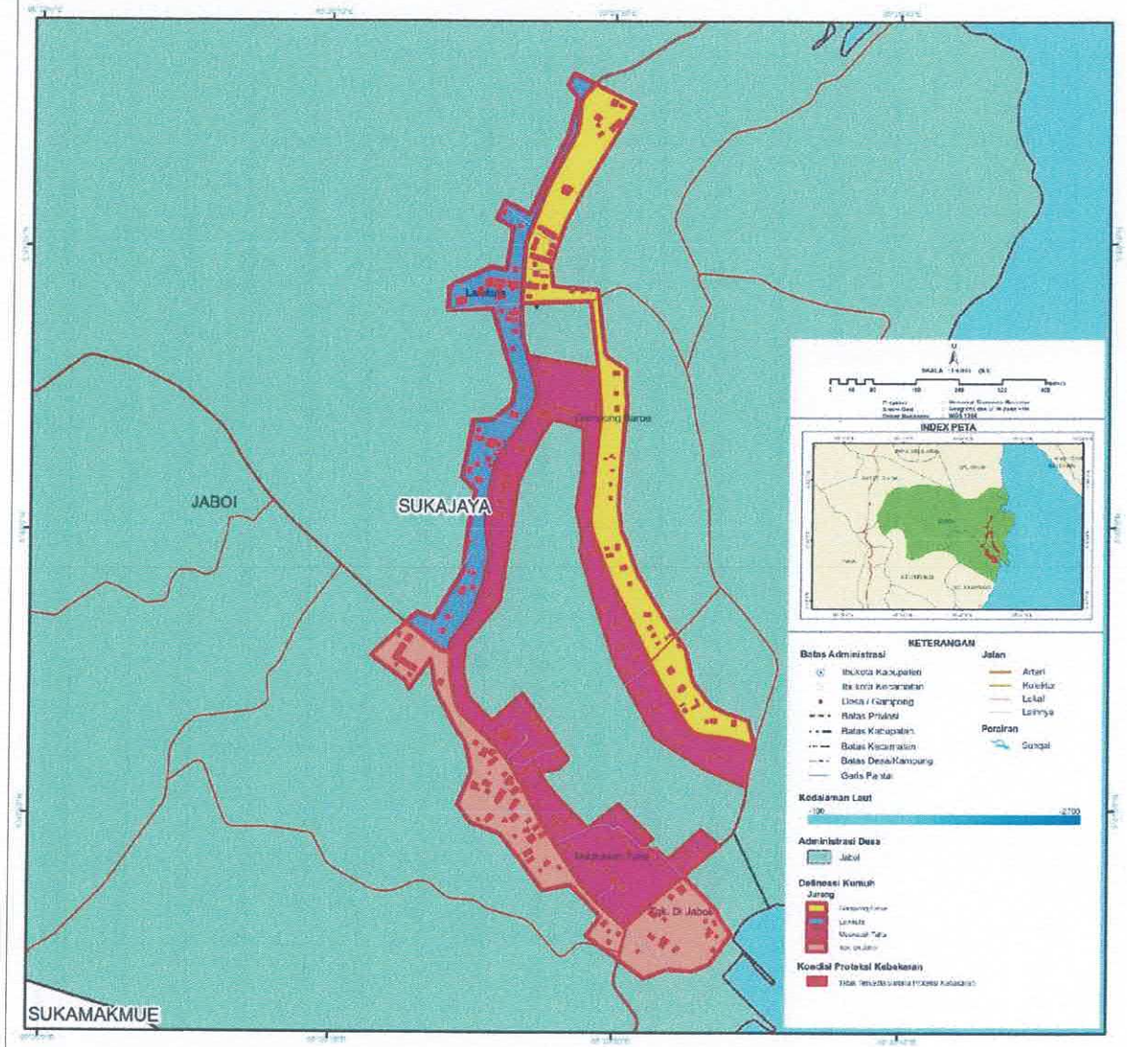

KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN GAMPONG JABOI





Jumlah KK	178 KK
Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	31 Unit
Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	165 Unit

DATA ...

DATA BASELINE NUMERIK KUMUH GAMPONG JABOI

Hasil pendataan baseline numerik Kumuh Gampong Jaboi berdasarkan 7 indikator kumuh menurut permen PUPR No.14 Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.10. Dapat disimpulkan nilai skoring Kumuh Gampong Jaboi adalah 26, yang tergolong kategori kumuh ringan. Tabel 3.10 Data Baseline Numerik Kumuh Gampong Jaboi

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH	Luas SK	23,928	Ha
Kab/Kota	: KOTA SABANG	Luas Verifikasi	23,928	Ha
Kecamatan	: SUKAJAYA	Jumlah Bangunan	165	Unit
Kawasan	: JABOI	Jumlah Penduduk	717	Jiwa
Kelurahan	: JABOI	Jumlah KK	178	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	24,00	Unit	14,55%	0
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	16,00	Unit	9,70%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				0,00%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	5.103,65	Meter	33,40%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				16,70%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	97,00	KK	54,49%	3
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	163,00	KK	91,57%	5
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				73,03%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	1.818,44	Meter	19,69%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	999,64	Meter	10,82%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				0,00%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	50,00	KK	28,09%	1
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	50,00	KK	28,09%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				28,09%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	178,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	178,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	31,00	Unit	18,79%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	165,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50,00%	

TOTAL NILAI	26
TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN
RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	38,26%
KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

- 60-80 KUMUH BERAT
- 38-59 KUMUH SEDANG
- 16-37 KUMUH RINGAN
- <16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

DS001-00000 — Gampong Baro

	5,58	Ha	
	5,58	Ha	
	37	Unit	
	158	Jiwa	
	40	KK	

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
6,00	Unit	16,22%	0
-	Ha	0,00%	0
3,00	Unit	8,11%	0
		0,00%	
-	Meter	0,00%	0
1.243,20	Meter	32,57%	1
		16,28%	
40,00	KK	100,00%	5
40,00	KK	100,00%	5
		100,00%	
-	Ha	0,00%	0
840,59	Meter	25,88%	1
344,49	Meter	10,61%	0
		8,63%	
5,00	KK	12,50%	0
5,00	KK	12,50%	0
		0,00%	
40,00	KK	100,00%	5
40,00	KK	100,00%	5
		100,00%	
-	Unit	0,00%	0
37,00	Unit	100,00%	5
		50,00%	

TOTAL NILAI	27
TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN
RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	39,27%
KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%

DS002-00000 — Lamkuta

	3,89	Ha	
	3,89	Ha	
	31	Unit	
	126	Jiwa	
	24	KK	

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
6,00	Unit	19,35%	0
-	Ha	0,00%	0
6,00	Unit	19,35%	0
		0,00%	
-	Meter	0,00%	0
286,92	Meter	5,57%	0
		0,00%	
4,00	KK	16,67%	0
9,00	KK	37,50%	1
		18,75%	
-	Ha	0,00%	0
405,00	Meter	17,87%	0
78,51	Meter	3,46%	0
		0,00%	
8,00	KK	33,33%	1
8,00	KK	33,33%	1
		33,33%	
24,00	KK	100,00%	5
24,00	KK	100,00%	5
		100,00%	
31,00	Unit	100,00%	5
31,00	Unit	100,00%	5
		100,00%	

TOTAL NILAI	23
TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN
RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	36,01%
KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%

DS003-00000 — Meunasah Tuha

	9,32	Ha	
	9,32	Ha	
	54	Unit	
	240	Jiwa	
	60	KK	

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
6,00	Unit	11,11%	0
-	Ha	0,00%	0
2,00	Unit	3,70%	0
		0,00%	
-	Meter	0,00%	0
-	Meter	0,00%	0
		0,00%	
-	KK	0,00%	0
60,00	KK	100,00%	5
		50,00%	
-	Ha	0,00%	0
475,05	Meter	24,06%	0
336,21	Meter	17,03%	0
		0,00%	
26,00	KK	43,33%	1
26,00	KK	43,33%	1
		43,33%	
60,00	KK	100,00%	5
60,00	KK	100,00%	5
		100,00%	
-	Unit	0,00%	0
54,00	Unit	100,00%	5
		50,00%	

TOTAL NILAI	22
TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN
RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	34,76%
KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%

DS004-00000 — Tgk Di Jabol

	5,13	Ha	
	5,13	Ha	
	43	Unit	
	193	Jiwa	
	54	KK	

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
6,00	Unit	13,95%	0
-	Ha	0,00%	0
5,00	Unit	11,63%	0
		0,00%	
-	Meter	0,00%	0
2.518,24	Meter	64,81%	3
		32,40%	
53,00	KK	98,15%	5
54,00	KK	100,00%	5
		99,07%	
-	Ha	0,00%	0
97,80	Meter	0,00%	0
240,43	Meter	13,77%	0
		0,00%	
11,00	KK	20,37%	0
11,00	KK	20,37%	0
		0,00%	
54,00	KK	100,00%	5
54,00	KK	100,00%	5
		100,00%	
-	Unit	0,00%	0
43,00	Unit	100,00%	5
		50,00%	

TOTAL NILAI	28
TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN
RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	40,21%
KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%

Tabel 3.11 ...

Tabel 3.11 Profil Kumuh Gampong Beurawang

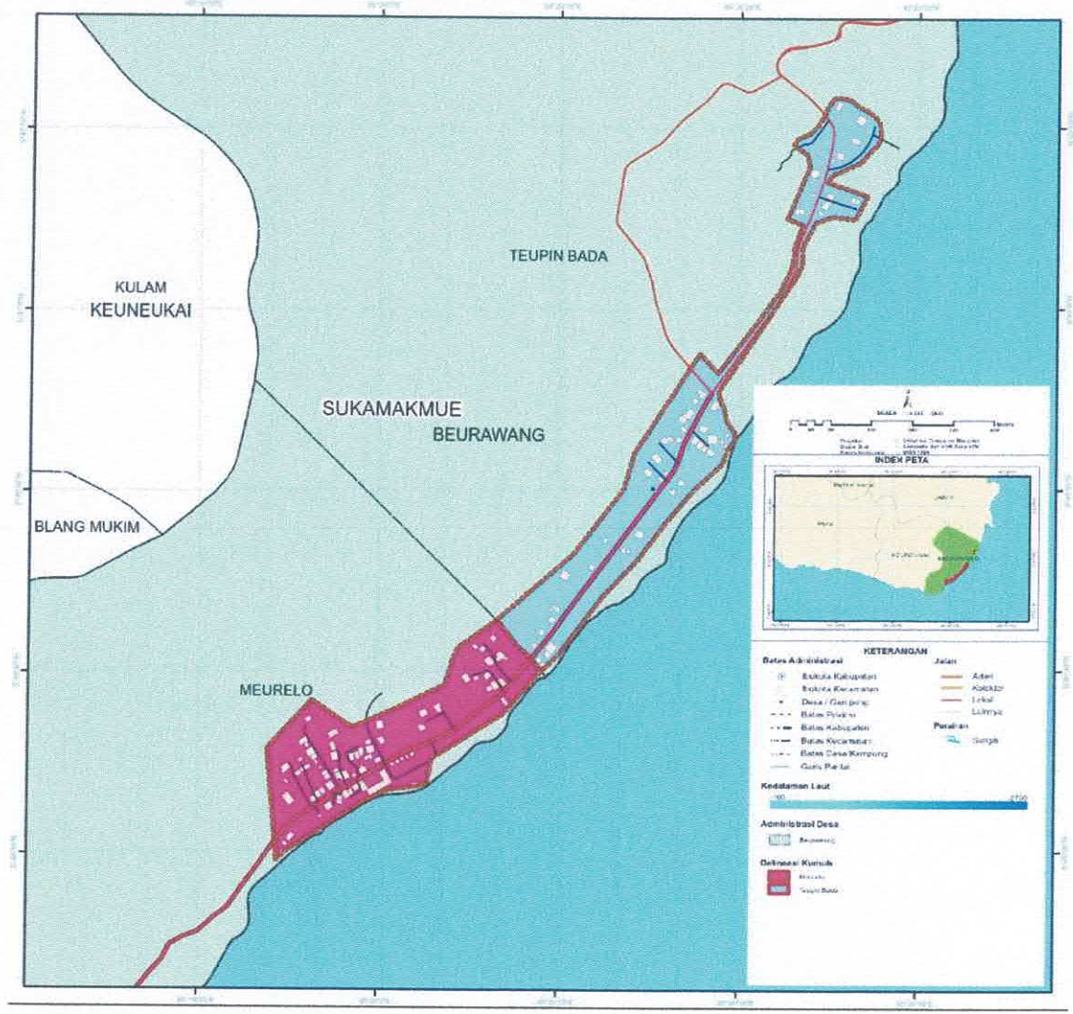

INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH		
Kawasan Kelurahan Kecamatan Kota Provinsi	Beurawang Beurawang Sukamakmue Sabang Aceh	No	Nama Dusun	Luas Kumuh (Ha)
Luas Deliniasi Kumuh	15,279	1	Teupin Bada	8,348
Koordinat Latitude Longtitude		2	Meurelo	6,931
Jumlah Bangunan Jumlah Penduduk Jumah KK	87 Unit 357 Jiwa 76 KK		Total	15,279
Kategori, Tipologi dan Karakteristik Permukimah Kumuh				
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan			
Tipologi Kumuh	Permukiman Kumuh Pesisir Pantai			

Karakteristik ...

	Karakteristik	Kawasan Gampong Nelayan	
	Permasalahan Utama		
	• Belum adanya sarana dan prasarana persampah yang memadai dan sesuai teknis • Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum • System pengolahan air limbah tidak sesuai standart teknis • Prasarana dan sarana pengolahan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis • Kualitas konstruksi drainase • Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan		

Jumlah ...

PERTIMBANGAN LAIN	BANGUNAN		LEGALITAS & STATUS TANAH		SOSIAL EKONOMI		JALAN LINGKUNGAN	
	Jumlah Bangunan	87 Unit	Bangunan Ber IMB	0	Jumlah penduduk	357 Jiwa	Total jaringan jalan	6.508,18 Meter
	Jumlah RTLH	24 Unit	Bangunan tidak Ber IMB	76 Unit	Jumlah KK	76 KK	Jalan rusak	482,25 Meter
	Ketidakteratura b Bangunan	19 Unit	Rumah Tangga tidak memiliki SHM	2 Unit	Jumlah MBR	67 KK	Jalan belum memadai (<2 m)	
	Kepadatan Bangunan	0	Bangunan tidak sesuai peruntukan	0			Kebutuhan jalan baru	0
								

Jumlah ...

AIR MINUM		DRAINASE		PENGOLAHAN LIMBAH		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		KONDISI KEBAKARAN	
Jumlah KRT	76 KK	Panjang drainase eksisting	743 Meter	Jumlah KK	76 KK	Jumlah KK	76 KK	Jumlah KK	87 Unit
Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1 KK	Panjang drainase idela	743 Meter	Sistem pengolahan air limbah tidak sesuai teknis	25 KK	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	76 KK	Ketidakterse diaan Prasarana Proteksi Kebakaran	0
Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	51 KK	Luas genangan	0 Ha	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	25 KK	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	76 KK	Ketidakterse diaan Sarana Proteksi Kebakaran	87 Unit
		Drainase rusak	334 Meter						
									

Kondisi ...

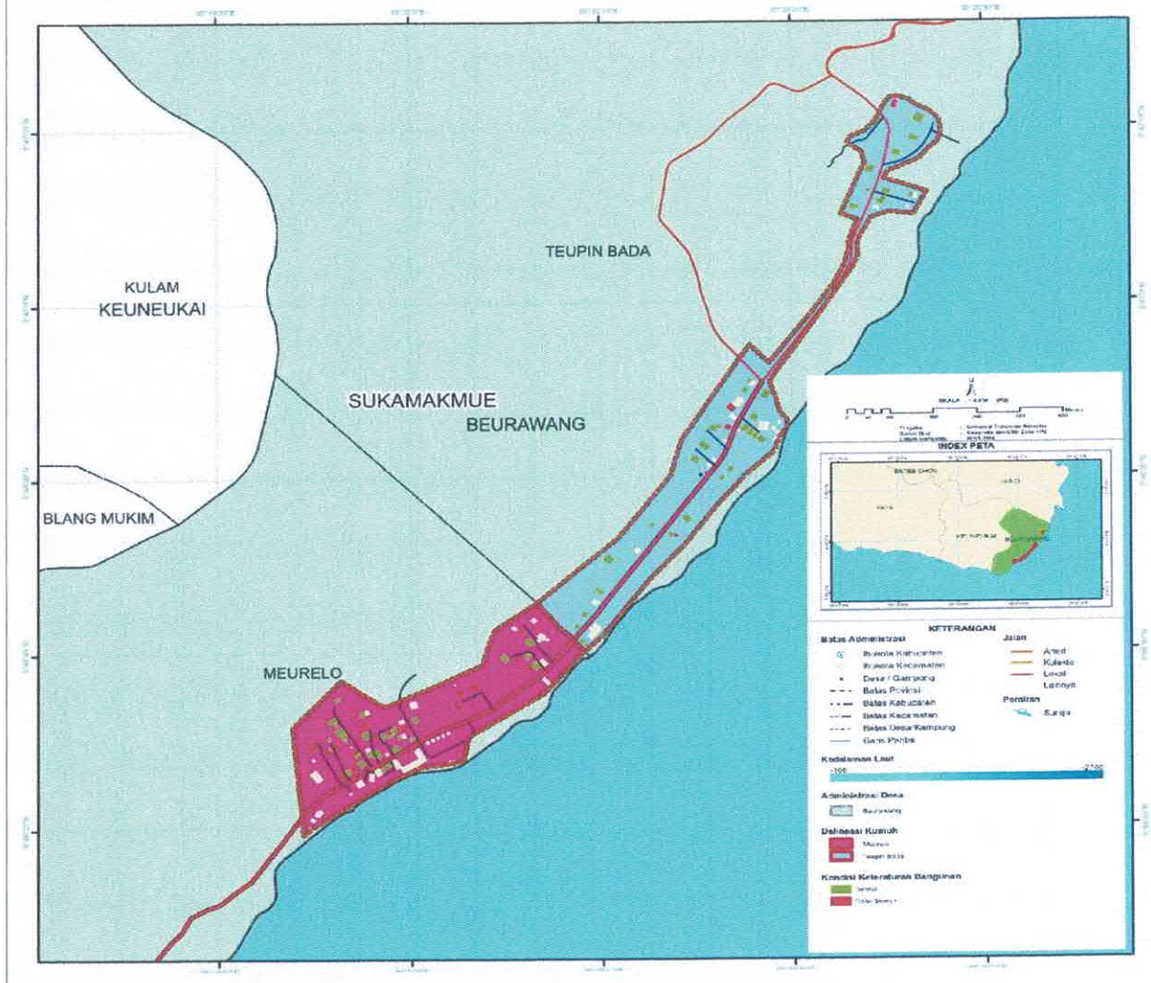

KONDISI BANGUNAN GEDUNG GAMPONG BEURAWANG







Jumlah Bangunan	87 Unit
Jumlah RTLH	24 Unit
Ketidakteraturab Bangunan	19 Unit
Kepadatan Bangunan	-
Ketidaksesuain dgn Persyaratan Teknis	24 Unit

Kondisi ...

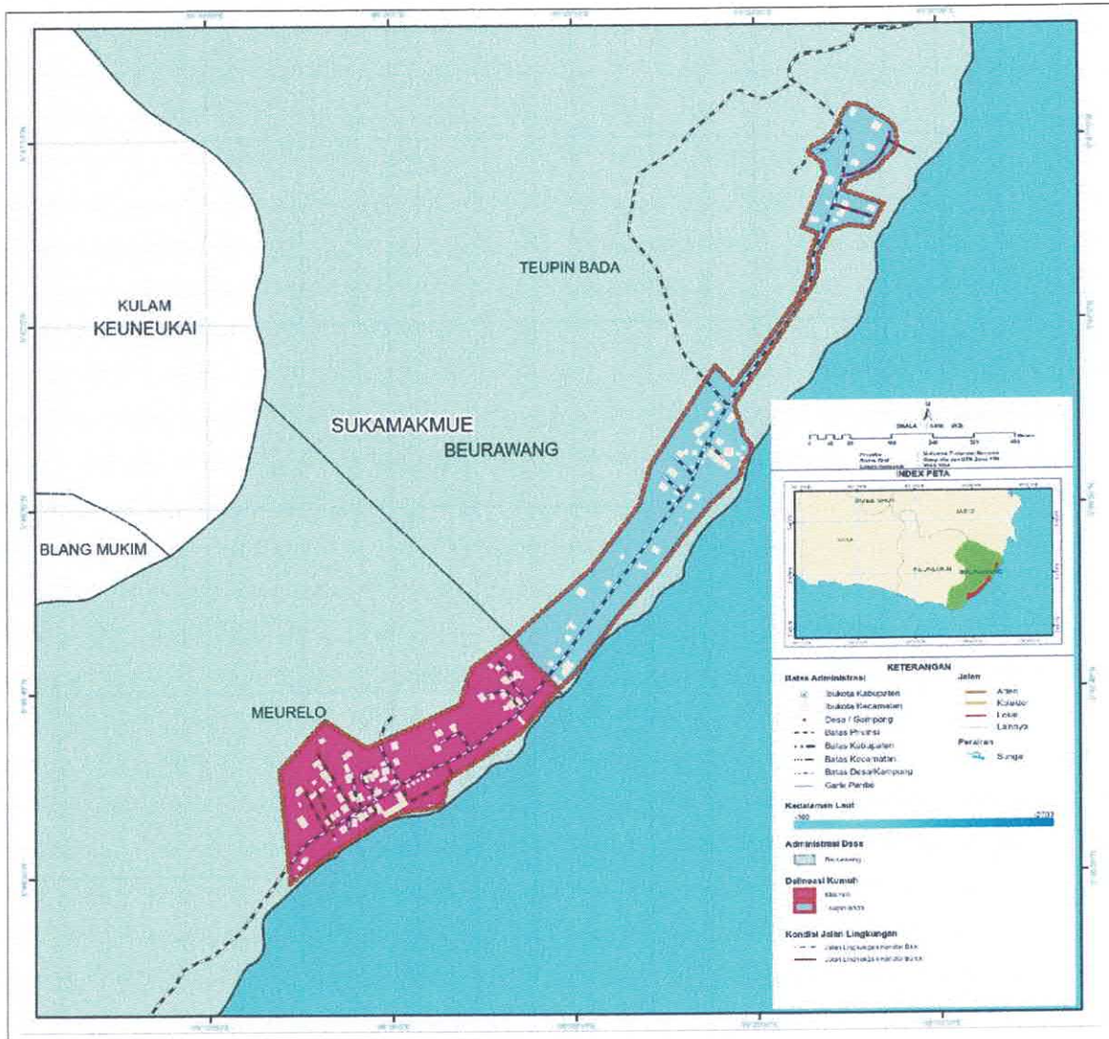

KONDISI JALAN LINGKUNGAN GAMPONG BEURAWANG





Total jaringan jalan	6.508,00 Meter
Jalan rusak	482,25 Meter
Kebutuhan jalan baru	0

Kondisi ...

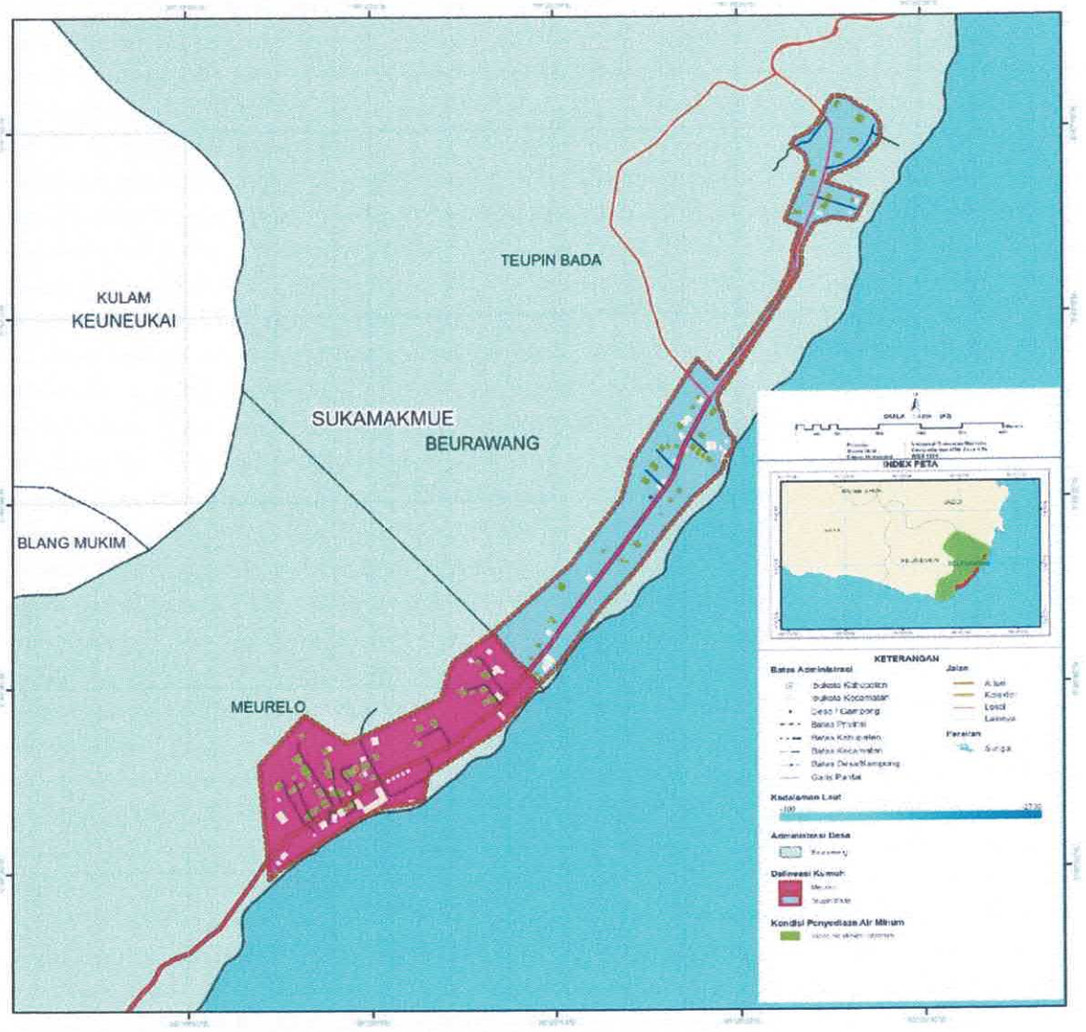

KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM GAMPONG BEURAWANG





Jumlah KK	76 KK
Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1 KK
Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	51 KK

Kondisi ...

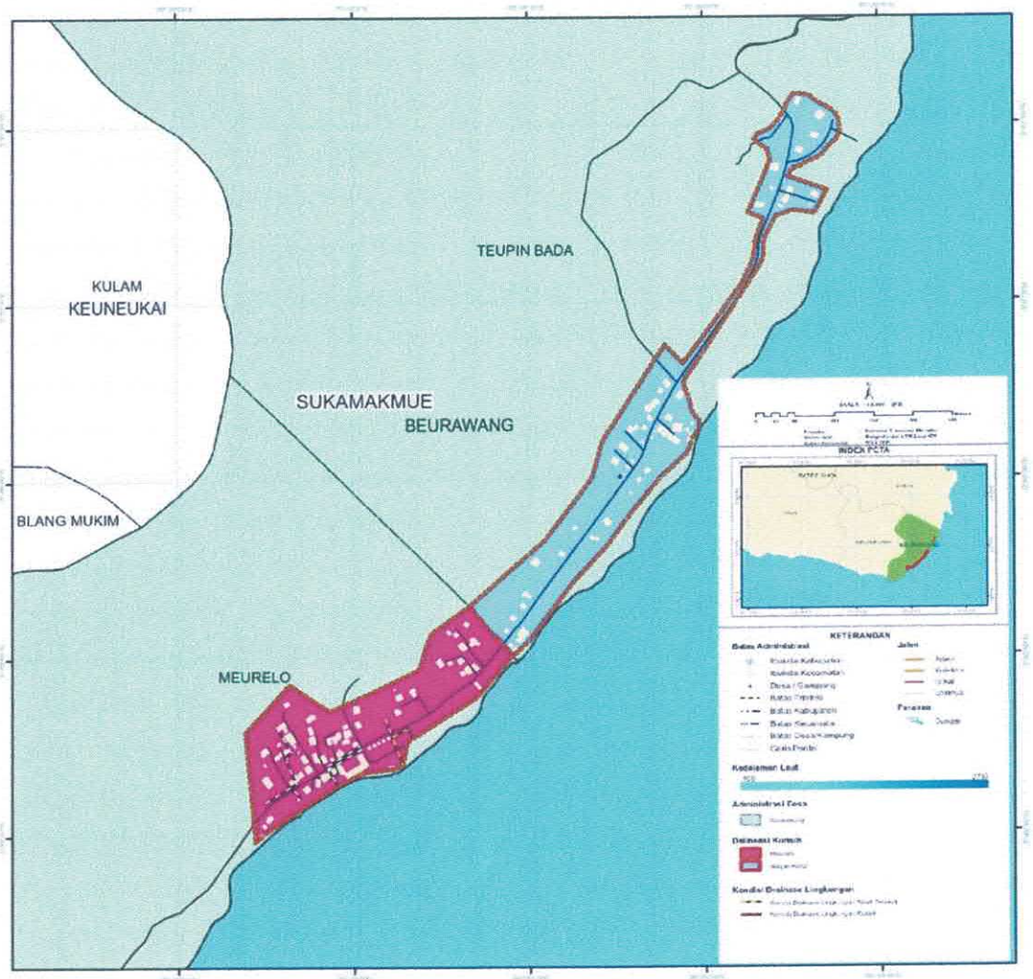

KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN GAMPONG BEURAWANG







Panjang Drainase Eksisting	743 Meter
Panjang Drainase Ideal	743 Meter
Luas Genangan	0 Ha
Drainase Rusak	334 Meter

Kondisi ...

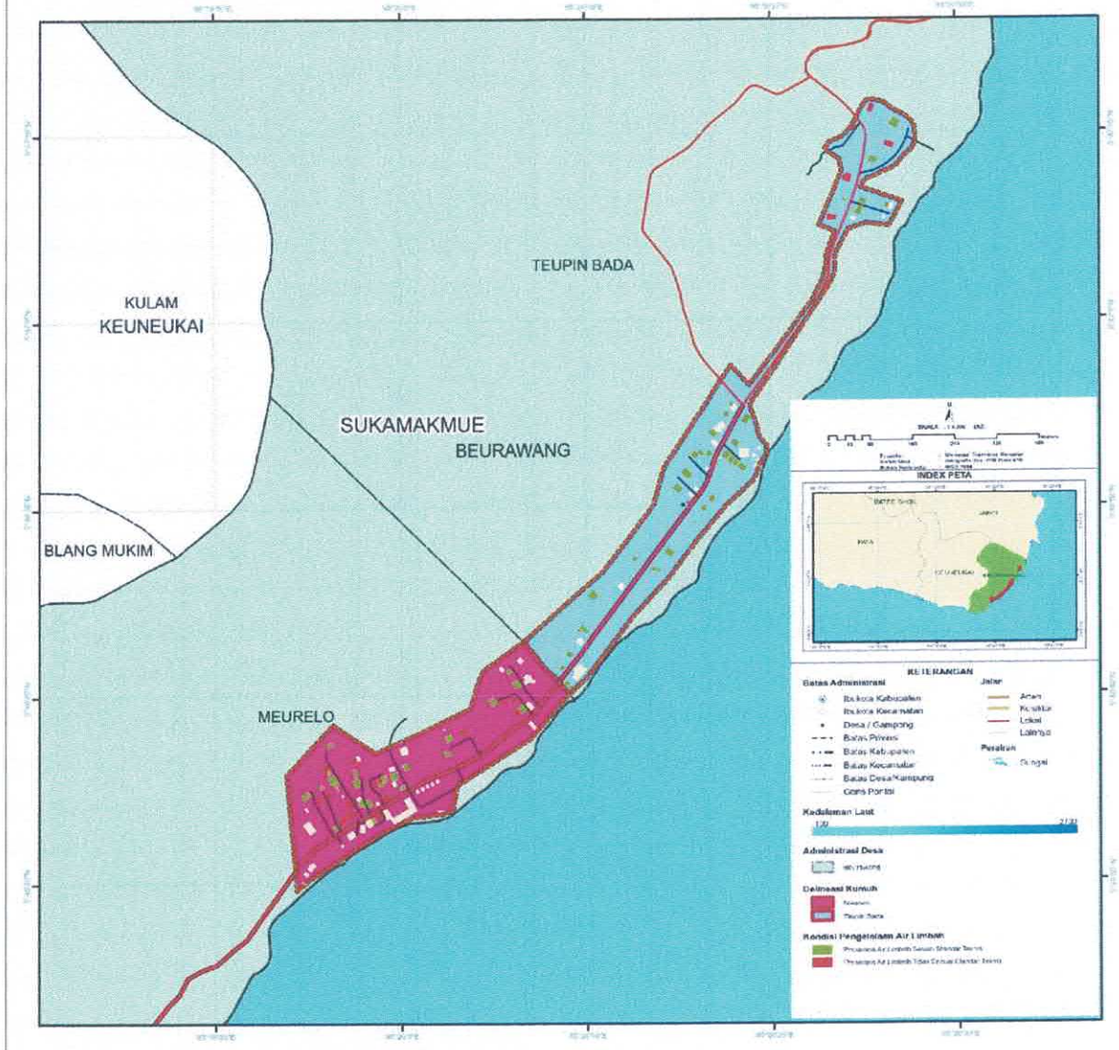

KONDISI PENGOLAHAN LIMBAH GAMPONG BEURAWANG







Jumlah KRT	76 KK
Sistem pengolahan air limbah tidak sesuai teknis	25 KK
Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	25 KK

Kondisi ...

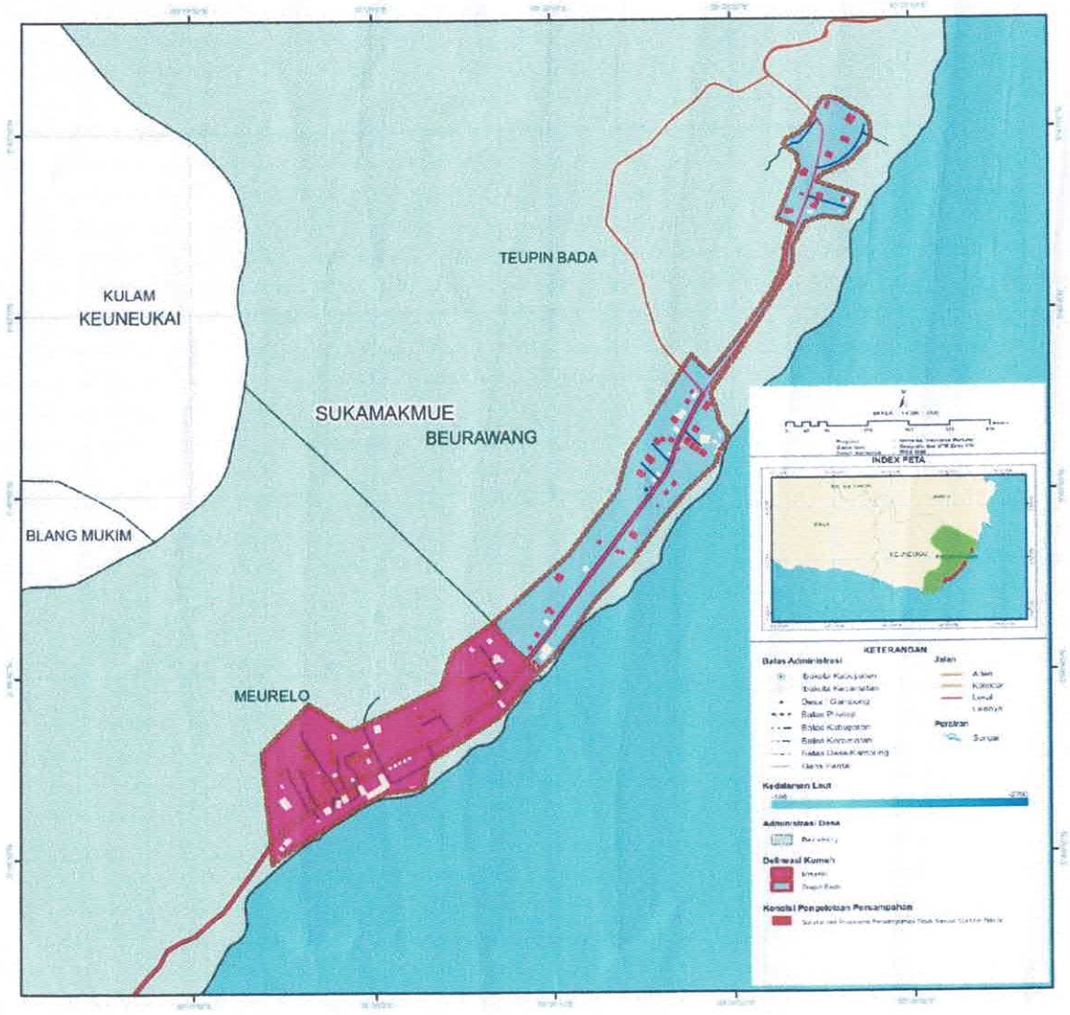

KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN GAMPONG BEURAWANG





Jumlah KK	76 KK
Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	76 KK
Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	76 KK

Kondisi ...

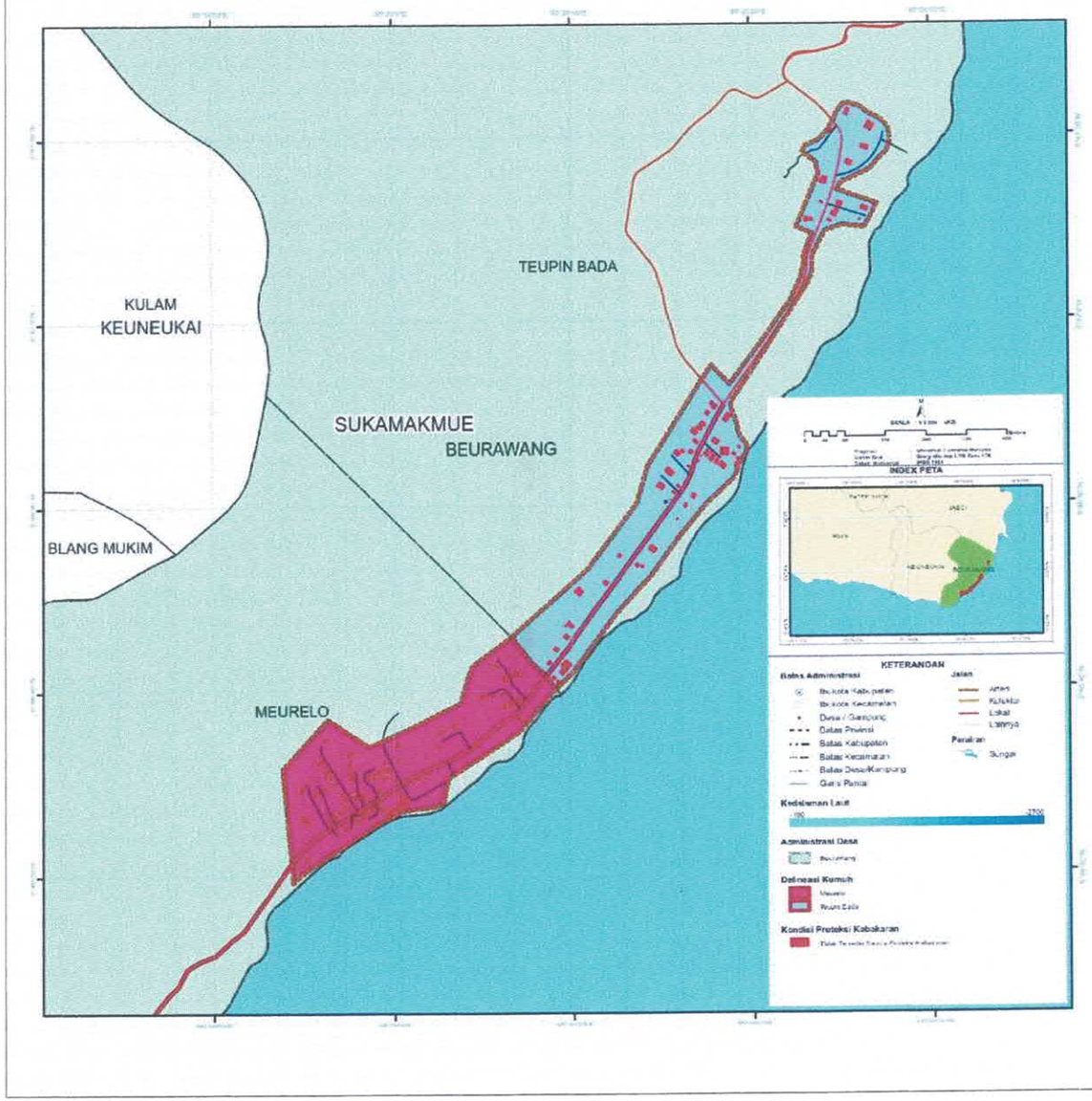

KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN GAMPONG BEURAWANG





Jumlah Bangunan	87 Unit
Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	0
Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	87 Unit

DATA ...

DATA BASELINE NUMERIK KUMUH GAMPONG BEURAWANG

Hasil pendataan baseline numerik Kumuh Gampong Beurawang berdasarkan 7 indikator kumuh menurut permen PUPR No.14 Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.12. Dapat disimpulkan nilai skoring Kumuh Gampong Beurawang adalah 21, yang tergolong dalam kategori kumuh ringan.

3.12 Data Baseline Numerik Kumuh Gampong Beurawang

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

Provinsi	: ACEH	Luas SK	15,279	Ha
Kab/Kota	: KOTA SABANG	Luas Verifikasi	15,279	Ha
Kecamatan	: SUKAMAKMUE	Jumlah Bangunan	87	Unit
Kawasan	: BEURAWANG	Jumlah Penduduk	357	Jiwa
Kelurahan	: BEURAWANG	Jumlah KK	76	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	19,00	Unit	21,84%	0
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	24,00	Unit	27,59%	1
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				9,20%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	482,25	Meter	7,41%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				0,00%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1,00	KK	1,32%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	51,00	KK	67,11%	3
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				33,55%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	334,00	Meter	44,95%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				14,98%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	25,00	KK	32,89%	1
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	25,00	KK	32,89%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				32,89%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	76,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	76,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	87,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50,00%	
			TOTAL NILAI		22
			TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		34,38%
			KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN
60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

DS001-00000

	6,931	Ha
	6,931	Ha
	43	Unit
	177	Jiwa
Meurelo	50	KK

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
14,00	Unit	32,56%	1
-	Ha	0,00%	0
12,00	Unit	27,91%	1
		20,16%	
-	Meter	0,00%	0
482,25	Meter	16,10%	0
		0,00%	
-	KK	0,00%	0
50,00	KK	100,00%	5
		50,00%	
-	Ha	0,00%	0
-	Meter	0,00%	0
102,00	Meter	19,96%	0
		0,00%	
22,00	KK	44,00%	1
22,00	KK	44,00%	1
		44,00%	
50,00	KK	100,00%	5
50,00	KK	100,00%	5
		100,00%	
-	Unit	0,00%	0
43,00	Unit	100,00%	5
		50,00%	
	TOTAL NILAI		24
	TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		37,74%
	KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

DS002-00000

	8,348	Ha
	8,348	Ha
	44	Unit
	180	Jiwa
Teupin Bada	26	KK

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
5,00	Unit	11,36%	0
-	Ha	0,00%	0
12,00	Unit	27,27%	1
		9,09%	
-	Meter	0,00%	0
-	Meter	0,00%	0
		0,00%	
1,00	KK	3,85%	0
1,00	KK	3,85%	0
		0,00%	
-	Ha	0,00%	0
-	Meter	0,00%	0
232,00	Meter	100,00%	5
		33,33%	
3,00	KK	11,54%	0
3,00	KK	11,54%	0
		0,00%	
26,00	KK	100,00%	5
26,00	KK	100,00%	5
		100,00%	
-	Unit	0,00%	0
44,00	Unit	100,00%	5
		50,00%	
	TOTAL NILAI		21
	TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		27,49%
	KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

BAB IV ...

BAB IV

PERMASALAHAN PERUMAHAN & PERMUKIMAN KUMUH

4.1 ISU DAN PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Banyak permasalahan perkotaan yang berakar pada kawasan permukiman, seperti tidak meratanya penyediaan infrastruktur permukiman perkotaan, ketidaktersediaan lingkungan permukiman yang layak, dan sebagainya yang pada akhirnya berimplikasi pada terciptanya permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Permasalahan yang ditimbulkan dari munculnya kawasan permukiman kumuh seperti lingkungan yang tidak sehat, pemanfaatan lahan ilegal, dan lain sebagainya tidak hanya berpengaruh terhadap internal kawasan itu sendiri namun juga terhadap kawasan sekitarnya dan sistem jaringan infrastruktur perkotaan secara umum.

Belum efektifnya penanganan permukiman kumuh (khususnya dalam konteks perkotaan) hingga saat ini diakibatkan oleh beberapa kondisi sebagai berikut:

a. Tuntutan yang tinggi terhadap pemenuhan kebutuhan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan belum didasarkan pada kebijakan dan strategi pembangunan yang memadai, tepat, berskala kabupaten/kota, dan berbasis kawasan;
b. Kebijakan untuk meningkatkan pembangunan kota tidak hanya berfokus pada upaya peningkatan pertumbuhan perekonomian serta pembangunan infrastruktur skala kota dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat perkotaan secara umum, namun juga memperhatikan kebutuhan penanganan kawasan kumuh;
c. Terdapat ketidaksinkronan antar instansi di daerah dalam menentukan kebijakan penanganan terutama penentuan lokasi dan bentuk penanganan yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya;
d. Belum terdapatnya strategi penanganan dan pentahapan baik dalam tahapan kegiatan maupun kawasan penanganan pada program penanganan permukiman kumuh skala kota sehingga penanganan kumuh bersifat parsial;
e. Upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang menjadi tugas dan wewenang pemerintah daerah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011) belum diimbangi dengan kemampuan pemerintah daerah dalam hal kapasitas SDM dan pembiayaan;

f. Peran ...

f. Peran Pokja PKP yang belum optimal sebagai penggerak kolaborasi, sinkronisasi, dan harmonisasi penanganan kumuh;
g. Proses kemitraan/keterpaduan yang masih sulit dilakukan karena pembagian kewenangan yang masih sebatas sektoral;
h. Terdapat permasalahan sosial/ adat istiadat/ pola pikir masyarakat dan pemerintah daerah;
i. Terdapat permasalahan legalitas tanah yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan kepemilikan yang sah atas tanah;
j. Terdapat permukiman kumuh perkotaan yang ada pada lahan ilegal (sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan rel KA, tanah Pelindo, tanah militer/TNI); dan
k. Terdapat Desain Kawasan dan DED yang tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Masalah yang terjadi akibat adanya permukiman kumuh, khususnya di kota-kota besar diantaranya adalah wajah perkotaan menjadi memburuk dan kotor, penertiban bangunan sukar dijalankan, banjir, penyakit menular dan kebakaran sering melanda permukiman. Di sisi lain bahwa kehidupan penghuninya terus merosot baik kesehatannya, maupun sosial kehidupan mereka yang terus terhimpit jauh di bawah garis kemiskinan. Secara umum permasalahan yang sering terjadi di daerah permukiman kumuh adalah:

a. Ukuran bangunan yang sangat sempit, tidak memenuhi standar untuk bangunan layak huni
b. Rumah yang berhimpitan satu sama lain membuat wilayah permukiman rawan akan bahaya kebakaran;
c. Sarana jalan yang sempit dan tidak memadai;
d. Tidak tersedianya jaringan drainase;
e. Kurangnya suplai air bersih; dan
f. Jaringan listrik yang tidak teratur serta fasilitas MCK yang tidak memadai.

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang ada tersebut, diperlukan beberapa pertimbangan, antara lain:

a. Bahwa dalam penanganan permukiman kumuh memerlukan adanya arahan yang jelas hingga ke tataran teknis operasional dan selaras dengan arah pengembangan kabupaten/kota;
b. Bahwa dalam penanganan permukiman kumuh diperlukan arahan yang didasarkan pada kebutuhan

kawasan dan berorientasi pada penanganan akar masalahnya;

c. Bahwa penanganan permukiman kumuh perlu diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan, dengan memuat unsur pencegahan dan peningkatan kualitas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
d. Bahwa dalam pengembangan kabupaten/kota dan kawasan permukiman perkotaan terdapat kebutuhan untuk merumuskan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang mampu mendukung dan mengintegrasikan seluruh strategi sektoral yang terkait.

Merujuk pada Keputusan Walikota Kota Sabang No. 650/351/2020 Tanggal 26 Maret Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Sabang. Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Sabang tersebar di 4 Kawasan dengan total luasan kumuh sebesar 123,713 Ha. Sebaran kawasan kumuh Kota Sabang dapat dilihat pada table berikut:

Table 4.1 Sebaran Permukiman Kumuh Kota Sabang

NO	KECAMATAN	KAWASAN	GAMPONG	JURONG	LUAS DELINIASI KUMUH (HA)	TOTAL DELINIASI KAWASAN (HA)
1	Sukajaya	Kawasan Paya - Keuneukai	Keuneukai	Lhok	16,002	57,495
				Pasi	10,809	
				Kulam	2,520	
				Blang Mukim	5,492	
			Paya	Pante Jaya	4,457	
				Tgk. Chok Alue Kala	15,088	
				Cot Preh	1,894	
				Ditremon	1,233	
2	Sukajaya	Kawasan Beurawang	Beurawang	Teupin Bada	8,348	15,279
				Meurelo	6,931	
3	Sukajaya	Kawasan Jaboi	Jaboi	Meunasah Tuha	9,322	23,928
				Tgk. Di Jaboi	5,133	
				Lamkuta	3,890	
				Gampong Baroe	5,583	
4	Sukakarya	Kawasan Krueng Raya	Krueng Raya	Batu Singa Berfakta	9,240	*27,011*
				Lhok Drien	3,039	
				Mustia Kolam Bermata	7,161	
				Teupin Cirik	7,571	
						123,713 Ha

Selanjutnya ...

Selanjutnya, beberapa kondisi aktual Kota Sabang terkait dengan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Sabag, dapat dijelaskan melalui tujuh sektor yakni permukiman, jalan/aksesibilitas, drainase, sanitasi, air minum, persampahan, dan proteksi kebakaran. Secara lebih rinci, masing-masing isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Sabang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Isu dan Permasalahan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Sabang.
Sumber : Kajian dan Analisis Dokumen. RP2KPKP 2022-2025

No	Aspek	Isu dan Permasalahan
1	Permukiman	1. Besarnya kebutuhan rumah tempat tinggal yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar 1.449 unit 2. Kawasan permukiman yang belum tertata dengan baik 3. Status lahan permukiman belum sepenuhnya memiliki sertifikat
2	Jalan dan Jembatan	1. Persentase jalan kota dalam kondisi baik belum optimal 2. Masih adanya sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar 3. Konektifitas jaringan jalan belum optimal 4. Kondisi mantap Jalan Kota sebesar 89,72%
3	Air Minum	1. Belum optimalnya sistem penyediaan air minum dan pengembangan air minum terlindungi 2. Kurangnya ketersediaan prasarana sarana sumber daya air terkait pengelolaan sumber air baku untuk air minum dan sistem jaringan distribusi yang belum baik. 3. Water Treatment Plan yang belum cukup dan lokasinya terlalu jauh dari wilayah layanan, sehingga mengakibatkan waktu distribusi air tidak dapat melayani setiap hari (24 jam). 4. Kebocoran pipa distribusi, pemasangan sambungan pipa illegal menyebabkan hilangnya volume air bersih yang terdistribusi. 5. Capaian air minum layak dan aman sebesar 89, 87%
4	Drainase	1. Sistem jaringan drainase belum terintegrasi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya, 2. Persentase kondisi jaringan drainase lingkungan belum optimal. 3. Jaringan drainase lingkungan yang tidak saling terhubung. 4. Kawasan permukiman yang tergenang. 5. Belum optimalnya fungsi drainase akibat timbunan sampah dilingkungan permukiman. 6. Luasan Genangan sebesar 0 Ha.

5. Air Limbah ...

No	Aspek	Isu dan Permasalahan
5	Air Limbah	1. Prilaku masyarakat yang masih menggunakan badan-badan sebagai tempat pembuangan limbah. 2. Tingginya penggunaan sarana pengelolaan limbah yang belum sesuai teknis. 3. Rendahnya pelayanan dan pengelolaan kegiatan penyehatan lingkungan sanitasi yang layak baik. 4. Belum optimalnya dan ketersediaan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) kota, komunal, serta kawasan; 5. Capaian akses Sanitasi layak sebesar 99,20 %
6	Persampahan	1. Belum optimalnya sinergisitas kerjasama dalam pengelolaan sampah kota secara regional. 2. Rendahnya cakupan pelayanan persampahan. 3. Kurangnya sarana dan prasarana persampahan. 4. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan serta kurang berfungsinya sistem pengawasan dan pengendalian 5. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan dan pemilahan sampah.,
7	Kebakaran	1. Belum tersedianya sarana dan prasarana proteksi kebakaran ditingkat kawasan maupun lingkup hunian.

4.2 Kriteria Dan Indikator Penilaian Penentuan Klasifikasi Dan Skala Prioritas Penanganan

Kriteria dan indikator penentuan kawasan prioritas berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh telah menetapkan bahwa dalam mengidentifikasi kondisi kekumuhan ada 3 (tiga) aspek utama yang harus menjadi tinjauan, yakni:

A. Identifikasi Kondisi Kekumuhan;
   1. Kondisi Bangunan Gedung
   2. Kondisi Jalan Lingkungan
   3. Kondisi Penyediaan Air Minum
   4. Kondisi Drainase Lingkungan
   5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah
   6. Kondisi Pengelolaan Persampahan
   7. Kondisi Proteksi Kebakaran
B. Identifikasi Legalitas Lahan; dan
C. Identifikasi Pertimbangan Lain

Secara lebih rinci, masing-masing aspek tinjauan dalam penentuan urutan kawasan prioritas ini akan dijabarkan dengan masing-masing kriteria, indikator, parameter, nilai serta sumber data seperti yang terlampir pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3 ...

Tabel 4.3 Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan Prioritas
Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
A. Identifikasi Kondisi Kekumuhan					
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; 2. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kavling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observas
			51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3	
			25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1	
	b. Tingkat kepadatan bangunan	1. KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; 2. KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; 3. Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: 4. Untuk kota metropolitan dan kota besar>250 unit/Ha; 5. Untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha.	76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Dokumen IMB, Format Isian, Peta Lokas
			51% - 75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	3	
			25% - 50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	1	
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan: 1. Pengendalian dampak lingkungan 2. Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5	Wawancara, Format Isian, Dokumen IMB, Observasi
			51% - 75% bangunan pada lokasi tidak Memenuhi persyaratan teknis	3	
			25% - 50% bangunan pada lokasi tidak Memenuhi persyaratan teknis	1	

3. Keselamatan ...

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		3. Keselamatan bangunan gedung 4. Kesehatan bangunan gedung 5. Kenyamanan bangunan gedung 6. Kemudahan bangunan gedung			
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3	
			25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1	
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3	
			25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1	
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Akses aman air minum tidak tersedia	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
			51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3	
			25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1	
	b. Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuh	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
			51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3	
			25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1	
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN		Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau	5	Wawancara,

a. Drainase ...

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	a. Drainase lingkungan tidak tersedia	saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	tidak terhubung dengan hierarki di atasnya		Format Isian, Peta RIS, Observasi
			51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hierarki di atasnya	3	
			25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hierarki di atasnya	1	
	b. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	76% - 100% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			51% - 75% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	3	
			25% - 50% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	1	
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	76% - 100% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			51% - 75% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	3	
			25% - 50% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	1	
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. Sistem pengelolaan air limbah tidak	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/ kloset yang tidak	76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5	Wawancara, Format Isian, Peta

memenuhi ...

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	memenuhi persyaratan teknis	terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat	51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3	RIS, Observasi
			25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1	
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak memenuhi persyaratan teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: 1. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; 2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.	76% - 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			51% - 75% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	3	
			25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	1	
6. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi dengan persyaratan teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: 1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; 2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan; 3. sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan 4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.	76% - 100% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			51% - 75% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3	
			25% - 50% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1	
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. pewadahan dan pemilahan domestik;	76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5	Wawancara, Format Isian, Peta
			51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3	

memenuhi ...

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	memenuhi persyaratan teknis	2. pengumpulan lingkungan; 3. pengangkutan lingkungan; 4. pengolahan lingkungan	25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1	RIS, Observasi
			25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	1	
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. pasokan air; 2. jalan lingkungan; 3. sarana komunikasi; 4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan; dan	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3	
			25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1	
	b. Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. mobil pompa; 3. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan 4. peralatan pendukung lainnya	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3	
			25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1	
B. Identifikasi Legalitas Lahan					
Legalitas Lahan	a. Kejelasan Status Penguasaan Lahan	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: 1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertif ikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau 2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah	Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(+)	Wawancara, Format Isian, Dokumen Pertanahan, Observas
			Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(-)	

b. Kesesuaian ...

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	b. Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR	(+)	Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi
			Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR perumahan/permukiman sesuai RTR	(-)	
C. Identifikasi Pertimbangan Lain					
Petimbangan Lain	a. Nilai Strategis Lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada : 1. fungsi strategis kabupaten/kota; 2. bukan fungsi strategis kabupaten/kota	Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota	5	Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi
			Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis Kabupaten/ kota	1	
	b. Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi : 1. Rendah yaitu kepadatan penduduk di baw ah 150 jiwa/ha; 2. Sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151– 200 jiwa/ha; 3. Tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201– 400 jiwa/ha; 4. Sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha	1. Untuk metropolitan & Kota Besar Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha 2. Untuk Kota Sedang & Kota Kecil Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 Jiw a/Ha	5	Wawancara, Format Isian, Statistik, Observasi
			Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 151 - 200 Jiwa/Ha	3	
			Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiw a/Ha	1	

c. Kondisi ...

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	c. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa : 1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; 2. Potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; 3. Potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat	Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
			Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara	1	

Berdasarkan ...

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan sesuai formula penilaian tersebut di atas, maka selanjutnya lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dikelompokkan dalam berbagai klasifikasi sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi merupakan:
   a. Kumuh berat bila memiliki nilai 60-80;
   b. Kumuh sedang bila memiliki nilai 38-59;
   c. Kumuh berat bila memiliki nilai 16-37;
2. Berdasarkan pertimbangan lain, suatu lokasi memiliki:
   a. Pertimbangan lain tinggi bila memiliki nilai 11-15
   b. Pertimbangan lain sedang bila memiliki nilai 6-10;
   c. Pertimbangan lain rendah bila memiliki nilai 1-5;
3. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi memiliki:
   a. Status lahan legal bila memiliki nilai positif (+);
   b. Status lahan tidak legal bila memiliki nilai negatf (-).

Berdasarkan penilaian tersebut, maka terdapat 18 kemungkinan klasifikasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yaitu sebagai berikut:

1. A1 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
2. A2 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
3. A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;
4. A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
5. A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
6. A6 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal;
7. B1 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
8. B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
9. B3 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;

10. B4 ...

10. B4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
11. B5 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
12. B6 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal;
13. C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
14. C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
15. C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;
16. C4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
17. C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
18. C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal.

Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, maka dapat ditentukan skala prioritas penanganan, sebagai berikut:

1. Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2;
2. Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2;
3. Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2;
4. Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4;
5. Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4;
6. Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4;
7. Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6;
8. Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6;
9. Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6

Tabel. 4.4 ...

Tabel 4.4 Penilaian Lokasi Berdasarkan Kriteria, Indikator Dan Parameter Kekumuhan

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	Lokasi Permukiman Kumuh				
						Keunekai	Paya	Beurawang	Jaboi	Krueng Raya
	A. Identifikasi Kondisi Kekumuhan									
1	KONDISI BANGUNAN GEDUNG	Ketidakteraturan Bangunan	1. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; 2. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kavling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5					
				51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3					
				25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1		1	1		
		Tingkat kepadatan bangunan	1. KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; 2. KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; 3. Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: 4. Untuk kota metropolitan dan kota besar>250 unit/Ha; 5. Untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha.	76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5					
				51% - 75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	3					
				25% - 50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	1					

Ketidaksesuaian ...

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	Lokasi Permukiman Kumuh				
						Keunekai	Paya	Beurawang	Jaboi	Krueng Raya
		Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan: 1. Pengendalian dampak lingkungan 2. Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/ atau prasarana/ sarana umum 3. Keselamatan bangunan gedung 4. kesehatan bangunan gedung 5. Kenyamanan bangunan gedung 6. Kemudahan bangunan gedung	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5					
				51% - 75% bangunan pada lokasi tidak Memenuhi persyaratan teknis	3					
				25% - 50% bangunan pada lokasi tidak Memenuhi persyaratan teknis	1					
2	KONDISI JALAN LINGKUNGAN	Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5					
				51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3					
				25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1					
		Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5					
				51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3					

25% ...

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	Lokasi Permukiman Kumuh				
						Keunekai	Paya	Beurawang	Jaboi	Krueng Raya
				25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1				1	1
3	KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	Akses aman air minum tidak tersedia	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5					
				51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3				3	
				25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1					
		Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuh	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5				5	
				51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3			3		
				25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1	1	1			1
4	KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	Drainase lingkungan tidak tersedia	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hierarki di atasnya	5					

mengalir ...

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	Lokasi Permukiman Kumuh				
						Keunekai	Paya	Beurawang	Jaboi	Krueng Raya
			mengalir dan menimbulkan genangan	51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hierarki di atasnya	3					
				25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/ atau tidak terhubung dengan hierarki di atasnya	1					
		Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	76% - 100% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	5					
				51% - 75% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	3					
				25% - 50% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	1					1
		Kualitas Konstruksi Drainase	Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	76% - 100% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	5					
				51% - 75% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	3					

25% ...

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	Lokasi Permukiman Kumuh				
						Keunekai	Paya	Beurawang	Jaboi	Krueng Raya
				25% - 50% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	1	1	1	1		1
5	KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/ kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat	76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5					
				51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3					
				25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1			1	1	
		Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak memenuhi persyaratan teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: 1. Kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; 2. Tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.	76% - 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	5					
				51% - 75% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	3					
				25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	1			1	1	1

6. PENGELOLAAN ...

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	Lokasi Permukiman Kumuh				
						Keunekai	Paya	Beurawang	Jaboi	Krueng Raya
6	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi dengan persyaratan teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: 1. Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; 2. Tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan; 3. Sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan 4. Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.	76% - 100% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5	5	5	5	5	5
				51% - 75% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3					
				25% - 50% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1					
		Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. pewadahan dan pemilahan domestik; 2. pengumpulan lingkungan; 3. pengangkutan lingkungan; 4. pengolahan lingkungan	76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5	5	5	5		5
				51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3					
				25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1					

7. KONDISI ...

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	Lokasi Permukiman Kumuh				
						Keunekai	Paya	Beurawang	Jaboi	Krueng Raya
7	KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu : 1. Pasokan air; 2. Jalan lingkungan; 3. Sarana komunikasi; 4. Data sistem proteksi kebakaran lingkungan;dan	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5					
				51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3		3			
				25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1	1				1
		Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu : 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. Mobil pompa; 3. Mobil tangga sesuai kebutuhan; dan 4. Peralatan pendukung lainnya	76% - 100% area- tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5	5	5	5	5	5
				51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3					
				25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1					
				SUBTOTAL		**18**	**21**	**22**	**26**	**21**
1	IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN									
	Legalitas Lahan	Kejelasan Status Penguasaan Lahan	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: 1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertif ikat hak atas tanah atau bentuk	Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(+)	+1	+1	+1	+1	+1

dokumen ...

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	Lokasi Permukiman Kumuh				
						Keunekai	Paya	Beurawang	Jaboi	Krueng Raya
			dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau 2. Kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah	Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(-)					
		Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat	Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR	(+)	+1	+1	+1	+1	+1
			Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR perumahan/permukiman sesuai RTR	(-)					
				SUBTOTAL		**+2**	**+2**	**+2**	**+2**	**+2**
	IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN									
	Petimbangan Lain	Nilai Strategis Lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada :	Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota	5	5	5	5	5	5

1. Fungsi ...

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	Lokasi Permukiman Kumuh				
						Keunekai	Paya	Beurawang	Jaboi	Krueng Raya
			1. Fungsi strategis kabupaten/kota; 2. Bukan fungsi strategis kabupaten/kota	Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis Kabupaten/ kota	1					
		Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi : 1. Rendah yaitu kepadatan penduduk di baw ah 150 jiwa/ha; 2. Sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151– 200 jiwa/ha; 3. Tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201– 400 jiwa/ha; 4. Sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha	Untuk metropolitan & Kota Besar Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha	5					
				Untuk Kota Sedang & Kota Kecil Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 Jiw a/Ha						
				Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 151 - 200 Jiwa/Ha	3					
				Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha	1	1	1	1	1	1
		Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa	Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara	5	5	5	5	5	5

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	Lokasi Permukiman Kumuh				
						Keunekai	Paya	Beurawang	Jaboi	Krueng Raya
			1. Potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; 2. Potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; 3. Potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat	Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara	1					
		Keterjangkauan Lokasi dengan Pusat Kota Sabang	Pertimbangan jarak tempuh dan akses lokasi perumahan dan permukiman dengan pusat kota sabang.	Lokasi perumahan atau permukiman memiliki kemudahan akses dan jangkauan dengan pusat Kota Sabang	5	5	5			5
				Lokasi perumahan atau permukiman belum memiliki kemudahan akses yang memadai dari jangkauan pusat Kota Sabang	1			1	1	
		Potensi pengembangan perubahan wajah	Pertimbangan potensi yang dimiliku lokasi perumahan atau permukiman berupa 1. Potensi pengembangan perubahan wajah kawasan	Lokasi perumahan atau permukiman memiliki potensi pengembangan perubahan wajah kawasan kumuh.	5	5				5

kawasan ...

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	Lokasi Permukiman Kumuh				
						Keunekai	Paya	Beurawang	Jaboi	Krueng Raya
		kawasan kumuh	perumahan dan permukiman kumuh 2. Potensi lokasi yang memiliki karakteristik atau tema tertentu	Lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki potensi pengembangan perubahan wajah kawasan kumuh.	1		1	1	1	
		Kolaborasi penanganan kumuh dan penganggaran.	Pertimbangan potensi yang dimiliku lokasi perumahan atau permukiman berupa 1. Memiliki perencanaan yang berdampingan dan terintegrasi dengan kawasan perumahan dan permukiman kumuh 2. Keterlibatan pihak stake holder dalam perencanaan	Lokasi perumahan atau permukiman kumuh memiliki potensi kolaborasi penanganan kumuh dan penganggaran	5					5
				Lokasi perumahan atau permukiman kumuh memiliki potensi kolaborasi penanganan kumuh dan penganggaran	1	1	1	1	1	
				SUBTOTAL		22	18	14	14	26
				GRAND TOTAL		42	41	38	42	44

Selanjutnya ...

Selanjutnya, rekapitulasi hasil penilaian, penentuan klasifikasi, dan skala prioritas penanganan kawasan permukiman kumuh Kota Sabang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.5 Rekapitulasi Hasil Penilaian dan Skala Prioritas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

NO	GAMPONG	Jumlah Nilai Penilaian Kriteria dan Indikator Kekumuhan	TINGKAT KEKUMUHAN			JUMLAH NILAI ASPEK PERTIMBANGAN LAIN	PERTIMBANGAN LAIN			LEGALITAS LAHAN		KLASIFIKASI	SKALA PRIORITAS
			KUMUH BERAT	**KUMUH SEDANG**	**KUMUH RINGAN**		**TINGGI**	**SEDANG**	**RENDAH**	**LEGAL**	**TIDAK LEGAL**		
			(60-80)	**(38-59)**	**(16-37)**		**(21-30)**	**(11-20)**	**(1-10)**	**NILAI (+)**	**NILAI (-)**		
1	Keunekai	18			√	22	√			√		C1	2
2	Paya	21			√	18		√		√		C3	3
3	Beurawang	22			√	14		√		√		C3	3
4	Jaboi	26			√	14		√		√		C3	2
5	Krueng Raya	21			√	26	√			√		C1	1

4.3 Perumusan Kebutuhan Penanganan Berdasarkan Isu Dan Permasalahan Permukiman Kumuh

Target 0% permukiman kumuh di tahun 2024 merupakan hal besar yang harus dicapai. Dibutuhkan upaya penanganan yang sangat serius dan program-program inovatif yang dapat menggerakkan seluruh pihak secara intensif dalam menangani permukiman kumuh, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Pemerintah secara resmi meluncurkan Program Nasional Penanganan Permukiman Kumuh untuk mengimplementasikan program kolaborasi sebagai platform dalam penanganan kumuh antar sektor pembangunan. Dalam program tersebut, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah (Pemda) akan jadi pelaku utama dalam penanganan, dimana seluruh pemetaan kebutuhan, rencana program, hingga rencana investasi akan disusun oleh Pemda. Program-program yang ada di pemerintah pusat kemudian hanya akan menjadi pendamping daerah dalam penyusunan rencana dan menjalankan program, dan program yang ada di pusat akan disesuaikan dengan kebutuhan serta kesiapan daerah. Berikut ini adalah tabel kebutuhan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman skala kota dan kawasan.

Tabel. 4.6 ...

Tabel 4.6 Rumusan Kebutuhan Penanganan Perumhan dan Permukiman Kumuh Kota Sabang

NO	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS KOTA SABANG	LOKASI	KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH HASIL OVERVIEW	KEBUTUHAN PENANGANAN	
				PENCEGAHAN	PENINGKATAN
1	❑ Besarnya kebutuhan rumah tempat tinggal yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). ❑ Kawasan permukiman yang belum tertata dengan baik ❑ Status lahan permukiman belum sepenuhnya memiliki sertifikat	Seluruh kawasan perumahan dan permukiman Kota Sabang	❑ Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan rumah layak huni. ❑ Rehabilitasi/peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	❑ Monitoring dan pengawasan pembanguan kawasan permukiman baru ❑ Penyiapan dan Pengembangan infrastruktur dasar permukiman ❑ Penyusunan dokumen teknis penataan bangunan dan lingkungan ❑ Penyediaan SDM tim pemantau dan pengawas	Peningkatkan kualitas permukiman perkotaan yang lak huni
2	❑ Persentase jalan kota dalam kondisi baik belum optimal ❑ Masih adanya sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar ❑ Konektifitas jaringan jalan belum optimal	Seluruh kawasan perumahan dan permukiman Kota Sabang		❑ Meningkatkan monitoring dan pengawasan berkala terhadap kondisi jalan dikawasan kawasan permukiman	❑ Infrastruktur jalan yang terintegrasi diseluruh kawasan permukiman. ❑ Peningkatan kualitas infrastruktur jalan.

3. Belum ...

NO	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS KOTA SABANG	LOKASI	KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH HASIL OVERVIEW	KEBUTUHAN PENANGANAN	
				PENCEGAHAN	PENINGKATAN
3.	❑ Belum optimalnya sistem penyediaan air minum dan pengembangan air minum terlindungi ❑ Kurangnya ketersediaan prasarana sarana sumber daya air terkait pengelolaan sumber air baku untuk air minum dan sistem jaringan distribusi yang belum baik. ❑ Kebocoran pipa distribusi, pemasangan sambungan pipa illegal menyebabkan hilangnya volume air bersih yang terdistribusi.	Seluruh kawasan perumahan dan permukiman Kota Sabang	❑ Peningkatan cakupan pelayanan seluruh lapisan masyarakat melalui penataan jaringan air bersih memanfaatkan ketersediaan air baku yang ada.	❑ Pemeliharaan sumber air bersih. ❑ Monitoring dan pemugaran berkala sumber dan sarana penampungan air bersih ❑ Meningkatkan monitoring dan pengawasan keamanan sistem distribusi air minum	❑ Pengamanan sumber dan sistem air minum ❑ Pembangunan reservoir skala komunitas
4	❑ Sistem jaringan drainase belum terintegrasi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya, ❑ Persentase kondisi jaringan drainase lingkungan belum optimal. ❑ Jaringan drainase lingkungan yang tidak saling terhubung. ❑ Kawasan permukiman yang tergenang. ❑ Belum optimalnya fungsi drainase akibat timbunan sampah dilingkungan permukiman.	Seluruh kawasan perumahan dan permukiman Kota Sabang	❑ Peningkatan penyediaan dan pemeliharaan jaringan drainase. ❑ Mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan. ❑ Pembangunan saluran air hujan secara terbuka didaerah kerapatan bangunan rendah. ❑ Sedangkan daerah perkotaan yang memiliki kerapatan bangunan tinggi direncanakan menggunakan saluran tertutup.	❑ Meningkatkan monitoring dan pengawasan kawasan permukiman. ❑ Sosialisi dan pendampingan masyarakat.	❑ Pembangunan dan Peningkatan kualitas drainase. ❑ Integrasi sistem jaringan drainase untuk mencegah genangan.

5. Prilaku ...

NO	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS KOTA SABANG	LOKASI	KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH HASIL OVERVIEW	KEBUTUHAN PENANGANAN	
				PENCEGAHAN	PENINGKATAN
5	❑ Prilaku masyarakat yang masih menggunakan badan-badan sebagai tempat pembuangan limbah. ❑ Tingginya penggunaan sarana pengelolaan limbah yang belum sesuai teknis.	Seluruh kawasan perumahan dan permukiman Kota Sabang	❑ . Meningkatnya pelayanan sanitasi yang berkelanjutan ❑ Menyediakan akses pelayanan air limbah rumah tangga ❑ Pengembangan Instalasi Pengolahan Tinja (IPLT)	❑ . Sosialisasi pentingnya tentang sistem pengolahan limbah sesuai teknis. ❑ Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS.	❑ Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Komunal.
	❑ Rendahnya pelayanan dan pengelolaan kegiatan penyehatan lingkungan sanitasi yang layak baik. ❑ Belum optimalnya dan ketersediaan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) kota, komunal, serta kawasan;			❑ .Mendorong perubahan perilaku dimasyarakat terkait dengan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	❑ Penyediaan dan Pemeliharaan tangki septik individual yang layak, aman dan berkelanjutan
6	❑ Belum optimalnya sinergisitas kerjasama dalam pengelolaan sampah kota secara regional. ❑ Rendahnya cakupan pelayanan persampahan. ❑ Kurangnya sarana dan prasarana persampahan. ❑ Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan serta kurang berfungsinya sistem pengawasan dan pengendalian	Seluruh kawasan perumahan dan permukiman Kota Sabang	❑ Meningkatkan sarana dan prasrana layanan persampahan ❑ Mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan ❑ Meningkatkan pelayanan persampahan ❑ Meningkatkan dan Mempertahankan Kualitas, Daya Dukung dan Kelestarian Fungsi Lingkungan ❑ penataan 3R atau 3M (mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang). ❑ Pengadaan pengelolaan alat angkut.	❑ Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. ❑ Pengurangan sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R.	❑ Peningkatan dan pengembangan TPA ❑ Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana persampahan ❑ Meningkatkan jangkauan pelayanan persampahan.

kurangnya ...

NO	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS KOTA SABANG	LOKASI	KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH HASIL OVERVIEW	KEBUTUHAN PENANGANAN	
				PENCEGAHAN	PENINGKATAN
	❑ Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan dan pemilahan sampah.				
7	❑ Belum tersedianya sarana dan prasarana proteksi kebakaran ditingkat kawasan maupun lingkup hunian	Seluruh kawasan perumahan dan permukiman Kota Sabang	❑ Penyusunan dokumen rencana mitigasi bencana ❑ Peningkatan sarpras penanggulangan bencana dan ketahanan masyarakat. ❑ Rencana Pembangunan hidran-hidran air tersebar secara merata di sepanjang jalan arteri, kawasan perdagangan dan jasa serta kawasan permukiman; ❑ Rencana Pembangunan tandon-tandon air untuk pemadam kebakaran; ❑ Rencana Pembangunan pos pemadam kebakaran	❑ Pembinaan Relawan Tanggap Bencana Kebakaran ❑ Penyiapan regulasi penanganan bahaya kebakaran	❑ Penyediaan sarana dan prasarana kebakaran.
8	❑ Belum optimalnya fungsi ruang terbuka publik pada kawasan permukiman,	Seluruh kawasan perumahan dan permukiman Kota Sabang	❑ Pengembangan RTH sebagai bagian dari pengembangan fasilitas umum dan taman kota/lingkungan. ❑ Pengembangan RTH sebagai pembatas antara kawasan industri dengan kawasan fungsional lain di sekitarnya, terutama kawasan permukiman; ❑ Penyediaan taman-taman lingkungan yang berada di pusat-pusat pelayanan lingkungan perumahan; ❑ Penyediaan dan pengembangan RTH sebagai bagian dari pembangunan suatu kawasan fungsional.		

BAB V
KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

5.1 Konsep Dan Strategi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Sampai Dengan Pencapaian Kota Bebas Kumuh Dalam Skala Kota

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) merupakan dokumen perencanaan kegiatan penanganan dengan lingkup/skala kota dan kawasan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) dan terpadu, tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan-kegiatan yang bersifat non-fisik (peningkatan kapasitas/pemberdayaan, sosial dan ekonomi).

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, bahwa upaya penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh harus memuat unsur-unsur pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang diterjemahkan dalam bentuk strategi, program, dan rencana aksi kegiatan sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.

Konsep dan strategi ini pada dasarnya merupakan amanat dari Undang-undang dimana pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.

Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kota ini diangkat dari kondisi aktual yang ada di Kota Sabang disertai isu-isu strategis apa saja yang berpengaruh dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Kota Sabang yang dengan demikian akan diketahui kebutuhan penanganan. Seperti yang telah terjabar pada bab sebelumnya, kebutuhan penanganan kekumuhan untuk skala perkotaan mencakup delapan sektor, seperti pada tabel berikut:

Gambar 5.1...

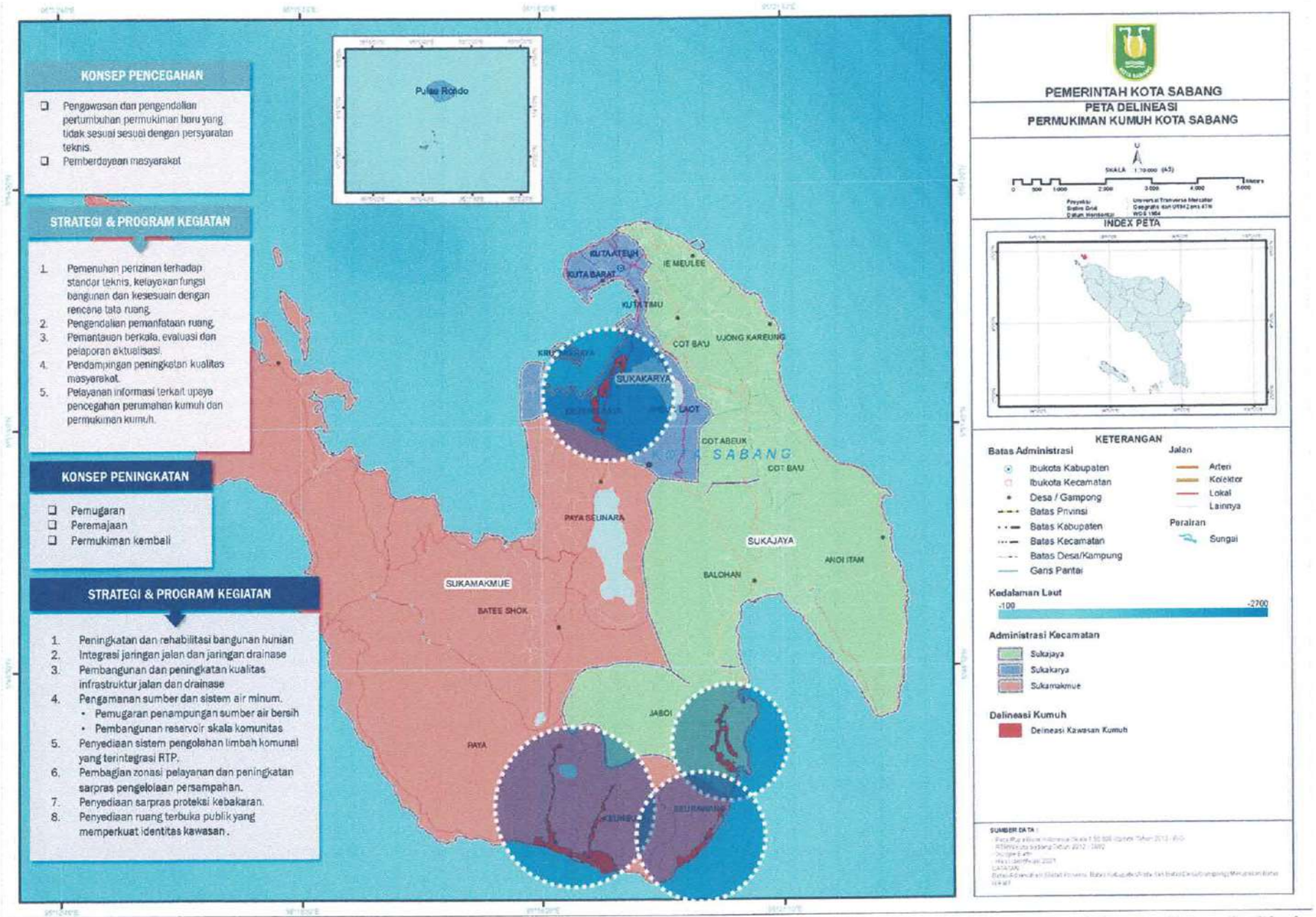

Gambar 5.1 Peta Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kota - Kota Sabang. Sumber : Hasil Pemetaan, 2021

Tabel 5.1...

Tabel 5.1

Tabel Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kota

NO	SEKTOR	KONDISI AKTUAL DAN ISU STRATEGIS KOTA	KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH HASIL OVERVIEW	KEBUTUHAN PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN		STRATEGI PENANGANAN	
				PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
1	PERMU-KIMAN	1. Besarnya kebutuhan rumah tempat tinggal yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 2. Kawasan permukiman yang belum tertata dengan baik 3. Status lahan permukiman belum sepenuhnya memiliki sertifikat	• Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan rumah layak huni. • Rehabilitasi/peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	• Monitoring dan pengawasan pembanguan kawasan permukiman baru • Penyiapan dan Pengembangan infrastruktur dasar permukiman • Penyusunan dokumen teknis penataan bangunan dan lingkungan • Penyediaan SDM tim pemantau dan pengawas	Peningkatkan kualitas permukiman perkotaan yang lak huni	• Pengawasan dan Pengendalian • Pemberdayaan Masyarakat	• Pemugaran • Penataan Kawasan Permukiman / Peremajaan • Permukiman kembali		Rehabilitasi bangunan secara bertahap sesuai dengan persyaratan teknis bangunan sehat layak huni

2. JALAN ...

NO	SEKTOR	KONDISI AKTUAL DAN ISU STRATEGIS KOTA	KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH HASIL OVERVIEW	KEBUTUHAN PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN		STRATEGI PENANGANAN	
				PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
2	JALAN & AKSESI-BILITAS	1. Persentase jalan kota dalam kondisi baik belum optimal 2. Masih adanya sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar 3. Konektifitas jaringan jalan belum optimal		• Meningkatkan monitoring dan pengawasan berkala terhadap kondisi jalan dikawasan kawasan permukiman	• Infrastruktur jalan yang terintegrasi diseluruh kawasan permukiman . • Peningkatan kualitas infrastruktur jalan.	• Monitoring dan pengawasan kondisi sistem jaringan dan kondisi jalan dikawasan permukiman. • Penggunaan material yang tepat guna untuk durabilitas jalan lingkungan.	• Peremajaan • Peningkatan kapasitas jalan lingkungan	• Pembangunan jalan lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang. • Pembangunan jalan lingkungan pada lokasi yang belum terlayani prasarana jalan.	• Pembangunan jalan lingkungan yang terintegrasi dengan sistem jaringan jalan eksisting. • Peningkata kualitas jalan lingkungan.
3.	AIR MINUM	1. Belum optimalnya sistem penyediaan air minum dan pengem-bangan air	• Peningkatan cakupan pelayanan seluruh lapisan masyarakat melalui penataan jaringan air	• Pemeliharaan sumber air bersih. • Monitoring dan pemugaran berkala sumber dan sarana	• Pengamanan sumber dan sistem air minum • Pembangunan reservoir skala komunitas	• Pengawasan dan Pengendalian • Pemberdayaan Masyarakat	• Pengamanan sumber dan sistem air minum. • Pengelompokan zonasi kebutuhan air minum	• Pemantauan dan penertiban pemasangan pipa disribusi ilegal. • Pemugaran jaringan pipa distribusi.	• Pembangunan rumah pompa dan reservoir skala komunitas. • Pemugaran berkala

minum...

NO	SEKTOR	KONDISI AKTUAL DAN ISU STRATEGIS KOTA	KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH HASIL OVERVIEW	KEBUTUHAN PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN		STRATEGI PENANGANAN	
				PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
		minum terlindungi 2. Kurangnya ketersediaan prasarana sarana sumber daya air terkait pengelolaan sumber air baku untuk air minum dan sistem jaringan distribusi yang belum baik. 3. Kebocoran pipa distribusi, pemasangan sambungan pipa illegal menyebabkan hilangnya volume air bersih yang terdistribusi.	bersih memanfaatkan ketersediaan air baku yang ada.	penampungan air bersih • Meningkatkan monitoring dan pengawasan keamanan sistem distribusi air minum			• Pembangunan reservoir skala komunitas • Peningkatan jangkauan pelayanan unit penyediaan air minum		sumber dan sarana penampungan air bersih. • Peningkatan jangkauan jaringan distribusi air bersih.

NO	SEKTOR	KONDISI AKTUAL DAN ISU STRATEGIS KOTA	KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH HASIL OVERVIEW	KEBUTUHAN PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN		STRATEGI PENANGANAN	
				PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
4	DRAINASE	1. Sistem jaringan drainase belum terintegrasi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya, 2. Persentase kondisi jaringan drainase lingkungan belum optimal. 3. Jaringan drainase lingkungan yang tidak saling terhubung. 4. Kawasan permukiman yang tergenang. 5. Belum optimalnya fungsi	• Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan jaringan drainase • Peningkatan penyediaan dan pemeliharaan jaringan drainase. • Mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan. • Pembangunan saluran air hujan secara terbuka didaerah kerapatan bangunan rendah. • Sedangkan daerah perkotaan yang memiliki kerapatan bangunan tinggi direncanakan	• Meningkatkan monitoring dan pengawasan kawasan permukiman.	• Pembangunan dan Peningkatan kualitas drainase. • Integrasi sistem jaringan drainase untuk mencegah genangan. • Sosialisi dan pendampingan masyarakat.	• Monitoring dan pengawasan kondisi sistem jaringan dan kondisi drainase dikawasan permukiman. • Penggunaan material yang tepat guna untuk durabilitas drainase lingkungan . • Perhitungan kapasitas volume drainase sesuai dengan kebutuhan.	• Pembangunan drainase. • Peningkatan kualitas drainase	• Pembangunan jaringan drainase lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang. • Monitoring dan pengawasan kondisi sistem jaringan dan kondisi drainase dikawasan permukiman.	• Peningkatan Kualitas jaringan Drainase kawasan permukiman

drainase ...

NO	SEKTOR	KONDISI AKTUAL DAN ISU STRATEGIS KOTA	KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH HASIL OVERVIEW	KEBUTUHAN PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN		STRATEGI PENANGANAN	
				PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
		drainase akibat timbunan sampah dilingkungan permukiman.	menggunakan saluran tertutup.						
5	AIR LIMBAH	1. Prilaku masyarakat yang masih menggunakan badan-badan sebagai tempat pembuangan limbah. 2. Tingginya penggunaan sarana pengelolaan limbah yang belum sesuai teknis. 3. Rendahnya pelayanan dan pengelolaan kegiatan penyehatan lingkungan	• Meningkatnya pelayanan sanitasi yang berkelanjutan • Menyediakan akses pelayanan air limbah rumah tangga • Pengembangan Instalasi Pengolahan Tinja (IPLT)	• Sosialisasi pentingnya tentang sistem pengolahan limbah sesuai teknis. • Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. • Mendorong perubahan perilaku dimasyarakat terkait dengan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	• Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Komunal. • Penyediaan dan Pemeliharaan tangki septik individual yang layak, aman dan berkelanjutan	• Pengawasan berkala	• Pengelompokkan layanan sistem pengolahan limbah komunal. • Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Komunal. Peningkatan kapasitas unit pengolahan air limbah komunal • Pemugaran sarana dan prasarana pengolahan air limbah	• Penyusunan qanun dan regulasi turunan tentang pengelolaan air limbah domestik • Pemenuhan standar teknis pengolahan limbah (septi tank) disetiap pembangunan permukiman baru.	• Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Komunal pada permukiman dengan tingkat kepadatan tinggi. • Pembangunan sistem pengolahan limbah rumah tangga setempat pada kawasan perumahan dengan tingkat

sanitasi ...

NO	SEKTOR	KONDISI AKTUAL DAN ISU STRATEGIS KOTA	KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH HASIL OVERVIEW	KEBUTUHAN PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN		STRATEGI PENANGANAN	
				PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
		sanitasi yang layak baik. 4. Belum optimalnya dan ketersediaan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) kota, komunal, serta kawasan;							kepadatan sedang-rendah.

6. PERSAMPAHAN ...

NO	SEKTOR	KONDISI AKTUAL DAN ISU STRATEGIS KOTA	KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH HASIL OVERVIEW	KEBUTUHAN PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN		STRATEGI PENANGANAN	
				PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
6	PERSAMPAHAN	1. Belum optimalnya sinergisitas kerjasama dalam pengelolaan sampah kota secara regional. 2. Rendahnya cakupan pelayanan persampahan. 3. Kurangnya sarana dan prasarana persampahan. 4. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan serta kurang berfungsinya sistem pengawasan dan pengendalian	• Meningkatkan sarana dan prasrana layanan persampahan • Mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan • Meningkatkan pelayanan persampahan • Meningkatkan dan Mempertahankan Kualitas, Daya Dukung dan Kelestarian Fungsi Lingkungan • penataan 3R atau 3M (mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang).	• Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. • Pengurangan sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R.	• Peningkatan dan pengembangan TPA • Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana persampahan • Meningkatkan jangkauan pelayanan persampahan.	• Mengurangi sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R. • Monitoring dan pemeliharaan berkala sarpras persampahan dikawasan permukiman.	• Peningkatan dan pegembangan TPA Lhoek Batee. • Pengelompokkan layanan pengelolaan persampahan berdasarkan jangkauan layananan tingkat dusun. • Peningkatan kuantitas dan kuantitas sarpras persampahan.	• Memperkuat regulasi dalam pengelolaan persampahan • Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan persampahan. • Pemberian insentif bagi masyarakat, atau pihak swasata mampu mengelola persampahan dengan baik. • Membentuk pengelola teknis setingkat UPTD untuk penanganan persampahan	• Peningkatan dan pengembangan TPA. • Peningkatan jumlah TPS pada kawaasn permuki-man. • Peningkatan jangkauan dan kuantitas layanan pengangkutan persampahan. • Pengadaan alat pengangkutan persampahan.

5. kurangnya ...

NO	SEKTOR	KONDISI AKTUAL DAN ISU STRATEGIS KOTA	KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH HASIL OVERVIEW	KEBUTUHAN PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN		STRATEGI PENANGANAN	
				PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
		5. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan dan pemilahan sampah.,	• Pengadaan pengelolaan alat angkut.						
7	PROTEKSI KEBAKARAN	1. Belum tersedianya sarana dan prasarana proteksi kebakaran ditingkat kawasan maupun lingkup hunian	• Penyusunan dokumen rencana mitigasi bencana • Peningkatan sarpras penanggulangan bencana dan ketahanan masyarakat. • Rencana Pembangunan hidran-hidran air tersebar secara merata di sepanjang jalan arteri, kawasan perdagangan	• Pembinaan Relawan Tanggap Bencana Kebakaran • Penyiapan regulasi penanganan bahaya kebakaran	• Penyediaan sarana dan prasarana kebakaran.	• Pemberdayaan Masyarakat • Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian bahaya kebakaran	• Integrasi reservoir penampungan air bersih sebagai sarana proteksi kebakaran. • Pembangunan posko tanggap dan penanggulangan kebakaran. • Penyediaan APAR.	• Sosialisasi masyarakat mengenai kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran • Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran • Pembentukan dan Pelatihan relawan tanggap bencana di semua Dusun.	• Pembangunan posko ta ggap dan penanggulangan kebakaran. • Rencana pembangunan sisitem hidran dikawasan permukiman. • Integrasi reservoir penampungan air bersih sebagai sarana proteksi kebakaran. • Penyediaan APAR

dan ...

NO	SEKTOR	KONDISI AKTUAL DAN ISU STRATEGIS KOTA	KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH HASIL OVERVIEW	KEBUTUHAN PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN		STRATEGI PENANGANAN	
				PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
			dan jasa serta kawasan permukiman; • Rencana Pembangunan tandon-tandon air untuk pemadam kebakaran; • Rencana Pembangunan pos pemadam kebakaran						
8	RUANG TERBU-KA HIJAU	1. Belum optimalnya fungsi ruang terbuka publik pada kawasan permukiman,	• Pengembangan RTH sebagai bagian dari pengembangan fasilitas umum dan taman kota /lingkungan. • Pengembangan RTH sebagai pembatas antara kawasan industri dengan kawasan fungsional lain di sekitarnya, terutama					• Pemugaraan RTP eksisting. • Monitoring dan pemeliharaan berkala RTP dikawasan permukiman.	• Optimalisasi fungsi RTP pada kawasan permukiman. • Penyediaan RTP yang sesuai dengan karakter dan identitas kawasan permukiman.

kawasan...

NO	SEKTOR	KONDISI AKTUAL DAN ISU STRATEGIS KOTA	KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH HASIL OVERVIEW	KEBUTUHAN PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN		STRATEGI PENANGANAN	
				PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
			kawasan permukiman • Penyediaan taman-taman lingkungan yang berada di pusat-pusat pelayanan lingkungan perumahan; • Penyediaan dan pengembangan RTH sebagai bagian dari pembangunan suatu kawasan fungsional.						

5.2 Konsep Dan Strategi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Sabang berada pada empat kawasan yang memiliki karakteristik dan tipologi kumuh yang serupa. Namun tiap-tiap kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh memiliki permasalahan yang berbeda, sehingga memerlukan konsep dan strategi penanganan yang berbeda. Konsep pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh skala kawasan Kota Sabang adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2 ...

Tabel 5.2 Tabel Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kawasan

NO	SEKTOR	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		STRATEGI PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN KUALITAS	PENCEGAHAN	PENINGKATAN KUALITAS
KAWASAN KRUENG RAYA						
A	PERMUKIMAN	❑ 8,46% bangunan permukiman belum teratur. Beberapa unit bangunan berada pada sempadan alur. ❑ 15,02% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis dan berada pada area yang terdampak bencana tsunami pada tahun 2004.	❑ Pengawasan dan Pengendalian ❑ Pemberdayaan Masyarakat	❑ Pemugaran ❑ Permukiman kembali	❑ Melakukan sosialiasi tentang rumah dan lingkungan sehat dan layak huni. ❑ Pemenuhan perizinan terhadap standar teknis, kelayakan fungsi bangunan dan kesesuain dengan rencana tata ruang.	❑ Penataan kawasan permukiman. ❑ Fasilitasi perbaikan RTLH secara bertahap.
B	JALAN	❑ 12,74% kawasan permukiman belum terlayani oleh jaringan jalan lingkungan. ❑ 9,90% jalan lingkungan dalam kondisi rusak.	❑ Pengawasan dan Pengendalian ❑ Pemberdayaan Masyarakat	❑ Pemugaran ❑ Peremajaan	❑ Monitoring dan pengawasan kondisi sistem jaringan dan kondisi jalan dikawasan permukiman. ❑ Penggunaan material yang tepat guna untuk durabilitas jalan lingkungan. ❑ Pembangunan jalan lingkungan pada lokasi baru yang	❑ Peningkatan kualitas jalan lingkungan ❑ Pembangunan jalan lingkungan yang terintegrasi dengan jaringan jalan eksisting. ❑ Rehab jembatan.

sesuai ...

NO	SEKTOR	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		STRATEGI PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN KUALITAS	PENCEGAHAN	PENINGKATAN KUALITAS
					sesuai arahan rencana tata ruang.	
C	AIR MINUM	❑ 16,35% penduduk belum terpenuhi kebutuhan air minum.	❑ Pengawasan dan Pengendalian ❑ Pemberdayaan Masyarakat	❑ Pemugaran ❑ Peremajaan	❑ Pemeliharaan sumber air bersih ❑ Pengawasan dan pengendalian kuantitas distribusi air bersih.	❑ Pembangunan reservoir komunal skala komunitas. ❑ Peremajaan pipa jaringan distribusi air bersih. ❑ Peningkatan jangkauan layanan jaringan pipa distribusi air bersih.
D	DRAINASE	❑ 7,41% kawasan permukiman tidak mampu mengalirkan limpasan air. ❑ 15,22% kawasan permukiman belum terlayani jaringan drainase. Sebagian sistem jaringan drainase lingkungan tidak saling terkoneksi. ❑ 42,24% jaringan drainase lingkungan memilki kualitas yang tidak sesuai standar teknis.	❑ Pengawasan dan Pengendalian ❑ Pemberdayaan Masyarakat	❑ Pemugaran ❑ Peremajaan	❑ Monitoring dan pengawasan kondisi sistem jaringan dan kondisi drainase dikawasan permukiman. ❑ Penggunaan material yang tepat guna untuk durabilitas drainase lingkungan . ❑ Perhitungan kapasitas volume drainase sesuai dengan kebutuhan.	❑ Pembangunan jaringan drainase untuk pengendali banjir. ❑ Peningkatan kualitas drainase kawasan permukiman. ❑ Integrasi jaringan drainase diseluruh kawasan permukiman.

E. SANITASI ...

NO	SEKTOR	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		STRATEGI PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN KUALITAS	PENCEGAHAN	PENINGKATAN KUALITAS
E	SANITASI	❑ 3,19% bangunan hunian belum memiliki sistem pengolahan limbah sesuai teknis. ❑ 18,73% bangunan hunian belum memiliki sarpras pengolahan limbah sesuai teknis.	❑ Pengawasan dan Pengendalian ❑ Pemberdayaan Masyarakat	❑ Pemugaran ❑ Peremajaan	❑ Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola lImbah ❑ Mendorong perubahan perilaku dimasyarakat terkait dengan stop Buang Air Besar Sembarangan	❑ Pembangunan MCK komunal ❑ Pembangunan IPAL komunal
F	PERSAMPAHAN	❑ 89,84% kawasan permukiman belum memiliki sarpras persampahan sesuai teknis. Sampah domestik dibuang ke badan air. ❑ 100,00% kawasan permukiman belum terlayanai sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis. Sistem pengangkutan sampah belum melayani seluruh kawasan permukiman.	❑ Pengawasan dan Pengendalian ❑ Pemberdayaan Masyarakat	❑ Pemugaran ❑ Peremajaan	❑ Mengurangi sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R. ❑ Pelatihan pengelolaan sampah 3R. ❑ Monitoring dan pemeliharaan berkala sarpras persampahan. ❑ Membentuk pengelola teknis setingkat UPTD untuk penanganan persampahan.	❑ Pengelompokkan layanan pengelolaan persampahan berdasarkan jangkauan layananan tingkat dusun. ❑ Pengadaan TPS. ❑ Pengadaan alat pengangkutan persampahan.

G. PROTEKSI...

NO	SEKTOR	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		STRATEGI PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN KUALITAS	PENCEGAHAN	PENINGKATAN KUALITAS
G	PROTEKSI KEBAKARAN	❑ 12,05% kawasan permukiman belum terlayani prasarana proteksi kebakaran. ❑ 100,00% kawasan permukiman belum memiliki sarana proteksi kebakaran.	❑ Pengawasan dan Pengendalian ❑ Pemberdayaan Masyarakat	❑ Pemugaran ❑ Peremajaan	❑ Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran ❑ Pembentukan dan Pelatihan relawan tanggap bencana.	❑ Pembangunan posko tanggap bencana. ❑ Penyediaan hydran umum.
H	RUANG TERBUKA PUBLIK	❑ Belum optimalnya fungsi RTP ekssisting. ❑ Belum adanya RTP yang memadai.			❑ Pemugaraan RTP eksisting. ❑ Monitoring dan pemeliharaan berkala RTP.	❑ Pembangunan RTP skala komunitas ❑ Integrasi desain RTP yang sesuai dengan karakter kawasan krueng raya.
KAWASAN PAYA-KEUNEUKAI						
A	PERMUKIMAN	❑ 28,50% bangunan permukiman belum teratur. Sebagian permukiman berada di pesisir pantai. ❑ 17,30% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis.	❑ Pengawasan dan Pengendalian ❑ Pemberdayaan Masyarakat	❑ Pemugaran ❑ Peremajaan	❑ Melakukan sosialiasi tentang rumah dan lingkungan sehat dan layak huni. ❑ Pemenuhan perizinan terhadap standar teknis, kelayakan fungsi bangunan dan kesesuain dengan rencana tata ruang.	❑ Penataan kawasan permukiman. Fasilitasi perbaikan RTLH secara bertahap.

B. JALAN ...

NO	SEKTOR	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		STRATEGI PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN KUALITAS	PENCEGAHAN	PENINGKATAN KUALITAS
B	JALAN	❑ 12,68% jalan lingkungan dalam kondisi rusak.	❑ Pengawasan dan Pengendalian ❑ Pemberdayaan Masyarakat	❑ Pemugaran ❑ Peremajaan	❑ Monitoring dan pengawasan kondisi sistem jaringan dan kondisi jalan dikawasan permukiman. ❑ Penggunaan material yang tepat guna untuk durabilitas jalan lingkungan. ❑ Pembangunan jalan lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang.	❑ Peningkatan kualitas jalan lingkungan ❑ Pembangunan jalan lingkungan yang terintegrasi dengan jaringan jalan eksisting. Rehab jembatan.
C	AIR MINUM	❑ 42,69% penduduk belum terpenuhi kebutuhan air minum.	❑ Pengawasan dan Pengendalian ❑ Pemberdayaan Masyarakat.	❑ Pemugaran ❑ Peremajaan	❑ Pemeliharaan sumber air bersih. ❑ Pengawasan dan pengendalian kuantitas distribusi air bersih.	❑ Pemugaran fasilitas penampungan air bersih. ❑ Peremajaan pipa jaringan distribusi air bersih. ❑ Peningkatan jangkauan layanan jaringan pipa distribusi air bersih.

D. DRAINASE ...

NO	SEKTOR	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		STRATEGI PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN KUALITAS	PENCEGAHAN	PENINGKATAN KUALITAS
D	DRAINASE	❑ 35,37% jaringan drainase lingkungan memilki kualitas yang tidak sesuai standar teknis.	❑ Pengawasan dan Pengendalian ❑ Pemberdayaan Masyarakat	❑ Pemugaran ❑ Peremajaan	❑ Monitoring dan pengawasan kondisi sistem jaringan dan kondisi drainase dikawasan permukiman. ❑ Penggunaan material yang tepat guna untuk durabilitas drainase lingkungan . ❑ Perhitungan kapasitas volume drainase sesuai dengan kebutuhan. ❑ Pembangunan jaringan drainase lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang.	❑ Pembangunan jaringan drainase untuk pengendali banjir. ❑ Peningkatan kualitas drainase kawasan permukiman. ❑ Integrasi jaringan drainase diseluruh kawasan permukiman.
E	SANITASI	❑ 7,76% bangunan hunian belum memiliki sistem pengolahan limbah sesuai teknis. ❑ 7,76% bangunan hunian belum memiliki sarpras pengolahan limbah sesuai teknis.	❑ Pengawasan dan Pengendalian ❑ Pemberdayaan Masyarakat	❑ Pemugaran ❑ Peremajaan	❑ Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola lImbah ❑ Mendorong perubahan perilaku dimasyarakat terkait dengan stop	❑ Pembangunan MCK komunal berdasarkan pengelompokan zonasi pelayanan. ❑ Pembangunan IPAL komunal

Buang ...

NO	SEKTOR	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		STRATEGI PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN KUALITAS	PENCEGAHAN	PENINGKATAN KUALITAS
					Buang Air Besar Sembarangan	
F	PERSAMPAHAN	❑ 100,00% kawasan permukiman belum memiliki sarpras persampahan sesuai teknis. Sampah domestik dibuang ke badan air. ❑ 88,58% kawasan permukiman belum terlayanai sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis. Sistem pengangkutan sampah belum melayani seluruh kawasan permukiman.	❑ Pengawasan dan Pengendalian ❑ Pemberdayaan Masyarakat	❑ Pemugaran ❑ Peremajaan	❑ Mengurangi sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R. ❑ Pelatihan pengelolaan sampah 3R. ❑ Monitoring dan pemeliharaan berkala sarpras persampahan. ❑ Membentuk pengelola teknis setingkat UPTD untuk penanganan persampahan.	❑ Pengelompokkan layanan pengelolaan persampahan berdasarkan jangkauan layananan tingkat dusun. ❑ Pengadaan TPS. ❑ Pengadaan alat pengangkutan persampahan.
G	PROTEKSI KEBAKARAN	❑ 52,67% kawasan permukiman belum terlayani prasarana proteksi kebakaran. ❑ 100,00% kawasan permukiman belum memiliki sarana proteksi kebakaran.	❑ Pengawasan dan Pengendalian ❑ Pemberdayaan Masyarakat	❑ Pemugaran ❑ Peremajaan	❑ Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran ❑ Pembentukan dan Pelatihan relawan tanggap bencana.	❑ Pembangunan posko tanggap bencana. ❑ Penyediaan hydran umum.
H	RUANG TERBUKA PUBLIK	❑ Belum optimalnya fungsi RTP ekssisting. ❑ Belum adanya RTP yang memadai.			❑ Pemugaraan RTP eksisting.	❑ Pembangunan RTP skala komunitas

Monitoring ...

NO	SEKTOR	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		STRATEGI PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN KUALITAS	PENCEGAHAN	PENINGKATAN KUALITAS
					❑ Monitoring dan pemeliharaan berkala RTP.	❑ Optimaliasi RTP eksisting
KAWASAN JABOI						
A	PERMUKIMAN	❑ 14,55% bangunan permukiman belum teratur ❑ 9,70% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis.	❑ Pengawasan dan Pengendalian ❑ Pemberdayaan Masyarakat	❑ Pemugaran ❑ Peremajaan	❑ Melakukan sosialiasi tentang rumah dan lingkungan sehat dan layak huni. ❑ Pemenuhan perizinan terhadap standar teknis, kelayakan fungsi bangunan dan kesesuain dengan rencana tata ruang.	❑ Penataan kawasan permukiman. ❑ Fasilitasi perbaikan RTLH secara bertahap.
B	JALAN	❑ 33,40% jalan lingkungan dalam kondisi rusak	❑ Pengawasan dan Pengendalian ❑ Pemberdayaan Masyarakat	❑ Pemugaran ❑ Peremajaan	❑ Monitoring dan pengawasan kondisi sistem jaringan dan kondisi jalan dikawasan permukiman. ❑ Penggunaan material yang tepat guna untuk durabilitas jalan lingkungan.	❑ Peningkatan kualitas jalan lingkungan ❑ Pembangunan jalan lingkungan yang terintegrasi dengan jaringan jalan eksisting. ❑

Pembangunan ...

NO	SEKTOR	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		STRATEGI PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN KUALITAS	PENCEGAHAN	PENINGKATAN KUALITAS
					❑ Pembangunan jalan lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang.	
C	AIR MINUM	❑ 54,49% masyarakat belum memiliki akses aman air minum ❑ 91,57% masyarakat belum terpenuhi kebutuhan air minum	❑ Pengawasan dan Pengendalian ❑ Pemberdayaan Masyarakat	❑ Pemugaran ❑ Peremajaan	❑ Pemeliharaan sumber air bersih. ❑ Pengawasan dan pengendalian kuantitas distribusi air bersih.	❑ Pemanfatan sumber mata air sebagai sumber air baku. ❑ Pemugaran fasilitas penampungan air bersih. ❑ Peremajaan pipa jaringan distribusi air bersih. ❑ Peningkatan jangkauan layanan jaringan pipa distribusi air bersih.
D	DRAINASE	❑ 19,69% kawasan permukiman belum terlayani jaringan drainase. ❑ 10,82% jaringan drainase lingkungan memilki kualitas yang tidak sesuai standar teknis	❑ Pengawasan dan Pengendalian ❑ Pemberdayaan Masyarakat	❑ Pemugaran ❑ Peremajaan	❑ Monitoring dan pengawasan kondisi sistem jaringan dan kondisi drainase dikawasan permukiman. ❑ Penggunaan material yang tepat guna untuk	❑ Pembangunan jaringan drainase untuk pengendali banjir. ❑ Peningkatan kualitas drainase kawasan permukiman.

durabilitas ...

NO	SEKTOR	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		STRATEGI PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN KUALITAS	PENCEGAHAN	PENINGKATAN KUALITAS
					durabilitas drainase lingkungan . ❑ Perhitungan kapasitas volume drainase sesuai dengan kebutuhan. ❑ Pembangunan jaringan drainase lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang.	Integrasi jaringan drainase diseluruh kawasan permukiman.
E	SANITASI	❑ 28,09% bangunan hunian belum memiliki sistem pengolahan limbah sesuai teknis. ❑ 28,09% bangunan hunian belum memiliki sarpras pengolahan limbah sesuai teknis.	❑ Pengawasan dan Pengendalian ❑ Pemberdayaan Masyarakat	❑ Pemugaran ❑ Peremajaan	❑ Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola lImbah ❑ Mendorong perubahan perilaku dimasyarakat terkait dengan stop Buang Air Besar Sembarangan	❑ Pembangunan MCK komunal berdasarkan pengelompokan zonasi pelayanan. ❑ Pembangunan IPAL komunal
F	PERSAMPAHAN	❑ 100,00% kawasan permukiman belum memiliki sarpras persampahan sesuai teknis. ❑ 100,00% kawasan permukiman belum terlayani sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis. Sistem	❑ Pengawasan dan Pengendalian ❑ Pemberdayaan Masyarakat	❑ Pemugaran ❑ Peremajaan	❑ Mengurangi sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R.	❑ Pengelompokkan layanan pengelolaan persampahan berdasarkan jangkauan

pengangkutan ...

NO	SEKTOR	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		STRATEGI PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN KUALITAS	PENCEGAHAN	PENINGKATAN KUALITAS
		pengangkutan sampah belum melayani seluruh kawasan permukiman.			❑ Pelatihan pengelolaan sampah 3R. ❑ Monitoring dan pemeliharaan berkala sarpras persampahan. ❑ Membentuk pengelola teknis setingkat UPTD untuk penanganan persampahan.	layananan tingkat dusun. ❑ Pengadaan TPS. ❑ Pengadaan alat pengangkutan persampahan.
G	PROTEKSI KEBAKARAN	❑ 18,79% kawasan permukiman belum terlayani prasarana proteksi kebakaran. ❑ 100,00% kawasan permukiman belum memiliki sarana proteksi kebakaran.	❑ Pengawasan dan Pengendalian ❑ Pemberdayaan Masyarakat	❑ Pemugaran ❑ Peremajaan	❑ Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran Pembentukan dan Pelatihan relawan tanggap bencana.	❑ Pembangunan posko tanggap bencana. Penyediaan hydran umum.
H	RUANG TERBUKA PUBLIK				❑ Pemugaraan RTP eksisting. ❑ Monitoring dan pemeliharaan berkala RTP.	❑ Pembangunan RTP skala komunitas Optimaliasi RTP eksisting
KAWASAN BEURAWANG						
A	PERMUKIMAN	❑ 21,84% bangunan permukiman belum teratur. ❑ 27,59% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis.	❑ Pengawasan dan Pengendalian ❑ Pemberdayaan Masyarakat	❑ Pemugaran ❑ Peremajaan	❑ Melakukan sosialiasi tentang rumah dan	❑ Penataan kawasan permukiman.

lingkungan ...

NO	SEKTOR	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		STRATEGI PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN KUALITAS	PENCEGAHAN	PENINGKATAN KUALITAS
					lingkungan sehat dan layak huni. ❑ Pemenuhan perizinan terhadap standar teknis, kelayakan fungsi bangunan dan kesesuain dengan rencana tata ruang.	❑ Fasilitasi perbaikan RTLH secara bertahap.
B	JALAN	❑ 7,41% jalan lingkungan dalam kondisi rusak	❑ Pengawasan dan Pengendalian ❑ Pemberdayaan Masyarakat	❑ Pemugaran ❑ Peremajaan	❑ Monitoring dan pengawasan kondisi sistem jaringan dan kondisi jalan dikawasan permukiman. ❑ Penggunaan material yang tepat guna untuk durabilitas jalan lingkungan. ❑ Pembangunan jalan lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang.	❑ Peningkatan kualitas jalan lingkungan ❑ Pembangunan jalan lingkungan yang terintegrasi dengan jaringan jalan eksisting.
C	AIR MINUM	❑ 1,32% masyarakat belum memiliki akses aman air minum ❑ 67,11% masyarakat belum terpenuhi kebutuhan air minum	❑ Pengawasan dan Pengendalian ❑ Pemberdayaan Masyarakat	❑ Pemugaran ❑ Peremajaan	❑ Pemeliharaan sumber air bersih. ❑ Pengawasan dan pengendalian	❑ Pemugaran fasilitas penampungan air bersih.

kuantitas ...

NO	SEKTOR	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		STRATEGI PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN KUALITAS	PENCEGAHAN	PENINGKATAN KUALITAS
					kuantitas distribusi air bersih.	❑ Peremajaan pipa jaringan distribusi air bersih. ❑ Peningkatan jangkauan layanan jaringan pipa distribusi air bersih.
D	DRAINASE	❑ 44,95% kualitas kontruksi jaringan drainase lingkungan mengalami kerusakan.	❑ Pengawasan dan Pengendalian ❑ Pemberdayaan Masyarakat	❑ Pemugaran ❑ Peremajaan	❑ Monitoring dan pengawasan kondisi sistem jaringan dan kondisi drainase dikawasan permukiman. ❑ Penggunaan material yang tepat guna untuk durabilitas drainase lingkungan . ❑ Perhitungan kapasitas volume drainase sesuai dengan kebutuhan. ❑ Pembangunan jaringan drainase lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang.	❑ Pembangunan jaringan drainase untuk pengendali banjir. ❑ Peningkatan kualitas drainase kawasan permukiman. ❑ Integrasi jaringan drainase diseluruh kawasan permukiman.

E. SANITASI ...

NO	SEKTOR	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		STRATEGI PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN KUALITAS	PENCEGAHAN	PENINGKATAN KUALITAS
E	SANITASI	❑ 32,89% bangunan hunian belum memiliki sistem pengolahan limbah sesuai teknis. ❑ 32,89% bangunan hunian belum memiliki sarpras pengolahan limbah sesuai teknis	❑ Pengawasan dan Pengendalian ❑ Pemberdayaan Masyarakat	❑ Pemugaran ❑ Peremajaan	❑ Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola lImbah ❑ Mendorong perubahan perilaku dimasyarakat terkait dengan stop Buang Air Besar Sembarangan	❑ Pembangunan MCK komunal berdasarkan pengelompokan zonasi pelayanan. ❑ Pembangunan IPAL komunal
F	PERSAMPAHAN	❑ 100,00% kawasan permukiman belum memiliki sarpras persampahan sesuai teknis. ❑ 100,00% kawasan permukiman belum terlayani sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis. Sistem pengangkutan sampah belum melayani seluruh kawasan permukiman.	❑ Pengawasan dan Pengendalian ❑ Pemberdayaan Masyarakat	❑ Pemugaran ❑ Peremajaan	❑ Mengurangi sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R. ❑ Pelatihan pengelolaan sampah 3R. ❑ Monitoring dan pemeliharaan berkala sarpras persampahan. ❑ Membentuk pengelola teknis setingkat UPTD untuk penanganan persampahan.	❑ Pengelompokkan layanan pengelolaan persampahan berdasarkan jangkauan layananan tingkat dusun. ❑ Pengadaan TPS. ❑ Pengadaan alat pengangkutan persampahan.

G. PROTEKSI...

NO	SEKTOR	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		STRATEGI PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN KUALITAS	PENCEGAHAN	PENINGKATAN KUALITAS
G	PROTEKSI KEBAKARAN	❑ 0,00% kawasan permukiman belum terlayani prasarana proteksi kebakaran. ❑ 100,00% kawasan permukiman belum memiliki sarana proteksi kebakaran	❑ Pengawasan dan Pengendalian ❑ Pemberdayaan Masyarakat	❑ Pemugaran ❑ Peremajaan	❑ Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran ❑ Pembentukan dan Pelatihan relawan tanggap bencana.	❑ Pembangunan posko tanggap bencana. ❑ Penyediaan hydran umum.
					❑ Pemugaraan RTP eksisting. ❑ Monitoring dan pemeliharaan berkala RTP.	❑ Pembangunan RTP skala komunitas ❑ Optimaliasi RTP eksisting

Gambar 5.2 Peta Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh – Kawasan Krueng Raya

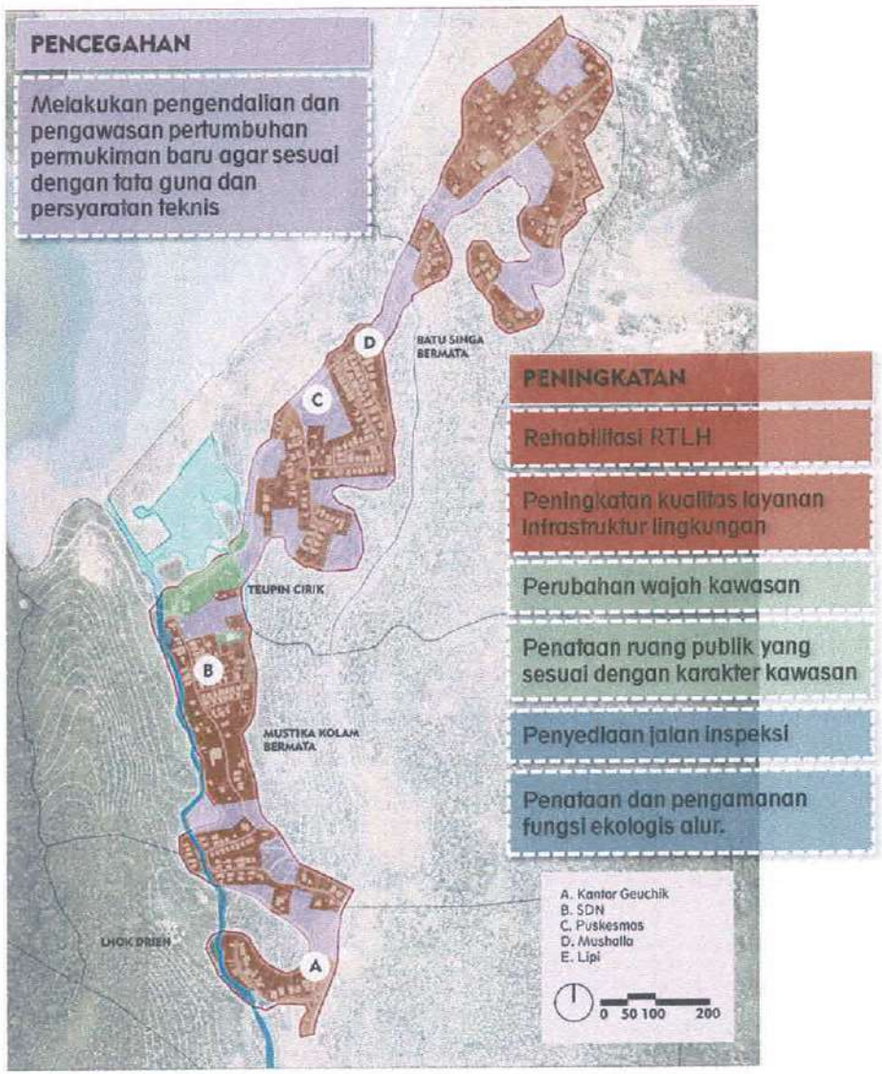

Gambar 5.3 Peta Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh – Kawasan Paya-Keueneukai

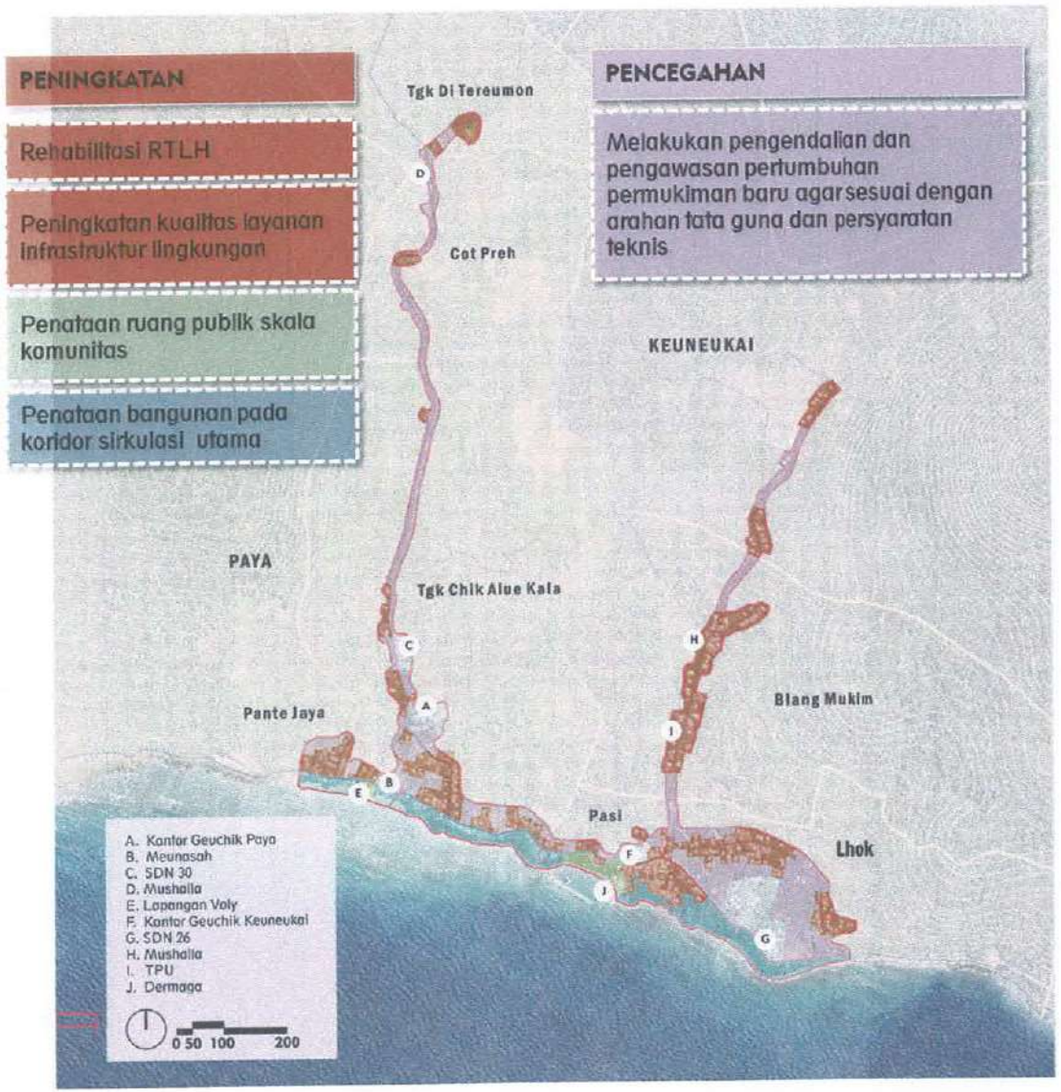

Gambar 5.4 ...

Gambar 5.4 Peta Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh – Kawasan Jaboi

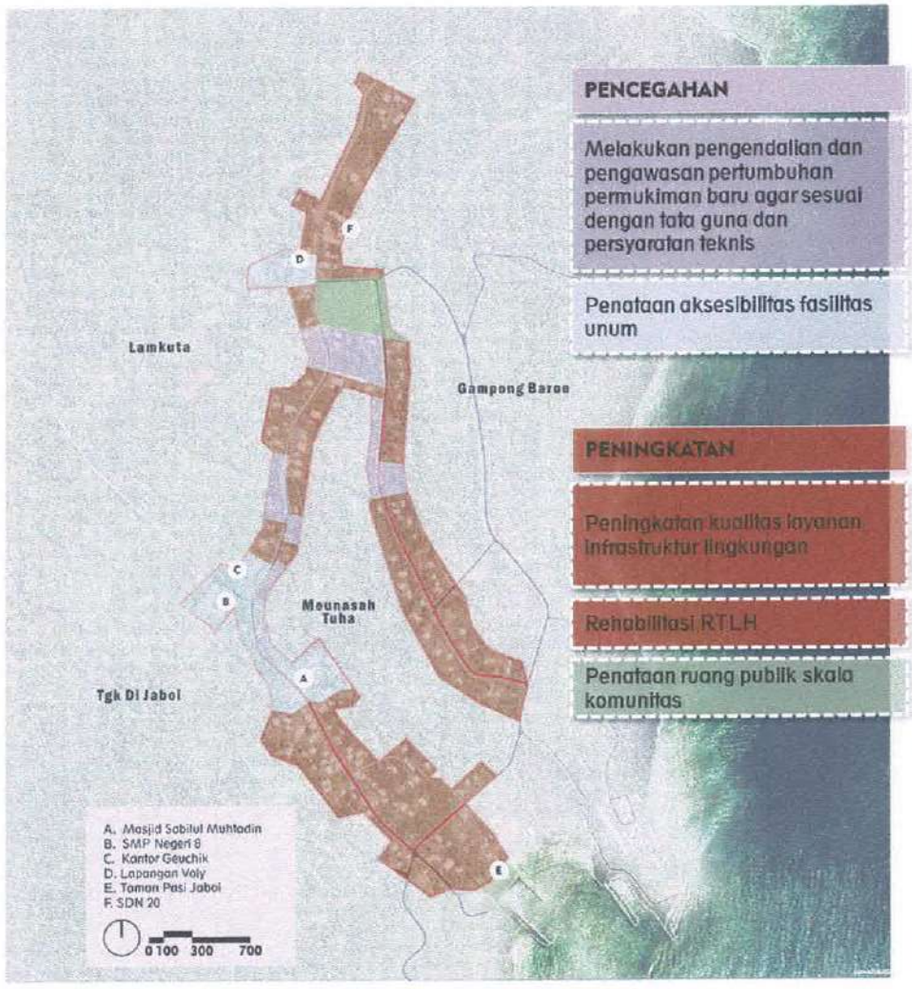

Gambar 5.5 Peta Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh – Kawasan Beurawang

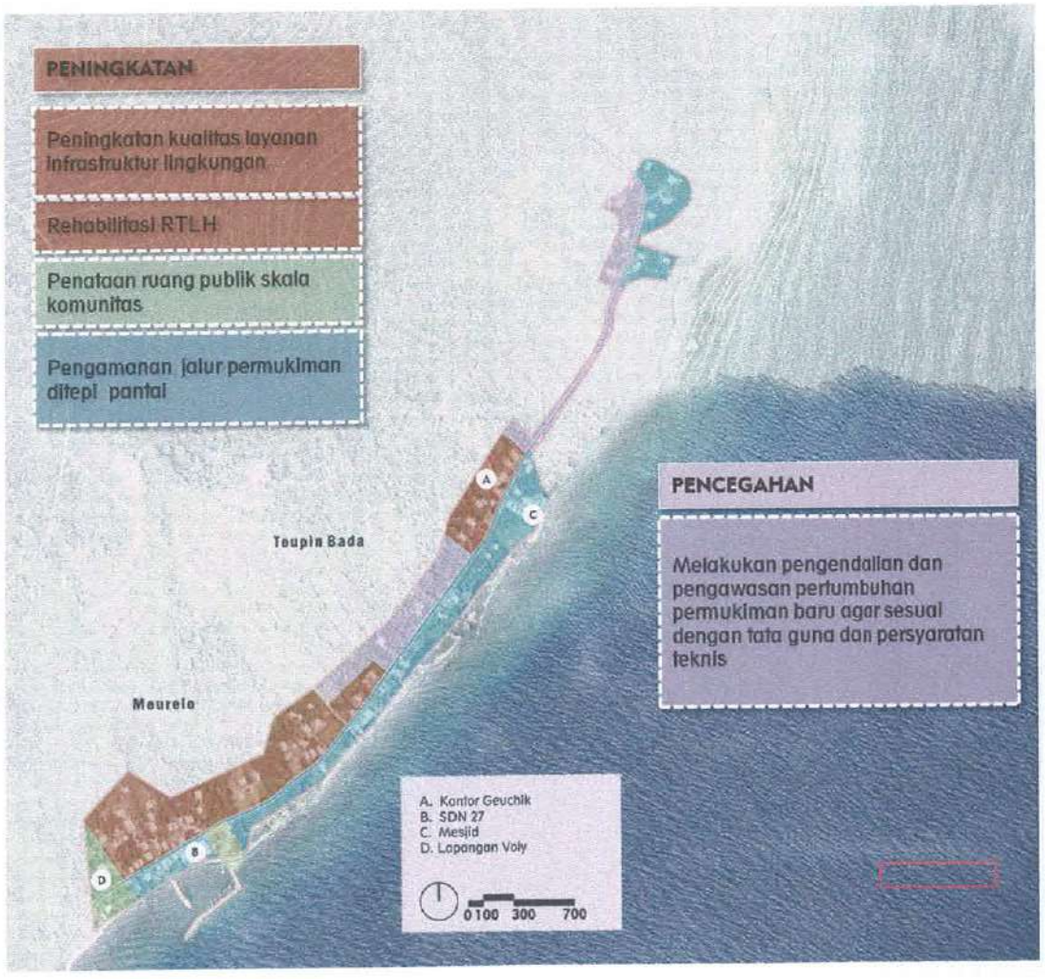

BAB VI

RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

6.1 Program Dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembanganya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Program dan kegiatan penanganan terhadap perumahan dan permukiman kumuh di Kota Sabang diharapkan tidak hanya mengatasi kekumuhan yang sudah ada, namun juga untuk mencegah tumbuhnya kekumuhan baru. Tindakan pencegahan yang dilakukan meliputi pengawasan dan pengendalian oleh para *stakeholder* serta juga dengan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat.

Tindakan pengawasan dan pengendalian tersebut dapat dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap perizinan yang telah ditetapkan (seperti: izin prinsip, izin lokasi, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan), standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemerikasaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara tindakan pemberdayaan terhadap masyarakat dilakukan oleh pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

1. Pengawasan dan Pengendalian

   Lingkup kegiatan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) dilakukan terhadap rencana pengembangan perumahan dan permukiman. Kegiatan tersebut mencakup perizinan terhadap: izin prinsip; izin lokasi; izin penggunaan pemanfaatan tanah; izin mendirikan bangunan; dan izin lainnya. Pengawasan dan pengendalian dalam tahap pembangunan dilakukan terhadap kelayakan teknis pembangunan dengan mengacu pada 8 indikator kumuh yang meliputi:

   - Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis, dan tahap pemanfaatan
   - Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi, untuk menjadi kondisi sistem pelayanan
   - Kuantitas kapasitas dan dimensi serta kualitas bahan atau material yang digunakan masih sesuai dengan fungsinya;

Kondisi...

- Kondisi keberfungsian bangunan beserta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) bangunan beserta PSU tidak mengurangi keberfungsiannya.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan kumuh dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan meliputi ;

1) Pendampingan

a) Penyuluhan; Penyuluhan merupakan kegiatan untuk memberikan informasi dalammeningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh

b) Pembinaan; Pembimbingan merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh

c) Bantuan Teknis; Bantuan teknis yang bersifat fisik, diarahkan pada upaya pemeliharaan/ perbaikan atau melengkapi komponen fisik yang menjadi paramater kekumuhan, Bantuan teknis non fisik, diarahkan pada kegiatan penyusunan elemen software pengaturan dan perencanaan, meliputi : fasilitasi penyusunan perencanaan; norma, standar, prosedur, dan kriteria; penguatan kapasitas kelembagaan; kerjasama pemerintah dengan swasta.

2) Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi yang diberikan meliputi informasi baik melalui media elektronik, cetak maupun secara langsung kepada masyarakat, terkait dengan: (1) rencana tata ruang; (2) penataan bangunan dan lingkungan; (3) perizinan; dan (4) standar perumahan dan permukiman. Beberapa program dan kegiatan pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru yang dilakukan dengan mekanisme sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat dapat sadar dan dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan maupun pasca penanganan kumuh tersebut, adalah sebagai berikut:

a) Program pengendalian pemanfaatan ruang

Lingkup kegiatan yang dilakukan dalam program ini yaitu sosialisasi. Sosialisasi yang dimaksud berupa

sosialisasi ...

sosialisasi aturan tata ruang dan teknis pemanfaatan sempadan sungai kepada masyarakat, dan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang. Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait aturan tata ruang yang berlaku, sehingga masyarakat dapat turut berpartisipasi dan mengawasi pelaksanaan tata ruang. Kegiatan lanjutan dari sosialisasi ini adalah terbentuknya aturan bersama terhadap pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

b) Program lingkungan sehat perumahan

Lingkup kegiatan dalam program ini berupa penyuluhan mengenai lingkungan sehat perumahan. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat dapat menyadari pentingnya lingkungan sehat sebagai upaya dalam pencegahan munculnya permukiman kumuh.

c) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Kegiatan dalam program ini adalah penyuluhan masyarakat untuk dapat hidup bersih dan sehat. Hal ini penting karena lingkungan yang sehat tercipta dari diri yang sehat.

d) Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya alam lainnya

Lingkup kegiatan dari program ini adalah perencanaan kawasan sempadan sungai dan sumber daya alam lainnya agar dapat berfungsi efektif sebagai buffer. Bentuk penataan kawasan sempadan sungai dapat berupa jalur inspeksi, pedestrian dan vegetasi sabuk hijau.

Kota Sabang juga menerapkan program dan kegiatan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang baru. Adapun pencegahan ini dilakukan dimana terjadi beberapa faktor misalnya terjadi penurunan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman.

Tabel 6.1...

Tabel 6.1 Program Pencegahan Perumahan dan Permukiman Kumuh Baru

PERMASALAHAN	PROGRAM PENANGANAN	NO	KEGIATAN	LOKASI
Pertumbuhan kebutuhan perumahan dan permukiman baru dengan kelengkapan sarana prasarana permukiman yang kurang memadai.	Program pencegahan permukiman kumuh	1	Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya untuk rumah layak huni dan sehat serta Indikator kumuh	Kawasan Perumahan dan Permukiman Kota Sabang
		2	Pengendalian dan pengawasan terhadap pertumbuhan permukiman baru	Kawasan Perumahan dan Permukiman Kota Sabang
		3	Pemberdayaan masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan huniannya agar tetap sehat dan nyaman (layak huni)	Kawasan Perumahan dan Permukiman Kota Sabang

Secara lebih rinci, program dan kegiatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembanganya perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Sabang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.2 Program dan Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Permukiman Kumuh Baru

NO	KEGIATAN	PELAKU	OUTPUT
A	Penyusunan Dokumen Perencanaan		
1	Penyusunanan database 100-0-100	Aparat kel/ desa, BKM-UP, relawan, TPP, Tim fasilitator	Daftar potensi dan masalah terkait dengan 100-0-100
2	Penyusunan RPLP	TPP, BKM-UP, masyarakat, aparat kel/ desa	Dokumen RPLP/RTPLP
3	Pemilihan kegiatan prioritas dan penyusunan DED	TIPP, BKM-UP	DED kegiatan prioritas
B	Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal)		
1	Penyusunan terkait persyaratan IMB	Pemda, Aparat kel/desa, fasilitator, BKM-UP	Masyarakat mengerti dan paham tentang persyaratan IMB
2	Penyuluhan tentang RTRW/RDTR kab/kota	Pemda dan aparat kel/desa	Masyarakat paham tentang zonasi peruntukan wilayah
3	Penyuluhan/ pelatihan/coach tentang standar teknis pembangunan infrastuktur yang terkait dengan 8 indikator kumuh	Pemda, TPP, BKM-UP, masyarakat, aparat kel/desa	Masyarakat mengerti dan paham tentang bangunan infrastruktur yang memenuhi standar teknis (SPM)
4	Penyuluhan/ pelatihan/coach	Pemda, TPP, BKM-UP, masyarakat,	Masyarakat mengerti dan paham cara

tentang ...

NO	KEGIATAN	PELAKU	OUTPUT
	tentang identifikasi kelayakan fungsi bangunan infrastruktur permukiman (termasuk PSU dan 8 indikator kumuh)	aparat kel/desa dan Tim OP	melakukan pemeliharaan bangunan
5	Penguatan Tim OP dan pembentukan Pokja pengawasan permukiman tingkat kel/desa	Pemda, TPP, BKM-UP, masyarakat, aparat kel/desa dan Tim OP	Tim OP dan Pokja Waskim menjalankan fungsi dengan optimal
C	Pemberdayaan Masayarakat		
1	Penyuluhan dan pembimbingan tentang penyusunan dan pelaksanaan norma (aturan) bersama	Apara kel/desa, BKM-UP, relawan, TPP, Tim Fasilitator	Tersedianya aturan bersama tentang penceahan permukiman kumuh & adanya indikasi awal perubahan pola perilaku masyarakat
2	Monitoring dan pengendalian penerapan aturan bersama	Apara kel/desa, BKM-UP, relawan, TPP, Tim Fasilitator	Aturan bersama dijalankan secara konsekuen oleh masyarakat
3	Informasi tentang (1) rencana tata ruang, (2) penataan bangunan dan lingkungan, (3) perizinan, dan (4)	Pemda, TPP, BKM-UP, masyarakat, aparat kel/desa	Informasi tentang perumahandan permukiman baik melauli media elektronik maupun cetak
	standar perumahan dan permukiman		
D	Pembangunan Inrastruktur		
1	Pelatihan/ coach terkait pembangunan infrastruktur skala lingkungan (8 indikator)	Pemda, TPP, BKM-UP, masyarakat, aparat kel/desa	Dipahaminya pemabngunan infrastruktur yang memenuhi kelayakan teknis dan kelayakan fungsi
2	Transparansi dan akuntabilitas keuangan	Pemda, TPP, BKM-UP, masyarakat, aparat kel/desa	Terbangunnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana
3	Monitoring & evaluasi pelaksanaan pembangunan fisik dan penggunaan keuangan	Pemda, TPP, BKM-UP, masyarakat, aparat kel/desa	Bangunan fisikmemiliki kelayakan teknis dan kelayakan fungsi serta efisiensi pemanaatan dana
E	Membangun Jejaring Kerja		
1	Pelatihan/coach identifikasi skateholder dalam kegiatan pencegahan permukiman kumuh	Pemda, TPP, BKM-UP, masyarakat, aparat kel/desa	Daftar stakeholder

2. Pelatihan ...

NO	KEGIATAN	PELAKU	OUTPUT
2	Pelatihan/coach menyusun proposal kerjasama dengan pihak lain	Pemda, TPP, BKM-UP, masyarakat, aparat kel/desa	Dipahaminya cara menyusun proposal kerjasama
3	Pelatihan/coach cara komunikasi dengan mitra terkait pemanfaatan dana kemitraan	Pemda, TPP, BKM-UP, masyarakat, aparat kel/desa	Adanya laporan hasil dan penggunaan dana kepada mitra
F	Penguatan Livelihood (P2B)		
1	Penguatan kelompok melalui implementasi panca sutra	Pemda, TPP, BKM-UP, masyarakat, aparat kel/desa	Kelompok menerapkan panca sutra
2	Prioritas sasaran adalah warga MBR, utamanya yang tinggal di kawasan permukiman kumuh (delineasi kumuh)	Pemda, TPP, BKM-UP, masyarakat, aparat kel/desa	Warga MBR di kawasan kumuh mendapatkan layanan P2B

6.2 Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten/Kota, Skala Kawasan, Dan Skala Lingkungan (Rencana Aksi Masyarakat/Cap)

Rencana aksi program disusun sesuai dengan indikator kekumuhan berdasarkan strategi penanganan kumuh dan target yang ingin dicapai dari penanganan kawasan kumuh prioritas akan dibahas oleh pemangku kepentingan yang ada di daerah dan disepakati dalam suatu memorandum keterpaduan program baik skala kabupaten/kota, kawasan, dan lingkungan. Perumusan rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kabupaten/kota, skala kawasan, dan skala lingkungan yang ditinjau berdasarkan masing-masing segmen ini dilakukan dengan dua mekanisme, yakni dengan membuat peta rencana aksi program penanganan permukiman kumuh serta matriks rencana aksi program penanganan dan memorandum program skala kabupaten/kota, kawasan, dan lingkungan.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa upaya penanganan permukiman kumuh harus memuat unsur-unsur pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang diterjemahkan dalam bentuk strategi, program, dan rencana aksi kegiatan.

Sebagaimana ...

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bahasan sebelumnya bahwa rencana aksi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdiri dari 2 (dua) strategi, yaitu

1. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru, melalui:
   a. Pengawasan dan pengendalian; dan
   b. Pemberdayaan masyarakat, serta
2. Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, melalui:
   a. Pemugaran;
   b. Peremajaan; dan
   c. Permukiman kembali.

Perumusan 2 (dua) strategi tersebut harus mempertimbangkan permasalahan ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan, kualitas bangunan, serta sarana dan prasarana (jalan lingkungan, drainase, persampahan, air limbah, air minum dan proteksi kebakaran). Secara lebih rinci, rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Sabang dijabarkan berdasarkan segmen masing-masing kawasan pada Tabel 6.3.

6.3 Memorandum Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembanganya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Memorandum Program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembanganya perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Sabang termuat dalam Rencana Aksi Program perkotaan Sabang yang didasarkan pada permasalahan dan kebutuhan penanganan. Dalam memorandum ini teruraikan kebutuhan program dibidang keciptakaryaan yang meliputi (jalan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan) beserta dengan rencana investasi (yang didalamnya terdapat sumber pendanaan, pelaksana, dan perkiraan biaya).

Tabel 6.3 ...

Tabel 6.3

Rencana Aksi Program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Sabang

NO	LOKASI KEGIATAN	LUAS	INDIKATOR KEKUMUHAN	ASPEK KEKUMUHAN / JENIS KEGIATAN	VOL	SATUAN	TAHUN PENANGANAN			
							2022	2023	2024	2025
1.	KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA SABANG		BANGUNAN	Monitoring dan pengawasan pembanguan kawasan permukiman baru	15	Ls				
				Penyiapan dan Pengembangan infrastruktur dasar permukiman	15	Ls				
				Pendampingan peningkatan kualitas masyarakat.	15	Ls				
				Pelayanan informasi terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	15	Ls				
			JALAN	Meningkatkan monitoring dan pengawasan berkala terhadap kondisi jalan dikawasan kawasan permukiman.	15	Ls				
				Pemugaran kondisi sistem jaringan jalan secara berkala.	15	Ls				
				Pembangunan jalan lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang.		Meter				
				Pembangunan jalan lingkungan pada lokasi yang belum terlayani prasarana jalan.		Meter				
			AIR MINUM	Pemeliharaan sumber air bersih.		Unit				
				Monitoring dan pemugaran berkala sumber dan sarana penampungan air bersih	15	Ls				
				Pengawasan keamanan sistem distribusi air minum penertiban pemasangan pipa disribusi ilegal.	15	Ls				
				Pemugaran jaringan pipa distribusi.		Meter				

DRAINASE...

NO	LOKASI KEGIATAN	LUAS	INDIKATOR KEKUMUHAN	ASPEK KEKUMUHAN / JENIS KEGIATAN	VOL	SATUAN	TAHUN PENANGANAN			
							2022	2023	2024	2025
			DRAINASE	Pengawasan kondisi sistem jaringan dan kondisi drainase dikawasan permukiman	15	Ls				
				Pembangunan jaringan drainase lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang.		Meter				
			SANITASI	Penyusunan qanun dan regulasi turunan tentang pengelolaan air limbah domestik	1	Paket				
				Sosialisasi pentingnya tentang sistem pengolahan limbah sesuai teknis.	15	Ls				
				Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS.	15	Ls				
				Pendampingan perubahan perilaku dimasyarakat terkait dengan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	15	Ls				
				Pemenuhan standar teknis pengolahan limbah (septi tank) disetiap pembangunan permukiman baru.	15	Ls				
			PERSAMPAHAN	Penguatan regulasi dalam pengelolaan persampahan	1	Paket				
				Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan persampahan.	15	Ls				
				Pemberian insentif bagi masyarakat, atau pihak swasata mampu mengelola persampahan dengan baik.	15	Ls				
				Membentuk pengelola teknis setingkat UPTD untuk penanganan persampahan.	1	Paket				
				Pengurangan sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R	1	Ls				

...

PROTEKSI ...

NO	LOKASI KEGIATAN	LUAS	INDIKATOR KEKUMUHAN	ASPEK KEKUMUHAN / JENIS KEGIATAN	VOL	SATUAN	TAHUN PENANGANAN			
							2022	2023	2024	2025
			PROTEKSI KEBAKARAN	Penyiapan regulasi penanganan bahaya kebakaran	1	Paket				
				Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran	15	Ls				
				Pembentukan dan Pelatihan relawan tanggap bencana	18	Unit				
				Pembangunan pos pemadam kebakaran	18	Unit				

BAB VII

RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

7.1 Program Dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Program dan kegiatan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh di Kota Sabang dilaksanakan berdasarkan kondisi aktual dan permasalahan terjadi. Dimana program yang diusulkan meliputi program pengembangan perumahan, program perbaikan/peningkatan RTLH, program peningkatan kualitas dan kapasitas air minum, program Peningkatan Kualitas Aksesibilitas, program penanganan air limbah, program peningkatan pelayanan persampahan serta program proteksi bencana kebakaran

Tabel 7.1 Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Sabang

PERMASALAHAN	PROGRAM PENANGANAN	NO	SUB PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI
✓ Besarnya kebutuhan rumah tempat tinggal yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). ✓ Kawasan permukiman yang belum tertata dengan baik ✓ Status lahan permukiman belum sepenuhnya memiliki sertifikat	Peningkatkan kualitas layanan infrastruktur lingkungan	1	Program pengembangan perumahan	1. Penyusunan dan legalisasi Qanun RP2KPKPK 2. Sosialisasi dan monitoring kesesuaian pemanfataan ruang berdasarkan peraturan tata ruang. 3. Pendataan dan mapping status kepemilikan lahan. 4. Sosialisasi pentingnya Surat Hak Milik (SHM) atas tanah 5. Percepatan pengurusan SHM.	Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan Kota Sabang
		2	Peningkatan/Perbaikan perumahan	1. Sosialisasi rumah sehat dan layak huni 2. Penyusunan database RTLH 3. Rehabilitasi bangunan secara bertahap sesuai dengan persyaratan teknis bangunan sehat dan layak huni.	Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan Kota Sabang

4. Stimulasi ...

PERMASALAHAN	PROGRAM PENANGANAN	NO	SUB PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI
				4. Stimulasi pembangunan perumahan bagi MBR. 5. Monitoring dan evaluasi	
✓ Persentase jalan kota dalam kondisi baik belum optimal ✓ Masih adanya sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar ✓ Konektifitas jaringan jalan belum optimal	Peningkatkan kualitas layanan infrastruktur lingkungan	1	Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	1. Pendataan dan mapping jaringan jalan 2. Integrasi jaringan jalan dan jembatan 3. Pembangunan jaringan jalan sesuai dengan perencanaan tata ruang. 4. Monitoring dan evaluasi	Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan Kota Sabang
		2	Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan	1. Peningkatan Kualitas Jaringan Jalan 2. Pemeliharaan dan monitoring kondisi dan kualitas jaringan jalan	Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan Kota Sabang
✓ Belum optimalnya sistem penyediaan air minum dan pengembangan air minum terlindungi ✓ Kurangnya ketersediaan prasarana sarana sumber daya air. ✓ Kebocoran pipa distribusi ✓ Pemasangan sambungan pipa illegal	Peningkatkan kualitas layanan infrastruktur lingkungan	1	Pengamanan sumber air dan sistem distribusi air bersih	1. Pemugaran berkala sumber dan sarana penampungan air bersih. 2. Peremajaan jaringan pipa distribusi air bersih 3. Monitoring dan evaluasi sumber air dan sistem distribusi air bersih	Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan Kota Sabang
		2	Pengelompokan zonasi kebutuhan air minum	1. Pembangunan sarana penampungan air berish berdasarkan zonasi pelayanan	Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan Kota Sabang

Jaringan ...

PERMASALAHAN	PROGRAM PENANGANAN	NO	SUB PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI
✓ Jaringan drainase belum terintegrasi ✓ Persentase kondisi jaringan drainase lingkungan belum optimal. ✓ Jaringan drainase lingkungan yang tidak saling terhubung. ✓ Kawasan permukiman yang tergenang. ✓ Belum optimalnya fungsi drainase akibat timbunan sampah dilingkungan permukiman.	Peningkatkan kualitas layanan infrastruktur lingkungan	1	Pembangunan Sistem Informasi/Data base jaringan drainase	1. Pendataan dan mapping jaringan drainase 2. Integrasi jaringan drainase 3. Pembangunan jaringan jaringan sesuai dengan perencanaan tata ruang. 4. Monitoring dan evaluasi	Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan Kota Sabang
		2	Peningkatan Kualitas jaringan Drainase kawasan permukiman	1. Peningkatan kualitas jaringan drainase 2. Peningkatan kapasitas drainase untuk penanggulangan banjir 3. Memaksimalkan fungsi waduk sebagai area retensi untuk penanggulangan banjir 4. Pemeliharaan rutin kualitas jaringan drainase 5. Monitoring dan evaluasi kondisi jaringan drainase	Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan Kota Sabang
✓ Tingginya penggunaan sarana pengelolaan limbah yang belum sesuai teknis. ✓ Rendahnya pelayanan dan pengelolaan kegiatan penyehatan lingkungan sanitasi yang layak baik. ✓ Belum optimalnya dan ketersediaan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) kota, komunal, serta kawasan;	Peningkatkan kualitas layanan infrastruktur lingkungan	1	Peningkatan Layanan dan Sistem Pengolahan Limbah	1. Penyusunan qanun dan regulasi turunan tentang pengelolaan air limbah domestic 2. Sosialisasi pentingnya tentang sistem pengolahan limbah sesuai teknis. 3. Pemenuhan standar teknis pengolahan limbah (septi tank) disetiap pembangunan permukiman baru • 4. Pengelompokkan layanan sistem pengolahan limbah komunal 5. Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Komunal.	Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan Kota Sabang

6. Peningkatan ...

PERMASALAHAN	PROGRAM PENANGANAN	NO	SUB PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI
				6. Peningkatan kapasitas unit pengolahan air limbah komunal 7. Pemugaran sarana dan prasarana pengolahan air limbah	
✓ Belum optimalnya sinergisitas kerjasama dalam pengelolaan sampah kota secara regional. ✓ Rendahnya cakupan pelayanan persampahan. ✓ Kurangnya sarana dan prasarana persampahan. ✓ Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan serta kurang berfungsinya sistem pengawasan dan pengendalian ✓ Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan dan pemilahan sampah.,	Peningkatkan kualitas layanan infrastruktur lingkungan	1	Peningkatan Sistem Pelayanan Pengelolaan Persampahan	1. Memperkuat regulasi dalam pengelolaan persampahan 2. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan persampahan. 3. Pengurangan sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R. 4. Pemberian insentif bagi masyarakat, atau pihak swasata mampu mengelola persampahan dengan baik. 5. Membentuk pengelola teknis setingkat UPTD untuk penanganan persampahan 6. Peningkatan dan pengembangan TPA. 7. Peningkatan jumlah TPS pada kawaasn permukiman. 8. Peningkatan jangkauan dan kuantitas layanan pengangkutan persampahan. 9. Pengadaan alat pengangkutan persampahan 10. Monitoring dan pemeliharaan berkala sarpras persampahan dikawasan permukiman.	Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan Kota Sabang

Belum ...

PERMASALAHAN	PROGRAM PENANGANAN	NO	SUB PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI
✓ Belum tersedianya sarana dan prasarana proteksi kebakaran ditingkat kawasan maupun lingkup hunian	Peningkatkan kualitas layanan infrastruktur lingkungan	1	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	1. Pembinaan Relawan Tanggap Bencana Kebakaran 2. Penyiapan regulasi penanganan bahaya kebakaran 3. Integrasi reservoir penampungan air bersih sebagai sarana proteksi kebakaran. 4. Pembangunan posko tanggap dan penanggulangan kebakaran. 5. Rencana pembangunan sisitem hidran dikawasan permukiman.	Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan Kota Sabang
✓ Belum optimalnya fungsi ruang terbuka ublik pada kawasan permukiman,	Penyediaan Ruang Terbuka Publik	1	Penataan ruang publik skala komunitas	1. Pemugaraan RTP eksisting. 2. Monitoring dan pemeliharaan berkala RTP dikawasan permukiman. 3. Optimalisasi fungsi RTP pada kawasan permukiman.	Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan Kota Sabang
		2	Penataan ruang publik yang berkarakter	1. Penyediaan RTP yang sesuai dengan karakter dan identitas kawasan permukiman.	

Gambar 7.1...

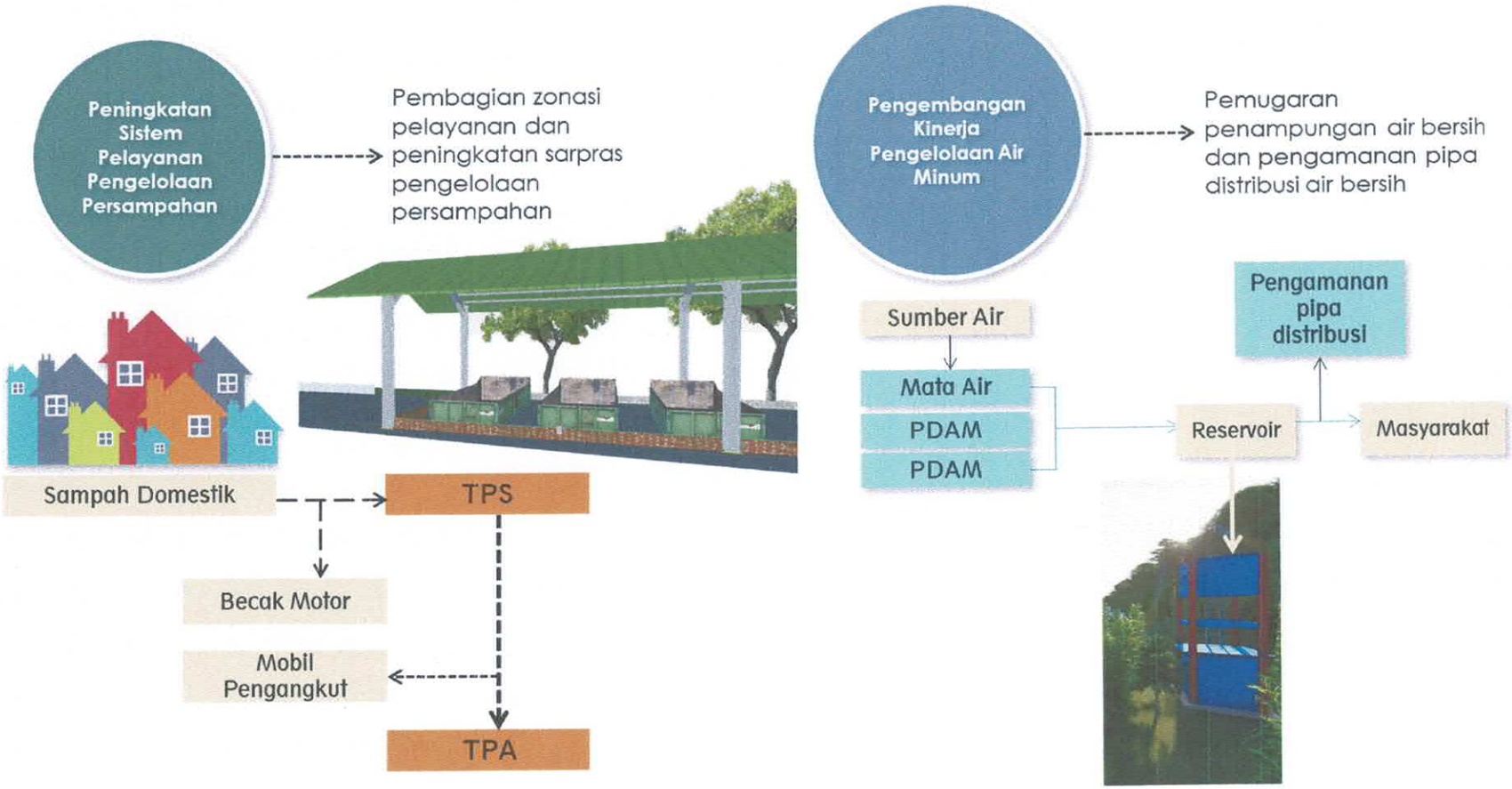

Gambar 7.1 Ilustrasi Diagram Program Penanganan Permukiman Kumuh Kota Sabang

7.2 Program Peningkatan Kualitas Kawasan Prioritas Krueng Raya

Kawasan Krueng Raya merupakan kawasan prioritas pertama berdasarkan hasil penilaian skala prioritas penanganan kawasan permukiman kumuh kota sabang. Kawasan Krueng Raya merupakan kawasan permukiman kumuh yang berada dipesisr pantai dengan tingkat kekumuhan sedang. Luas kawasan perumahan dan permukiman kumuh Krueng Raya adalah 27,011 Ha. Informasi umum Kawasan Krueng Raya dapat dilihat pada tabel 7.2 berikut.

Tabel 7.2
Informasi Umum Kawasan Kumuh Krueng Raya

Kawasan	Krueng Raya
Gampong	Krueng Raya
Kecamatan	Sukakarya
Kota	Sabang
Provinsi	Aceh
Luas Deliniasi Kumuh	27,011
Jumlah Bangunan	474
Jumlah Penduduk	1.581 Jiwa
Jumah KK	387
Kategori, Tipologi dan Karakteristik Permukimah Kumuh	
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	Permukiman Kumuh Pesisir Pantai
Karakteristik	Kawasan Gampong Nelayan
Permasalahan Utama	
• Belum adanya sarana dan prasarana persampah yang memadai dan sesuai teknis	
• Kondisi jalan lingkungan belum memadai (<2 M)	
• Kondisi drainase lingkungan yang buruk	
• Sistem pengolahan limbah yang tidak sesuai teknis	
SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH	
1. Batu Singa Berfakta	9,240 Ha
2. Lhok Drien	3,039 Ha
3. Mustika Kolam Bermata	7,161 Ha
4. Teupin Cirik	7,571 Ha

Penyusunan program peningkatan kualitas kawasan prioritas Krueng Raya merincikan program-program yang telah disusun untuk penanganan Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan Kota Sabang. Program peningkatan kualitas Kawasan Krueng Raya dilakukan dengan pembangunan berbasis kawasan dan lingkungan melalui pendekatan perencanaan partisipatif. Program disusun sesuai dengan indikator kekumuhan berdasarkan strategi penanganan kumuh dan target yang ingin dicapai dari penanganan kawasan kumuh. Program Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Krueng Raya dapat dilihat pada tabel 7.3.

Tabel 7.3 ...

Table 7.3

Tabel 7.3 Program Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Prioritas – Kawasan Krueng Raya

NO	SEKTOR	PERMASALAHAN	KEBUTUHAN PENANGANAN			RENCANA TAHUN PELAKSANAAN			
			PENANGANAN	KEGIATAN		2022	2023	2024	2025
A	PERMUKIMAN	✓ Pengembangan pembangunan perumahan tidak terencana. ✓ Rumah tidak layak huni ✓ Konflik kepemilikan lahan	Program pengembangan perumahan	1	Sosialisasi dan monitoring kesesuaian pemanfataan ruang berdasarkan peraturan tata ruang				
				2	Stimulan rehabilitasi RTLH				
				3	Pendataan dan mapping status kepemilikan lahan.				
				4	Percepatan pengurusan SHM				
B	JALAN	✓ Kondisi jaringan jalan lingkungan yang belum memadai ✓ Kawasan permukiman belum seluruhnya terlayani jaringan jalan	Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan	1	Pembangunan jalan lingkungan				
				2	Pembangunan jalan inspeksi + pedestrian				
				3	Peningkatan kualitas jalan lingkungan				
				4	Rehab jembatan				
C	AIR MINUM	✓ Sumber air bersih belum terlindungi ✓ Kawasan permukiman belum sepenuhnya memiliki akses aman air bersih	Pengamanan sumber air dan sistem distribusi air bersih.	1	Peremajaan pipa jaringan distribusi air bersih				
				2	Pembagian zonasi pelayanan air bersih				
				3	Pembangunan rumah pompa dan reservoir air bersih				

NO	SEKTOR	PERMASALAHAN	KEBUTUHAN PENANGANAN			RENCANA TAHUN PELAKSANAAN			
			PENANGANAN	KEGIATAN		2022	2023	2024	2025
		✓ Kawasan permukiman belum terlayaninya jaringan air bersih							
D	DRAINASE	✓ Kawasan permukiman belum terakses jaringan drainase ✓ Jaringan drainsae tidak berungsi secara optimal ✓ Kawasan permukiman tergenangan	Pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan drainase	1	Pembangunan jaringan drainase				
				2	Peningkatan kualitas drainase				
				3	Pemeliharaan rutin jaringan drainase				
E	SANITASI	✓ Kawasan permukiman belum memiliki sistem pengelolaan air limbah sesuai persyaratan teknis	Pengembangan kinerja sistem pengelolaan air limbah	1	Sosialisasi pentingnya tentang sistem pengolahan limbah sesuai teknis				
				2	Pembagian zonasi pelayanan pengolahan limbah				
				3	Pembangunan IPAL komunal				
F	PERSAMPAHAN	✓ Belum tersedianya sarana dan prasarana persampahan ✓ Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	1	Sosialisasi kawasan permukimanan yang layak huni.				
				2	Pengurangan sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R.				
				3	Membentuk pengelola teknis setingkat UPTD untuk penanganan persampahan				
				4	Pelatihan pengelolaan sampah 3R				

sampah ...

NO	SEKTOR	PERMASALAHAN	KEBUTUHAN PENANGANAN			RENCANA TAHUN PELAKSANAAN			
			PENANGANAN	KEGIATAN		2022	2023	2024	2025
		sampah dan pemeliharaan kesehatan lingkungan		5	Pembangunan Tempat Penampungan Sementara tingkat Dusun				
				6	Pengadaan sarana pengangkutan sampah domestik				
G	PROTEKSI KEBAKARAN	✓ Tidak tersedianya sistem proteksi kebakaran di kawasan permukiman	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1	Pembinaan Relawan Tanggap Bencana Kebakaran				
				2	Pembangunan posko tanggap dan penanggulangan kebakaran.				
				3	Rencana pembangunan sisitem hidran dikawasan permukiman.				
				4	Sosialisasi penanggulangan dan evakuasi dini kebencanaan				
H	RUANG TERBUKA HIJAU DAN PUBLIK	✓ Belum terpenuhinya kebutuhan ruang terbuka publik	Penataan ruang publik skala komunitas	1	Pembangunan balai nelayan				
				2	Pembanguanan RTP Kampung nelayan				
				3	Monitoring dan pemeliharaan berkala RTP dikawasan permukiman.				

7.3 Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Kota Sabang

Rencana aksi program peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Sabang tertuang dalam matriks rencana aksi program yang memuat aspek kekumuhan , jenis kegiatan, volume pekerjaan, rencana anggaran, dan sumber pembiayaan. Adapun periode pengentasan kawasan kumuh dilaksanakan selama lima tahun untuk mewujudkan kawasan bebas kumuh di Kota Sabang.

Penyusunan rencana aksi program dilakukan dengan model pembangunan berbasis kawasan dan lingkungan melalui pendekatan perencanaan partisipatif pada kawasan permukiman kumuh. Rencana aksi program disusun berdasarkan ketujuh indikator kekumuhan dan berdasarkan strategi penanganan permukiman kumuh dan juga kebutuhan penanganan berdasarkan kondisi eksisting. Rencana aksi program peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Sabang dapat dilihat pada Tabel 7.4

Table 7.4
Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Sabang

NO	ASPEK KEKUMUHAN	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOL	SATUAN	TOTAL BIAYA	TAHUN PENANGANAN (x1000)				SUMBER PENDANAAN
							2022	2023	2024	2025	
I	GAMPONG PAYA										
A	Tahap persiapan dan perencanaan	Sosialisasi 7 iIndikator kumuh	Gampong Paya	4	Unit	80.000		40.000	40.000		APBK
		Sosialisai perubahan sikap dan prilaku	Gampong Paya	4	Unit	80.000			40.000	40.000	APBK
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanganan Kumuh Kawasan Paya-Keuneukai	Gampong Paya	1	Unit	100.000	100.000				APBK

Penyusunan ...

NO	ASPEK KEKUMUHAN	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOL	SATUAN	TOTAL BIAYA	TAHUN PENANGANAN (x1000)				SUMBER PENDANAAN
							2022	2023	2024	2025	
		Penyusunan Dokumen RTP Gampong Paya	Gampong Paya	1	Unit	100.000		100.000			APBK
B	Bangunan gedung	Peremajaan rumah	Cot Preh	4	Unit	120.000		120.000			APBN-APBK
		Peremajaan rumah	Pante Jaya	15	Unit	450.000		150.000	150.000	150.000	APBN-APBK
		Peremajaan rumah	Tgk Chick Alue Kala	12	Unit	360.000		60.000	300.000		APBN-APBK
		Peremajaan rumah	Tgk Di Teuremon	6	Unit	180.000		30.000	60.000	90.000	APBN-APBK
C	Jalan lingkungan	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Cot Preh	900	Meter	900.000		300.000	300.000	300.000	APBN
		Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Pante Jaya	300	Meter	300.000		300.000			APBK
		Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Tgk Di Teuremon	800	Meter	800.000		300.000	500.000		APBN
D	Penyediaan air minum	Penyediaan dan pengadaan lahan	Gampong Paya	2	Unit	100.000		100.000			APBK
		Pembangunan rumah pompa & reservoir	Pante Jaya	1	Unit	500.000			500.000		APBN
		Pembangunan rumah pompa & reservoir	Tgk Di Teuremon	1	Unit	500.000				500.000	APBN
E	Drainase lingkungan	Peningkatan kualitas drainase	Cot Preh	100	Meter	70.000		700.00			APBK
		Peningkatan kualitas drainase	Pante Jaya	250	Meter	175.000			175.000		APBK
		Peningkatan kualitas drainase	Tgk Chick Alue Kala	150	Meter	105.000				105.000	APBK
F	Pengolahan limbah	Penyediaan dan pengadaan lahan	Gampong Paya	3	Unit	150.000	100.000	50.000			APBK
		IPAL + MCK komunal	Cot Preh	1	Unit	500.000		500.000			APBN

IPAL ...

NO	ASPEK KEKUMUHAN	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOL	SATUAN	TOTAL BIAYA	TAHUN PENANGANAN (x1000)				SUMBER PENDANAAN
							2022	2023	2024	2025	
		IPAL + MCK komunal	Pante Jaya	1	Unit	500.000			500.000		APBN
		Bio - Septitanc	Tgk Chick Alue Kala	1	Unit	30.000			30.000		APBK
F	Pengelolaan persampahan	Penyediaan dan pengadaan lahan	Gampong Paya	4	Unit	200.000	100.000	100.000			APBK
		Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Cot Preh	1	Unit	150.000		150.000			APBK
		Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Pante Jaya	1	Unit	150.000		150.000			APBK
		Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Tgk Chick Alue Kala	1	Unit	150.000			150.000		APBK
		Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Tgk Di Teuremon	1	Unit	150.000			150.000		APBK
		Becak Motor	Gampong Paya	4	Unit	400.000			200.000	200.000	APBG
G	Proteksi kebakaran	Penyediaan dan pengadaan lahan	Gampong Paya	4	Unit	200.000	100.000	100.000			APBK
		Posko Tanggap Bencana	Cot Preh	1	Unit	150.000		150.000			APBK
		Posko Tanggap Bencana	Pante Jaya	1	Unit	150.000			150.000		APBK
		Posko Tanggap Bencana	Tgk Chick Alue Kala	1	Unit	150.000			150.000		APBK
		Posko Tanggap Bencana	Tgk Di Teuremon	1	Unit	150.000				150.000	APBK
H	Ruang terbuka hijau	Penyediaan dan pengadaan lahan	Gampong Paya	2	Unit	100.000		100.000			APBK
		Penyediaan penerangan jalan umum (PJU)	Gampong Paya	40	Unit	1.200.000			600.000	600.000	APBA

Pembangunan ...

NO	ASPEK KEKUMUHAN	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOL	SATUAN	TOTAL BIAYA	TAHUN PENANGANAN (x1000)				SUMBER PENDANAAN
							2022	2023	2024	2025	
		Pembangunan RTP	Gampong Paya	1	Unit	4.000.000			2.000.000	2.000.000	APBN-APBK
		Revitalisasi lapangan voly	Gampong Paya	1	Unit	1.000.000			1.000.000		APBN-APBK
I	Pengendalian dan pengawasan	Operasional dan pemeliharaan	Gampong Paya	2	Unit	100.000			50.000	50.000	APBK
		Pelatihan kemitraan dan kewirausahaan	Gampong Paya	3	Unit	120.000	40.000	40.000	40.000		CSR
		Bantuan modal usaha	Gampong Paya	3	Unit	300.000		100.000	100.000	100.000	CSR
		Peningkatan kualitas UMK	Gampong Paya	3	Unit	300.000	100.000	100.000	100.000		CSR
		Sosialisasi penanggulangan dan evakuasi dini kebencanaan	Gampong Paya	3	Unit	150.000	50.000	50.000	50.000		APBK
		Pelatihan pemuda tanggap bencana	Gampong Paya	3	Unit	150.000		50.000	50.000	50.000	APBK
				SUB TOTAL		15.520.000					
II	GAMPONG KEUNEUKAI										
A	Tahap persiapan dan perencanaan	Sosialisasi 7 iIndikator kumuh	Gampong Keuneukai	4	Unit	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	APBK
		Sosialisai perubahan sikap dan prilaku	Gampong Keuneukai	4	Unit	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	APBK
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanganan Kumuh Kawasan Paya-Keuneukai	Gampong Keuneukai	1	Unit	100.000	100.000				APBK

Penyusunan ...

NO	ASPEK KEKUMUHAN	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOL	SATUAN	TOTAL BIAYA	TAHUN PENANGANAN (x1000)				SUMBER PENDANAAN
							2022	2023	2024	2025	
		Penyusunan Dokumen RTP Gampong Keuneukai	Gampong Keuneukai	1	Unit	100.000		100.000			APBK
B	Bangunan Gedung	Bantuan stimulan bahan bangunan	Blang Mukim	1	Unit	15.000		15.000			APBA
		Bantuan stimulan bahan bangunan	Kulam	5	Unit	75.000		75.000			APBA
		Peremajaan RTLH	Lhok	6	Unit	180.000			180.000		APBN-APBK
		Peremajaan RTLH	Pasi	19	Unit	570.000		60.000	120.000	390.000	APBN-APBK
C	Jalan lingkungan	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Blang Mukim	600	Meter	600.000		600.000			APBK
		Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Kulam	1.200	Meter	1.200.000		600.000	600.000		APBA
D	Penyediaan air minum	Penyediaan dan pengadaan lahan	Gampong Keuneukai	4	Unit	200.000		100.000	100.000		APBK
		Pembangunan rumah pompa & reservoir	Blang Mukim	1	Unit	500.000			500.000		APBN
		Hyndran umum	Kulam	1	Unit	50.000			50.000		APBK
		Pembangunan rumah pompa & reservoir	Lhok	1	Unit	500.000		500.000			APBN
		Pembangunan rumah pompa & reservoir	Pasi	1	Unit	500.000			500.000		APBN
		Penyediaan mobil tank	Gampong Keuneukai	1	Unit	600.000				600.000	
E	Drainase	Peningkatan kualitas drainase	Blang Mukim	150	Meter	105.000		105.000			APBK
		Peningkatan kualitas drainase	Kulam	100	Meter	70.000		70.000			APBK
		Peningkatan kualitas drainase	Lhok	900	Meter	630.000			400.000	230.000	APBK

F. Pengelolaan ...

NO	ASPEK KEKUMUHAN	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOL	SATUAN	TOTAL BIAYA	TAHUN PENANGANAN (x1000)				SUMBER PENDANAAN
							2022	2023	2024	2025	
F	Pengelolaan persampahan	Penyediaan dan pengadaan lahan	Gampong Keuneukai	4	Unit	200.000		100.000	100.000		APBK
		Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Blang Mukim	1	Unit	150.000			150.000		APBK
		Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Kulam	1	Unit	150.000			150.000		APBK
		Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Lhok	1	Unit	150.000				150.000	APBK
		Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Pasi	1	Unit	150.000				150.000	APBK
		Becak Motor	Gampong Keuneukai	4	Unit	400.000			200.000	200.000	APBG
G	Proteksi kebakaran	Penyediaan dan pengadaan lahan	Gampong Keuneukai	4	Unit	200.000		100.000	100.000		APBK
		Posko Tanggap Bencana	Blang Mukim	1	Unit	150.000			150.000		APBK
		Posko Tanggap Bencana	Kulam	1	Unit	150.000			150.000		APBK
		Posko Tanggap Bencana	Lhok	1	Unit	150.000				150.000	APBK
		Posko Tanggap Bencana	Pasi	1	Unit	150.000				150.000	APBK
H	Ruang terbuka hijau	Penyediaan penerangan jalan umum (PJU)	Gampong Keuneukai	50	Unit	1.500.000		500.000	500.000	500.000	APBA
		Penyediaan dan pengadaan lahan	Gampong Keuneukai	2	Unit	100.000		100.000			APBK
		Pembangunan RTP	Gampong Keuneukai	2	Unit	3.000.000			2.000.000	1.500.000	APBN-CSR
		Revitalisasi dermaga	Gampong Keuneukai	1	Unit	5.000.000			2.500.000	2.500.000	APBA-CSR
I		Operasional dan pemeliharaan	Gampong Keuneukai	2	Unit	100.000			100.000		APBK

Pengendalian ...

NO	ASPEK KEKUMUHAN	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOL	SATUAN	TOTAL BIAYA	TAHUN PENANGANAN (x1000)				SUMBER PENDANAAN
							2022	2023	2024	2025	
	Pengendalian dan pengawasan	Pelatihan kemitraan dan kewirausahaan	Gampong Keuneukai	3	Unit	120.000		40.000	40.000	40.000	CSR
		Bantuan modal usaha	Gampong Keuneukai	3	Unit	300.000		100.000	100.000	100.000	CSR
		Peningkatan kualitas UMK	Gampong Keuneukai	3	Unit	300.000	100.000	100.000	100.000		CSR
		Sosialisasi penanggulangan dan evakuasi dini kebencanaan	Gampong Keuneukai	2	Unit	100.000		50.000	50.000		APBK
		Pelatihan pemuda tanggap bencana	Gampong Keuneukai	4	Unit	200.000		100.000	100.000		APBK
				SUB TOTAL		18.875.000					
III.	**GAMPONG JABOI**										
A	Tahap persiapan dan perencanaan	Sosialisasi 7 iIndikator kumuh	Gampong Jaboi	4	Unit	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	APBK
		Sosialisai perubahan sikap dan prilaku	Gampong Jaboi	4	Unit	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	APBK
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanganan Kumuh Kawasan Jaboi	Gampong Jaboi	1	Unit	100.000		100.000			APBK
		Penyusunan Dokumen RTP Gampong Jaboi	Gampong Jaboi	1	Unit	100.000		100.000			APBK
B	Bangunan gedung	Peremajaan RTLH	Dsn Gampong Baro	9	Unit	270.000		180.000	90.000		APBN-APBA
		Peremajaan RTLH	Dsn Lamkuta	8	Unit	240.000		240.000			APBN-APBA

Peremajaan ...

NO	ASPEK KEKUMUHAN	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOL	SATUAN	TOTAL BIAYA	TAHUN PENANGANAN (x1000)				SUMBER PENDANAAN
							2022	2023	2024	2025	
		Peremajaan RTLH	Dsn Meunasah Tuha	11	Unit	330.000			150.000	180.000	APBN-APBA
		Peremajaan RTLH	Dsn Tgk Di Jaboi	12	Unit	360.000			120.000	240.000	APBN-APBA
C	Jalan lingkungan	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Dsn Gampong Baro	1.300	Meter	1.300.000			1.300.000		APBN
		Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Dsn Lamkuta	300	Meter	300.000		300.000			APBK
		Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Dsn Tgk Di Jaboi	2.650	Meter	2.650.000			1.650.000	1.000.000	APBN
D	Penyediaan air minum	Penyediaan dan pengadaan lahan	Gampong Jaboi	4	Unit	200.000		100.000	100.000		APBK
		Pembangunan rumah pompa & reservoir	Dsn Gampong Baro	1	Unit	500.000			500.000		ABPN
		Hyndran umum	Dsn Lamkuta	1	Unit	50.000			50.000		APBK
		Pembangunan rumah pompa & reservoir	Dsn Meunasah Tuha	1	Unit	500.000				500.000	APBN
		Pembangunan rumah pompa & reservoir	Dsn Tgk Di Jaboi	1	Unit	500.000				500.000	APBN
		Penyediaan mobil tank	Gampong Jaboi	2	Unit	1.200.000		600.000	600.000		APBK
E	Drainase lingkungan	Penyediaan dan pengadaan lahan	Gampong Jaboi	4	Unit	200.000		100.000	100.000		APBK

Pembangunan ...

NO	ASPEK KEKUMUHAN	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOL	SATUAN	TOTAL BIAYA	TAHUN PENANGANAN (x1000)				SUMBER PENDANAAN
							2022	2023	2024	2025	
		Pembangunan drainase baru	Dsn Gampong Baro	850	Meter	850.000		850.000			APBA
		Pembangunan drainase baru	Dsn Lamkuta	405	Meter	405.000		405.000			APBA
		Pembangunan drainase baru	Dsn Meunasah Tuha	490	Meter	490.000			490.000		APBK
		Pembangunan drainase baru	Dsn Tgk Di Jaboi	100	Meter	100.000			100.000		APBK
		Peningkatan kualitas drainase lingkungan	Dsn Gampong Baro	350	Meter	245.000			245.000		APBK
		Peningkatan kualitas drainase lingkungan	Dsn Lamkuta	100	Meter	70.000	70.000				APBK
		Peningkatan kualitas drainase lingkungan	Dsn Meunasah Tuha	345	Meter	241.500		241.000			APBK
		Peningkatan kualitas drainase lingkungan	Dsn Tgk Di Jaboi	250	Meter	175.000			175.000		APBK
F	Pengolahan limbah	Penyediaan dan pengadaan lahan	Gampong Jaboi	4	Unit	200.000		100.000	100.000		APBK
		Bio - Septitanc	Dsn Gampong Baro	1	Unit	30.000			30.000		APBK
		Bio - Septitanc	Dsn Lamkuta	1	Unit	30.000			30.000		APBK
		IPAL + MCK komunal	Dsn Meunasah Tuha	1	Unit	500.000				500.000	APBN

IPAL ...

NO	ASPEK KEKUMUHAN	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOL	SATUAN	TOTAL BIAYA	TAHUN PENANGANAN (x1000)				SUMBER PENDANAAN
							2022	2023	2024	2025	
		IPAL + MCK komunal	Dsn Tgk Di Jaboi	1	Unit	500.000				500.000	APBN
G	Pengelolaan persampahan	Penyediaan dan pengadaan lahan	Gampong Jaboi	4	Unit	200.000		100.000	100.000		APBK
		Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Dsn Gampong Baro	1	Unit	200.000		200.000			APBK
		Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Dsn Lamkuta	1	Unit	200.000		200.000			APBK
		Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Dsn Meunasah Tuha	1	Unit	200.000			200.000		APBK
		Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Dsn Tgk Di Jaboi	1	Unit	200.000			200.000		APBK
		Becak Motor	Gampong Jaboi	4	Unit	400.000		200.000	100.000	100.000	CSR
H	Proteksi kebakaran	Penyediaan dan pengadaan lahan	Gampong Jaboi	4	Unit	200.000	100.000	100.000			APBK
		Posko Tanggap Bencana	Dsn Gampong Baro	1	Unit	150.000		150.000			APBK
		Posko Tanggap Bencana	Dsn Lamkuta	1	Unit	150.000		150.000			APBK
		Posko Tanggap Bencana	Dsn Meunasah Tuha	1	Unit	150.000			150.000		APBK
		Posko Tanggap Bencana	Dsn Tgk Di Jaboi	1	Unit	150.000			150.000		APBK
I	Ruang terbuka hijau	Penyediaan penerangan jalan umum (PJU)	Gampong Jaboi	50	Unit	1.500.000		500.000	500.000	500.000	APBA-APBK

Penyediaan ...

NO	ASPEK KEKUMUHAN	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOL	SATUAN	TOTAL BIAYA	TAHUN PENANGANAN (x1000)				SUMBER PENDANAAN
							2022	2023	2024	2025	
		Penyediaan dan pengadaan lahan	Gampong Jaboi	2	Unit	200.000	100.000	100.000			APBK
		Pembangunan RTP	Gampong Jaboi	2	Unit	2.000.000			1.000.000	1.000.000	APBA-APBK
		Revitalisasi lapangan voly	Gampong Jaboi	1	Unit	1.000.000			500.000	500.000	CSR
J	Pengendalian dan pengawasan	Operasional dan pemeliharaan	Gampong Jaboi	1	Unit	50.000				50.000	APBK
		Pelatihan kemitraan dan kewirausahaan	Gampong Jaboi	3	Unit	120.000	40.000	40.000	40.000		CSR
		Bantuan modal usaha	Gampong Jaboi	3	Unit	300.000	100.000	100.000	100.000		CSR
		Peningkatan kualitas UMK	Gampong Jaboi	3	Unit	300.000		100.000	100.000	100.000	CSR
		Sosialisasi penanggulangan dan evakuasi dini kebencanaan	Gampong Jaboi	2	Unit	100.000		50.000	50.000		APBK
		Pelatihan pemuda tanggap bencana	Gampong Jaboi	4	Unit	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	APBK
				SUB TOTAL		20.766.500					
IV.	**GAMPONG BEURAWANG**										
A	Persiapan dan perencanaan	Sosialisasi 7 iIndikator kumuh	Gp. Beurawang	4	Unit	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	APBK
		Sosialisai perubahan sikap dan prilaku	Gp. Beurawang	4	Unit	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	APBK

Peenyusunan ...

NO	ASPEK KEKUMUHAN	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOL	SATUAN	TOTAL BIAYA	TAHUN PENANGANAN (x1000)				SUMBER PENDANAAN
							2022	2023	2024	2025	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanganan Kumuh Kawasan Beurawang	Gp. Beurawang	1	Unit	100.000			100.000		APBK
		Penyusunan Dokumen RTP Gampong Beurawang	Gp. Beurawang	1	Unit	100.000			100.000		APBK
B	Bangunan gedung	Peremajaan RTLH	Dsn Meurelo	12	Unit	360.000		60.000	120.000	180.000	APBN-APBK
		Peremajaan RTLH	Dsn Teupin Bada	12	Unit	360.000		60.000	120.000	180.000	APBN-APBK
		Stimulan bahan bangunan	Dsn Meurelo	14	Unit	210.000		70.000	70.000	70.000	APBN-APBK
		Stimulan bahan bangunan	Dsn Teupin Bada	9	Unit	135.000		60.000	75.000		APBN-APBK
C	Jalan lingkungan	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Dsn Meurelo	550	Meter	550.000		550.000			APBA
D	Penyediaan air minum	Penyediaan dan pengadaan lahan	Dsn Meurelo	1	Unit	50.000		50.000			APBK
		Pembangunan rumah pompa & reservoir	Dsn Meurelo	1	Unit	500.000			500.000		APBN
E	Drainase lingkungan	Peningkatan kualitas drainase	Dsn Meurelo	110	Meter	77.000		77.000			APBK
		Peningkatan kualitas drainase	Dsn Teupin Bada	240	Meter	168.000		168.000			APBK

F. Pengolahan ...

NO	ASPEK KEKUMUHAN	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOL	SATUAN	TOTAL BIAYA	TAHUN PENANGANAN (x1000)				SUMBER PENDANAAN
							2022	2023	2024	2025	
F	Pengolahan limbah	Penyediaan dan pengadaan lahan	Gp. Beurawang	2	Unit	100.000		100.000			APBK
		IPAL + MCK komunal	Dsn Meurelo	1	Unit	500.000			500.000		APBN
		Bio - Septitanc	Dsn Teupin Bada	1	Unit	30.000			30.000		APBK
G	Pengelolaan persampahan	Penyediaan dan pengadaan lahan	Gp. Beurawang	2	Unit	100.000	50.000	50.000			APBK
		Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Dsn Meurelo	1	Unit	200.000		200.000			APBK
		Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Dsn Teupin Bada	1	Unit	200.000			200.000		APBK
		Becak Motor	Gp. Beurawang	2	Unit	200.000		100.000	100.000		APBG
H	Proteksi kebakaram	Penyediaan dan pengadaan lahan	Gp. Beurawang	2	Unit	100.000		50.000	50.000		APBK
		Posko Tanggap Bencana	Dsn Meurelo	1	Unit	150.000			150.000		APBK
		Posko Tanggap Bencana	Dsn Teupin Bada	1	Unit	150.000			150.000		APBK
I	Ruang terbuka	Penyediaan penerangan jalan umum (PJU)	Gp. Beurawang	30	Unit	900.000		30.000	30.000	30.000	APBN-APBA

pembangunan ...

NO	ASPEK KEKUMUHAN	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOL	SATUAN	TOTAL BIAYA	TAHUN PENANGANAN (x1000)				SUMBER PENDANAAN
							2022	2023	2024	2025	
		Pembangunan RTP	Gp. Beurawang	1	Unit	1.000.000				1.000.000	APBN-APBA
		Revitalisasi lapangan voly	Gp. Beurawang	1	Unit	1.000.000				1.000.000	APBK-CSR
J	Pengendalian dan Pengawasan	Operasional dan pemeliharaan	Gp. Beurawang	1	Unit	50.000				50.000	APBK
		Pelatihan kemitraan dan kewirausahaan	Gp. Beurawang	4	Unit	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000	CSR
		Bantuan modal usaha	Gp. Beurawang	2	Unit	200.000		100.000	100.000		CSR
		Peningkatan kualitas UMK	Gp. Beurawang	2	Unit	200.000		100.000	100.000		CSR
		Sosialisasi penanggulangan dan evakuasi dini kebencanaan	Gp. Beurawang	2	Unit	100.000		50.000	50.000		APBK
		Pelatihan pemuda tanggap bencana	Gp. Beurawang	2	Unit	100.000		50.000	50.000		APBK
				SUB TOTAL		8.210.000					

7.4 RENCANA AKSI PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KAWASAN PRIORITAS - KRUENG RAYA

Rencana aksi program peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh kawasan prioritas di Kota Sabang berada di Kawasan Krueng Raya. Rencana aksi program peningkatan kawasan permukiman kumuh kawasan prioritas meliputi aspek fisik dan aspek non fisik, hal ini mengingat penanganan kawasan permukiman kumuh tidak hanya dilakukan dengan pendekatan fisik, tapi juga dengan pendekatan non fisik. Adapun rencana aksi program fisik yang diusulkan meliputi rehabilitasi rumah layak huni, pembangunan jalan lingkungan, drainase, jaringan air minum, persampahan, air limbah, serta lainnya. Sedangkan dalam aspek non fisik meliputi pemberdayaan masyarakat di kawasan permukiman kumuh.

Table 7.5
Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Prioritas – Krueng Raya

NO	LOKASI	ASPEK KEKUMUHAN / JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	TOTAL BIAYA	TAHUN PENANGAN				SUMBER PENDANAAN
							2022	2023	2024	2025	
A	Tahapan persiapan dan perencanaan	Sosialisasi Perencanaan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Skala Kawasan - Kawasan Kumuh Krueng Raya	Gp. Kr Raya	4	Unit	80.000.000					APBK
		Sosialisasi 7 indikator kumuh	Gp. Kr Raya	4	Unit	80.000.000					APBK
		Sosialisai perubahan sikap dan prilaku	Gp. Kr Raya	4	Unit	200.000.000					APBK
		Tinjauan lapangan	Gp. Kr Raya	4	Unit	200.000.000					APBK
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Skala Kawasan - Kawasan Kumuh Krueng Raya	Gp. Kr Raya	1	Unit	100.000.000					APBK

Penyusunan ...

NO	LOKASI	ASPEK KEKUMUHAN / JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	TOTAL BIAYA	TAHUN PENANGAN				SUMBER PENDANAAN
							2022	2023	2024	2025	
		Penyusunan Dokumen Teknis RTP Gampong Nelayan	Gp. Kr Raya	1	Unit	50.000.000					APBK
		Penyusunan Dokumen Teknis Jalan inspeksi + pedestrian	Gp. Kr Raya	1	Unit	200.000.000					APBK
		Penyusunan Dokumen Teknis Dermaga, jalur kuliner dan souvenir serta balee nelayan	Gp. Kr Raya	1	Unit	100.000.000					APBK
B	Pembebasan lahan dan bangunan	Pembebasan lahan jalan inspeksi + pedestrian	Gp. Kr Raya	20	Unit	2.500.000.000					APBK
		Pembebasan lahan RTP	Gp. Kr Raya	10	Unit	1.500.000.000					APBK
C	Bangunan gedung	Peremajaan rumah	Batu Singa Berfakta	3	Unit	90.000.000					APBN-APBK
		Peremajaan rumah	Lhok Drien	17	Unit	510.000.000					APBN-APBK
		Peremajaan rumah	MKB	44	Unit	1.320.000.000					APBN-APBK
		Peremajaan rumah	Teupin Cirik	3	Unit	90.000.000					APBN-APBK
D	Jalan lingkungan	Peningkatan jalan aspal	Gp Krueng Raya	1.600	Meter	3.200.000.000					APBA
		Pelebaran dan peningkatan kualitas jalan lingkungan	Batu Singa Berfakta	700	Meter	700.000.000					ABPN
		Penyediaan dan pengadaan lahan	Gp. Krueng Raya	1	Ls	500.000.000					APBK
		Pembangunan inspeksi + pedestrian	Gp Krueng Raya	1.400	Meter	5.000.000.000					APBN
		Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Batu Singa Berfakta	1.420	Meter	1.420.000.000					APBN
		Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Lhok Drien	247	Meter	247.000.000					APBK

Peningkatan ...

NO	LOKASI	ASPEK KEKUMUHAN / JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	TOTAL BIAYA	TAHUN PENANGAN				SUMBER PENDANAAN
							2022	2023	2024	2025	
		Peningkatan kualitas jalan lingkungan	MKB	598	Meter	598.000.000					APBK
		Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Teupin Cirik	627	Meter	627.000.000					APBK
		Rehab Jembatan	Gp Kr Raya	1	Unit	500.000.000					APBN
E	Penyediaan air minum	Penyediaan dan pengadaan lahan	Gp. Krueng Raya	3	Unit	150.000.000					APBK
		Pembangunan reservoir	Batu Singa Berfakta	1	Unit	500.000.000					APBN
		Pembangunan reservoir	Lhok Drien	1	Unit	500.000.000					APBN
		Pembangunan reservoir	MKB	1	Unit	500.000.000					APBN
F	Drainase lingkungan	Penyediaan dan pengadaan lahan	Gp Krueng Raya	1	Unit	50.000.000					APBK
		Pembangunan drainase sekunder	Gp Kr Raya	1.345	Meter	1.345.000.000					APBN
		Peningkatan kualitas drainase	Batu Singa Berfakta	500	Meter	350.000.000					APBN
		Peningkatan kualitas drainase	Lhok Drien	400	Meter	280.000.000					APBK
		Pembangunan drainase lingkungan	MKB	600	Meter	600.000.000					APBK
		Peningkatan kualitas drainase	MKB	600	Meter	420.000.000					APBK
		Peningkatan kualitas drainase	Teupin Cirik	520	Meter	364.000.000					APBK
G	Pengolahan limbah	Penyediaan dan pengadaan lahan	Gp Kr Raya	3	Unit	150.000.000					APBK
		IPAL komunal	Batu Singa Berfakta	1	Unit	500.000.000					APBK
		IPAL komunal	MKB	2	Unit	1.000.000.000					APBK
H	Pengelolaan persampahan	Penyediaan dan pengadaan lahan	Gp Krueng Raya	4	Unit	200.000.000					APBK

Tempat ...

NO	LOKASI	ASPEK KEKUMUHAN / JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	TOTAL BIAYA	TAHUN PENANGAN				SUMBER PENDANAAN
							2022	2023	2024	2025	
		Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Batu Singa Berfakta	1	Unit	150.000.000					APBK
		Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Lhok Drien	1	Unit	150.000.000					APBK
		Tempat Penampungan Sementara (TPS)	MKB	1	Unit	150.000.000					APBK
		Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Teupin Cirik	1	Unit	150.000.000					APBK
		Becak Motor	Gp Kr Raya	2	Unit	200.000.000					APBG
I	Proteksi kebakaran	Penyediaan dan pengadaan lahan	Gp Kr Raya	4	Unit	200.000.000					APBK
		Posko Tanggap Bencana	Batu Singa Berfakta	1	Unit	100.000.000					APBK
		Posko Tanggap Bencana	Lhok Drien	1	Unit	100.000.000					APBK
		Posko Tanggap Bencana	MKB	1	Unit	100.000.000					APBK
		Posko Tanggap Bencana	Teupin Cirik	1	Unit	100.000.000					APBK
J	Ruang terbuka hijau	Penyediaan dan pengadaan lahan	Gp Kr Raya	1	Unit	1.000.000.000					APBK
		Penyediaan penerangan jalan umum (PJU)	Gp Kr Raya	80	Unit	2.400.000.000					APBN-APBK
		Pembangunan RTP gampong nelayan	Gp Kr Raya	1	Unit	8.000.000.000					APBN
		Pembangunan dermaga	Gp Kr Raya	1	Unit	7.000.000.000					APBN
		Pembangunan *bay walk*	Gp Kr Raya	1	Unit	3.000.000.000					APBN
		Penyediaan food stall	Gp Kr Raya	16	Unit	160.000.000					CSR
		Pembangunan balee nelayan + MCK	Gp Krueng Raya	3	Unit	510.000.000					APBK
		Pembangunan pintu masuk Gampong Nelayan	Gp Kr Raya	2	Unit	300.000.000					CSR
		Pembangunan Mesjid	Gp Kr Raya	1	Unit	10.000.000.000					APBK

8. Pengendalian ...

NO	LOKASI	ASPEK KEKUMUHAN / JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	TOTAL BIAYA	TAHUN PENANGAN				SUMBER PENDANAAN
							2022	2023	2024	2025	
K	Pengendalian dan pengawasan	Operasional dan pemeliharaan	Gp Kr Raya	2	Unit	100.000.000					APBG
		Pelatihan kemitraan dan kewirausahaan	Gp Kr Raya	4	Unit	160.000.000					APBK
		Bantuan modal usaha	Gp Kr Raya	2	Unit	200.000.000					APBK-CSR
		Peningkatan kualitas UMK	Gp Kr Raya	1	Unit	200.000.000					APBK
		Sosialisasi penanggulangan dan evakuasi dini kebencanaan	Gp Kr Raya	1	Unit	100.000.000					APBK
		Pelatihan pemuda tanggap bencana	Gp Kr Raya	1	Unit	100.000.000					APBK
			SUB TOTAL			61.351.000.000					

7.5 RENCANA DETAIL KONSEP DESAIN KAWASAN PRIORITAS

Penataan Kawasan permukiman Kawasan Krueng Raya berfokus pada peningkatan kualitas infrastruktur permukiman yang juga dapat bernilai lebih terhadap peningkatan kualitas ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Konsep yang diterapkan pada perencanaan ini adalah Wisata Desa. Wisata Desa adalah kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian desa baik dari sosial ekonomi, budaya dan berbagai potensi unik desa yang telah dikembangkan menjadi komponen wisata seperti pesona alam desanya yang indah, kuliner khas desa, cindera mata, homestay dan sebagainya.

Perencanaan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kawasan Krueng Raya berfokus pada tujuh perencanaan utama yaitu :

1. Pelestarian lingkungan
2. Peningkatan kualitas infrastruktur
3. Sistem pengolahan limbah dan pengelolaan persamppahan
4. Penyediaan Air Bersih
5. Pertumbuhan UKM dan ekonomi kreatif
6. Perubahan wajah kawasan
7. Proteksi dan evakuasi bencana

Pengembangan kegiatan dari tujuh perencanaan utama tersebut dapat dilihat dalam grafik 7.2. Lokasi pengembangan untuk

setiap ...

setiap kegiatan tertuang Dalam Masterplan Penanganan Kumuh Kawasan Krueng Raya pada gambar 7.3



Gambar 7.2 Kegiatan pengembangan penanganan kumuh Kawasan Krueng Raya

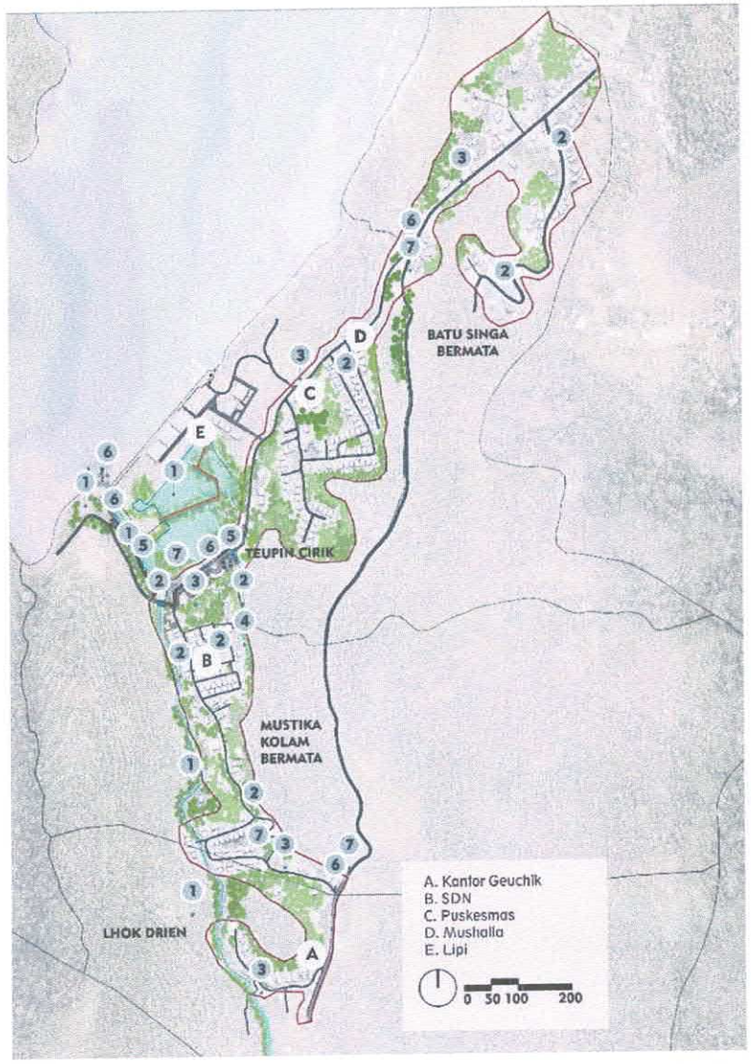

Gambar 7.3 Masterplan Penanganan Kumuh Kawasan Krueng Raya

❑ **Pelestaran Lingkungan**

Kegiatan untuk mendukung konsep Pelestarian Lingkungan adalah naturalisasi sungai/alur, *natural trail, camping ground, mangrove trail*, dan konservasi hutan lindung. Naturalisasi sungai/alur berfungsi untuk memperbaiki fungsi inisial sungai, konservasi alam (berhenti mengekspoitasi) dan melindungi ekosistem sekitar. Kegiatan normalisasi alur akan dilakukan disepanjang aliran alur yang melintasi kawasan perencanaan.



Gambar 7.4 Kegiatan Naturalisasi Krueng Raya.

Kegiatan *mangrove trail/park* akan bersinergi dengan perencanaan area LIPI berupa laboratorium budidaya ikan. Kegiatan mangrove trail/park dapat menjadi wisata edukasi di Kawasan Krueng Raya. Kawasan mangrove trai;/park berfungsi untuk mereduksi dampak abrasi pantai, sebagai pemecah ombak dan pelindung ekosistem biota laut.



Gambar 7.5 Kegiatan *Manggrove Trail/Park*. Krueng Raya.

Gambar 7.6 ...

❑ **Peningkatan Kualitas Lingkungan**

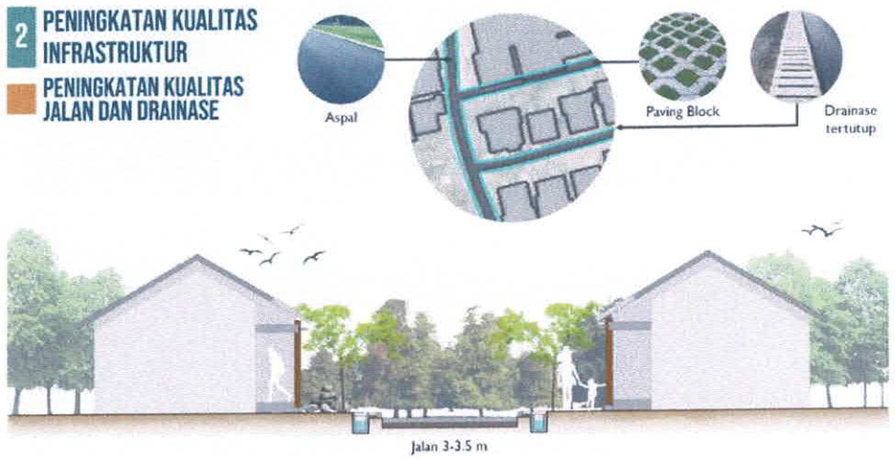

Gambar 7.6 Ilustrasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Jalan dan Drainase Lingkungan



Gambar 7.7 Ilustrasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Jalan dan Drainase Lingkungan

Kegiatan rehab jembatan tidak hanya meningkatkan kualitas fisik jembata, namun juga penambahan kantilever di sisi kiri dan kanan jembatan yang berfungsi sebagai area pejalan kaki yang terkoneksi dengan jalur pejalan kaki yang ada pada kawasan perencanaan.



Gambar 7.8 Ilustrasi Kegiatan Rehab Jembatan.

❑ **Pengolahan Limbah dan Pengelolaan Persampahan**

Kegiatan untuk Pengolahan Limbah dan Pengelolaan Persampahan adalah penyediaan IPAL komunal terintegrasi RTP dan penyediaan TPS (Tempat Penampungan Sementara) 3R serta becak motor untuk pengangkutan sampah dosmetik.

Gambar 7.9 ...



Gambar 7.9 Konsep Kegiatan IPAL Komunal Terintegrasi RTP

Penyediaan IPAL komunal terintegrasi RTP dibagi menjadi empat zona pelayanan berdasarkan batas administrasi dusun, agar memudahkan administrasi dan biaya operasional. Pemilihan lokasi IPAL komunal harus berada di elevasi yang lebih rendah dari permukiman, sehingga dapat memanfaatkan gaya gravitasi untuk aliran limbah domestik. Satu unit IPAL komunal direncanakan melayani 25-50 KK.

Kegiatan TPS 3R juga dibagi menjadi empat zona pelayanan berdasasrkan batas administrasi dusun. Sampah domestic yang berasal dari masing-masing hunian rumah tangga diangku secara rutin menggunan becak motor yang dikelola oleh desa. Becak motor akan mengangkut sampah domestic menuju TPS 3R yang ada disetiap zona pelayanan. Untuk selanjutnya diangkut oleh mobil pengangkut sampah menuju TPA.

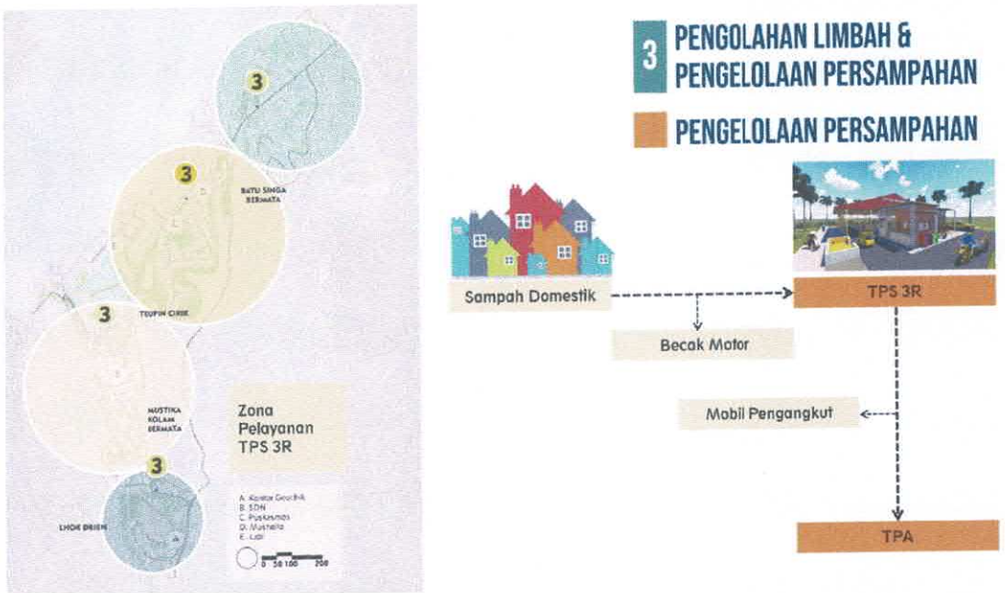

Gambar 7.10 Kegiatan TPS 3R dan SIstem Pengelolaan Persampahan.

❑ **Penyediaan Air Bersih**

Kegiatan untuk penyediaan air bersih adalah penyediaan rumah rumah dan reservoir skala lingkungan. Potensi sumber air bersih

yang ...

yang ada adalah alur Waduk Paya Senara dan sumber mata air dari lereng perbukitan di sekitar perrmukiman penduduk.



Gambar 7.11 Potensi sumber air bersih. Alur Waduk Paya Senara (kiri) dan Mata air (kanan)

Kedua sumber air ini akan melalui penyaringan sederhana untuk selanjutnya akn ditampung dalam reservoir dan rumah pompa. Bentuk reservoir berupa kolam retensi dan menara air.

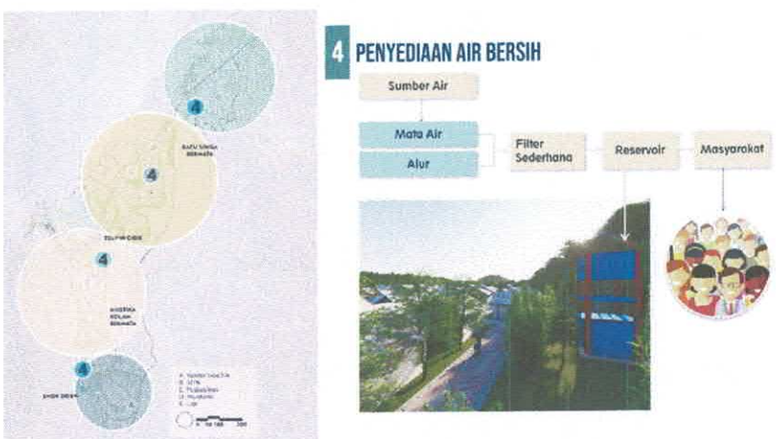

Gambar 7.12 Skema Konsep Penyediaan Air Bersih

❑ **Pertumbuhan UMK dan Ekonomi Kreatif**

Pertumbuhan UMK dan ekonomi kreatif perlu dilakukan untuk meningkatkan kondisi masyarakat setempat dengan penyediaan galeri-galeri dan food stall di area publik yang dapat diakses oleh wisatawan.

Selain penyediaan sarana, perlu juga dilakukan pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan keterampilan oleh pihak-pihak terkait. Sosialisasi untuk perubahan prilaku masyarakat serta kesiapan masyarakat juga perlu terus dilakukan. Pembangunan fisik perlu diiringi dengan perubahan kualitas dan pola pikir masyarkat, agar masyarakat siap dan dapat menggunakan, menjaga dan memelihara pembangunan fisik tersebut secara tepat sasaran.



Gambar 7.13 Ilustrasi Penyediaan Galeri dan Food Stall Untuk Mendukung Pertumbuhan UMK dan Ekonomi Kreatif.:

Perubahan ...

❑ **Perubahan Wajah Kawasan**

Penangangan kumuh Kawasan Krueng Raya tidak hanya berfokus pada peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dasar permukiman, tetapi juga melakukan perubahan wajah kawasan kumuh Krueng Raya. Hal dilakukan dengan kegiatan penyediaan *entrance gate*, ruang terbuka komunitas, dermaga, serta *food stall* dan *bay walk*.

Penyediaan Ruang Terbuka Komunitas bertujuan untuk memberikan ruang berinteraksi masyarakat sekitar. Ruang Terbuka Komunitas memiliki fasilitas area parkir; tiga lapangan voly pantai; *bench;* plaza dan galeri yang berfungsi untuk memajang produk-produk lokal masyarkat setempat. Plaza yang berada di tengah RTP dapat digunakan untuk area pertunjukan seni dan pertunjukan-pertunjukan lainnya.



Gambar 7.14 Rencana Penyediaan Ruang Terbuka Komunitas



Gambar 7.15 Ilustrasi 3D Ruang Terbuka Komunitas

BAB VIII
RENCANA PENYEDIAAN TANAH

Rencana Penyediaan Tanah memuat rumusan penyediaan tanah terhadap penanganan perumahan dan permukiman kumuh dengan pola penanganan peremajaan dan permukiman kembali. Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan bahwa perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan serta peran masyarakat.

Pelaksanaan pengadaan tanah didasarkan pada peraturan perundang-undangan pemerintah Indonesia yang terkait, meliputi:

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
b. Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan
c. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Sabang akan dilaksanakan dengan pola Pemugaran dan Peremajaan, dimana tingkat kekumuhan di empat kawasan permukiman kumuh adalah kumuh ringan.

8.1 POLA PENYEDIAAN TANAH

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas ketersediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Ketersediaan tanah termasuk penetapannya di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pola penyediaan tanah bagi pembangunan perumahan adalah sebagai berikut:

1. Pemberian ...

1. Pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara (PP 40/1996);
2. Konsolidasi tanah oleh pemilik tanah (UU 1 dan 20/2011);
3. Peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemiliki tanah (PP 24/1997);
4. Pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah (UU 1/2014);
5. Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar (PP 11/2010); dan/atau
6. Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum (UU 2/2012).

Pengadaan atau penyediaan tanah dalam Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) akan dilaksanakan/disediakan minimal 1 tahun sebelum program kegiatan penanganan permukiman kumuh dilaksanakan.

Adapun penjabaran mengenai pola penyediaan tanah bagi pembangunan perumahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara

- ❑ Tanah yang langsung dikuasai oleh negara yang digunakan untuk pembangunan rumah, perumahan dan/atau kawasan permukiman diserahkan melalui pemberian hak atas tanah kepada setiap orang yang melakukan pembangunan rumah, perumahan dan kawasan permukiman;
- ❑ Pemberian hak atas tanah didasarkan pada keputusan gubernur atau bupati/walikota tentang penetapan lokasi atau izin lokasi;
- ❑ Dalam hal tanah yang langsung dikuasai Negara terdapat garapan masyarakat, hak atas tanah diberikan setelah pelaku pembangunan perumahan dan permukiman selaku pemohon hak atas tanah menyelesaikan ganti rugi atas seluruh garapan masyarakat berdasarkan kesepakatan;
- ❑ Dalam hal tidak ada kesepakatan tentang ganti rugi, penyelesaiannya dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Salah satu pemberian hak atas tanah adalah pemberian Hak Guna Bangunan (HGB), dimana yang dapat menjadi pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) adalah Warga

Negara Indonesia (WNI) dan Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak lagi memenuhi syarat tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Dan apabila dalam jangka waktu tersebut haknya tidak dilepaskan atau dialihkan, hak tersebut hapus karena hukum.

2. Konsolidasi tanah oleh pemilik tanah
   - ❑ Konsolidasi tanah dapat dilakukan di atas tanah milik pemegang hak atas tanah dan/atau di atas tanah Negara yang digarap oleh masyarakat;
   - ❑ Konsolidasi tanah dilaksanakan berdasarkan kesepakatan: antar pemegang hak atas tanah; antar pemegang tanah negara; atau antara penggarap tanah Negara dan pemegang hak atas tanah.

   Konsolidasi tanah dapat dilaksanakan apabila sedikitnya 60% (enam puluh persen) dari pemilik tanah yang luas tanahnya meliputi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari luas seluruh areal tanah yang akan dikonsolidasi menyatakan persetujuan;
   - ❑ Kesepakatan paling sedikit 60% (enam puluh persen) tidak mengurangi hak masyarakat sebesar 40% (empat puluh persen) untuk mendapatkan aksesibilitas;
   - ❑ Konsolidasi tanah dapat dilaksanakan bagi pembangunan rumah tunggal, rumah deret atau rumah susun.

   Manfaat konsolidasi tanah antara lain:
   a. Memenuhi kebutuhan lingkungan yang teratur, tertib dan sehat;
   b. Keuntungan estetika/keindahan view yang lebih baik kepada pemilik tanah;
   c. Meningkatkan pemerataan pembangunan (membangun tanpa menggurus);
   d. Menghindari akses – akses yang mungkin timbul dalam proses penataan dan penyediaan tanah;
   e. Mempercepat pertumbuhan wilayah;
   f. Menertibkan administrasi pertanahan;
   g. Menghemat biaya pemerintah;

h. Meningkatkan ...

h. Meningkatkan efisiensi dan produktifitas penggunaan tanah;

i. Meningkatkan harga properti peserta;

3. Peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah

- ❑ Peralihan atau pelepasan hak atas tanah dilakukan setelah badan hukum memperoleh izin lokasi;
- ❑ Peralihan hak atas tanah dibuat dihadapan pejabat pembuat akta tanah setelah ada kesepakatan bersama;
- ❑ Pelepasan hak atas tanah dilakukan dihadapan pejabat berwenang;
- ❑ Peralihan hak atau pelepasan hak atas tanah wajib didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

4. Pemanfaatan dan pemindah tanganan tanah barang milik negara atau milik daerah

- ❑ Pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah bagi pembangunan rumah, perumahan dan kawasan permukiman diperuntukkan pembangunan rumah umum dan/atau rumah khusus;
- ❑ Pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daeah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan.

5. Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar

- ❑ Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar bagi pembangunan rumah, perumahan dan kawasan permukiman diperuntukkan pembangunan rumah umum, rumah khusus dan penataan permukiman kumuh;
- ❑ Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

6. Pengadaan tanah

- ❑ Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum bagi pembangunan rumah, perumahan dan kawasan permukiman diperuntukan pembangungan rumah umum, rumah khusus dan penataan permukiman kumuh;

Pengadaan ...

- ❑ Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undang.

8.2 PENGADAAN TANAH DAN PERMUKIMAN KEMBALI

8.2.1 Ketentuan Pelaksanaan

Pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengadaan tanah untuk penataan kawasan permukiman dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang wilayah;
b. Warga yang kehilangan tanah dan/atau aset lainnya sebagai akibat pengadaan tanah untuk kegiatan program harus segera menerima ganti rugi secara adil;
c. Warga Terdampak yang harus pindah ke lokasi lain sebagai akibat dari pengadaan tanahuntuk kegiatan program, maka harus mendapatkan:
    1) Informasi tentang pilihan dan hak mereka terkait dengan pengadaan tanah dan pemukiman kembali;
    2) Informasi terkait pilihan-pilihan penggantian kompensasi atau kerugian dan mendapatkan pilihan pemukiman kembali yang layak huni;
    3) Kompensasi yang cepat dan efektif dengan penggantian penuh atas kerugian asset yang terkena proyek secara langsung;
    4) Bantuan-bantuan (seperti tunjangan hidup) selama proses relokasi;
    5) Bantuan perumahan atau lokasi perumahan sesuai yang disetujui bersama oleh para WTP yang setidaknya setara dengan kondisi dilokasi sebelumnya bahkan jika memungkinkan lebih baik;
    6) Dukungan pemulihan mata pencaharian WTP setelah perpindahan dan pada masa transisi berdasarkan kesepakatan bersama; dan
    7) Kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan relokasi.
d. WTP yang direlokasi, baik untuk permanen maupun untuk sementara, maka perlu diperhatikan lokasi barunya, kemungkinan akan kehilangan mata pencaharian/pendapatan, kemungkinan berkurangnya akses terhadap fasilitas umum, pendidikan dan kesehatan, serta keharmonisan dengan warga dilokasi relokasi; dan

e. Jika ...

e. Jika WTP memutuskan untuk memberikan tanahnya secara sukarela (hibah) atau memberikan izin pakai atau izin untuk dilewati kegiatan proyek, maka harus tercatat sesuai ketentuan yang berlaku.

8.2.1 Ketentuan Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Dan Pemukiman Kembali

Sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012, pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semuapemangku kepentingan. Dokumen perencanaan pengadaan tanah disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali atau disebut LARAP (*Land Acquisition and Resettlement Action Plan*) dibagi dalam 2 kategori sesuai dampak yang diitimbulkan oleh kegiatan proyek, yaitu:

a. Kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah dan pemukiman kembali (relokasi); dan
b. Kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah tanpa ada merelokasi warga terdampak.

Kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah dan pemukiman kembali (relokasi) dilengkapi dengan dokumen LARAP, sedangkan untuk kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah tanpa ada merelokasi warga terdampak dilengkapi dengan dokumen RPL (Rencana Penyiapan Lahan).

Tabel 8.1 Tabel Kebutuhan Dokumen Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali

URAIAN	KEBUTUHAN DOKUMEN
1. Pengadaan tanah dan relokasi	
❑ Jumlah WTP >200 orang (atau >40 RT) atau menghilangkan >10% dari aset produktif	LARAP Komprehensif/ Lengkap
❑ Jumlah WTP ≤200 orang (atau ≤40 RT) atau menghilangkan ≤10% dari aset produktif	LARAP Sederhana
2. Pengadaan tanah tanpa ada relokasi	RPL

8.2.2 Pelaku Dan Tahapan Pelaksanaan

Pelaku dalam proses pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali adalah:

a. Pemerintah ...

a. Pemerintah kabupaten/kota (Pokja PKP, dinas/instansi terkait)
   1) Memahami secara menyeluruh konsep pengelolaan lingkungan dan dampak sosial program penanganan permukiman kumuh yang akan dilaksanakan;
   2) Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah dan atau permukiman kembali;
   3) Pemerintah daerah menyediakan anggaran yang cukup untuk kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah dan atau permukiman kembali; dan
   4) Memantau dan evaluasi kemajuan pelaksanaan pengadaan tanah dan atau permukiman kembali.

b. Tim Konsultan LARAP yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten/kota
   1) Membantu pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan proses perencanaan pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali;
   2) Melakukan kajian aspek sosial ekonomi dan aspek hukum terhadap warga terdampak dan aset-aset yang terdampak;
   3) Menyusun strategi dan rencana kerja pelaksanaan pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali; dan
   4) Bertanggungjawab atas seluruh proses dan penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali.

c. Tim Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota
   1) Tim Pemberdayaan Masyarakat memfasilitasi proses sosialisasi dan rembug-rembug di masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota; dan
   2) Tim Pemberdayaan Masyarakat membantu Tim Pengadaan Tanah untuk melakukan pendataan warga dan aset terdampak.

d. Tim Penilai Independen
   1) Bertanggungjawab atas penilaian kerugian yang dialami oleh WTP; dan
   2) Melakukan penilaian independen atas aset-aset WTP sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Pemukiman kembali Kegiatan pengadaan tanah dilaksanakan melalui

tahapan (1) Persiapan; (2) Sosilisasi awal; (3) Pendataan; (4) Rembug dan konsultasi; (5) Penyusunan dokumen LARAP; (6) Review dokumen LARAP; (7) Persetujuan LARAP; (8) Pelaksanaan LARAP; dan (9) Pemantauan pelaksanaan LARAP.

Pihak/instansi terkait yang membutuhkan pengadaan tanah harus menyiapkan pendanaan pelaksanaan pengadaan tanah, meliputi:

a. Sosialisasi awal rencana penataan kawasan permukiman;
b. Penyiapan pelaksanaan;
c. Penyediaan anggaran perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali dari pemerintah kabupaten/kota;
d. Inventarisasi dan identifikasi;
e. Penetapan penilai;
f. Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
g. Pemberian ganti kerugian;
h. Pelepasan objek pengadaan tanah;
i. Peyiapan hunian bagi warga terdampak (hunian sementara dan hunian menetap);
j. Administrasi dan pengelolaan dan evaluasi pengadaan tanah; dan
k. Penyusunan laporan.

BAB IX
RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN

9.1 SUMBER PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kota Sabang direncanakan berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Sabang serta Non Pemerintahan atau pembiayaan lainnya. Adapun sumber biaya, bentuk, skema pembiayaan dan karakteristik pembiayaan yang akan diimplementasikan dalam pencegahan dan peningkatan kualiatas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Sabang dapat dilihat pada tabel 9.1.

Tabel 9.1 Sumber Biaya, Bentuk dan Skema Pembiayaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kawasan Kota Sabang

SUMBER PEMBIAYAAN	BENTUK PEMBIAYAAN	SKEMA PEMBIAYAAN
Pemerintah	Pendanaan Reguler	• APBN/APBD Provinsi/APBD Kota • APBN Dekonsentrasi Dan Tugas Perbantuan • APBN Transfer Ke Daerah (DAU/DAK/DBH)
	Pendanaan Non Reguler	• Hibah APBN (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan/FLPP, Bantuan Uang Muka (BUM) Dan Subsidi Selisih Bunga (SSB), Pembangunan Apartemen Bersubsidi, Dll) • Hibah APBD • Pinjaman APBN/APBD (Pendampingan Pembangunan Infrastruktur, Dll)
Non Pemerintah	Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha	• Penugasan BUMN • Private Finance Initiative (PFI) • Performance - Based Annuity Scheme (PBAS) • Availability Payment

Tabel 9.2 Karakteristik Pembiayaan
Sumber : Penyusunan Skema Pembiayaan Penataan Permukiman

SUMBER DAN SKEMA PEMBIAYAAN	KARAKTERISTIK DAN PRASYARAT	KEGIATAN YANG SESUAI
APBN	Sesuai dengan pengalokasian dan kewenangan pusat/nasional	Semua kegiatan yang menjadi urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang

dibagi ...

SUMBER DAN SKEMA PEMBIAYAAN	KARAKTERISTIK DAN PRASYARAT	KEGIATAN YANG SESUAI
		dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan (misal: fasilitas program penanganan permukiman kumu bagi lokasi strategis nasional, fasilitas dan bantuan teknis untuk peremajaan/perbaikan permukiman kumuh)
APBN – Dekonsentrasi dan tugas perbantuan	Sesuai dengan pengalokasian dan kewenangan pusat/nasional yang telah didelegasikan	Semua kegiatan yang menjadi kewenangan pusat/nasional yang telah didelegasikan
	Memenuhi readliness kriteria yang telah ditetapkan: (1). Memiliki SK Kumuh (2). Telah melakukan verifikasi data kumuh (3). Telah menyusun RP2KPKPK	
APBN – Transfer Daerah (DAU, DAK, DBH)	Sesuai dengan pengalokasian dan kewenangan pusat/nasional: Melalui Program KOTAKU	Semua kegiatan yang menjadi kewenangan pusat dan mendukung pencapaian 100 - 0 - 100
	Memenuhi Persyaratan: (1). Mendukung kegiatan strategis dan prioritas = 0% kawasan kumuh, (2). Sesuai dengan kewenangan pusat	
APBN – Pinjaman dan Hibah	Sesuai dengan pengalokasian dan kewenangan pusat/nasional	Semua kegiatan yang menjadi kewenangan pusat dan mendukung pencapaian 100 - 0 - 100
	Memenuhi persyaratan akses program yang disediakan, missal apartemen bersubsidi, dst.	
APBD Provinsi	Sesuai dengan pengalokasian dan kewenangan provinsi	semua kegiatan memungkinkan selama menjadi kewenangan provinsi
APBD Kota	Sesuai dengan pengalokasian anggaran	Semua kegiatan memungkinkan
Infrastruktur Swasta	Pembangunan infrastruktur diserahkan sepenuhnya kepada swasta dan kepemilikan aset pada swasta	Kegiatan infrastruktur yang tidak menyangkut hajat hidup orang banyak dan tidak menjadi kewenangan negara

Corporate ...

SUMBER DAN SKEMA PEMBIAYAAN	KARAKTERISTIK DAN PRASYARAT	KEGIATAN YANG SESUAI
Corporate Socia Responsibility (CSR)	Berdasarkan proposal yang telah diajukan dan disepakati kedua belah pihak, dengan mempertimbangkan : (1). Rencana CSR (2). RPI2JM (3). Kesiapan Lahan Dan Penerimaan (4). Kesiapan DED Keberlanjutan PenanganaN (5). Kesiapan Perijinan (6). Ketersediaan Dana Sumber: Penyusunan Skema	(1). Program dan kegiatan yang membutuhkan penanganan dalam waktu singkat. (2). Program dan kegiatan yang tidak membutuhkan keberlanjutan penanganan.

9.2 RENCANA INVESTASI PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA SABANG.

Rencana Investasi dan pembiayaan mengidentifikasin kebutuhan anggaran penanganan kawasan permukiman kumuh Kota Sabang yang dijabarkan selama lima tahun kedepan. Rencana Investasi merupakan bagian dari Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh. Memorandum Program pada dasarnya merupakan perjanjian pendahuluan, yan mengatur dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum membuat perjanjian yang lebih terperinci dan mengikat para pihak pada nantinya.

Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh didasarkan pada permasalahan dan kebutuhan penanganan yang diuraikan pada masing-masing kawasan. Dalam memorandum ini teruraikan kebutuhan program di bidang keciptakaryaan yang meliputi jalan, drainase, air minum, sanitasi dan persampahan beserta dengan rencana investasi yang didalamnya terdapat sumber pendanaan, pelaksana, dan perkiraan biaya. Matriks memorandum program pembangunan infrastruktur dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Sabang dapat dilihat pada tabel 9.3 berikut

Tabel 9.3 ...

Tabel 9.3 Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur Dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Sabang Tahun 2022-2025

NO	LOKASI	LUAS (Ha)	ASPEK KEKUMUHAN / JENIS KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (x1000)	TOTAL BIAYA (x1000)	TAHUN PENANGANAN (x1000)				SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
								2022	2023	2024	2025		
I	GAMPONG KRUENG RAYA												
A			Tahap Persiapan dan Perencanaan										
	Gp. Krueng Raya	27,011	Sosialisasi Perencanaan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Skala Kawasan - Kawasan Kumuh Krueng Raya	4	Unit	20.000	80.000	20.000		20.000	20.000	APBK	PUPR
	Gp. Krueng Raya	27,011	Sosialisasi 7 indikator kumuh	4	Unit	20.000	80.000		40.000	40.000		APBK	PUPR
	Gp. Krueng Raya	27,011	Sosialisai perubahan sikap dan prilaku	4	Unit	50.000	200.000		100.000	100.000		APBK	DLHK
	Gp. Krueng Raya	27,011	Tinjauan lapangan	4	Unit	50.000	200.000		100.000	100.000		APBK	PUPR
	Gp. Krueng Raya	27,011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Skala Kawasan - Kawasan Kumuh Krueng Raya	1	Unit	100.000	100.000					APBK	BAPPEDA
	Gp. Krueng Raya	27,011	Penyusunan Dokumen Teknis RTP Gampong Nelayan	1	Unit	50.000	50.000	50.000				APBK	PUPR
	Gp. Krueng Raya	27,011	Penyusunan Dokumen Teknis Jalan inspeksi + pedestrian	1	Unit	200.000	200.000	200.000				APBK	PUPR

Gp. Krueng Raya ...

NO	LOKASI	LUAS (Ha)	ASPEK KEKUMUHAN / JENIS KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (x1000)	TOTAL BIAYA (x1000)	TAHUN PENANGANAN (x1000)				SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
								2022	2023	2024	2025		
	Gp. Krueng Raya	27,011	Penyusunan Dokumen Teknis Dermaga, jalur kuliner dan souvenir serta balee nelayan	1	Unit	100.000	100.000	100.000				APBK	PUPR
B			Pembebasan Lahan dan Bangunan										
	Gp. Krueng Raya	27,011	Pembebasan lahan jalan inspeksi + pedestrian	20	Unit	125.000	2.500.000		1.250.000	1.250.000		APBK	PUPR
	Gp. Krueng Raya	27,011	Pembebasan lahan RTP	10	Unit	150.000	1.500.000	750.000	750.000			APBK	PUPR
C			Bangunan Gedung										
	Batu Singa Berfakta	9,24	Peremajaan rumah	3	Unit	30.000	90.000		30.000	30.000	30.000	APBN-APBK	PUPR
	Lhok Drien	3,039	Peremajaan rumah	17	Unit	30.000	510.000		170.000	170.000	170.000	APBN-APBK	PUPR
	Mustika Kolam Bermata	7,161	Peremajaan rumah	44	Unit	30.000	1.320.000		440.000	440.000	440.000	APBN-APBK	PUPR
	Teupin Cirik	7,571	Peremajaan rumah	3	Unit	30.000	90.000		30.000	30.000	30.000	APBN-APBK	PUPR
D			Jalan Lingkungan										
	Gp Krueng Raya	27,01	Peningkatan jalan aspal	1.600	Meter	2.000.000	3.200.000		1.600.000	1.600.000		APBA	PUPR
	Batu Singa Berfakta	9,24	Pelebaran dan peningkatan kualitas jalan lingkungan	700	Meter	1.000	700.000	700.000				ABPN	BPPW
	Gp. Krueng Raya	27,01	Penyediaan dan pengadaan lahan	1	Ls	500.000	500.000		250.000	250.000		APBK	PUPR
	Gp Krueng Raya	27,01	Pembangunan inspeksi + pedestrian	1.400	Meter		5.000.000			2.500.000	2.500.000	APBN	BPPW

Batu ...

NO	LOKASI	LUAS (Ha)	ASPEK KEKUMUHAN / JENIS KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (x1000)	TOTAL BIAYA (x1000)	TAHUN PENANGANAN (x1000)				SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
								2022	2023	2024	2025		
	Batu Singa Berfakta	9,24	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	1.420	Meter	1.000	1.420.000		1.000.000	420.000		APBN	PUPR
	Lhok Drien	3,039	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	247	Meter	1.000	247.000			247.000		APBK	PUPR
	Mustika Kolam Bermata	7,161	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	598	Meter	1.000	598.000			598.000		APBK	PUPR
	Teupin Cirik	7,571	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	627	Meter	1.000	627.000			627.000		APBK	PUPR
	Gp Krueng Raya	27,011	Rehab Jembatan	1	Unit	500.000	500.000	500.000				APBN	PUPR
E			Penyediaan Air Minum										
	Gp. Krueng Raya	27,011	Penyediaan dan pengadaan lahan	3	Unit	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000		APBK	PUPR
	Batu Singa Berfakta	9,24	Pembangunan reservoir	1	Unit	500.000	500.000		500.000			APBN	PDAM
	Lhok Drien	3,039	Pembangunan reservoir	1	Unit	500.000	500.000			500.000		APBN	PDAM
	Mustika Kolam Bermata	7,161	Pembangunan reservoir	1	Unit	500.000	500.000	500.000				APBN	PDAM
F			Drainase Lingkungan										
	Gp Krueng Raya	27,011	Penyediaan dan pengadaan lahan	1	Unit	50.000	50.000	50.000				APBK	PUPR
	Gp Krueng Raya	27,011	Pembangunan drainase sekunder	1.345	Meter	1.000	1.345.000	1.345.000				APBN	BPPW
	Batu Singa Berfakta	9,24	Peningkatan kualitas drainase	500	Meter	700	350.000	350.000				APBN	BPPW
	Lhok Drien	3,039	Peningkatan kualitas drainase	400	Meter	700	280.000	280.000				APBK	PUPR

Mustika ...

NO	LOKASI	LUAS (Ha)	ASPEK KEKUMUHAN / JENIS KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (x1000)	TOTAL BIAYA (x1000)	TAHUN PENANGANAN (x1000)				SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
								2022	2023	2024	2025		
	Mustika Kolam Bermata	7,161	Pembangunan drainase lingkungan	600	Meter	700	600.000		600.000			APBK	PUPR
	Mustika Kolam Bermata	7,161	Peningkatan kualitas drainase	600	Meter	700	420.000			420.000		APBK	PUPR
	Teupin Cirik	7,571	Peningkatan kualitas drainase	520	Meter	700	364.000			364.000		APBK	PUPR
G			Pengolahan Limbah										
	Gp Krueng Raya	27,011	Penyediaan dan pengadaan lahan	3	Unit	50.000	150.000	100.000	50.000			APBK	PUPR
	Batu Singa Berfakta	9,24	IPAL komunal	1	Unit	500.000	500.000		500.000			APBK	PUPR
	Mustika Kolam Bermata	7,161	IPAL komunal	2	Unit	500.000	1.000.000		500.000	500.000		APBK	PUPR
H			Pengelolaan Persampahan										
	Gp Krueng Raya	27,011	Penyediaan dan pengadaan lahan	4	Unit	50.000	200.000	100.000	100.000			APBK	PUPR
	Batu Singa Berfakta	9,24	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	1	Unit	150.000	150.000		150.000			APBK	DLHK
	Lhok Drien	3,039	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	1	Unit	150.000	150.000		150.000			APBK	DLHK
	Mustika Kolam Bermata	7,161	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	1	Unit	150.000	150.000			150.000		APBK	DLHK
	Teupin Cirik	7,571	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	1	Unit	150.000	150.000			150.000		APBK	DLHK
	Gp Krueng Raya	27,011	Becak Motor	2	Unit	100.000	200.000		100.000	100.000		APBG	DLHK

I. Proteksi ...

NO	LOKASI	LUAS (Ha)	ASPEK KEKUMUHAN / JENIS KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (x1000)	TOTAL BIAYA (x1000)	TAHUN PENANGANAN (x1000)				SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
								2022	2023	2024	2025		
I			Proteksi Kebakaran										
	Gp Krueng Raya	27,011	Penyediaan dan pengadaan lahan	4	Unit	50.000	200.000		100.000	100.000		APBK	DPKK
	Batu Singa Berfakta	9,24	Posko Tanggap Bencana	1	Unit	100.000	100.000			100.000		APBK	DPKK
	Lhok Drien	3,039	Posko Tanggap Bencana	1	Unit	100.000	100.000			100.000		APBK	DPKK
	Mustika Kolam Bermata	7,161	Posko Tanggap Bencana	1	Unit	100.000	100.000				100.000	APBK	DPKK
	Teupin Cirik	7,571	Posko Tanggap Bencana	1	Unit	100.000	100.000				100.000	APBK	DPKK
J			Ruang Terbuka Hijau										
	Gp Krueng Raya	27,011	Penyediaan dan pengadaan lahan	1	Unit	1.000.000	1.000.000		500.000	500.000		APBK	PUPR
	Gp Krueng Raya	27,011	Penyediaan penerangan jalan umum (PJU)	80	Unit	30.000	2.400.000		800.000	800.000	800.000	APBN-APBK	PUPR
	Gp Krueng Raya	27,011	Pembangunan RTP gampong nelayan	1	Unit	8.000.000	8.000.000	8.000.000				APBN	BPPW
	Gp Krueng Raya	27,011	Pembangunan dermaga	1	Unit	7.000.000	7.000.000	7.000.000				APBN	BPPW
	Gp Krueng Raya	27,011	Pembangunan *bay walk*	1	Unit	3.000.000	3.000.000		3.000.000			APBN	BPPW
	Gp Krueng Raya	27,011	Penyediaan food stall	16	Unit	10.000	160.000		160.000			CSR	DISPARK
	Gp Krueng Raya	27,011	Pembangunan balee nelayan + MCK	3	Unit	170.00	510.000		340.000	170.000		APBK	DISPARK
	Gp Krueng Raya	27,011	Pembangunan pintu masuk Gampong Nelayan	2	Unit	150.000	300.000		300.000			CSR	DISPAK
	Gp Krueng Raya	27,011	Pembangunan Mesjid	1	Unit	10.000.000	10.000.000		5.000.000	5.000.000		APBK	PUPR

K. Pengendalian ...

NO	LOKASI	LUAS (Ha)	ASPEK KEKUMUHAN / JENIS KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (x1000)	TOTAL BIAYA (x1000)	TAHUN PENANGANAN (x1000)				SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
								2022	2023	2024	2025		
K			Pengendalian dan Pengawasan										
	Gp Krueng Raya	27,011	Operasional dan pemeliharaan	2	Unit	50.000	100.000			50.000	50.000	APBG	PUPR
	Gp Krueng Raya	27,011	Pelatihan kemitraan dan kewirausahaan	4	Unit	40.000	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000	APBK	DISPERINDAG
	Gp Krueng Raya	27,011	Bantuan modal usaha	2	Unit	100.000	200.000		100.000	100.000		APBK-CSR	DISPERINDAG
	Gp Krueng Raya	27,011	Peningkatan kualitas UMK	1	Unit	100.000	200.000	100.000	100.000			APBK	DISPERINDAG
	Gp Krueng Raya	27,011	Sosialisasi penanggulangan dan evakuasi dini kebencanaan	1	Unit	50.000	100.000		50.000	50.000		APBK	DPKK
	Gp Krueng Raya	27,011	Pelatihan pemuda tanggap bencana	1	Unit	50.000	100.000		50.000	50.000		APBK	DPKK
				SUB TOTAL			61.351.000						
II	GAMPONG PAYA												
A			Tahap Persiapan dan Perencanaan										
	Gampong Paya	22,672	Sosialisasi 7 indikator kumuh	4	Unit	20.000	80.000		40.000	40.000		APBK	PUPR
	Gampong Paya	22,672	Sosialisai perubahan sikap dan prilaku	4	Unit	20.000	80.000			40.000	40.000	APBK	DLHK
	Gampong Paya	22,672	Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanganan Kumuh Kawasan Paya-Keuneukai	1	Unit	100.000	100.000	100.000				APBK	BAPPEDA
	Gampong Paya	22,672	Penyusunan Dokumen RTP Gampong Paya	1	Unit	100.000	100.000		100.000			APBK	PUPR

B. Bangunan ..

NO	LOKASI	LUAS (Ha)	ASPEK KEKUMUHAN / JENIS KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (x1000)	TOTAL BIAYA (x1000)	TAHUN PENANGANAN (x1000)				SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
								2022	2023	2024	2025		
B			Bangunan Gedung										
	Cot Preh	1,894	Peremajaan rumah	4	Unit	30.000	120.000		120.000			APBN-APBK	BPPPS-PUPR
	Pante Jaya	4,457	Peremajaan rumah	15	Unit	30.000	450.000		150.000	150.000	150.000	APBN-APBK	BPPPS-PUPR
	Tgk Chick Alue Kala	15,088	Peremajaan rumah	12	Unit	30.000	360.000		60.000	300.000		APBN-APBK	BPPPS-PUPR
	Tgk Di Teuremon	1,233	Peremajaan rumah	6	Unit	30.000	180.000		30.000	60.000	90.000	APBN-APBK	BPPPS-PUPR
C			Jalan Lingkungan										
	Cot Preh	1,894	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	900	Meter	1.000	900.000		300.000	300.000	300.000	APBN	BPPW
	Pante Jaya	4,457	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	300	Meter	1.000	300.000		300.000			APBK	PUPR
	Tgk Di Teuremon	1,233	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	800	Meter	1.000	800.000		300.000	500.000		APBN	BPPW
D			Penyediaan Air Minum										
	Gampong Paya	22,672	Penyediaan dan pengadaan lahan	2	Unit	50.000	100.000		100.000			APBK	PUPR
	Pante Jaya	4,457	Pembangunan rumah pompa & reservoir	1	Unit	500.000	500.000			500.000		APBN	BPPW
	Tgk Di Teuremon	1,233	Pembangunan rumah pompa & reservoir	1	Unit	500.000	500.000				500.000	APBN	BPPW
E			Drainase Lingkungan										
	Cot Preh	1,894	Peningkatan kualitas drainase	100	Meter	700	70.000		700.00			APBK	PUPR
	Pante Jaya	4,457	Peningkatan kualitas drainase	250	Meter	700	175.000			175.000		APBK	PUPR
	Tgk Chick Alue Kala	15,088	Peningkatan kualitas drainase	150	Meter	700	105.000				105.000	APBK	PUPR
F			Pengolahan Limbah										
	Gampong Paya	22,672	Penyediaan dan pengadaan lahan	3	Unit	50.000	150.000	100.000	50.000			APBK	PUPR

Cot Preh ...

NO	LOKASI	LUAS (Ha)	ASPEK KEKUMUHAN / JENIS KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (x1000)	TOTAL BIAYA (x1000)	TAHUN PENANGANAN (x1000)				SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
								2022	2023	2024	2025		
	Cot Preh	1,894	IPAL + MCK komunal	1	Unit	500.000	500.000		500.000			APBN	BPPW
	Pante Jaya	4,457	IPAL + MCK komunal	1	Unit	500.000	500.000			500.000		APBN	BPPW
	Tgk Chick Alue Kala	15,088	Bio - Septitanc	1	Unit	30.000	30.000			30.000		APBK	PUPR
G			Pengelolaan Persampahan										
	Gampong Paya	22,672	Penyediaan dan pengadaan lahan	4	Unit	50.000	200.000	100.000	100.000			APBK	DLHK
	Cot Preh	1,894	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	1	Unit	150.000	150.000		150.000			APBK	DLHK
	Pante Jaya	4,457	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	1	Unit	150.000	150.000		150.000			APBK	DLHK
	Tgk Chick Alue Kala	15,088	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	1	Unit	150.000	150.000			150.000		APBK	DLHK
	Tgk Di Teuremon	1,233	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	1	Unit	150.000	150.000			150.000		APBK	DLHK
	Gampong Paya	22,672	Becak Motor	4	Unit	100.000	400.000			200.000	200.000	APBG	DLHK
H			Proteksi Kebakaran										
	Gampong Paya	22,672	Penyediaan dan pengadaan lahan	4	Unit	50.000	200.000	100.000	100.000			APBK	DPKK
	Cot Preh	1,894	Posko Tanggap Bencana	1	Unit	150.000	150.000		150.000			APBK	DPKK
	Pante Jaya	4,457	Posko Tanggap Bencana	1	Unit	150.000	150.000			150.000		APBK	DPKK
	Tgk Chick Alue Kala	15,088	Posko Tanggap Bencana	1	Unit	150.000	150.000			150.000		APBK	DPKK
	Tgk Di Teuremon	1,233	Posko Tanggap Bencana	1	Unit	150.000	150.000				150.000	APBK	DPKK
I			Ruang Terbuka Hijau										
	Gampong Paya	22,672	Penyediaan dan pengadaan lahan	2	Unit	50.000	100.000		100.000			APBK	PUPR
	Gampong Paya	22,672	Penyediaan penerangan jalan umum (PJU)	40	Unit	30.000	1.200.000			600.000	600.000	APBA	PUPR

NO	LOKASI	LUAS (Ha)	ASPEK KEKUMUHAN / JENIS KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (x1000)	TOTAL BIAYA (x1000)	TAHUN PENANGANAN (x1000)				SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
								2022	2023	2024	2025		
	Gampong Paya	22,672	Pembangunan RTP	1	Unit	4.000.000	4.000.000			2.000.000	2.000.000	APBN-APBK	PUPR
	Gampong Paya	22,672	Revitalisasi lapangan voly	1	Unit	1.000.000	1.000.000			1.000.000		APBN-APBK	PUPR
J			Pengendalian dan Pengawasan										
	Gampong Paya	22,672	Operasional dan pemeliharaan	2	Unit	50.000	100.000			50.000	50.000	APBK	PUPR
	Gampong Paya	22,672	Pelatihan kemitraan dan kewirausahaan	3	Unit	40.000	120.000	40.000	40.000	40.000		CSR	DISPERINDAG
	Gampong Paya	22,672	Bantuan modal usaha	3	Unit	100.000	300.000		100.000	100.000	100.000	CSR	DISPERINDAG
	Gampong Paya	22,672	Peningkatan kualitas UMK	3	Unit	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000		CSR	DISPERINDAG
	Gampong Paya	22,672	Sosialisasi penanggulangan dan evakuasi dini kebencanaan	3	Unit	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000		APBK	DPKK
	Gampong Paya	22,672	Pelatihan pemuda tanggap bencana	3	Unit	50.000	150.000		50.000	50.000	50.000	APBK	DPKK
				SUB TOTAL			15.520.000						
III	**GAMPONG KEUNEUKAI**												
A			Tahap Persiapan dan Perencanaan										
	Gampong Keuneukai	34,823	Sosialisasi 7 indikator kumuh	4	Unit	20.000	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	APBK	PUPR
	Gampong Keuneukai	34,823	Sosialisai perubahan sikap dan prilaku	4	Unit	20.000	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	APBK	DLHK
	Gampong Keuneukai	34,823	Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanganan Kumuh Kawasan Paya-Keuneukai	1	Unit	100.000	100.000	100.000				APBK	BAPPEDA

NO	LOKASI	LUAS (Ha)	ASPEK KEKUMUHAN / JENIS KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (x1000)	TOTAL BIAYA (x1000)	TAHUN PENANGANAN (x1000)				SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
								2022	2023	2024	2025		
	Gampong Keuneukai	34,823	Penyusunan Dokumen RTP Gampong Keuneukai	1	Unit	100.000	100.000		100.000			APBK	PUPR
B			Bangunan Gedung										
	Blang Mukim	5,492	Bantuan stimulan bahan bangunan	1	Unit	15.000	15.000		15.000			APBA	PUPR
	Kulam	2,52	Bantuan stimulan bahan bangunan	5	Unit	15.000	75.000		75.000			APBA	PUPR
	Lhok	16,002	Peremajaan RTLH	6	Unit	30.000	180.000			180.000		APBN-APBK	BPPPS-PUPR
	Pasi	10,809	Peremajaan RTLH	19	Unit	30.000	570.000		60.000	120.000	390.000	APBN-APBK	BPPPS-PUPR
C			Jalan Lingkungan										
	Blang Mukim	5,492	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	600	Meter	1.000	600.000		600.000			APBK	PUPR
	Kulam	2,52	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	1.200	Meter	1.000	1.200.000		600.000	600.000		APBA	PUPR
D			Penyediaan Air Minum										
	Gampong Keuneukai	34,823	Penyediaan dan pengadaan lahan	4	Unit	50.000	200.000		100.000	100.000		APBK	PUPR
	Blang Mukim	5,492	Pembangunan rumah pompa & reservoir	1	Unit	500.000	500.000			500.000		APBN	BPPW
	Kulam	2,52	Hyndran umum	1	Unit	50.000	50.000			50.000		APBK	PUPR
	Lhok	16,002	Pembangunan rumah pompa & reservoir	1	Unit	500.000	500.000		500.000			APBN	BPPW
	Pasi	10,809	Pembangunan rumah pompa & reservoir	1	Unit	500.000	500.000			500.000		APBN	BPPW
	Gampong Keuneukai	34,823	Penyediaan mobil tank	1	Unit	600.000	600.000				600.000		
E			Drainase Lingkungan										
	Blang Mukim	5,492	Peningkatan kualitas drainase	150	Meter	700	105.000		105.000			APBK	PUPR
	Kulam	2,52	Peningkatan kualitas drainase	100	Meter	700	70.000		70.000			APBK	PUPR

Lhok ...

NO	LOKASI	LUAS (Ha)	ASPEK KEKUMUHAN / JENIS KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (x1000)	TOTAL BIAYA (x1000)	TAHUN PENANGANAN (x1000)				SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
								2022	2023	2024	2025		
	Lhok	16,002	Peningkatan kualitas drainase	900	Meter	700	630.000			400.000	230.000	APBK	PUPR
F			Pengelolaan Persampahan										
	Gampong Keuneukai	34,823	Penyediaan dan pengadaan lahan	4	Unit	50.000	200.000		100.000	100.000		APBK	DLHK
	Blang Mukim	5,492	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	1	Unit	150.000	150.000			150.000		APBK	DLHK
	Kulam	2,52	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	1	Unit	150.000	150.000			150.000		APBK	DLHK
	Lhok	16,002	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	1	Unit	150.000	150.000				150.000	APBK	DLHK
	Pasi	10,809	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	1	Unit	150.000	150.000				150.000	APBK	DLHK
	Gampong Keuneukai	34,823	Becak Motor	4	Unit	100.000	400.000			200.000	200.000	APBG	DLHK
G			Proteksi Kebakaran										
	Gampong Keuneukai	34,823	Penyediaan dan pengadaan lahan	4	Unit	50.000	200.000		100.000	100.000		APBK	DPKK
	Blang Mukim	5,492	Posko Tanggap Bencana	1	Unit	150.000	150.000			150.000		APBK	DPKK
	Kulam	2,52	Posko Tanggap Bencana	1	Unit	150.000	150.000			150.000		APBK	DPKK
	Lhok	16,002	Posko Tanggap Bencana	1	Unit	150.000	150.000				150.000	APBK	DPKK
	Pasi	10,809	Posko Tanggap Bencana	1	Unit	150.000	150.000				150.000	APBK	DPKK
H			Ruang Terbuka Hijau										
	Gampong Keuneukai	34,823	Penyediaan penerangan jalan umum (PJU)	50	Unit	30.000	1.500.000		500.000	500.000	500.000	APBA	PUPR
	Gampong Keuneukai	34,823	Penyediaan dan pengadaan lahan	2	Unit	50.000	100.000		100.000			APBK	PUPR
	Gampong Keuneukai	34,823	Pembangunan RTP	2	Unit	1.500.000	3.000.000			2.000.000	1.500.000	APBN-CSR	BPPW-PUPR

NO	LOKASI	LUAS (Ha)	ASPEK KEKUMUHAN / JENIS KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (x1000)	TOTAL BIAYA (x1000)	TAHUN PENANGANAN (x1000)				SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
								2022	2023	2024	2025		
	Gampong Keuneukai	34,823	Revitalisasi dermaga	1	Unit	5.000.000	5.000.000			2.500.000	2.500.000	APBA-CSR	PUPR
I			Pengendalian dan Pengawasan										
	Gampong Keuneukai	34,823	Operasional dan pemeliharaan	2	Unit	50.000	100.000			100.000		APBK	PUPR
	Gampong Keuneukai	34,823	Pelatihan kemitraan dan kewirausahaan	3	Unit	40.000	120.000		40.000	40.000	40.000	CSR	DISPERINDAG
	Gampong Keuneukai	34,823	Bantuan modal usaha	3	Unit	100.000	300.000		100.000	100.000	100.000	CSR	DISPERINDAG
	Gampong Keuneukai	34,823	Peningkatan kualitas UMK	3	Unit	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000		CSR	DISPERINDAG
	Gampong Keuneukai	34,823	Sosialisasi penanggulangan dan evakuasi dini kebencanaan	2	Unit	50.000	100.000		50.000	50.000		APBK	DPKK
	Gampong Keuneukai	34,823	Pelatihan pemuda tanggap bencana	4	Unit	50.000	200.000		100.000	100.000		APBK	DPKK
				SUB TOTAL			18.875.000						
IV	GAMPONG JABOI												
A			Tahap Persiapan dan Perencanaan										
	Gampong Jaboi	23,928	Sosialisasi 7 indikator kumuh	4	Unit	20.000	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	APBK	PUPR
	Gampong Jaboi	23,928	Sosialisai perubahan sikap dan prilaku	4	Unit	20.000	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	APBK	DLHK
	Gampong Jaboi	23,928	Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanganan Kumuh Kawasan Jaboi	1	Unit	100.000	100.000		100.000			APBK	BAPPEDA
	Gampong Jaboi	23,928	Penyusunan Dokumen RTP Gampong Jaboi	1	Unit	100.000	100.000		100.000			APBK	PUPR

B. Bangunan ...

NO	LOKASI	LUAS (Ha)	ASPEK KEKUMUHAN / JENIS KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (x1000)	TOTAL BIAYA (x1000)	TAHUN PENANGANAN (x1000)				SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
								2022	2023	2024	2025		
B			Bangunan Gedung										
	Gampong Baro	5,583	Peremajaan RTLH	9	Unit	30.000	270.000		180.000	90.000		APBN-APBA	BPPPS-PERKIM
	Lamkuta	3,89	Peremajaan RTLH	8	Unit	30.000	240.000		240.000			APBN-APBA	BPPPS-PERKIM
	Meunasah Tuha	9,322	Peremajaan RTLH	11	Unit	30.000	330.000			150.000	180.000	APBN-APBA	BPPPS-PERKIM
	Tgk Di Jaboi	5,133	Peremajaan RTLH	12	Unit	30.000	360.000			120.000	240.000	APBN-APBA	BPPPS-PERKIM
C			Jalan Lingkungan										
	Gampong Baro	5,583	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	1.300	Meter	1.000	1.300.000			1.300.000		APBN	BPPW
	Lamkuta	3,89	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	300	Meter	1.000	300.000		300.000			APBK	PUPR
	Tgk Di Jaboi	5,133	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	2.650	Meter	1.000	2.650.000			1.650.000	1.000.000	APBN	BPPW
D			Penyediaan Air Minum										
	Gampong Jaboi	23,928	Penyediaan dan pengadaan lahan	4	Unit	50.000	200.000		100.000	100.000		APBK	PUPR
	Gampong Baro	5,583	Pembangunan rumah pompa & reservoir	1	Unit	500.000	500.000			500.000		ABPN	BPPW
	Lamkuta	3,89	Hyndran umum	1	Unit	50.000	50.000			50.000		APBK	PUPR
	Meunasah Tuha	9,322	Pembangunan rumah pompa & reservoir	1	Unit	500.000	500.000				500.000	APBN	BPPW
	Tgk Di Jaboi	5,133	Pembangunan rumah pompa & reservoir	1	Unit	500.000	500.000				500.000	APBN	BPPW
	Gampong Jaboi	23,928	Penyediaan mobil tank	2	Unit	600.000	1.200.000		600.000	600.000		APBK	PUPR
E			Drainase Lingkungan										
	Gampong Jaboi	23,928	Penyediaan dan pengadaan lahan	4	Unit	50.000	200.000		100.000	100.000		APBK	PUPR
	Gampong Baro	5,583	Pembangunan drainase baru	850	Meter	1.000	850.000		850.000			APBA	PUPR

Lamkuta ...

NO	LOKASI	LUAS (Ha)	ASPEK KEKUMUHAN / JENIS KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (x1000)	TOTAL BIAYA (x1000)	TAHUN PENANGANAN (x1000)				SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
								2022	2023	2024	2025		
	Lamkuta	3,89	Pembangunan drainase baru	405	Meter	1.000	405.000		405.000			APBA	PUPR
	Meunasah Tuha	9,322	Pembangunan drainase baru	490	Meter	1.000	490.000			490.000		APBK	PUPR
	Tgk Di Jaboi	5,133	Pembangunan drainase baru	100	Meter	1.000	100.000			100.000		APBK	PUPR
	Gampong Baro	5,583	Peningkatan kualitas drainase lingkungan	350	Meter	700	245.000			245.000		APBK	PUPR
	Lamkuta	3,89	Peningkatan kualitas drainase lingkungan	100	Meter	700	70.000	70.000				APBK	PUPR
	Meunasah Tuha	9,322	Peningkatan kualitas drainase lingkungan	345	Meter	700	241.500		241.000			APBK	PUPR
	Tgk Di Jaboi	5,133	Peningkatan kualitas drainase lingkungan	250	Meter	700	175.000			175.000		APBK	PUPR
F			Pengolahan Limbah										
	Gampong Jaboi	23,928	Penyediaan dan pengadaan lahan	4	Unit	50.000	200.000		100.000	100.000		APBK	PUPR
	Gampong Baro	5,583	Bio - Septitanc	1	Unit	30.000	30.000			30.000		APBK	PUPR
	Lamkuta	3,89	Bio - Septitanc	1	Unit	30.000	30.000			30.000		APBK	PUPR
	Meunasah Tuha	9,322	IPAL + MCK komunal	1	Unit	500.000	500.000				500.000	APBN	BPPW
	Tgk Di Jaboi	5,133	IPAL + MCK komunal	1	Unit	500.000	500.000				500.000	APBN	BPPW
G			Pengelolaan Persampahan										
	Gampong Jaboi	23,928	Penyediaan dan pengadaan lahan	4	Unit	50.000	200.000		100.000	100.000		APBK	DLHK
	Gampong Baro	5,583	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	1	Unit	200.000	200.000		200.000			APBK	DLHK
	Lamkuta	3,89	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	1	Unit	200.000	200.000		200.000			APBK	DLHK
	Meunasah Tuha	9,322	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	1	Unit	200.000	200.000			200.000		APBK	DLHK

Tgk ...

NO	LOKASI	LUAS (Ha)	ASPEK KEKUMUHAN / JENIS KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (x1000)	TOTAL BIAYA (x1000)	TAHUN PENANGANAN (x1000)				SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
								2022	2023	2024	2025		
	Tgk Di Jaboi	5,133	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	1	Unit	200.000	200.000			200.000		APBK	DLHK
	Gampong Jaboi	23,928	Becak Motor	4	Unit	100.000	400.000		200.000	100.000	100.000	CSR	DLHK
H			Proteksi Kebakaran										
	Gampong Jaboi	23,928	Penyediaan dan pengadaan lahan	4	Unit	50.000	200.000	100.000	100.000			APBK	DPKK
	Gampong Baro	5,583	Posko Tanggap Bencana	1	Unit	150.000	150.000		150.000			APBK	DPKK
	Lamkuta	3,89	Posko Tanggap Bencana	1	Unit	150.000	150.000		150.000			APBK	DPKK
	Meunasah Tuha	9,322	Posko Tanggap Bencana	1	Unit	150.000	150.000			150.000		APBK	DPKK
	Tgk Di Jaboi	5,133	Posko Tanggap Bencana	1	Unit	150.000	150.000			150.000		APBK	DPKK
I			Ruang Terbuka Hijau										
	Gampong Jaboi	23,928	Penyediaan penerangan jalan umum (PJU)	50	Unit	30.000	1.500.000		500.000	500.000	500.000	APBA-APBK	PUPR
	Gampong Jaboi	23,928	Penyediaan dan pengadaan lahan	2	Unit	100.000	200.000	100.000	100.000			APBK	PUPR
	Gampong Jaboi	23,928	Pembangunan RTP	2	Unit	1.000.000	2.000.000			1.000.000	1.000.000	APBA-APBK	PUPR
	Gampong Jaboi	23,928	Revitalisasi lapangan voly	1	Unit	1.000.000	1.000.000			500.000	500.000	CSR	PUPR
J			Pengendalian dan Pengawasan										
	Gampong Jaboi	23,928	Operasional dan pemeliharaan	1	Unit	50.000	50.000				50.000	APBK	PUPR
	Gampong Jaboi	23,928	Pelatihan kemitraan dan kewirausahaan	3	Unit	40.000	120.000	40.000	40.000	40.000		CSR	DISPERINDAG
	Gampong Jaboi	23,928	Bantuan modal usaha	3	Unit	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000		CSR	DISPERINDAG
	Gampong Jaboi	23,928	Peningkatan kualitas UMK	3	Unit	100.000	300.000		100.000	100.000	100.000	CSR	DISPERINDAG

Gampong ...

NO	LOKASI	LUAS (Ha)	ASPEK KEKUMUHAN / JENIS KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (x1000)	TOTAL BIAYA (x1000)	TAHUN PENANGANAN (x1000)				SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
								2022	2023	2024	2025		
	Gampong Jaboi	23,928	Sosialisasi penanggulangan dan evakuasi dini kebencanaan	2	Unit	50.000	100.000		50.000	50.000		APBK	DPKK
	Gampong Jaboi	23,928	Pelatihan pemuda tanggap bencana	4	Unit	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	APBK	DPKK
				SUB TOTAL			20.766.500						
V	GAMPONG BEURAWANG												
A			Tahap Persiapan dan Perencanaan										
	Gampong Beurawang	15,279	Sosialisasi 7 indikator kumuh	4	Unit	20.000	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	APBK	PUPR
	Gampong Beurawang	15,279	Sosialisai perubahan sikap dan prilaku	4	Unit	20.000	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	APBK	DLHK
	Gampong Beurawang	15,279	Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanganan Kumuh Kawasan Beurawang	1	Unit	100.000	100.000			100.000		APBK	BAPPEDA
	Gampong Beurawang	15,279	Penyusunan Dokumen RTP Gampong Beurawang	1	Unit	100.000	100.000			100.000		APBK	PUPR
B			Bangunan Gedung										
	Meurelo	6,931	Peremajaan RTLH	12	Unit	30.000	360.000		60.000	120.000	180.000	APBN-APBK	BPPPS-PUPR
	Teupin Bada	8,348	Peremajaan RTLH	12	Unit	30.000	360.000		60.000	120.000	180.000	APBN-APBK	BPPPS-PUPR
	Meurelo	6,931	Stimulan bahan bangunan	14	Unit	15.000	210.000		70.000	70.000	70.000	APBN-APBK	BPPPS-PUPR
	Teupin Bada	8,348	Stimulan bahan bangunan	9	Unit	15.000	135.000		60.000	75.000		APBN-APBK	BPPPS-PUPR
C			Jalan Lingkungan										
	Meurelo	6,931	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	550	Meter	1.000	550.000		550.000			APBA	PUPR

D. Penyediaan ...

NO	LOKASI	LUAS (Ha)	ASPEK KEKUMUHAN / JENIS KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (x1000)	TOTAL BIAYA (x1000)	TAHUN PENANGANAN (x1000)				SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
								2022	2023	2024	2025		
D			Penyediaan Air Minum										
	Meurelo	6,931	Penyediaan dan pengadaan lahan	1	Unit	50.000	50.000		50.000			APBK	PUPR
	Meurelo	6,931	Pembangunan rumah pompa & reservoir	1	Unit	500.000	500.000			500.000		APBN	BPPW
E			Drainase Lingkungan										
	Meurelo	6,931	Peningkatan kualitas drainase	110	Meter	700	77.000		77.000			APBK	PUPR
	Teupin Bada	8,348	Peningkatan kualitas drainase	240	Meter	700	168.000		168.000			APBK	PUPR
F			Pengolahan Limbah										
	Gampong Beurawang	15,279	Penyediaan dan pengadaan lahan	2	Unit	50.000	100.000		100.000			APBK	PUPR
	Meurelo	6,931	IPAL + MCK komunal	1	Unit	500.000	500.000			500.000		APBN	BPPW
	Teupin Bada	8,348	Bio - Septitanc	1	Unit	30.000	30.000			30.000		APBK	PUPR
G			Pengelolaan Persampahan										
	Gampong Beurawang	15,279	Penyediaan dan pengadaan lahan	2	Unit	50.000	100.000	50.000	50.000			APBK	DLHK
	Meurelo	6,931	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	1	Unit	200.000	200.000		200.000			APBK	DLHK
	Teupin Bada	8,348	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	1	Unit	200.000	200.000			200.000		APBK	DLHK
	Gampong Beurawang	15,279	Becak Motor	2	Unit	100.000	200.000		100.000	100.000		APBG	DLHK
H			Proteksi Kebakaran										
	Gampong Beurawang	15,279	Penyediaan dan pengadaan lahan	2	Unit	50.000	100.000		50.000	50.000		APBK	DPKK
	Meurelo	6,931	Posko Tanggap Bencana	1	Unit	150.000	150.000			150.000		APBK	DPKK
	Teupin Bada	8,348	Posko Tanggap Bencana	1	Unit	150.000	150.000			150.000		APBK	DPKK

I. Ruang ...

NO	LOKASI	LUAS (Ha)	ASPEK KEKUMUHAN / JENIS KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (x1000)	TOTAL BIAYA (x1000)	TAHUN PENANGANAN (x1000)				SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
								2022	2023	2024	2025		
I			Ruang Terbuka Hijau										
	Gampong Beurawang	15,279	Penyediaan penerangan jalan umum (PJU)	30	Unit	30.000	900.000		30.000	30.000	30.000	APBN-APBA	PUPR
	Gampong Beurawang	15,279	Pembangunan RTP	1	Unit	1.000.000	1.000.000				1.000.000	APBN-APBA	PUPR
	Gampong Beurawang	15,279	Revitalisasi lapangan voly	1	Unit	1.000.000	1.000.000				1.000.000	APBK-CSR	PUPR
J			Pengendalian dan Pengawasan										
	Gampong Beurawang	15,279	Operasional dan pemeliharaan	1	Unit	50.000	50.000				50.000	APBK	PUPR
	Gampong Beurawang	15,279	Pelatihan kemitraan dan kewirausahaan	4	Unit	40.000	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000	CSR	DISPERINDAG
	Gampong Beurawang	15,279	Bantuan modal usaha	2	Unit	100.000	200.000		100.000	100.000		CSR	DISPERINDAG
	Gampong Beurawang	15,279	Peningkatan kualitas UMK	2	Unit	100.000	200.000		100.000	100.000		CSR	DISPERINDAG
	Gampong Beurawang	15,279	Sosialisasi penanggulangan dan evakuasi dini kebencanaan	2	Unit	50.000	100.000		50.000	50.000		APBK	DPKK
	Gampong Beurawang	15,279	Pelatihan pemuda tanggap bencana	2	Unit	50.000	100.000		50.000	50.000		APBK	DPKK
				SUB TOTAL			8.210.000						

BAB X

RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

10.1 Peran Pemangku Kepentingan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 juga mengamanatkan bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Terkait hal ini, masing-masing stakeholder memiliki peran, tugas, dan fungsi sesuai dengan kapasitasnya dalam penyelenggaraan kawasan permukiman, termasuk di dalamnya terkait upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 10.1 Struktur Pembagian Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat

Dalam upaya mewujudkan kabupaten/kota untuk semua, diperlukan keterlibatan dari setiap pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sektor swasta, komunitas, organisasi masyarakat, akademisi/perguruan tinggi, maupun lembaga internasional yang memiliki peran penting untuk mewujudkan pembanguan perkotaan yang berkelanjutan sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Indikasi pembagian peran antar aktor pembangunan untuk mewujudkan perumahan dan sarana prasarana dasar penanganan kawasan permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

a. Pengakuan terhadap permukiman informal.
b. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh.
c. Pencegahan tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh.

Selain itu, peran pelaku pembangunan perkotaan juga didorong dengan adanya kemitraan secara vertikal dan horizontal (multi level dan multi aktor) dalam merencanakan, membangun, dan mengelola perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan. Sebelum membagi peran antar aktor untuk mengimplementasikan *New Urban Agenda (NUA), UN-Habitat* telah mengidentifikasi beberapa

hal ...

hal yang dibutuhkan sebagai prasyarat untuk mewujudkan perkotaan yang berkelanjutan bagi semua mulai dari kebijakan perkotaan nasional, peraturan perundang-undangan terkait perkotaan, perencanaan dan desain perkotaan, ekonomi, dan pembiayaan perkotaan, dan pembangunan fisik perkotaan.

Dengan memperhatikan kebutuhan akan lima hal di atas dalam mengimplementasikan pembangunan kota yang berkelanjutan, maka masing-masing aktor dapat mengambil peran. Sebagai perbandingan, dokumen NUA tidak secara spesifik mejabarkan hal-hal apa saja yang menjadi tugas dan wewenang dari masing-masing aktor, karena bentuk sistem pemerintahan setiap negara berbeda-beda. Berikut adalah pembahasan singkat mengenai peran apa saja yang diambil oleh para pelaku pembangunan di Indonesia., dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Tabel 10.1 Peran Para Pelaku Dalam Pembangunan yang Berkelanjutan Sesuai Prinsip NUA Dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

PELAKU KEPENTINGAN		PERAN
Pemerintah	Pemerintah Pusat	✓ Menyusun kebijakan perkotaan nasional yang mengakomodasi NUA dan SDG's.
		✓ Mengkoordinasikan pemerintah daerah ✓ Untuk menangani permasalahan Pembangunan lintas daerah. ✓ Mendorong terwujudnya kerja sama multi pihak dan multilevel pemerintahan untuk mewujudkan NUA.
	Pemerintah Provinsi	✓ Memperkuat mekanisme kerja sama antar kabupaten/kota. ✓ Bersama dengan pemerintah pusat, mendorong terlaksananya kebijakan perkotaan nasional (jika sudah berlandaskan hukum) di tingkat daerah.
	Pemerintah Kabupaten/Kota	✓ Menjalankan wewenang dan fungsi pemerintahan sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. ✓ Memetakan keterkaitan NUA dengan RPJMD. ✓ Mendorong kerja sama dengan badan usaha.

Non ...

PELAKU KEPENTINGAN		PERAN
Non Pemerintah	Swasta	✓ Menggiatkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Corporate Shared Value* (CSV). ✓ Mendorong KPBU untuk membantu pemenuhan kebutuhan pembangunan perkotaan.
	Akademisi	✓ Menyediakan *evidence-based research* sebagai masukan dalam pembuatan kebijakan pembangunan perkotaan.
	Komunitas/Organisasi Masyarakat	✓ Terlibat aktif dalam berbagai forum pembangunan kota. ✓ Mendorong aspirasi masyarakat terkait pembangunan perkotaan.
	Media	✓ Memantau perkembangan pembangunan kota secara objektif. Mengadvokasi isu-isu pembangunan perkotaan yang tengah ramai di masyarakat.

Dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, diperlukan kolaborasi dan kemitraan antara pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan NUA. Pendekatan kolaboratif dan kemitraan ini pun sangat didorong di dalam NUA, terlebih adanya keterbatasan peran dan kapasitas dari masingmasing aktor pembangunan, termasuk dari segi alternatif pendanaan. Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman bersifat multi sektoral dan melibatkan banyak pihak. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan leading sector dalam pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman, namun bukan sebagai pelaku tunggal. Perlu dipahami dari berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat maupun swasta.

Dalam penyelenggaraanya, pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dilakukan secara terdesentralisasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Pemerintah Pusat akan lebih berperan sebagai pembina, pengarah, dan pengatur, agar terus dapat tercipta suasana yang semakin kondusif. Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga terdapat pembagian peran dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Di samping ...

Disamping itu agar terjadi efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan perumahan dan permukiman, baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan, pelaksanaannya harus dilakukan secara terpadu (baik sektornya, pembiayaannya, maupun pelakunya) dan dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan dan penataan ruang yang berlaku. Pembagian peran dan kewenangan dalam pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman secara luas dapat dilihat dalam ilustrasi gambar berikut.

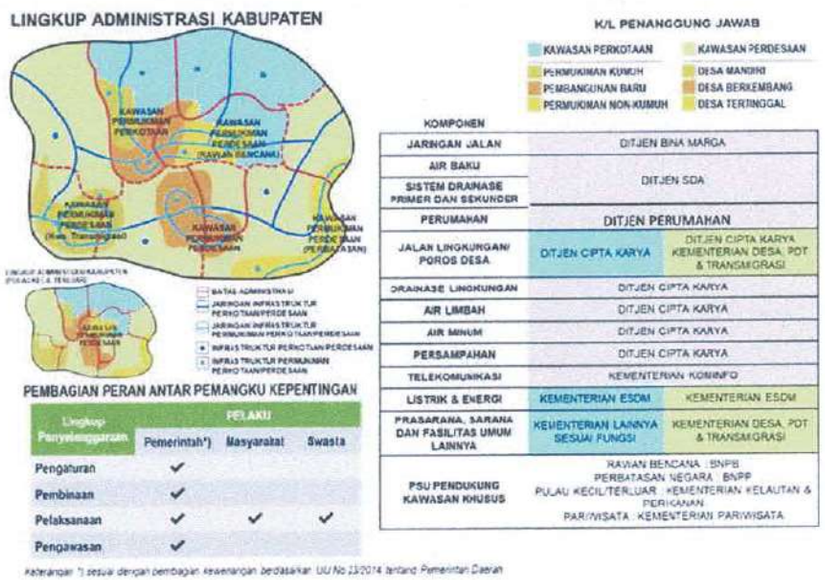

Gambar 10. 2 Skema Peran Antar Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Secara rinci pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk sub kawasan permukiman serta perumahan dan kawasan permukiman kumuh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10.2 Pembagian Urusan Pemerintah Terkait Penanganan Permukiman Kumuh

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KAB/KOTA
		✓ Penetapan sistem kawasan permukiman. ✓ Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 hektar atau lebih.	✓ Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 hektar sampai dengan dibawah 15 hektar	✓ Penertiban izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. ✓ Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 hektar
	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh			Pencegahan perumahan dan Kawasan permukiman kumuh pada kabupaten/kota.
	Permukiman	✓ Penetapan sistem	Penyelenggaraan	Penyelenggaraan

Pengembangan ...

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KAB/KOTA
		pengembangan infrastruktur permukiman secara nasional. ✓ Penyelenggaraan infrastruktur pada permukaan dikawasan	infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah provinsi.	infrastruktur pada permukiman di kabupaten/kota.

10.2 PERAN DAN BENTUK KETERLIBATAN PEMERINTAH KOTA SABANG DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN RP2KPKPK

Dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, peran dan bentuk keterlibatan pemerintah Kota Sabang dalam penyusunan dokumen RP2KPKPK dijabarkan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 10.3 Peran dan Bentuk Keterlibatan Pemerintah Kota Sabang dalam Penyusunan Dokumen RP2KPKPK

PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	BENTUK KETERLIBATAN	TUGAS DAN WEWENANG
Tim Teknis Penyusun RP2KPKPK yang merupakan	Kabupaten/ Kota Perumusan RP2KPKPK	✓ Merumuskan RP2KPKPK ✓ Mengambil keputusan dalam proses	TUGAS ✓ Menyediakan basis data dan informasi spasial dan sektoral;
Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP), terdiri dari dinas/instansi terkait di lingkup pemerintah kabupaten/kota		penyusunan dokumen RP2KPKPK ✓ Mengawal keberlanjutan program RP2KPKPK hingga tahapan implementasi	✓ Melaksanakan penyusunan RP2KPKPK sesuai dengan panduan; ✓ Menghasilkan RP2KPKPK yang dapat diimplementasikan; ✓ Publikasi dokumen RP2KPKPK kepada masyarakat; ✓ Menindaklanjuti output RP2KPKPK; dan ✓ Menyusun dan legalisasi peraturan Kepala Daerah (Perbup/perwal) WEWENANG ✓ Melaksanakan peninjauan kembali terhadap RP2KPKPK berdasarkan ketentuan yang tercantum; ✓ Melibatkan peran masyarakat dalam proses penyusunan RP2KPKPK

PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	BENTUK KETERLIBATAN	TUGAS DAN WEWENANG
Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari Pokja PKP, Perbankan, Perguruan Tinggi/Akademisi, BUMN/BUMD, Asosiasi Pengembang Perumahan, Asosiasi Profesi, Forum Masyarakat dan Pelaku Program Air Minum dan Kumuh.	Sebagai mitra Pokja PKP dalam penyusunan RP2KPKPK	Berpartisipasi dalam kegiatan rapat koordinasi	Memberikan masukan teknis terkait dengan dokumen RP2KPKPK
Kelembagaan masyarakat	Sebagai mitra Pokja PKP dalam penyusunan RP2KPKPK	Berpartisipasi dalam kegiatan survey dan wawancara	TUGAS ✓ Membantu Pokja PKP dalam koordinasi dan sinkronisasi data permukiman kumuh; ✓ Memberikan input dalam pola penanganan permukiman kumuh; ✓ Melakukan perencanaan partisipatif.

PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	BENTUK KETERLIBATAN	TUGAS DAN WEWENANG
			WEWENANG ✓ Memberikan masukan dan pendapat terkait dengan komponen pembangunan

Pj. WALI KOTA SABANG,

REZA FAHLEVI

BAPPEDA KOTA SABANG

